

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

RPJMD

**TAHUN 2025 - 2029
KOTA TEBING TINGGI**



**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2025**



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
dan
WALI KOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

Penyelenggaraan RPJMD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

BAB II

KEDUDUKAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka menengah 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, dengan memperhatikan RTRW Daerah, RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan RTRW Kabupaten/Kota yang berbatasan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah dan renstra Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 6

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Daerah
 - c. Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

- d. Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah
- e. Bab V : Penutup
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan:
 - a. konsistensi kebijakan dengan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; dan
 - c. konsistensi antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029
Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA TEBING TINGGI,


IMAN IRDIAN SARAGIH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,


MUHAMMAD SYAH IRWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (1-73/2025)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 diwujudkan dalam Visi, Misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi merupakan Perencanaan yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga perumusan Visi dan Misi juga merupakan produk kolektif *stakeholder*.

Rencana pembangunan jangka menengah mengarah pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya lebih menitikberatkan pada partisipasi *stakeholder* yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan. Oleh karena itu, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan arah, serta Sasaran dan tahapan pembangunan yang akan dicapai juga bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi fleksibilitas yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

Kurun waktu RPJMD sesuai dengan kurun waktu RPJM Nasional, yaitu Tahun 2025-2029. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah. RPJMD sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, RPJMD memuat strategi pembangunan, kebijakan umum, Program kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk Arah Kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tebing Tinggi yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RPJMD ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk merumuskan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, Program prioritas, Program Perangkat Daerah dan Gambaran Keuangan Daerah. Dalam era globalisasi dan dinamika perubahan yang cepat, tantangan yang dihadapi oleh daerah semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan suatu rencana yang komprehensif dan terarah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Proses partisipatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Melalui dialog dan kolaborasi, diharapkan setiap elemen masyarakat dapat berkontribusi dalam merumuskan program dan kegiatan yang relevan dan berdampak positif bagi kehidupan sehari-hari.

Dokumen ini terdiri dari beberapa bagian penting yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan, Program prioritas, Program Perangkat Daerah dan Gambaran Keuangan Daerah yang dilaksanakan selama periode 2025-2029. Dalam analisis situasi, kami mengidentifikasi berbagai potensi dan tantangan yang ada di Kota Tebing Tinggi, termasuk aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kondisi daerah, kami dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Visi dan misi yang diusung dalam RPJMD ini adalah hasil dari refleksi mendalam terhadap kondisi dan harapan masyarakat. Visi yang diusung adalah **"Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya"**. Visi ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, kami menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas, serta Indikator Kinerja yang dapat diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program.

Strategi dan program yang dirumuskan dalam RPJMD ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup. Setiap program dirancang untuk saling mendukung dan terintegrasi, sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pembangunan, agar hasil yang dicapai tidak hanya bermanfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI**

Dalam pelaksanaan RPJMD ini, peran serta masyarakat sangatlah penting. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan program-program yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan RPJMD ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kendala. Namun, dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kami yakin bahwa setiap tantangan dapat diatasi. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang lebih baik di masa depan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan, demi kesejahteraan dan kemajuan Kota Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Mei 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang I-1	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-13
1.5 Sistematika Penulisan	I-14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.2 Gambaran Keuangan Daerah.....	II-148
2.3 Permasalahan Isu Stratgeis	II-157
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1
3.1 Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.2 Pentahapan, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-16
3.3 Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan	III-35
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH	IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	IV-4
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kesimpulan	V-1
5.2 Pedoman Pelaksanaan RPJMD	V-1
5.3 Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan.....	V-2
5.4 Evaluasi dan Penyesuaian Strategi.....	V-3
5.5 Manajemen Risiko Pembangunan Daerah	V-5



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
2.1	Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi	II - 4
2.2	Rata – Rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan	II- 5
2.3	Daya Dukung Pangan Kota Tebing Tinggi	II- 7
2.4	Daya Dukung Air Kota Tebing Tinggi	II – 7
2.5	Indikator Resilensi Berkelanjutan	II - 18
2.6	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi	II – 19
2.7	Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi	II - 20
2.8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	II - 24
2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	II - 25
2.10	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-20224 (persen)	II - 26
2.11	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (persen)	II - 27
2.12	Indikator Kesehatan Utama Di Kota Tebing Tinggi 2020 - 2030	II - 38
2.13	Ringkasan Indikator Pendidikan Kota Tebing Tinggi 2020-2030	II -46
2.14	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024	II -50
2.15	Jumlah Keluarga Penerima PKH Tahun 2020-2024	II -51
2.16	Jumlah Keluarga Penerima Kartu Sembako Tahun 2020-2024	II -51
2.17	Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2020-2024	II - 57
2.18	Indeks Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020-2024	II - 59
2.19	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2023	II - 66
2.20	Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi	II - 69
2.21	Karakteristik Pengangguran Kota Tebing Tinggi, 2021-2024	II - 71
2.22	Indikator Daya Saing Sumber Daya Manusia	II - 74
2.23	Perkembangan Indikator Iptek dan Inovasi di Kota Tebing Tinggi 2020-2024	II - 78
2.24	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru Di Kota Tebing Tinggi 2020-2024	II - 81
2.25	Indeks SPM Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024	II -111
2.26	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi	II - 112
2.27	Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2020-2024	II -112
2.28	Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2020-2024 Lanjutan	II -113
2.29	Indikator Kinerja Utama RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024	II -114
2.30	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi	II -114
2.31	Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi	II -115
2.32	Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kota Tebing Tinggi	II -116
2.33	Indikator Bencana Kebakaran Kota Tebing Tinggi	II -117



2.34	Indikator Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi	II -118
2.35	Indikator Bidang Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi	II -119
2.36	Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi	II -120
2.37	Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi	II -122
2.38	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi	II -123
2.39	Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi	II -124
2.40	Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi	II -125
2.41	Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi	II -128
2.42	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi	II -131
2.43	Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi	II -131
2.44	Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024	II -132
2.45	Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi	II -134
2.46	Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi	II - 135
2.47	Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi	II - 137
2.48	Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi	II - 137
2.49	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi	II - 139
2.50	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	II - 140
2.51	Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi	II - 141
2.52	Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi	II – 143
2.53	Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi 2020-2024	II – 143
2.54	Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi	II – 144
2.55	Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	II - 144
2.56	Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi	II –145
2.57	Opini BPK Tahun 2020-2024	II -145
2.58	Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi	II -145
2.59	Predikat SAKIP Tahun 2020-2024	II -146
2.60	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024	II – 146
2.61	Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan di Kota Tebing Tinggi	II - 147
2.62	Realisasi APBD Tahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi	II - 150
2.63	Neraca Daerah Tahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi	II – 150
2.64	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025	II – 151
2.65	Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 - 2024:	II – 154
2.66	Pembiayaan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 - 2024	II – 155
2.67	Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030	II - 156
3.1	Tabel penyalarsan sasaran pembangunan RPJMD Tebing Tinggi dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RJMD Provinsi Sumatera Utara	III-11
3.2	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD	III - 12
3.3	Pentahapan Pembangunan RPJMD	III - 27
3.4	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah	III - 32
3.5	Arah Kebijakan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029	III - 34
3.6	Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD	III - 38



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI**

4.1	Indikator Program, Target Dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	IV - 5
4.2	Penetapan Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi	IV - 31
4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi	IV - 33
4.4	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tebing Tinggi	IV - 38
4.5	Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Utama Dalam RPJMN dan RPJMD 2025-2029	IV - 44
4.6	Dukungan Program Kota Tebing Tinggi terhadap Program Nasional yang Harus Diperhatikan	IV - 56
4.7	Dukungan Program Daerah Terhadap 17 Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	IV - 57
4.8	Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Tebing Tinggi Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara	IV - 60



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 13
2.1	Peta Wilayah Kota Tebing Tinggi	II - 2
2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi	II - 23
2.3	PDRB per Kapita Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi	II - 28
2.4	Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2019-2023	II - 29
2.5	Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023	II - 30
2.6	IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara 2020-2025	II - 48
2.7	Rasio Ketergantungan Kota Tebing Tinggi	II - 159
3.1	Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD	III - 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, pemerintah daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang disiapkan oleh Pemerintah Kota yang sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu harus mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan pusat dan provinsi. Salah satu dokumen yang harus disusun oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi pada saat pergantian hasil kepala daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJMD merupakan acuan dan panduan utama manajemen pembangunan daerah setiap tahun, selama lima tahun.

RPJMD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 5 ayat (2), yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berkaitan dengan dasar dan waktu penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD dapat dijelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar penyusunan RPJMD, batas waktu penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD paling lambat

sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 42.

Penyusunan naskah teknokratik RPJMD mencakup analisis gambaran umum kondisi daerah; perumusan keuangan; perumusan permasalahan pembangunan daerah; penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis daerah. Pada prinsipnya tujuan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kota Tebing Tinggi periode Perencanaan Pembangunan 2025-2029 ini adalah sebagai bahan untuk penyelarasan substansi arah kebijakan pembangunan daerah periode 2025-2029 dengan visi, misi dan program dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagai bahan untuk penyelarasan arah kebijakan keuangan daerah periode 2025-2029 dengan visi, misi dan program dari calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagai pedoman untuk penyusunan rancangan awal RPJMD periode perencanaan pembangunan Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 harus memperhatikan dan bersinergi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029. Selain itu untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kota Tebing Tinggi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 harus berpedoman pada RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2045 khususnya pada tahap Pembangunan Lima Tahunan I dari RPJPD dimaksud.

Arah kebijakan pembangunan tahap I dalam RPJPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025–2045 ditekankan pada *Penguatan Fondasi Transformasi* yang dititik beratkan pada penguatan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Transformasi Sosial difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Selanjutnya Transformasi Ekonomi dengan fokus pada penurunan angka kemiskinan, kemiskinan ekstrem dan pengangguran dengan meningkatkan dan penguatan UMKM, meningkatkan investasi, ketahanan pangan. Sedangkan Transformasi Tata Kelola dititik beratkan pada peningkatan transformasi dan akuntabilitas berbasis IT.

Selain itu penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 menggunakan empat pendekatan yaitu pendekatan *teknokratik, partisipatif, politik, top down dan bottom up*. Penyusunan RPJMD menggunakan *pendekatan teknokratis* yaitu menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan teknokratis ini dilakukan diawali dengan penyusunan rencana pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan dilanjutkan dengan penyajian pada rancangan RPJMD. Berdasarkan analisis data yang dilakukan dirumuskan permasalahan dan isu strategis. Isu strategis digunakan sebagai dasar untuk menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dan arah kebijakan. Pendekatan teknokratis juga dilakukan untuk menyusun proyeksi keuangan daerah dan target capaian indikator untuk masing-masing ukuran.

Penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 ini juga menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a) Relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,

- disetiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b) Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c) Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
 - d) Keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
 - e) Terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f) Terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan politis dalam penyusunan RPJMD adalah upaya untuk menterjemahkan program-program pembangunan yang ditawarkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui tahapan:

- a) Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b) Melakukan konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
- c) Melakukan pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pendekatan yang terakhir digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah perpaduan antara pendekatan *bottom up* dan *top down* yang hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 disusun sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh daerah, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kota Tebing Tinggi, yang terletak di jalur lintas utama Sumatera, memiliki potensi strategis yang perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penyusunan RPJMD ini, terdapat beberapa kondisi yang mendasari, antara lain:

1. **Kondisi Sosial Ekonomi:** Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kota Tebing Tinggi mencapai 8,79%, yang menunjukkan perlunya program-program yang lebih efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, angka harapan hidup yang meningkat menjadi 74,29 tahun pada tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi.
2. **Kondisi Infrastruktur:** Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor kunci dalam

menunjang pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat peningkatan dalam kualitas jalan dan gedung pemerintah, masih terdapat tantangan dalam pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi 59,92% pada tahun 2024, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan infrastruktur.

3. **Kesehatan dan Pendidikan:** Indikator kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan perlunya perhatian lebih. Angka kematian ibu dan bayi, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih menjadi isu yang harus diatasi. Selain itu, upaya peningkatan akses pendidikan dan kualitas pendidikan juga menjadi prioritas utama, dengan rata-rata lama sekolah yang terus meningkat menjadi 10,87 tahun pada tahun 2024.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJMD sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, terlibat dalam proses perencanaan. Ini akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap program-program pembangunan yang direncanakan dan meningkatkan akuntabilitas.
5. **Regulasi dan Kebijakan:** RPJMD harus berpedoman pada berbagai regulasi dan kebijakan yang ada, termasuk RPJMN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Sinergi antara dokumen perencanaan di berbagai tingkat pemerintahan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 merupakan langkah penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan terencana. Rencana ini didasarkan pada visi dan misi yang telah dirumuskan oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dan Wakil Walikota, H. Chairil Mukmin Tambunan, yang terpilih untuk periode 2025-2029, yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta..Tanggal pelantikan kepala daerah terpilih untuk periode 2025-2029 akan menjadi momentum penting dalam penyusunan RPJMD ini. Kepala daerah yang baru dilantik diharapkan dapat membawa visi dan misi yang jelas untuk pembangunan Kota Tebing Tinggi, serta mampu mengimplementasikan program-program yang relevan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 akan menjadi peta jalan yang strategis untuk pembangunan daerah, dengan fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, diharapkan Kota Tebing Tinggi dapat mencapai visi : ***"Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya"***

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi dasar hukum dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Kota Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6937);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015, mengenai Produk Hukum Daerah sebagai mana sudah diatur dalam perundangan sebelumnya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025- 2045; (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor..... Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033; (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2045; (Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 Nomor 4 tambahan Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 23);

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2045, dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kemudian, pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.1. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal ini dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.2. Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu keterkaitan yang sangat penting dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah. RPJMD adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode tertentu, biasanya lima tahun.

Pertama, RPJMD Kota Tebing Tinggi harus sejalan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, mengingat bahwa Kota Tebing Tinggi merupakan bagian dari provinsi tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi harus

mendukung visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dengan kata lain, RPJMD Kota Tebing Tinggi berfungsi sebagai implementasi dari kebijakan yang lebih besar yang diusung oleh RPJMD Provinsi.

Kedua, koordinasi antara kedua tingkat perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada, baik manusia maupun finansial, dapat digunakan secara efisien dan efektif. Misalnya, jika RPJMD Provinsi Sumatera Utara menekankan pada pengembangan infrastruktur, maka RPJMD Kota Tebing Tinggi perlu merumuskan program-program yang konkret untuk mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat kota, seperti perbaikan jalan, pengembangan transportasi publik, dan lain-lain.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD Kota Tebing Tinggi

Penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2045 yaitu, Penguatan Fondasi Pembangunan. Selain itu, juga menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunannya dengan arahan serta kebijakan dari sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan RKPD

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD, sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Wali Kota dalam mencapai visi misi harus terpetakan dengan baik, kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah, setiap tahun diselenggarakan musrenbang RKPD Kota Tebing Tinggi yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan peralihan dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun. Implementasi dari RPJMD Kota Tebing Tinggi dituangkan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang secara kelembagaan harus berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan program prioritas untuk dilaksanakan dalam waktu lima (5) tahun. Pelaksanaan RPJMD juga akan dituangkan

ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di mana Pemerintah Kota Tebing Tinggi menjadi prioritas program untuk disusun dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama lima (5) tahun.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan RTRW Kota Tebing Tinggi

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi merupakan suatu keterkaitan yang sangat penting dan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi tidak dapat dilepaskan dari pedoman yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota Tebing Tinggi periode 2013-2033, yang secara resmi diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013. RTRW ini berfungsi sebagai landasan utama dalam menentukan arah dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai aspek pembangunan lainnya.

Secara lebih rinci, RPJMD Kota Tebing Tinggi disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan berbagai kebijakan serta sasaran pokok pembangunan jangka panjang dan jangka menengah yang telah dirumuskan dalam RTRW. Hal ini mencakup penyesuaian tujuan pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat berjalan secara harmonis dan tidak bertentangan dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah yang ada. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang yang menjadi fondasi keberlanjutan pembangunan.

Lebih lanjut, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah yang tercantum dalam RPJMD akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RTRW, juga RDTR. Ini berarti bahwa setiap langkah pengembangan wilayah, mulai dari pemanfaatan lahan, pengembangan infrastruktur, hingga pengelolaan sumber daya alam, harus mengacu pada ketentuan dan arahan yang telah diatur dalam RTRW. Dengan integrasi yang kuat antara RPJMD dan RTRW, Kota Tebing Tinggi dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, hubungan antara RPJMD dan RTRW merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terencana, terarah, dan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tebing Tinggi

Hubungan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan aspek yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. KLHS merupakan dokumen strategis yang wajib disusun dan menjadi bagian integral dalam penyusunan RPJMD. Fungsi utama

KLHS adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD telah mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh dan mendalam. Dengan demikian, KLHS berperan sebagai alat evaluasi dan pengendalian yang menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Secara lebih rinci, KLHS mengkaji potensi dan kondisi lingkungan yang ada di Kota Tebing Tinggi, sehingga dapat mengidentifikasi dampak positif maupun negatif yang mungkin timbul dari pelaksanaan program pembangunan. Kajian ini memberikan rekomendasi yang sangat penting berupa langkah-langkah antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan kompensasi terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Misalnya, jika suatu program pembangunan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, KLHS akan menyarankan tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak tersebut, atau adaptasi agar pembangunan tetap dapat berjalan dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Selain itu, jika dampak negatif tidak dapat dihindari, KLHS juga merekomendasikan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan.

Dengan adanya KLHS sebagai bagian dari RPJMD, Kota Tebing Tinggi dapat memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi dan sosial, tetapi juga ramah lingkungan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam di masa depan. Oleh karena itu, hubungan antara RPJMD dan KLHS merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang seimbang, terencana, dan berwawasan lingkungan, sehingga Kota Tebing Tinggi dapat berkembang secara optimal tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup.

1.3.8. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kota Tebing Tinggi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat arah, kebijakan, dan program pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Dalam konteks pembangunan modern yang berkelanjutan, RPJMD harus selaras dan terintegrasi dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu serangkaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan kesejahteraan bagi semua.

Integrasi SDGs ke dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi menjadi sangat penting karena SDGs menyediakan kerangka kerja yang komprehensif dan holistik untuk pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan. Dengan mengadopsi target dan indikator SDGs, RPJMD dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan global tersebut, sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal Kota Tebing Tinggi. Misalnya, tujuan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan

kualitas pendidikan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dapat diintegrasikan secara sistematis dalam rencana pembangunan daerah.

Proses integrasi ini dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan indikator RPJMD dengan target-target SDGs, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan capaian yang relevan dengan standar internasional. Hal ini juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena SDGs menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Dengan demikian, hubungan antara RPJMD Kota Tebing Tinggi dan SDGs bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan fondasi strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berwawasan masa depan. Melalui sinergi ini, Kota Tebing Tinggi dapat berkontribusi secara nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan global sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1.3.9. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan Isu Gender Kota Tebing Tinggi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi memiliki hubungan yang sangat erat dengan isu gender karena dokumen perencanaan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Kesetaraan gender bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga merupakan faktor penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, RPJMD harus mengadopsi pendekatan yang responsif gender, yang berarti kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang harus mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi seluruh kelompok gender secara adil dan setara.

Integrasi isu gender dalam RPJMD dilakukan dengan memasukkan kebijakan dan strategi yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan hak-hak kelompok rentan, serta menghilangkan diskriminasi berbasis gender. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan program-program yang responsif gender yang kemudian diintegrasikan secara sistematis ke dalam dokumen perencanaan teknis seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan demikian, seluruh perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan dan pengawasan program yang mendukung kesetaraan gender.

Penerapan pendekatan responsif gender dalam RPJMD juga melibatkan pengumpulan dan analisis data yang terdisagregasi berdasarkan gender untuk mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan maupun laki-laki di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan partisipasi politik. Data ini menjadi dasar dalam merumuskan indikator kinerja yang sensitif gender, sehingga pencapaian target pembangunan dapat diukur secara objektif dan transparan.

Lebih jauh, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perempuan, masyarakat sipil, dan sektor swasta, sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang responsif gender. Dengan demikian, RPJMD Kota Tebing Tinggi tidak hanya menjadi dokumen perencanaan biasa, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang mendorong pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan.

1.3.10. Hubungan RPJMD Kota Tebing Tinggi dengan Kota Layak Anak (KLA) Kota Tebing Tinggi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep Kota Layak Anak (KLA). RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka menengah berfungsi sebagai landasan utama bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan, termasuk upaya mewujudkan Kota Layak Anak. Integrasi tema-tema KLA ke dalam RPJMD menjadi sangat penting agar pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap mereka dapat dijamin secara sistematis dan terencana dalam setiap aspek pembangunan daerah.

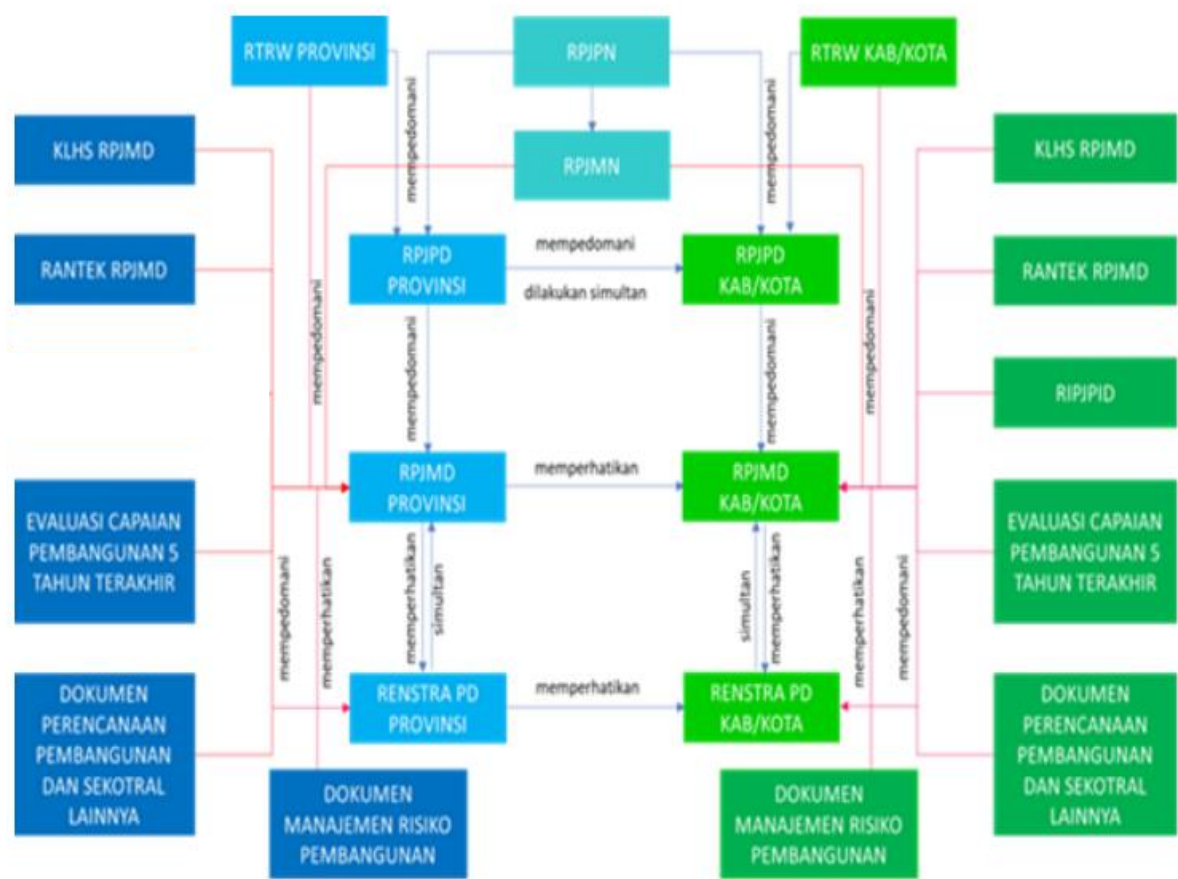
Kota Layak Anak sendiri merupakan sebuah konsep pembangunan kota yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan serta hak-hak anak. Konsep ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, dalam RPJMD, tema-tema KLA seperti pemenuhan hak atas pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang memadai, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi anak dalam berbagai kegiatan sosial harus dijadikan prioritas utama. Dengan memasukkan tema-tema ini ke dalam RPJMD, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memperhatikan aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Lebih lanjut, RPJMD berperan dalam menetapkan target dan indikator kinerja yang spesifik terkait dengan pencapaian KLA. Misalnya, indikator mengenai akses anak terhadap layanan kesehatan dasar, tingkat partisipasi anak dalam pendidikan formal, serta keberadaan fasilitas publik yang ramah anak dapat dimasukkan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Hal ini juga mendorong koordinasi lintas sektor dan antar perangkat daerah untuk bekerja sama secara sinergis dalam mengimplementasikan program-program yang mendukung KLA.

Selain itu, integrasi KLA dalam RPJMD juga memperkuat mekanisme pengawasan dan evaluasi pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan anak. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi tidak hanya berkomitmen pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, di mana anak-anak sebagai generasi penerus mendapatkan perhatian khusus. Keselarasan antara RPJMD dan KLA ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan kota yang lebih layak huni bagi anak-anak, menjamin hak-hak mereka

terpenuhi, serta memberikan kontribusi positif bagi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan dan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam mewujudkan visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi terpilih, dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Kota Tebing Tinggi yang maju kotanya, religius, makmur dan sejahtera rakyatnya.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025- 2029, adalah:

- 1. Sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
- 2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;

3. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil walikota terpilih;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan kolaborasi baik antar daerah, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
6. Mengetahui capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
7. Memberikan gambaran keuangan masa lalu dan kemampuan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan.
8. Memberikan gambaran rumusan permasalahan dan isu strategis untuk dipecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (Lima) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
Menggambarkan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.
2. Dasar hukum penyusunan;
Menyajikan dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Hubungan antara dokumen
RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
4. Maksud dan tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029
5. Sistematika penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masingmasing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029

BAB II : Gambaran Umum Daerah

1) Gambaran umum kondisi daerah

Penyajian pada Subbab ini memuat sekurang-kurangnya hal hal sebagai berikut:

a. Aspek Geografi dan Demografi

1) Posisi dan Peran Strategis Daerah

Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi tersebut dapat berupa kontribusi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.

2) Potensi Sumber Daya Alam

Menjelaskan potensi sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penjelasan ini dapat disimpulkan dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

4) Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Menjelaskan kondisi energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Lingkungan Hidup Berkualitas

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini perlu

dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

6) Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator- indikator seperti Penurunan Intensitas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

7) Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan gambaran demografi ini sekurangnya didukung dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Penduduk, Rasio Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Selain itu, penjelasan demografi ini perlu dilengkapi dengan proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana yang tersaji dalam proyeksi penduduk di RPJPD Tahun 2025-2045.

b.Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Kesejahteraan Ekonomi Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Dalam menarasikan agar dikorelasikan satu indikator dengan indikator lainnya sehingga dapat dipahami secara utuh dan lebih bermakna.
- 2) Kesehatan untuk Semua Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan ini sekurang-

kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

- 3) Pendidikan Berkualitas yang Merata Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.
- 4) Perlindungan Sosial yang Adaptif Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.
- 5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.
- 6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator lainnya sesuai konteks

daerah.

c. Aspek Daya Saing Daerah

1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Menjelaskan kondisi tentang Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Rasio Kewirausahaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Inovasi Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru Indonesia, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

4) Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

5) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Menjelaskan kondisi tentang integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas

perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Pembentukan Modal Tetap Bruto, Ekspor Barang dan Jasa, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

- 6) Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Persentase Desa Mandiri, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

- 7) Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

d. Aspek Pelayanan Umum

- 1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Integritas Nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.
- 2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial
Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang

diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks

- 3) Ketenteraman dan Ketertiban, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antar negara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

- 4) Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah. Menjelaskan kinerja urusan pemerintahan daerah berupa capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk 5 (lima) tahun terakhir.

2) Gambaran Keuangan Daerah

- 1) Memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK;
- 2) Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024, kebijakan keuangan terbaru, dan kondisi lingkungan dinamis. Proyeksi keuangan ini seyogyanya bersumber dari perangkat daerah yang mampu pendapatan dan belanja keuangan daerah.

3) Permasalahan dan Isu Strategis

- 1) Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara

realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan.

- 2) Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.
- 3) Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Merumuskan isu strategis daerah (dapat menggunakan kertas kerja) disimpulkan dari: Permasalahan Isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional); dan Potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Visi disajikan sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD;
2. Misi disajikan sesuai dengan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD dan dapat disesuaikan dengan pendekatan teknokratik agar sesuai dengan kaidah penyusunan misi. Penyesuaian misi dapat dilakukan mulai pada tahap pembahasan rancangan awal oleh Tim Penyusun dan dibahas pada Konsultasi Publik, mendapatkan persetujuan Kepala Daerah, serta disepakati dengan DPRD pada saat pembahasan Nota Kesepakatan Rancangan Awal.
3. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa fokus pembangunan, seperti: Pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan; Peningkatan infrastruktur berkelanjutan; Peningkatan produktivitas daerah; Penguatan daya saing SDM berkelanjutan; Penguatan lingkungan

sosial yang sehat dan budaya maju; Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan Tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
5. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan: kalimat kondisi; dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan ultimate outcome; tidak menurunkan indikator tetapi kinerjanya
6. Strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah; strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD, penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah.

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah

- a) Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah
- b) Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memuat:

- a) Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
- b) Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap perencanaan serta pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi untuk periode 2025-2029 merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. RPJMD ini tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam mengenai posisi dan peran strategis daerah menjadi sangat krusial. Posisi geografis, kontribusi ekonomi, peran infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang harus dianalisis secara komprehensif agar perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Kota Tebing Tinggi memiliki posisi strategis sebagai kota penyangga (buffer city) bagi empat Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Sumatera Utara, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, Bandara Kualanamu, dan Danau Toba. Selain itu, Tebing Tinggi juga merupakan titik simpul transportasi darat yang penting, menghubungkan Medan dan daerah sekitarnya.

Posisi dan peran strategis daerah tidak hanya berkaitan dengan letak geografis semata, tetapi juga mencakup bagaimana daerah tersebut berinteraksi dan berkontribusi terhadap wilayah sekitarnya maupun wilayah yang lebih luas. Kota Tebing Tinggi, sebagai sebuah kota yang memiliki karakteristik unik dan posisi geografis yang spesifik, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD 2025-2029, penting untuk mengkaji secara mendalam berbagai dimensi strategis tersebut agar kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan dapat memperkuat peran kota sebagai motor penggerak pembangunan regional.

Tujuan utama dari uraian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi geografis Kota Tebing Tinggi, kontribusi ekonominya, peran infrastruktur yang dimiliki, serta upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut, diharapkan RPJMD Kota Tebing Tinggi dapat dirancang dengan lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan. Selain itu, uraian ini juga bertujuan untuk menegaskan pentingnya sinergi antara Kota Tebing Tinggi dengan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Provinsi Sumatera Utara secara lebih luas, sehingga pembangunan yang

dilakukan tidak hanya berdampak lokal tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan regional.

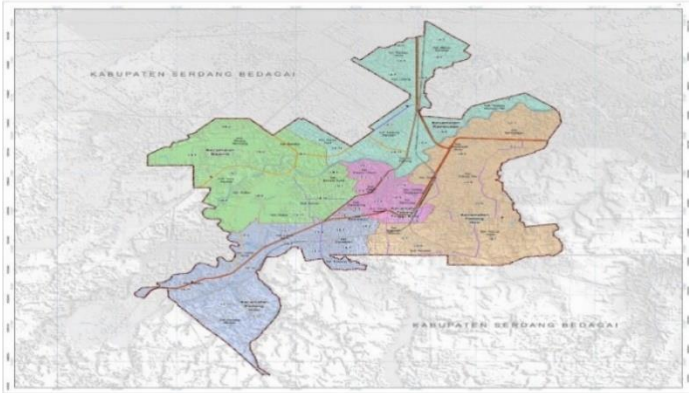
Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin kompleks dan dinamis, posisi dan peran strategis Kota Tebing Tinggi menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kota ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi dan pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya yang memiliki daya tarik bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, penguatan posisi dan peran strategis ini harus menjadi fokus utama dalam RPJMD 2025-2029, agar Kota Tebing Tinggi dapat berkembang menjadi kota yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warganya. Pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap posisi dan peran strategis daerah ini akan menjadi landasan yang kokoh bagi perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.

Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kota Tebing Tinggi menggambarkan penjelasan mengenai luas dan batas wilayah administrasi, letak dan penjelasan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.

A. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Tebing Tinggi salah satu dari tujuh kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang letaknya tidak jauh dari Ibukota Provinsi yaitu 78 kilometer dari Kota Medan. Kota Tebing Tinggi memiliki 35 Kelurahan dengan 179 Lingkungan, dimana Kecamatan Padang Hilir adalah kecamatan terluas dengan luas 1.134,17 Ha dan Kecamatan Bajenis merupakan Kecamatan yang ketinggiannya terendah yaitu 18 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Tebing Tinggi adalah 3.916,97 Ha (Sumber Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2043).

Gambar 2.1
Peta Wilayah Kota Tebing Tinggi
Peta Administrasi /kota Tebing Tinggi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 24 Tahun 2023 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2043

Kota Tebing Tinggi terletak pada Jalur Lintas Utama Sumatera, yaitu yang menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera Utara melalui Lintas Diagonal pada ruas jalan Tebing Tinggi-Sumatera Utara-Parapat-Balige-Siborong-borong. Batas wilayah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara berbatasan dengan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- b. Wilayah Selatan berbatasan dengan PTPN IV Kebun Pabatu dan Perkebunan Paya Pinang, Kabupaten Serdang Bedagai
- c. Wilayah Timur berbatasan dengan PT. Socfindo Tanah Besi dan PTPN III Kebun Rambutan, Kabupaten Serdang Bedagai
- d. Wilayah Barat berbatasan dengan PTPN III Kebun Gunung Pamela, Kabupaten Serdang Bedagai

Secara administratif Kota Tebing Tinggi terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, 35 (tiga puluh lima) Kelurahan dan 179 Lingkungan yaitu :

1. **Kecamatan Padang Hulu** dengan luas wilayah 836,09 Ha atau 21,34% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 39 Lingkungan :
(1)Kelurahan Pabatu, (2)Kelurahan Lubuk Baru, (3)Kelurahan Persiakan, (4)Kelurahan Bandar Sono, (5)Kelurahan Tualang, (6)Kelurahan Lubuk Raya, (7)Kelurahan Padang Merbau.
2. **Kecamatan Rambutan** dengan luas wilayah 727,75 Ha atau 18,57% terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 28 Lingkungan :
(1)Kelurahan Rantau Laban, (2) Kelurahan Sri Padang, (3)Kelurahan Karya Jaya, (4)Kelurahan Lalang, (5)Kelurahan Tanjung Marulak, (6)Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, (7)Mekar Sentoso.
3. **Kecamatan Padang Hilir** dengan luas wilayah 1.130,72 Ha atau 28,87 % terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 35 Lingkungan :
(1)Kelurahan Bagelen, (2)Kelurahan Tebing Tinggi, (3)Kelurahan Tambangan, (4)Kelurahan Satria, (5)Kelurahan Deblod Sundoro, (6)Kelurahan Damar Sari, (7)Kelurahan Tambangan Hulu.
4. **Kecamatan Tebing Tinggi Kota** dengan luas wilayah 261,62 Ha atau 6,70 % terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 43 Lingkungan :
(1)Kelurahan Mandailing, (2)Kelurahan Pasar Gambir, (3)Kelurahan Rambung, (4)Kelurahan Tebing Tinggi Lama, (5)Kelurahan Pasar Baru, (6)Kelurahan Badak Bejuang, (7)Kelurahan Bandar Utama.
5. **Kecamatan Bajenis** dengan luas wilayah 960,80 Ha atau 24,53 % terhadap luas Kota Tebing Tinggi, terdiri dari 7 kelurahan dan 34 Lingkungan :
(1) Kelurahan Bulian, (2)Kelurahan Pelita, (3) Kelurahan Durian, (4) Kelurahan Bandar Sakti, (5) Kelurahan Teluk Karang, (6) Kelurahan Pinang Mancung, (7) Kelurahan Berohol.

B. Kondisi Geografis

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Kota Tebing Tinggi secara geografis terletak diantara 3°19'00"- 3°21'00"

Lintang Utara dan 98°11’-98°21’ Bujur Timur dan dikelilingi oleh Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak di jalan penghubung antara pantai barat dan pantai timur Sumatera Utara.

C. Topografi

Kota Tebing Tinggi berada di dataran rendah Pulau Sumatera (18-34 m) diatas permukaan laut (dpl) dengan memiliki topografi mendatar dan bergelombang. Topografi mendatar memiliki kelas kemiringan lereng berkisar antara 0-2% sedangkan topografi bergelombang berkisar antara 2-15%. Kota Tebing Tinggi didominasi oleh topografi mendatar hampir 75% dari wilayah. Kemudian Topografi kemiringan lereng berkisar antara 8-15% hanya sedikit berada di wilayah Kota Tebing Tinggi sehingga menunjukkan sedikitnya potensi akan bencana longsor.

Kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di Bajenis yaitu 18 meter diatas permukaan laut, sedangkan tertinggi di Kecamatan Tebing Tinggi Kota yaitu 34 meter di atas permukaan laut. Tinggi wilayah kecamatan di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tinggi Wilayah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi

Kecamatan Subdistrict	Tinggi Wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)
(1)	(2)
Padang Hulu	33
Tebing Tinggi Kota	34
Rambutan	30
Bejenis	18
Padang Hilir	33

Sumber : BPS Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Kecamatan Bajenis memiliki ketinggian paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan ketinggian 18 meter diatas permukaan laut seluas 9,0780 km² dengan luas 23,62% dari luas daratan Kota Tebing Tinggi, sehingga mengakibatkan Kecamatan Bajenis merupakan kawasan rawan banjir.

D. Geologi

Berdasarkan data dari Peta Geologi Lembar Tebing Tinggi, Sumatera menunjukkan bahwa kondisi geologi Kota Tebing Tinggi terbentuk dari dua jenis batuan, Batuan Sedimen dan Batuan Gunung Api. Keadaan tersebut menunjukkan kondisi struktur geologi Kota Tebing Tingi sama dengan struktur geologi daerah sekitarnya (Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang). Kondisi geologi Kota Tebing Tinggi ini umumnya memliki karakteristik tanah yang subur untuk pengembangan pertanian karena merupakan endapan lumpur aliran sungai.

E. Hidrologi

Kota Tebing Tinggi dilintasi oleh aliran 4 sungai yaitu Sungai Padang, Sungai Bahilang, Sungai Kelembah, Sungai Sibarau. Sungai Padang merupakan sungai utama yang mempunyai panjang sekitar ±16,22 km dan lebar ±65m.

F. Klimatologi

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Tebing Tinggi beriklim tropis, dengan ketinggian 18-34 m di atas permukaan laut, maka temperature udara di kota ini cukup panas yaitu berkisar antara 25°-27°C. Sebagaimana kota di Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi mempunyai musim kemarau dan musim penghujan.

Tabel 2.2		
Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Tahun 2024 di Kota Tebing Tinggi		
Bulan	Hari Hujan	Curah Hujan
Januari	12	97
Februari	5	14
Maret	10	86
April	4	60
Mei	8	213
Juni	8	90
Juli	6	69
Agustus	16	314
September	15	344
Oktober	18	448
Nopember	16	339
Desember	13	107
Total	131	2.181
Rata-Rata	10,92	181,75

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan publikasi BPS dalam Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2024, pada Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi mengalami hari hujan sebanyak 131 hari dengan curah hujan berkisar antara 16-224 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dengan curah hujan 448 mm.

G. Penggunaan Lahan

Sesuai dengan Perda Kota Tebing Tinggi No.04 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 yang memuat penggunaan lahan Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kota Tebing Tinggi didominasi Pemukiman (2.623,6 Ha), Perdagangan dan jasa (217,3 Ha), dan Pertanian Pangan (224 Ha).

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Potensi Kota Tebing Tinggi meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) Mebidangro (Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo) dan Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
2. Kawasan *hinterland* untuk menopang celah fungsi kegiatan perkotaan bagi daerah-daerah sekitarnya untuk bidang jasa dan perdagangan.
3. Kawasan Strategis Ekonomi meliputi Kawasan strategis ekonomi Bajenis-Berohol di Kelurahan Pinang Mancung.
4. Kawasan Pusat Pelayanan Kota yaitu Terminal Bandar Kajum di Kelurahan Lalang, Kelurahan Rantau Laban dan Kelurahan Mekar Sentosa di Kecamatan Rambutan.
5. Kawasan Sosial Budaya berada di pusat kota.
6. Kawasan lingkungan dan pariwisata disepanjang Sungai Padang dan Sungai Bahilang.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memegang peranan yang sangat penting. Kedua konsep ini menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pemahaman yang mendalam tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan. Ini mencakup kemampuan lingkungan menyediakan sumber daya alam seperti air, udara bersih, tanah subur, dan habitat yang memadai untuk flora dan fauna. Daya dukung juga mencakup kapasitas lingkungan dalam menyediakan jasa ekosistem yang esensial, seperti pengaturan iklim, siklus nutrisi, dan penyediaan oksigen. Jika daya dukung lingkungan melebihi kapasitasnya, maka akan terjadi degradasi lingkungan yang berdampak negatif pada kualitas hidup dan keberlanjutan ekosistem.

Mengingat Kota Tebing Tinggi merupakan wilayah perkotaan (wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian) maka penyediaan pangan mandiri bukanlah menjadi prioritas. Berdasarkan RDTR Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2042, luas pola ruang untuk tanaman pangan hanyalah 230,29 Ha (6,97 %) dari luas wilayah. Berdasarkan produksi pangan tahun 2022, ketersediaan pangan yang dihitung dalam satuan kalori, jumlah ketersediaan pangan di Kota Tebing Tinggi. Jika diasumsikan jumlah ketersediaan pangan konstan hingga akhir tahun perencanaan, sementara kebutuhan meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk, maka status daya dukung pangan Kota Tebing Tinggi tetap defisit sebagaimana terlihat pada Tabel berikut:



Tabel 2.3
Daya Dukung Pangan Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Pangan (Kkal)	Selisih Ketersediaan-kebutuhan	Status Daya dukung
2022	177.785	136.272.202.500	-28.755.755.835	Defisit
2023	178.914	137.137.581.000	-29.621.134.335	Defisit
2025	185.424	142.127.496.000	-34.611.049.335	Defisit
2026	188.576	144.543.504.000	-37.027.057.335	Defisit
2027	191.728	146.959.512.000	-39.443.065.335	Defisit
2028	194.880	149.375.520.000	-41.859.073.335	Defisit
2029	198.032	151.791.528.000	-44.275.081.335	Defisit

Daya dukung Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia selain pangan. Air dimanfaatkan baik secara langsung untuk konsumsi, kegiatan domestik, maupun dalam kegiatan penggunaan lahan untuk menghasilkan produk, termasuk pangan. Kondisi daya dukung air dinyatakan dalam surplus dan defisit, yang ditentukan berdasarkan selisih kebutuhan dan ketersediaan air (m³/tahun). Ketersediaan air Kota Tebing Tinggi dihitung dari ketersediaan air berdasarkan curah hujan dan debit air Sungai Padang, sedangkan kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk hidup layak. terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Daya Dukung Air Kota Tebing Tinggi

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)	Ketersediaan air (m ³ /tahun)			Selisih Ketersediaan air dengan Kebutuhan air
			Curah Hujan	Debit Sungai Padang	Total	
2023	178.914	286.262.400	49.131.307	137.970.000	187.101.307	-99.161.093
2025	185.424	296.678.400	49.131.307	137.970.000	187.101.307	-109.577.093
2026	188.576	301.721.600	49.131.307	137.970.000	187.101.307	-114.620.293
2027	191.728	306.764.800	49.131.307	137.970.000	187.101.307	-119.663.493
2028	194.880	311.808.000	49.131.307	137.970.000	187.101.307	-124.706.693
2029	198.032	316.851.200	49.131.307	137.970.000	187.101.307	-129.749.893

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh bahwa seluruh Kota Tebing Tinggi memiliki status daya dukung penyediaan air yang sudah terlampaui (defisit) mulai tahun 2023 hingga 2029. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Contohnya adalah kemampuan sungai untuk menampung limbah cair, kemampuan atmosfer untuk menyerap polutan udara, dan kemampuan tanah untuk menyerap limbah padat. Jika daya tampung lingkungan terlampaui, maka akan terjadi pencemaran, kerusakan habitat, dan gangguan fungsi ekosistem yang dapat mengancam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kota Tebing Tinggi, sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2025, kota ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dengan tingkat urbanisasi yang meningkat. Pertumbuhan penduduk ini menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kebutuhan air bersih, lahan permukiman, serta peningkatan

limbah domestik dan industri.

Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi mencapai sekitar 172.838 jiwa dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 1,5%. Proyeksi hingga tahun 2025 memperkirakan jumlah penduduk akan meningkat menjadi sekitar 182.000 jiwa. Pertumbuhan ini menuntut perencanaan yang matang agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga. Misalnya, kebutuhan air bersih yang meningkat harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan agar tidak terjadi over-extraction yang dapat merusak ekosistem sungai dan sumber air tanah.

Daya Dukung Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi

Dalam konteks daya dukung, Kota Tebing Tinggi memiliki beberapa sumber daya alam yang menjadi penopang utama kehidupan dan pembangunan, antara lain sumber air permukaan dan tanah subur untuk pertanian. Namun, tekanan pembangunan dan aktivitas manusia seperti konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan industri menyebabkan berkurangnya lahan hijau dan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan data KLHS RPJMD 2025-2029, luas RTH di Kota Tebing Tinggi saat ini masih di bawah standar minimal yang direkomendasikan, yaitu kurang dari 20% dari total luas wilayah kota. Kondisi ini mengurangi kemampuan lingkungan dalam menyediakan jasa ekosistem seperti penyerapan karbon, pengaturan suhu, dan penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati. Selain itu, kualitas udara di Kota Tebing Tinggi mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan akibat peningkatan kendaraan bermotor dan aktivitas industri. Polusi udara yang meningkat dapat menurunkan daya dukung lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2025-2029, perlu dirumuskan kebijakan pengendalian polusi udara dan peningkatan ruang terbuka hijau sebagai upaya memperkuat daya dukung lingkungan.

Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi

Daya tampung lingkungan di Kota Tebing Tinggi juga menjadi perhatian utama dalam penyusunan RPJMD. Kota ini menghadapi tantangan dalam pengelolaan limbah domestik dan limbah industri yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Data BPS dan laporan KLHS menunjukkan bahwa volume limbah domestik yang dihasilkan mencapai sekitar 50 ton per hari, dengan tingkat pengelolaan yang belum optimal. Limbah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari tanah, air, dan udara, sehingga melebihi daya tampung lingkungan dan menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran sungai dan tanah.

Kemampuan sungai-sungai kecil di Kota Tebing Tinggi untuk menampung limbah cair juga terbatas. Pembuangan limbah cair tanpa pengolahan yang memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan mengancam ekosistem perairan. Oleh karena itu, RPJMD harus mengintegrasikan program pengelolaan limbah yang efektif, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.



Dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

Penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Meningkatkan luas dan kualitas RTH untuk memperkuat fungsi ekosistem, mengurangi polusi udara, dan menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat. Pemerintah daerah dapat menetapkan target peningkatan RTH minimal 20% dari luas wilayah kota sesuai standar nasional.

Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

Melakukan konservasi sumber air, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan penggunaan air secara efisien untuk menjaga ketersediaan air bersih dan kelestarian ekosistem perairan.

Pengelolaan Limbah Terpadu

Membangun sistem pengelolaan limbah yang komprehensif, termasuk pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan limbah domestik dan industri agar tidak melebihi daya tampung lingkungan.

Pengendalian Polusi Udara

Mengatur dan mengawasi emisi dari kendaraan bermotor dan industri, serta mendorong penggunaan energi bersih dan transportasi ramah lingkungan.

Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui edukasi, kampanye, dan program pemberdayaan agar tercipta budaya hidup ramah lingkungan.

Monitoring dan Evaluasi Lingkungan

Membangun sistem pemantauan kualitas lingkungan secara berkala untuk memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan tetap terjaga dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan konsep fundamental yang harus menjadi pijakan dalam penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029. Dengan memahami dan mengelola kedua aspek ini secara tepat, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Data terbaru dari BPS dan laporan KLHS menjadi sumber penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Tebing Tinggi dapat menjadi kota yang maju sekaligus ramah lingkungan, berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan global.

2..1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Energi, air, dan pangan merupakan tiga pilar utama yang saling berkaitan dan sangat krusial dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia serta pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah. Kota Tebing Tinggi, sebagai kota yang berkembang di Provinsi Sumatera Utara, menghadapi tantangan sekaligus peluang dalam mengelola ketiga aspek ini secara terpadu. Ketahanan energi, ketersediaan air bersih, dan kemandirian pangan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks penyusunan RPJMD 2025-2029, pemahaman mendalam terhadap kondisi dan dinamika ketiga sektor ini sangat penting agar kebijakan dan program pembangunan yang dirancang dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam. Indikator-indikator seperti Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, dan Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum menjadi alat ukur yang membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi capaian pembangunan serta merumuskan strategi yang tepat.

Ketahanan Energi di Kota Tebing Tinggi

Akses dan Konsumsi Listrik Per Kapita

Menurut data BPS Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2025, akses listrik di kota ini telah mencapai lebih dari 95% dari total rumah tangga, menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyediaan energi listrik bagi masyarakat. Konsumsi listrik per kapita juga mengalami peningkatan, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan standar hidup warga. Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita diperkirakan sekitar 800 kWh per tahun, dan diproyeksikan meningkat hingga 900-1000 kWh per tahun pada 2025.

Namun, peningkatan konsumsi listrik ini juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan ketergantungan pada sumber energi fosil yang masih dominan. Kota Tebing Tinggi belum sepenuhnya memanfaatkan potensi energi terbarukan secara optimal, seperti energi surya dan biomassa, padahal wilayah ini memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan energi hijau.

Inisiatif Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi

Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan, RPJMD 2025-2029 perlu mengintegrasikan program pengembangan energi terbarukan, misalnya pemasangan panel surya di fasilitas publik dan perumahan, serta pemanfaatan limbah biomassa dari sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber energi alternatif. Selain itu, peningkatan efisiensi energi melalui kampanye hemat energi dan penggunaan teknologi hemat energi juga menjadi strategi penting untuk mengurangi beban konsumsi listrik dan emisi karbon.

Tantangan dan Strategi

Tantangan utama dalam ketahanan energi Kota Tebing Tinggi meliputi keterbatasan infrastruktur energi, ketergantungan pada energi fosil, dan kebutuhan investasi yang besar untuk pengembangan energi terbarukan. Strategi yang dapat ditempuh antara lain memperkuat kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam pengembangan energi bersih, mendorong partisipasi swasta dalam investasi energi terbarukan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi energi.

Ketahanan Air di Kota Tebing Tinggi

- **3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum**

Data BPS menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap air minum layak di Kota Tebing Tinggi telah mencapai sekitar 85% pada tahun 2020, dengan target peningkatan menjadi 95% pada tahun 2025. Akses ini mencakup penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan, sumur bor, dan sumber air lainnya yang memenuhi standar kesehatan.

- **Pengelolaan dan Kualitas Air**

Ketersediaan air bersih di Kota Tebing Tinggi sangat bergantung pada sumber air permukaan dan air tanah. Namun, tekanan dari pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri menyebabkan penurunan kualitas air di beberapa wilayah, terutama akibat pencemaran limbah domestik dan industri. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk menjaga daya dukung lingkungan dan memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas.

- **Tantangan dan Strategi**

Tantangan utama dalam ketahanan air meliputi degradasi kualitas air, fluktuasi ketersediaan air akibat perubahan iklim, dan infrastruktur pengelolaan air yang belum merata. Strategi yang diusulkan dalam RPJMD meliputi peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air, konservasi sumber air melalui reboisasi dan pengelolaan daerah tangkapan air, serta edukasi masyarakat tentang penggunaan air yang hemat dan ramah lingkungan.

- **Kemandirian Pangan di Kota Tebing Tinggi**

Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indikator penting yang mengukur kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh penduduknya. Berdasarkan data BPS dan laporan KLHS, Kota Tebing Tinggi memiliki IKP yang relatif stabil namun masih menghadapi tantangan dalam mengurangi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, terutama di kalangan rumah tangga berpendapatan rendah.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di kota ini diperkirakan berada di kisaran 10-12% pada tahun 2020, dengan upaya penurunan melalui program-program bantuan pangan dan peningkatan produksi lokal.

Produksi Pertanian dan Ketergantungan Pangan

Kota Tebing Tinggi memiliki lahan pertanian yang terbatas, sehingga ketergantungan pada pasokan pangan dari kabupaten tetangga cukup tinggi. Komoditas utama yang diproduksi meliputi padi, sayuran, dan buah-buahan. Namun, urbanisasi dan konversi lahan pertanian menjadi permukiman mengancam ketersediaan lahan produktif.

Strategi Peningkatan Kemandirian Pangan

RPJMD 2025-2029 perlu menekankan pengembangan pertanian perkotaan (urban farming), peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern, serta diversifikasi pangan lokal. Selain itu, penguatan jaringan distribusi pangan dan pengurangan kehilangan pascapanen menjadi fokus penting untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan.

Interdependensi Energi, Air, dan Pangan

Ketahanan energi, air, dan pangan tidak dapat dipisahkan karena ketiganya saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain. Energi diperlukan untuk pengolahan air dan irigasi pertanian, sementara air sangat penting untuk produksi pangan. Sebaliknya, sektor pangan juga mempengaruhi penggunaan energi dan air, misalnya melalui kebutuhan irigasi dan pengolahan hasil pertanian.

Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, integrasi kebijakan dan program yang mengakomodasi ketiga sektor ini sangat penting untuk menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan. Misalnya, pengembangan energi terbarukan dapat mendukung pengelolaan air bersih dan pertanian berkelanjutan, sementara konservasi air dapat mengurangi kebutuhan energi dalam pengolahan dan distribusi.

Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan fondasi utama bagi pembangunan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Data BPS 2020-2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam akses listrik dan air bersih, namun tantangan seperti ketergantungan pada energi fosil, degradasi kualitas air, dan keterbatasan lahan pertanian masih perlu diatasi. RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 harus mengintegrasikan strategi yang komprehensif dan terpadu untuk mengelola ketiga sektor ini secara sinergis, dengan fokus pada pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta peningkatan kemandirian pangan melalui inovasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas merupakan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Tebing Tinggi. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, aspek lingkungan hidup tidak hanya menjadi bagian dari tujuan pembangunan, tetapi juga menjadi prasyarat agar pembangunan ekonomi dan sosial dapat berlangsung harmonis tanpa merusak sumber daya alam dan ekosistem. Lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas mencakup udara bersih, air yang layak konsumsi, pengelolaan limbah yang efektif, pelestarian keanekaragaman hayati, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Data BPS Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2025 menunjukkan tren perkembangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, RPJMD harus mengintegrasikan kebijakan dan program yang komprehensif untuk mengatasi tantangan lingkungan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.

- **Kualitas Udara: Tantangan dan Upaya Pengendalian**

Kualitas udara merupakan indikator utama lingkungan hidup berkualitas. Kota Tebing Tinggi, sebagai kota yang berkembang dengan aktivitas industri, transportasi, dan permukiman yang padat, menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas udara tetap sehat. Data BPS dan laporan lingkungan daerah menunjukkan bahwa tingkat polusi udara, terutama partikel debu (PM10 dan PM2.5), serta emisi gas buang kendaraan bermotor dan industri, menjadi sumber utama pencemaran udara.

Meskipun belum tersedia data spesifik angka konsentrasi polutan udara dari BPS, tren nasional dan regional menunjukkan peningkatan kebutuhan pengendalian emisi. Dalam RPJMD 2025-2029, perlu dirumuskan kebijakan pengurangan emisi melalui pengembangan transportasi ramah lingkungan, pengawasan ketat terhadap industri, serta penghijauan kota yang dapat berfungsi sebagai penyerap polutan. Program-program seperti kampanye penggunaan kendaraan listrik, peningkatan kualitas bahan bakar, dan pengembangan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas. Selain itu, penguatan sistem pemantauan kualitas udara secara berkala akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil langkah cepat dan tepat.

- **Pengelolaan Air dan Kualitas Air Bersih**

Air bersih adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kesehatan masyarakat dan kelangsungan ekosistem. Data BPS Kota Tebing Tinggi tahun 2020-2025 menunjukkan bahwa akses rumah tangga terhadap air minum layak telah mencapai sekitar 85-90%, namun kualitas air di beberapa wilayah masih menghadapi tantangan akibat pencemaran limbah domestik dan industri. Pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi fokus utama dalam RPJMD. Hal ini mencakup perlindungan daerah tangkapan air, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah, serta pengembangan infrastruktur distribusi air bersih yang merata. Selain itu, program konservasi air dan edukasi masyarakat tentang penggunaan air yang hemat dan ramah lingkungan perlu diperkuat.

Kualitas air yang baik juga mendukung sektor pertanian dan industri yang ramah lingkungan, sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Pengawasan kualitas air secara rutin dan penerapan standar baku mutu air menjadi bagian integral dari strategi pembangunan lingkungan hidup berkualitas.

- **Pengelolaan Limbah dan Sanitasi**

Pengelolaan limbah yang efektif merupakan aspek penting dalam menjaga lingkungan hidup berkualitas. Kota Tebing Tinggi menghasilkan limbah domestik dan limbah industri yang harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari tanah, air, dan udara. Data BPS menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan limbah domestik yang terkelola dengan baik masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengurangan sampah di sumbernya dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah terpadu.

RPJMD 2025-2029 harus mengedepankan program pengelolaan limbah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), pengembangan bank sampah, serta peningkatan kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Selain itu, sanitasi yang layak dan akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai harus menjadi prioritas untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penyakit yang berhubungan dengan sanitasi buruk. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap limbah industri juga harus dilakukan untuk mencegah pencemaran lingkungan yang lebih luas.

- **Pelestarian Keanekaragaman Hayati dan Ruang Terbuka Hijau**

Keanekaragaman hayati merupakan indikator penting kualitas lingkungan hidup yang mencerminkan keseimbangan ekosistem. Kota Tebing Tinggi memiliki potensi keanekaragaman hayati yang perlu dilindungi dan dikembangkan, termasuk kawasan hutan kota, taman kota, dan area konservasi kecil yang mendukung habitat flora dan fauna lokal. Data BPS dan laporan KLHS menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau di Kota Tebing Tinggi masih berada di bawah standar ideal, sehingga perlu upaya peningkatan luas dan kualitasnya. RPJMD 2025-2029 harus memasukkan program penghijauan kota, rehabilitasi lahan kritis, dan pengembangan taman kota yang ramah lingkungan. Pelestarian keanekaragaman hayati juga dapat dilakukan melalui pengembangan ekowisata dan edukasi lingkungan yang melibatkan masyarakat luas. Hal ini tidak hanya menjaga fungsi ekologis, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

- **Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran Lingkungan**

Lingkungan hidup berkualitas tidak dapat terwujud tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kesadaran dan peran serta warga dalam menjaga kebersihan, mengelola sampah, serta melestarikan lingkungan menjadi faktor penentu keberhasilan program lingkungan hidup.

Data survei BPS menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, namun masih terdapat tantangan dalam konsistensi perilaku ramah lingkungan. RPJMD harus mengintegrasikan program pendidikan lingkungan, kampanye hijau, dan

pemberdayaan komunitas lingkungan. Penguatan kelembagaan masyarakat seperti kelompok sadar lingkungan (Pokdarling) dan kolaborasi dengan sektor swasta serta lembaga pendidikan dapat mempercepat perubahan perilaku dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.

- **Integrasi Lingkungan Hidup Berkualitas dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029**

Penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 harus mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan hidup berkualitas ke dalam seluruh sektor pembangunan. Hal ini meliputi perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan, pengembangan infrastruktur hijau, pengendalian pencemaran, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang lingkungan. Penggunaan data dan indikator lingkungan dari BPS serta hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi dasar dalam menetapkan target, program, dan indikator kinerja yang terukur. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga penting untuk memastikan pencapaian tujuan lingkungan hidup berkualitas.

Lingkungan hidup berkualitas merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan Kota Tebing Tinggi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan dukungan data terbaru dari BPS tahun 2020-2025, RPJMD 2025-2029 dapat merumuskan kebijakan dan program yang komprehensif untuk mengatasi tantangan kualitas udara, pengelolaan air, limbah, pelestarian keanekaragaman hayati, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKLH digunakan sebagai informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH Kota Tebing Tinggi dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 60,68, tahun 2022 sebesar 61,76, 2023 sebesar 60,55 dan di tahun 2024 sebesar 60,25.

Melalui integrasi yang kuat antara aspek lingkungan dan pembangunan sosial-ekonomi, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan visi menjadi kota yang sehat, nyaman, dan lestari, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara menyeluruh. Komitmen berkelanjutan, inovasi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan lingkungan hidup berkualitas yang mendukung masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan, beradaptasi, dan pulih kembali setelah mengalami dampak dari peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya Kota Tebing Tinggi, penguatan resilensi ini menjadi sangat krusial mengingat Indonesia, termasuk wilayah Sumatera Utara, menghadapi berbagai risiko bencana alam seperti

banjir, tanah longsor, dan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 harus mengintegrasikan strategi dan kebijakan yang memperkuat ketahanan daerah terhadap risiko-risiko tersebut agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan dan tidak mudah terganggu oleh bencana.

- **Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan salah satu penyebab utama perubahan iklim global. Kota Tebing Tinggi, sebagai bagian dari wilayah perkotaan yang berkembang, berkontribusi terhadap emisi GRK melalui sektor transportasi, industri, dan penggunaan energi. Data BPS dan laporan lingkungan regional menunjukkan bahwa konsumsi energi listrik per kapita dan penggunaan bahan bakar fosil masih menjadi sumber utama emisi di kota ini.

RPJMD 2025-2029 perlu menargetkan penurunan intensitas emisi GRK dengan mengadopsi berbagai langkah strategis, antara lain:

- **Pengembangan Energi Terbarukan:** Mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- **Transportasi Ramah Lingkungan:** Mengembangkan sistem transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan, serta mendorong penggunaan kendaraan listrik dan sepeda.
- **Pengelolaan Limbah:** Meningkatkan pengelolaan limbah organik dan anorganik untuk mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir.
- **Kampanye Hemat Energi:** Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi konsumsi energi secara bijak.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Tebing Tinggi dapat menurunkan emisi GRK secara signifikan, sekaligus mendukung target nasional dalam mitigasi perubahan iklim.

- **Indeks Risiko Bencana**

Indeks Risiko Bencana mengukur potensi kerentanan dan eksposur suatu wilayah terhadap berbagai jenis bencana alam. Berdasarkan data BPS dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kota Tebing Tinggi memiliki risiko bencana yang cukup tinggi terutama terkait banjir dan tanah longsor, terutama pada musim hujan yang intensitasnya meningkat akibat perubahan iklim.

Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks risiko bencana di Kota Tebing Tinggi antara lain:

- **Topografi dan Drainase:** Wilayah dengan topografi rendah dan sistem drainase yang kurang optimal rentan terhadap genangan dan banjir.
- **Perubahan Tata Ruang:** Konversi lahan hijau menjadi kawasan permukiman dan industri tanpa pengelolaan yang baik meningkatkan risiko banjir.
- **Kepadatan Penduduk:** Konsentrasi penduduk di daerah rawan bencana memperbesar potensi kerugian jiwa dan materi.

RPJMD harus mengintegrasikan pengurangan risiko bencana melalui:

- **Perbaikan Infrastruktur Drainase:** Membangun dan merawat saluran air yang memadai untuk mengurangi genangan.
- **Pengendalian Tata Ruang:** Menegakkan peraturan tata ruang yang memperhatikan zona risiko bencana.
- **Peningkatan Sistem Peringatan Dini:** Mengembangkan sistem informasi dan peringatan bencana yang cepat dan akurat.
- **Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.
- **Indeks Ketahanan Daerah**

Indeks Ketahanan Daerah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi dan mengelola risiko bencana serta perubahan iklim secara menyeluruh. Kota Tebing Tinggi perlu memperkuat ketahanan ini melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Beberapa aspek penting dalam indeks ketahanan daerah meliputi:

- **Kesiapan Infrastruktur:** Bangunan dan fasilitas publik yang tahan terhadap bencana, seperti gedung tahan gempa dan sistem drainase yang baik.
 - **Kapasitas Institusi:** Kelembagaan yang mampu merespon bencana dengan cepat dan efektif.
 - **Partisipasi Masyarakat:** Keterlibatan aktif warga dalam mitigasi dan adaptasi bencana.
 - **Sumber Daya dan Pendanaan:** Ketersediaan dana dan sumber daya untuk penanggulangan bencana dan pemulihan.
- RPJMD harus mengarahkan pembangunan pada penguatan kapasitas ini dengan:
- **Pengembangan Infrastruktur Tangguh Bencana:** Mendorong pembangunan yang memperhatikan standar ketahanan bencana.
 - **Penguatan Lembaga Penanggulangan Bencana:** Meningkatkan koordinasi antar instansi dan pelatihan sumber daya manusia.
 - **Pemberdayaan Masyarakat:** Membentuk kelompok tangguh bencana di tingkat kelurahan dan desa.
 - **Pengalokasian Anggaran Khusus:** Menyediakan dana cadangan untuk penanggulangan dan pemulihan bencana.

- **Adaptasi Perubahan Iklim dalam Perencanaan Kota**

Perubahan iklim membawa dampak nyata seperti peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pembangunan. Kota Tebing Tinggi harus mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dalam setiap aspek perencanaan dan pembangunan.

Strategi adaptasi yang dapat diimplementasikan meliputi:

- **Pengembangan Ruang Terbuka Hijau:** Menambah taman kota dan area resapan air untuk mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas udara.



- **Pengelolaan Sumber Daya Air:** Meningkatkan konservasi air dan pengelolaan sumber air bersih untuk menghadapi ketidakpastian pasokan air.
- **Penerapan Bangunan Hijau:** Mendorong penggunaan teknologi bangunan yang hemat energi dan tahan terhadap perubahan iklim.
- **Pengembangan Sistem Informasi Iklim:** Menyediakan data dan informasi cuaca yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
- **Peran Masyarakat dan Kolaborasi Multi-Stakeholder**

Resilensi tidak dapat dibangun hanya oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Kota Tebing Tinggi perlu membangun kemitraan yang kuat untuk:

 - **Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan:** Program edukasi tentang bencana dan perubahan iklim di sekolah dan komunitas.
 - **Mendorong Inovasi dan Teknologi:** Kolaborasi dengan universitas dan lembaga riset untuk mengembangkan solusi adaptasi dan mitigasi.
 - **Penguatan Jaringan Komunikasi:** Memastikan informasi bencana dan iklim tersampaikan dengan cepat dan tepat.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**

RPJMD Kota Tebing Tinggi harus mencakup mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap indikator-indikator resilensi, seperti:

Tabel 2.5
Indikator Resilensi Berkelanjutan

Indikator	Deskripsi	Target RPJMD 2025-2029
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persentase pengurangan emisi GRK dari sektor energi, transportasi, dan limbah	Penurunan 15-20% dibanding baseline 2020
Indeks Risiko Bencana	Skor risiko bencana berdasarkan frekuensi dan dampak bencana di wilayah Kota Tebing Tinggi	Penurunan risiko melalui mitigasi dan adaptasi
Indeks Ketahanan Daerah	Tingkat kesiapan infrastruktur, institusi, dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Peningkatan skor ketahanan minimal 25%
Akses Sistem Peringatan Dini	Persentase wilayah dan populasi yang terjangkau sistem peringatan dini bencana	Cakupan 90% wilayah dan populasi

Evaluasi berkala ini penting untuk menyesuaikan kebijakan dan program sesuai dengan perkembangan kondisi dan hasil yang dicapai Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Dengan mengintegrasikan penurunan emisi GRK, pengurangan risiko bencana, penguatan ketahanan daerah, dan adaptasi perubahan iklim ke dalam RPJMD 2025-2029, Kota Tebing Tinggi dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan lingkungan yang semakin



kompleks. Pendekatan yang holistik dan partisipatif, didukung oleh data dan indikator yang terukur, akan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.1.7 Kondisi Demografis

Penduduk Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 sebanyak 180.977 jiwa yang terdiri atas 90.018 jiwa penduduk laki-laki dan 90.959 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,965.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2024
Kota Tebing Tinggi

umur	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	7.990	7.596	15.586
5-9	8.026	7.674	15.700
10-14	8.060	7.468	15.528
15-19	7.287	6.935	14.222
20-24	6.814	6.667	13.481
25-29	7.320	7.212	14.532
30-34	7.371	7.190	14.561
35-39	6.842	6.709	13.551
40-44	6.432	6.365	12.797
45-49	5.604	5.777	11.381
50-54	4.846	5.366	10.212
55-59	4.155	4.916	9.071
60-64	3.765	4.128	7.893
65-69	2.737	3.148	5.885
70-74	1.676	2.011	3.687
75+	1.093	1.797	2.890
JUMLAH	90.018	90.959	180.977

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Kepadatan penduduk di Tebing Tinggi mencapai 4,708 ribu jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 5 orang. Kepadatan penduduk di 5 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan kepadatan sebesar 6,86 ribu jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Padang Hilir sebesar 3,60 ribu jiwa/km². Kondisi jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi yang semakin meningkat, Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui perangkat daerah terkait pembangunan infrastruktur diarahkan untuk pembangunan permukiman dengan metode rumah susun seperti program *backlog* perumahan.

Tabel 2.7
Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 2024 Kota Tebing Tinggi

Wilayah	2024	Luas Wilayah (Km2) Berdasarkan RDTR	Kepadatan Penduduk per Km2 (Berdasar RDTR)
Padang Hulu	34.313	8,36	4.104,4
Tebing Tinggi Kota	23.702	2,62	9.046,6
Rambutan	40.354	7,27	5.550,8
Bajenis	40.532	9,61	4.217,7
Padang Hilir	42.076	11,31	3.720,2
Total	180.977	39,17	4.620,3

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi diperkirakan mencapai 182.968 jiwa. Proyeksi ini menunjukkan adanya kenaikan yang konsisten dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang sejalan dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di kota ini. Pertumbuhan penduduk yang stabil ini merupakan indikator positif yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang, sekaligus menandakan adanya kebutuhan yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik, fasilitas sosial, dan lapangan kerja. Selanjutnya, proyeksi penduduk pada tahun 2030 menunjukkan lonjakan menjadi 191.737 jiwa, yang berarti terjadi pertumbuhan sekitar 4,8% dari tahun 2025. Angka ini menegaskan bahwa Kota Tebing Tinggi akan menghadapi tantangan sekaligus peluang yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pembangunan daerah.

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu fenomena bonus demografi yang diperkirakan akan dialami Kota Tebing Tinggi pada tahun 2030. Bonus demografi adalah kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia). Kondisi ini memberikan peluang besar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi apabila diiringi dengan kebijakan yang tepat, terutama dalam hal peningkatan keterampilan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan sarana serta prasarana pendukung. Dengan kata lain, bonus demografi dapat menjadi modal utama untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, asalkan dikelola dengan baik.

Namun, bonus demografi juga membawa tantangan yang tidak kalah penting. Pertama, peningkatan jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai agar tidak menimbulkan pengangguran dan masalah sosial lainnya. Kedua, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, infrastruktur dan fasilitas publik seperti transportasi, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan harus dikembangkan secara merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Jika tantangan-tantangan ini tidak diatasi dengan baik, potensi bonus demografi justru dapat berubah menjadi beban yang memperlambat pembangunan.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, data dan proyeksi penduduk ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan dan program

pembangunan yang responsif terhadap dinamika demografi. RPJMD harus mengarahkan kebijakan pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan, misalnya melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. Selain itu, peningkatan produktivitas tenaga kerja harus didukung dengan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan teknis.

Selanjutnya, RPJMD perlu menitikberatkan pada pengembangan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas, seperti transportasi publik yang efisien, jaringan jalan yang memadai, serta fasilitas perumahan yang layak dan terjangkau. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan juga harus menjadi prioritas agar kualitas hidup masyarakat meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Program-program sosial yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat juga penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Selain itu, RPJMD harus mengintegrasikan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sehingga pertumbuhan penduduk dan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana dan pengembangan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan yang mendukung keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan.

Penting juga untuk menekankan bahwa data proyeksi penduduk dan analisis demografi harus selalu diperbarui dan divalidasi dengan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan dalam RPJMD tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan dinamika penduduk dan kondisi sosial-ekonomi yang berkembang.

Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk Kota Tebing Tinggi yang diperkirakan mencapai 182.968 jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 191.737 jiwa pada tahun 2030 merupakan gambaran nyata dari dinamika demografi yang harus dikelola secara strategis. Bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 memberikan peluang emas untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial, asalkan didukung dengan kebijakan yang tepat dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur yang memadai.

Oleh karena itu, RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 harus menjadi dokumen perencanaan yang visioner dan komprehensif, yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan secara sinergis. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi dapat memanfaatkan momentum bonus demografi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Komitmen pemerintah daerah, kolaborasi dengan sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi tersebut.

Sebagai penutup, pengelolaan pertumbuhan penduduk dan bonus demografi bukan hanya

soal angka dan statistik, melainkan juga tentang bagaimana membangun manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, Kota Tebing Tinggi dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mengoptimalkan potensi demografi untuk kemajuan bersama.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, pemahaman mendalam tentang karakteristik kesejahteraan ekonomi sangat penting untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran. Kesejahteraan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari distribusi pendapatan, tingkat kemiskinan, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, indikator-indikator ekonomi yang saling terkait harus dianalisis secara komprehensif agar pembangunan yang direncanakan dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menggambarkan seberapa cepat perekonomian daerah berkembang dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data BPS Kota Tebing Tinggi, selama periode 2020-2023, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5% per tahun, meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Sektor-sektor utama yang mendorong pertumbuhan ini meliputi sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi di kota tersebut. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesejahteraan merata jika tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang adil dan penyerapan tenaga kerja yang optimal.

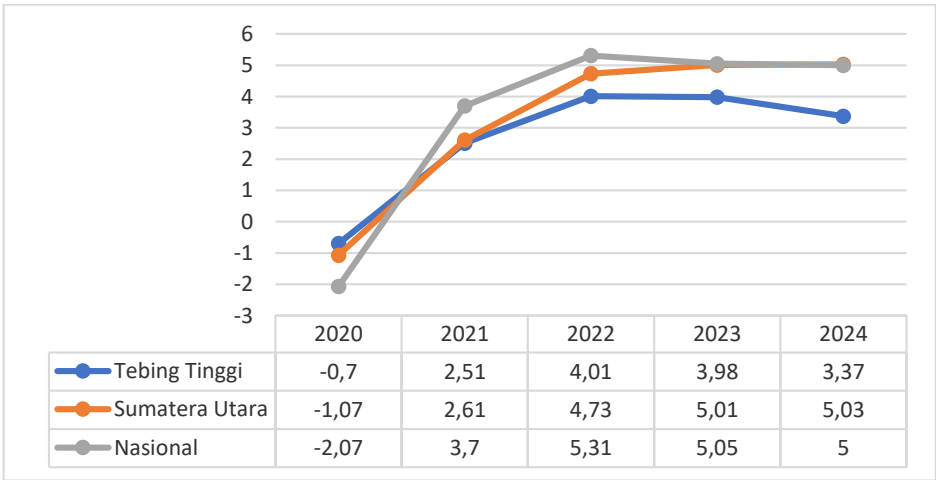
a. Pertumbuhan Ekonomi

- Pertumbuhan PDRB**

Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2024 tumbuh sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan pada Tahun 2023 yang sebesar 3,98 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha industri pengolahan yang 2 tahun terakhir mengalami kontraksi hingga -1,92 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 industri besar pabrik pengolahan karet di Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 perusahaan tidak dapat beroperasi lagi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 sebesar 3,98 persen, turun sebesar 0,51 persen di tahun 2024 menjadi 3,37 persen. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,03 persen dan 5,00 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024



Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2024 mencapai peningkatan menjadi 4.499,55 miliar rupiah. Dibandingkan tahun 2023 sebesar 4.352,75 miliar rupiah, mengalami peningkatan sebesar 146,80 miliar rupiah. Dalam 5 tahun terakhir PDRB Kota Tebing Tinggi berada pada tren peningkatan. PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha pada di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Dari Tabel berikut ini dapat diperoleh perkembangan PDRB Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan, tetapi pemulihan yang signifikan terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa menunjukkan potensi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan. Namun, tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian global perlu dihadapi dengan strategi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.

Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Tebing Tinggi memiliki potensi untuk menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat di Indonesia. Berikut ini tabel PDRB Kota Tebing Tinggi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2020- 2024 Kota tebing Tinggi seperti terlihat dibawah ini:



Tabel 2.8

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	56,81	57,13	59,33	61,18	61,42
B	Pertambangan dan Penggalian	6,65	6,89	7,14	7,47	7,60
C	Industri Pengolahan	492,19	500,45	506,61	503,92	494,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,88	8,18	8,55	8,61	8,79
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,34	9,40	9,72	9,92	10,14
F	Konstruksi	561,39	585,59	598,49	615,50	623,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	930,67	967,98	1.007,66	1.050,01	1.116,32
H	Transportasi dan Pergudangan	314,97	317,77	347,42	368,52	377,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176,37	176,03	190,15	200,50	213,36
J	Informasi dan Komunikasi	111,61	118,94	130,06	140,64	148,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	187,70	198,61	206,88	217,69	226,67
L	Real Estate	322,81	323,90	339,06	351,94	363,59
M,N	Jasa Perusahaan	16,74	16,77	17,76	19,19	19,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	397,65	398,56	398,91	411,69	426,44
P	Jasa Pendidikan	245,91	250,91	263,25	283,15	293,48
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	48,17	47,40	51,62	55,06	57,68
R,S,T, U	Jasa Lainnya	39,54	40,26	43,69	47,75	50,71
Produk Domestik Regional Bruto		3.926,39	4.024,78	4.186,31	4.352,75	4.499,55

Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025



Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	78,16	79,22	86,86	93,29	97,54
B	Pertambangan dan Penggalian	8,52	8,96	9,66	10,43	10,69
C	Industri Pengolahan	724,73	776,01	850,47	853,69	860,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	9,12	9,71	9,97	10,20
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,79	13,99	14,61	15,16	15,62
F	Konstruksi	860,09	919,98	1.004,61	1.089,53	1.114,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.453,71	1.552,48	1.710,78	1.847,66	2.019,47
H	Transportasi dan Pergudangan	486,66	505,27	566,28	625,59	659,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	241,13	241,13	264,74	283,68	309,56
J	Informasi dan Komunikasi	122,43	133,88	150,75	164,19	174,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	300,38	331,40	371,30	397,55	421,43
L	Real Estat	515,02	530,97	561,72	585,94	612,28
M,N	Jasa Perusahaan	27,87	28,70	32,36	36,38	38,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	697,20	698,27	737,07	800,74	876,77
P	Jasa Pendidikan	386,58	395,68	418,79	457,51	483,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,51	69,93	78,87	87,23	93,93
R,S, T,U	Jasa Lainnya	53,65	54,97	61,69	69,76	75,98
Produk Domestik Regional Bruto		6.049,20	6.349,90	6.930,27	7.428,29	7,875,11

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Dari Tabel di atas diketahui Ekonomi Kota Tebing Tinggi tahun 2024 tumbuh sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2023 yang sebesar 3,98 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha industri pengolahan yang 2 tahun terakhir mengalami kontraksi hingga -1,92 persen pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 industri besar pabrik pengolahan karet di Kota Tebing Tinggi sebanyak 2 (dua) perusahaan tidak dapat beroperasi lagi.

Lapangan usahan yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,41 persen; serta lapangan Usaha



Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,31 persen; diikuti Lapangan Usaha lainnya sebesar 6,20 persen; dan Lapangan Usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,36 persen.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,32	0,57	3,85	3,11	0,38
B	Pertambangan dan Penggalian	3,84	3,60	3,60	4,57	1,83
C	Industri Pengolahan	-0,27	1,68	1,23	-0,53	-1,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,11	3,76	4,54	0,69	2,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-0,42	0,59	3,44	2,06	2,22
F	Konstruksi	-5,92	4,31	2,20	2,84	1,33
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,39	4,01	4,10	4,20	6,31
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,69	0,89	9,33	6,07	2,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,28	-0,19	8,02	5,44	6,41
J	Informasi dan Komunikasi	7,27	6,58	9,35	8,14	5,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,91	5,81	4,16	5,23	4,12
L	Real Estat	1,99	0,34	4,68	3,80	3,31
M,N	Jasa Perusahaan	-0,60	0,21	5,88	8,04	3,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,45	0,23	0,09	3,20	3,58
P	Jasa Pendidikan	1,62	2,03	4,92	7,56	3,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0,99	-1,60	8,91	6,67	4,75
R,S, T,U	Jasa Lainnya	-0,99	1,83	8,51	9,30	6,20
Produk Domestik Regional Bruto		-0,70	2,51	4,01	3,98	3,37

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Dari tabel diatas perkembangan laju pertumbuhan PDRB Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan, tetapi pemulihan yang signifikan terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa menunjukkan potensi yang baik untuk pertumbuhan di masa depan. Namun, tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian global perlu dihadapi dengan strategi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.

Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan



beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Tebing Tinggi memiliki potensi untuk menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat di Indonesia.

Tabel 2.11
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024 (persen)

Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,29	1,25	1,25	1,26	1,24
B	Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
C	Industri Pengolahan	11,98	12,22	12,27	11,49	10,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,23	0,22	0,21	0,20	0,20
F	Konstruksi	14,22	14,49	14,49	14,67	14,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,03	24,45	24,68	24,87	25,64
H	Transportasi dan Pergudangan	8,05	7,96	8,17	8,42	8,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,99	3,80	3,83	3,82	3,93
J	Informasi dan Komunikasi	2,02	2,11	2,17	2,21	2,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,97	5,22	5,36	5,35	5,35
L	Real Estat	8,51	8,36	8,10	7,89	7,77
M,N	Jasa Perusahaan	0,46	0,45	0,47	0,49	0,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	11,53	11,00	10,63	10,78	11,13
P	Jasa Pendidikan	6,39	6,23	6,04	6,16	6,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,10	1,14	1,17	1,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,89	0,87	0,89	0,94	0,96
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Dari Tabel diatas distribusi persentase PDRB Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa menunjukkan potensi yang baik untuk pertumbuhan

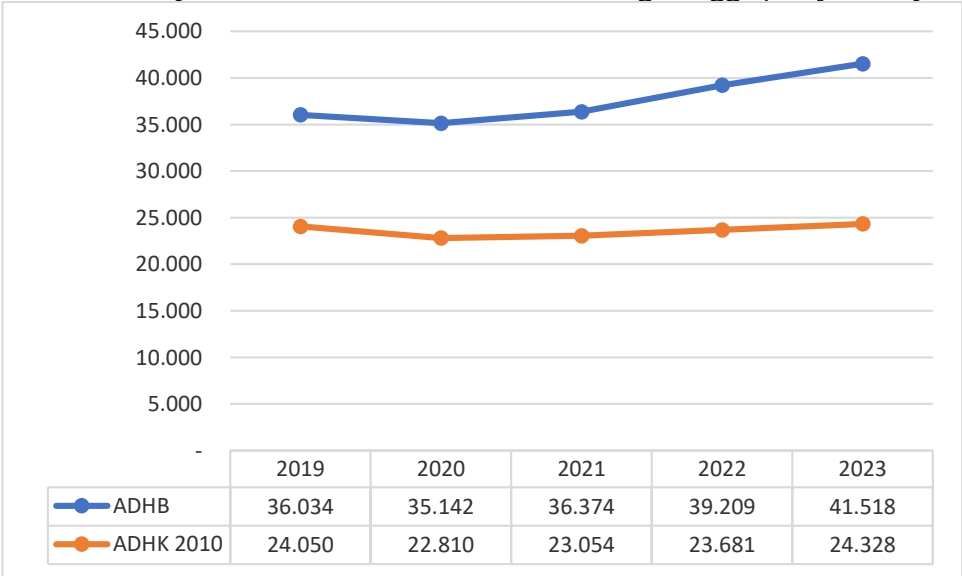
di masa depan. Namun, tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian global perlu dihadapi dengan strategi yang tepat agar pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan.

Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan akan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Tebing Tinggi memiliki potensi untuk menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat di Indonesia.

B. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan penduduk suatu daerah. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. PDRB Perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kesejahteraan dan tingkat pembangunan di suatu wilayah. Maka dari itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Gambar 2.3
PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023 Kota Tebing Tinggi (Milyar Rupiah)



Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Dari data diatas diperoleh PDRB Per Kapita Atas Harga Berlaku Kota Tebing Tinggi pada tahun 2023 sebesar Rp.41.518.749,52 per jiwa per tahun. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.24.328.718,37 per jiwa per tahun. Hal tersebut menggambarkan bahwa peningkatan nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di Kota Tebing Tinggi lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2023. Secara umum dapat terlihat bahwa PDRB per kapita di Kota Tebing Tinggi tahun 2019-2023 mengalami tren yang positif, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19, tetapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023.

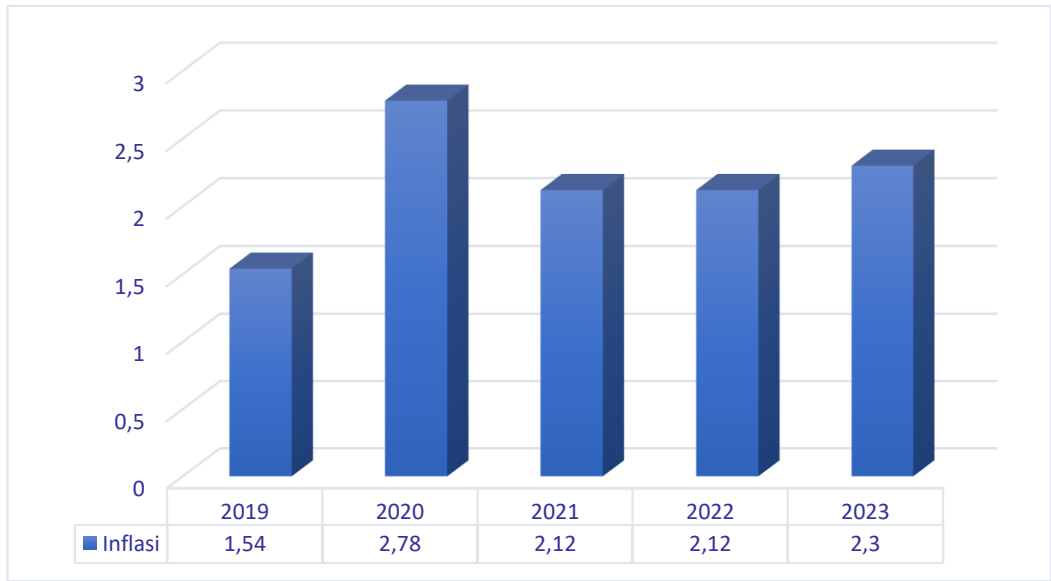
C. Laju Inflasi

Salah satu faktor fundamental dalam Indikator Makro Ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Tebing Tinggi adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Karena inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan faktor konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi.

Untuk mengetahui besaran inflasi digunakan data Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dapat mengukur kenaikan harga-harga yang terlingat meningkat dari tahun ke tahun. Angka inflasi Kota Tebing Tinggi menggunakan angka inflasi Kota Pematang Siantar yang merupakan *sister city* dari kota Tebing Tinggi. Angka inflasi di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022 mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu sebesar 6,16 persen. Namun di tahun 2023 inflasi kembali normal sebesar 2,30.

Gambar 2.4
Nilai Inflasi Kota Tebing Tinggi 2019-2023



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

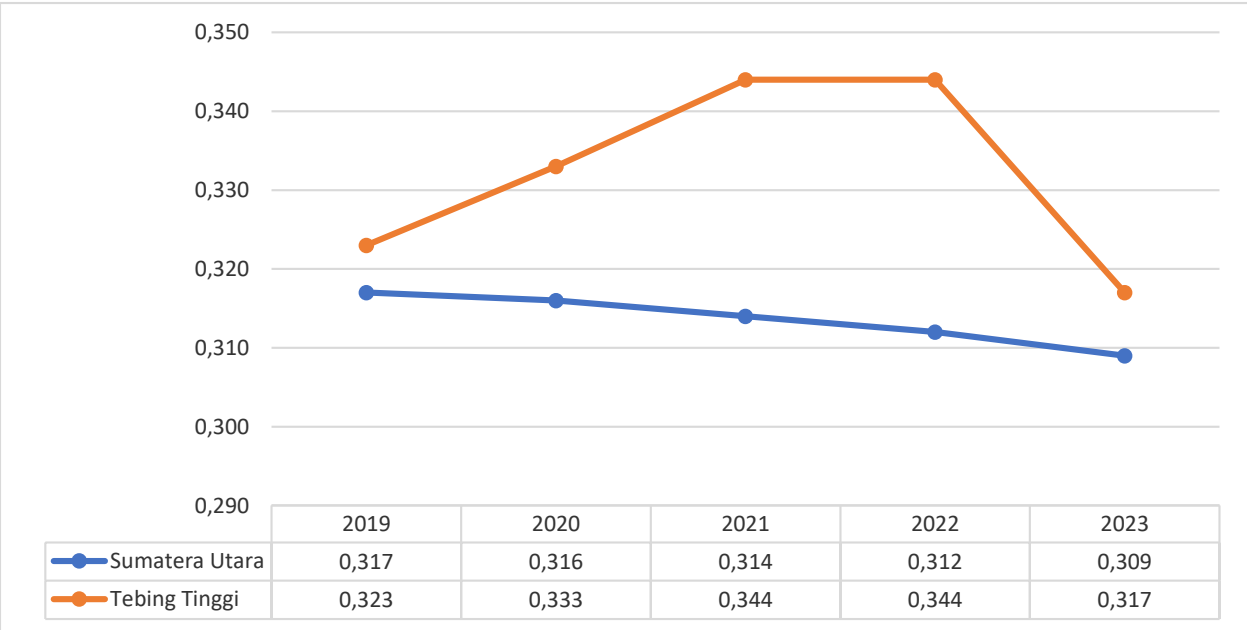
D. Gini Ratio

Gini Ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.. Sehingga teori ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi pemerataan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tebing Tinggi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah

penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- $0,00 < G < 0,35 \rightarrow$ Pemerataan tinggi/ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50 \rightarrow$ Pemerataan/ketimpangan sedang
- $G > 0,50 \rightarrow$ Pemerataan rendah/ketimpangan tinggi.

Gambar 2.5
Gini Ratio Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Secara umum dalam kurun waktu lima Tahun terakhir, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Tebing Tinggi berada di bawah 0,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berada pada tingkat ketimpangan rendah, atau dapat dikatakan distribusi pendapatannya cukup merata. Gini Ratio Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 mencapai angka 0,317 lebih tinggi dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara. Kondisi ketimpangan pendapatan Kota Tebing Tinggi tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 meskipun masih tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah dan lebih tinggi dibandingkan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Utara.

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental yang menjadi pondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan di setiap daerah, termasuk Kota Tebing Tinggi. Konsep "Kesehatan untuk Semua" menegaskan pentingnya akses dan kualitas layanan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali, mencakup seluruh siklus hidup mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Konsep ini juga menuntut pemerataan layanan kesehatan di seluruh wilayah kota, baik di pusat kota maupun di daerah pinggiran atau terpencil, serta menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi gender, usia, status sosial, maupun ekonomi.

Dengan demikian, kesehatan tidak hanya menjadi hak dasar setiap individu, tetapi juga menjadi indikator utama kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai kondisi kesehatan masyarakat sangat penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. RPJMD harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan yang mencakup pencegahan, pengobatan, pemulihan, serta promosi kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional yang menekankan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi dan sumber resmi lainnya selama periode 2020-2025, kondisi kesehatan masyarakat di kota ini menunjukkan tren perbaikan yang positif pada berbagai indikator utama. Usia harapan hidup yang meningkat, indeks keluarga sehat yang membaik, penurunan prevalensi stunting, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta perluasan akses sanitasi dan air bersih menjadi bukti nyata kemajuan yang telah dicapai. Namun, tantangan signifikan masih ada, terutama dalam hal pemerataan layanan kesehatan dan penurunan angka stunting yang masih relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Oleh karena itu, narasi ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan masyarakat Kota Tebing Tinggi, sekaligus menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD 2025-2029.

Kesehatan yang mencakup seluruh penduduk, seluruh siklus hidup, seluruh wilayah, dan seluruh kelompok masyarakat merupakan landasan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri, dan bermartabat. Dengan demikian, pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada aspek medis semata, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya yang saling terkait. Pendekatan holistik ini menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang kompleks dan memastikan bahwa setiap warga Kota Tebing Tinggi dapat menikmati kualitas hidup yang optimal tanpa terkecuali.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 harus menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan dan program yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, mengurangi kesenjangan kesehatan antar wilayah dan kelompok sosial, serta meningkatkan kapasitas sistem kesehatan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mewujudkan kesehatan untuk semua sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

a) **Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Tebing Tinggi**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi suatu daerah. UHH mengukur rata-rata

lama hidup yang diharapkan sejak lahir dalam kondisi kesehatan yang baik, sehingga menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan sistem kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Peningkatan usia harapan hidup menunjukkan kemajuan dalam pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, pengendalian penyakit, serta peningkatan kondisi sosial ekonomi yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren positif dalam peningkatan usia harapan hidup selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, usia harapan hidup di Kota Tebing Tinggi tercatat sebesar 69,8 tahun. Angka ini mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai 71,2 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan signifikan dalam berbagai aspek kesehatan masyarakat, termasuk akses dan mutu layanan kesehatan, peningkatan gizi, serta kondisi lingkungan yang lebih sehat. Selain itu, faktor sosial ekonomi seperti peningkatan pendapatan dan pendidikan juga berkontribusi pada peningkatan usia harapan hidup ini.

Perbedaan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan juga menjadi perhatian penting. Data menunjukkan bahwa perempuan di Kota Tebing Tinggi memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 72,5 tahun pada tahun 2023, sementara laki-laki sekitar 69,8 tahun. Fenomena ini sejalan dengan tren nasional dan global yang menunjukkan bahwa perempuan cenderung memiliki usia hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh faktor biologis, perilaku hidup sehat, serta tingkat risiko penyakit yang berbeda antara kedua jenis kelamin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan usia harapan hidup di Kota Tebing Tinggi meliputi perbaikan layanan kesehatan dasar seperti peningkatan cakupan imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, peningkatan status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil, turut berperan penting dalam memperpanjang usia harapan hidup. Kondisi sosial ekonomi yang membaik, termasuk peningkatan pendidikan dan pendapatan, juga memberikan dampak positif terhadap pola hidup sehat dan akses terhadap layanan kesehatan.

Peningkatan usia harapan hidup memiliki implikasi yang luas terhadap kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah. Dengan usia harapan hidup yang lebih tinggi, masyarakat Kota Tebing Tinggi berpotensi memiliki produktivitas yang lebih lama dan kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini juga menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan sistem pelayanan kesehatan yang mampu mengakomodasi kebutuhan kesehatan populasi yang menua, termasuk layanan kesehatan lansia dan pencegahan penyakit kronis. Selain itu, peningkatan usia harapan hidup harus diiringi dengan peningkatan kualitas hidup agar masyarakat tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga hidup dengan sehat dan produktif.

Dalam konteks RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, peningkatan usia harapan hidup menjadi salah satu target utama yang harus dicapai melalui berbagai program kesehatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat sistem kesehatan,

meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup, seluruh wilayah, dan seluruh kelompok masyarakat, sehingga mendukung pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

b) Indeks Keluarga Sehat (IKS) dan Peranannya

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat kesehatan keluarga secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, status gizi anggota keluarga, serta perilaku hidup sehat yang dijalankan dalam lingkungan keluarga. IKS menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan program kesehatan keluarga dan efektivitas intervensi kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Indeks ini tidak hanya mencerminkan kondisi kesehatan fisik, tetapi juga mencakup aspek pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup keluarga secara holistik.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa Indeks Keluarga Sehat mengalami peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, IKS tercatat sebesar 68,5, kemudian meningkat menjadi 72,0 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program kesehatan keluarga yang telah dijalankan secara konsisten dan terintegrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Faktor utama yang mendorong peningkatan IKS ini antara lain adalah peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti posyandu, puskesmas, dan klinik kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat.

Komponen utama yang membentuk IKS meliputi cakupan imunisasi lengkap pada anak, pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan profesional, pemberian makanan tambahan bergizi, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan keluarga. Selain itu, status gizi anggota keluarga, terutama balita dan ibu hamil, menjadi fokus utama dalam pengukuran IKS karena gizi yang baik sangat berperan dalam mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Perilaku hidup sehat seperti kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, penggunaan jamban sehat, dan konsumsi makanan bergizi juga menjadi indikator penting yang mempengaruhi nilai IKS.

Dampak positif dari peningkatan Indeks Keluarga Sehat sangat luas dan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Tebing Tinggi. Keluarga yang sehat cenderung memiliki anggota yang produktif, mampu berkontribusi secara optimal dalam kegiatan sosial dan ekonomi, serta memiliki risiko lebih rendah terhadap penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan IKS juga berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan anak karena anak yang sehat lebih mampu mengikuti proses belajar dengan baik.

Pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan berbagai program yang berkontribusi pada peningkatan IKS, antara lain program posyandu yang rutin digelar di seluruh

kelurahan, program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, serta kampanye PHBS yang melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat. Selain itu, program peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, seperti pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang didampingi tenaga kesehatan profesional, juga menjadi prioritas utama. Pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui edukasi kesehatan dan pemberdayaan keluarga agar mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan secara mandiri.

Keberhasilan peningkatan Indeks Keluarga Sehat ini menjadi modal penting dalam mewujudkan kesehatan untuk semua di Kota Tebing Tinggi. Namun, tantangan masih ada, terutama dalam menjangkau keluarga di wilayah terpencil dan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses dan pengetahuan kesehatan. Oleh karena itu, dalam RPJMD 2025-2029, perlu adanya penguatan program kesehatan keluarga yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, peningkatan kapasitas kader kesehatan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan edukasi dan layanan kesehatan.

Dengan terus meningkatkan Indeks Keluarga Sehat, Kota Tebing Tinggi dapat memastikan bahwa setiap keluarga memiliki fondasi kesehatan yang kuat, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan. Kesehatan keluarga yang baik akan menjadi pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif, sejahtera, dan bermartabat, sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029.

c) **Prevalensi Stunting dan Upaya Penanggulangan**

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dari standar usia akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan. Stunting menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu daerah karena anak yang mengalami stunting cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit, penurunan kemampuan intelektual, dan keterbatasan dalam berkontribusi secara optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Di Kota Tebing Tinggi, prevalensi stunting selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan, meskipun angka tersebut masih relatif tinggi dan menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan kesehatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi, prevalensi stunting pada tahun 2020 tercatat sebesar 28,5%. Angka ini menurun secara bertahap menjadi 22,0% pada tahun 2023. Penurunan ini merupakan hasil dari berbagai intervensi gizi dan kesehatan yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk program pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, edukasi gizi kepada keluarga, serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan ibu dan anak. Meskipun demikian, angka stunting di Kota Tebing Tinggi masih berada di atas rata-rata nasional yang sekitar 19%, sehingga penanggulangan stunting tetap menjadi prioritas utama dalam RPJMD 2025-2029.

Penurunan prevalensi stunting ini tidak lepas dari upaya terpadu yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan masyarakat. Program intervensi gizi yang berfokus pada peningkatan asupan gizi ibu hamil dan anak balita, seperti suplementasi zat besi, vitamin A, serta pemberian makanan tambahan bergizi, telah memberikan dampak positif. Selain itu, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang lebih merata juga berkontribusi dalam menurunkan risiko stunting. Edukasi dan penyuluhan mengenai pola asuh dan gizi seimbang kepada keluarga menjadi bagian penting dalam mengubah perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat.

Namun, tantangan dalam penanggulangan stunting di Kota Tebing Tinggi masih cukup kompleks. Kesenjangan akses layanan kesehatan dan gizi antara wilayah pusat dan daerah pinggiran atau terpencil masih menjadi kendala utama. Beberapa kelompok masyarakat rentan, terutama keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai. Faktor sosial budaya, seperti kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pola asuh yang tepat, juga turut mempengaruhi tingginya angka stunting. Selain itu, kondisi sanitasi dan air bersih yang belum merata turut berkontribusi pada tingginya risiko infeksi yang dapat memperburuk status gizi anak.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 perlu menempatkan penanggulangan stunting sebagai salah satu prioritas utama dengan strategi yang lebih terintegrasi dan berbasis bukti. Penguatan program gizi yang menasar ibu hamil, balita, dan keluarga rentan harus terus ditingkatkan, termasuk melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi dan pola asuh yang benar harus diperluas dengan melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan. Selain itu, peningkatan akses dan kualitas sanitasi serta air bersih harus menjadi bagian integral dari upaya penurunan stunting untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat memperburuk status gizi anak.

Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif juga sangat penting untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Data yang akurat dan terkini mengenai status gizi dan faktor risiko stunting harus menjadi dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Kolaborasi lintas sektor antara dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas sosial, serta lembaga swadaya masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi program yang optimal.

Dengan upaya yang terencana dan komprehensif, diharapkan prevalensi stunting di Kota Tebing Tinggi dapat terus menurun secara signifikan hingga mencapai atau bahkan berada di bawah rata-rata nasional. Penurunan stunting yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penanggulangan stunting harus menjadi fokus utama dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 sebagai bagian dari komitmen untuk mewujudkan kesehatan untuk semua yang inklusif dan berkelanjutan.

d) **Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan Implikasinya**

Cakupan imunisasi dasar lengkap merupakan salah satu indikator kesehatan yang sangat penting dalam upaya pencegahan penyakit menular pada anak-anak. Imunisasi berperan sebagai perlindungan utama terhadap berbagai penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian atau kecacatan permanen, seperti polio, campak, difteri, tetanus, dan tuberkulosis. Dengan cakupan imunisasi yang tinggi dan merata, risiko wabah penyakit menular dapat ditekan secara signifikan, sehingga mendukung terciptanya generasi yang sehat dan produktif.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kota Tebing Tinggi tercatat sekitar 75%. Angka ini meningkat menjadi 85% pada tahun 2023, menandakan kemajuan yang positif dalam pelaksanaan program imunisasi di tingkat daerah. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program imunisasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi juga meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan anak.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang menghalangi pencapaian cakupan imunisasi yang optimal, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kelompok masyarakat rentan. Faktor geografis seperti akses yang sulit ke fasilitas kesehatan, keterbatasan tenaga kesehatan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang imunisasi menjadi tantangan utama. Selain itu, adanya mitos dan informasi keliru mengenai imunisasi juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam program imunisasi. Kondisi pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 juga sempat mengganggu pelaksanaan imunisasi rutin akibat pembatasan mobilitas dan kekhawatiran masyarakat terhadap kunjungan ke fasilitas kesehatan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi telah mengimplementasikan berbagai strategi dan program yang bertujuan meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap secara merata. Salah satu upaya utama adalah memperkuat layanan imunisasi melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan vaksin yang memadai, serta penguatan sistem pencatatan dan pelaporan imunisasi. Program imunisasi juga didukung dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan media massa untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat imunisasi.

Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan pendekatan jemput bola dengan mengadakan imunisasi di posyandu, sekolah, dan tempat-tempat strategis lainnya untuk menjangkau anak-anak yang sulit mengakses fasilitas kesehatan. Pendekatan ini sangat efektif dalam menjangkau wilayah terpencil dan kelompok rentan, sehingga cakupan imunisasi dapat diperluas secara signifikan. Kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan dinas pendidikan dan organisasi masyarakat sipil, juga menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan program imunisasi.

Dampak positif dari peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap sangat besar bagi kesehatan masyarakat Kota Tebing Tinggi secara luas. Dengan semakin banyak anak yang terlindungi dari penyakit menular, angka kematian bayi dan balita dapat ditekan, serta beban penyakit menular di masyarakat dapat dikurangi. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan produktivitas generasi muda, yang pada gilirannya mendukung pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap harus menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat program imunisasi dengan pendekatan yang inovatif dan inklusif, memastikan bahwa seluruh anak di Kota Tebing Tinggi, tanpa terkecuali, mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal yang direkomendasikan. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi juga penting untuk memastikan cakupan imunisasi yang akurat dan intervensi yang tepat sasaran. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup, seluruh wilayah, dan seluruh kelompok masyarakat, serta mendukung pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Akses sanitasi yang layak dan air bersih merupakan faktor krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan lingkungan. Sanitasi yang baik membantu mengurangi risiko penularan penyakit menular seperti diare, kolera, dan infeksi cacing, yang sangat berpengaruh pada kesehatan anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Begitu pula, ketersediaan air bersih yang memadai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, termasuk minum, memasak, dan menjaga kebersihan pribadi serta lingkungan sekitar.

Di Kota Tebing Tinggi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan akses sanitasi dan air bersih selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, sekitar 70% rumah tangga di kota ini telah memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak, dan angka ini meningkat menjadi 78% pada tahun 2023. Sementara itu, akses terhadap air bersih juga mengalami peningkatan dari 80% pada tahun 2020 menjadi 85% pada tahun 2023. Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai program pembangunan infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk pembangunan jaringan pipa air bersih, sumur bor, serta fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan.

Meskipun terjadi kemajuan, masih terdapat kesenjangan akses sanitasi dan air bersih antar wilayah di Kota Tebing Tinggi. Wilayah pinggiran dan daerah dengan tingkat ekonomi rendah cenderung memiliki akses yang lebih terbatas dibandingkan dengan pusat kota. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kesehatan yang merata bagi seluruh penduduk, karena ketimpangan akses dapat memperbesar risiko penyakit dan menurunkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang kurang terlayani. Selain itu, kelompok masyarakat rentan seperti keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan dalam memperoleh akses sanitasi dan air bersih yang memadai.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah menginisiasi berbagai program untuk memperluas dan meratakan akses sanitasi dan air bersih. Program-program tersebut meliputi pembangunan dan rehabilitasi sarana sanitasi di permukiman padat penduduk, penyediaan air bersih melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), serta kampanye kesehatan lingkungan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan penggunaan fasilitas sanitasi yang benar. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas dan pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Pemerataan akses sanitasi dan air bersih sangat penting untuk mendukung prinsip kesehatan untuk semua, karena tanpa akses yang merata, kelompok masyarakat tertentu akan terus mengalami kerentanan terhadap penyakit dan kesenjangan kesehatan. Oleh karena itu, dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, perlu ada fokus yang lebih besar pada pengentasan kesenjangan akses ini dengan memperkuat investasi infrastruktur, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan koordinasi antar sektor terkait. Upaya ini harus didukung dengan sistem pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati fasilitas sanitasi dan air bersih yang layak, sehingga kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat secara signifikan.

Tabel 2.12
Indikator Kesehatan Utama Tahun 2020-2030 Kota Tebing Tinggi

Indikator Kesehatan Utama	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tren 2020-2023
Usia Harapan Hidup (tahun)	69,8	70,3	70,7	71,2	Meningkat secara bertahap
Indeks Keluarga Sehat (IKS)	68,5	69,8	70,9	72,0	Peningkatan konsisten
Prevalensi Stunting (%)	28,5	26,7	24,3	22,0	Penurunan signifikan namun masih tinggi
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (%)	75	78	82	85	Peningkatan cakupan imunisasi
Akses Sanitasi Layak (%)	70	73	75	78	Peningkatan akses sanitasi
Akses Air Bersih (%)	80	82	83	85	Peningkatan akses air bersih

Tabel di atas merangkum perkembangan indikator kesehatan utama di Kota Tebing Tinggi selama periode 2020 hingga 2023. Data menunjukkan tren positif pada hampir seluruh indikator, yang mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya peningkatan kesehatan

masyarakat. Usia harapan hidup meningkat secara bertahap, menandakan perbaikan kualitas layanan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi. Indeks Keluarga Sehat juga menunjukkan peningkatan, yang mencerminkan keberhasilan program kesehatan keluarga dan peningkatan perilaku hidup sehat.

Penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan menjadi indikator penting dalam upaya peningkatan gizi dan kesehatan anak, meskipun angka ini masih perlu ditekan lebih jauh agar mendekati atau di bawah rata-rata nasional. Cakupan imunisasi dasar lengkap meningkat secara konsisten, yang sangat penting dalam pencegahan penyakit menular pada anak-anak. Akses sanitasi layak dan air bersih juga mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses di seluruh wilayah kota.

Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, dengan fokus pada penguatan program kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Korelasi antar indikator kesehatan utama di Kota Tebing Tinggi menunjukkan hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dalam membentuk kondisi kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan usia harapan hidup, misalnya, tidak dapat dilepaskan dari perbaikan Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang mencerminkan akses dan kualitas layanan kesehatan keluarga, status gizi yang lebih baik, serta perilaku hidup sehat yang diterapkan secara luas. Keluarga yang sehat dengan akses layanan kesehatan memadai cenderung memiliki anak-anak yang tumbuh optimal, yang pada gilirannya menurunkan prevalensi stunting dan meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap.

Penurunan prevalensi stunting yang signifikan selama periode 2020-2023 berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan usia harapan hidup. Anak-anak yang bebas dari stunting memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat dan produktif, sehingga memperkuat fondasi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, cakupan imunisasi dasar lengkap yang meningkat secara konsisten membantu mencegah penyakit menular yang dapat mengancam kesehatan anak dan menurunkan angka kematian bayi dan balita, yang juga berdampak positif pada usia harapan hidup.

Akses sanitasi dan air bersih yang semakin membaik turut memperkuat indikator-indikator kesehatan lainnya. Sanitasi yang layak dan air bersih yang cukup mengurangi risiko penyakit infeksi yang sering menjadi penyebab utama stunting dan gangguan kesehatan lainnya. Dengan demikian, peningkatan akses sanitasi dan air bersih tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga mendukung keberhasilan program gizi dan imunisasi.

Hubungan sinergis antar indikator ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan di Kota Tebing Tinggi. Upaya peningkatan kesehatan tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral, melainkan harus melibatkan berbagai aspek mulai dari pelayanan kesehatan keluarga, gizi, imunisasi, hingga sanitasi dan lingkungan hidup. Pendekatan yang komprehensif ini akan memastikan bahwa setiap

intervensi saling melengkapi dan memperkuat, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal dan berkelanjutan.

Dalam konteks RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, pemahaman korelasi antar indikator kesehatan ini menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan berbagai program kesehatan dengan pendekatan lintas sektor, melibatkan dinas kesehatan, pendidikan, sosial, serta partisipasi aktif masyarakat. Penguatan sistem data dan monitoring juga sangat diperlukan untuk memantau perkembangan indikator secara real time dan menyesuaikan intervensi sesuai kebutuhan.

Dengan strategi yang terkoordinasi dan berbasis bukti, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup, seluruh wilayah, dan seluruh kelompok masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi generasi masa depan yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan visi kesehatan untuk semua dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, diperlukan strategi kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi guna mengatasi berbagai tantangan kesehatan yang masih dihadapi masyarakat. Prioritas utama adalah penguatan program kesehatan ibu dan anak, yang menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka kematian serta stunting. Program-program ini harus difokuskan pada peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan dasar, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman, pemberian makanan tambahan bergizi, serta edukasi gizi dan pola asuh yang benar. Dengan demikian, diharapkan penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup generasi muda Kota Tebing Tinggi.

Selain itu, peningkatan mutu layanan kesehatan dasar menjadi aspek krusial yang harus terus diperkuat. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, fasilitas kesehatan yang memadai, serta distribusi layanan yang merata hingga ke wilayah terpencil. Pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi informasi, seperti telemedicine dan sistem informasi kesehatan digital, dapat menjadi solusi untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sulit diakses. Mutu layanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan mendorong partisipasi aktif dalam program-program kesehatan.

Pemerataan akses sanitasi dan air bersih juga menjadi fokus kebijakan yang tidak kalah penting. Ketersediaan sanitasi layak dan air bersih yang merata di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi akan mengurangi risiko penyakit menular dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah pinggiran dan kelompok rentan. Pemerintah daerah harus mengintensifkan pembangunan infrastruktur sanitasi dan penyediaan air bersih, serta mengintegrasikan program kesehatan lingkungan dengan program kesehatan masyarakat lainnya.

Pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi dan air bersih perlu diperkuat agar keberlanjutan program dapat terjaga.

Pengembangan sistem data dan monitoring kesehatan yang akurat dan real-time menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas kebijakan dan program kesehatan. Pemerintah daerah harus membangun sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, mampu memantau perkembangan indikator kesehatan utama, serta memberikan data yang dapat digunakan untuk evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan. Sistem ini juga harus mampu mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan efisien.

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi pilar utama dalam membangun kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kesehatan. Program edukasi kesehatan yang berkelanjutan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk kader kesehatan, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan media massa. Pemberdayaan komunitas melalui pelatihan, penyuluhan, dan fasilitasi akses informasi kesehatan akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola kesehatan keluarga dan lingkungan secara mandiri. Hal ini akan memperkuat upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Terakhir, kebijakan kesehatan harus menempatkan pengurangan kesenjangan kesehatan antar wilayah dan kelompok sosial sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan akses layanan kesehatan yang dialami oleh kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan penduduk di wilayah terpencil. Pendekatan inklusif dan berbasis keadilan sosial harus menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam menikmati layanan kesehatan yang berkualitas.

Dengan mengimplementasikan strategi kebijakan tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 dapat mewujudkan kesehatan untuk semua yang mencakup seluruh siklus hidup, seluruh wilayah, dan seluruh kelompok masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan, sehingga Kota Tebing Tinggi dapat menjadi kota yang sehat, produktif, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Kesimpulan dan Harapan untuk Kesehatan yang Merata dan Inklusif

Kondisi kesehatan masyarakat Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2025 menunjukkan kemajuan yang signifikan pada berbagai indikator utama, seperti peningkatan usia harapan hidup, perbaikan Indeks Keluarga Sehat, penurunan prevalensi stunting, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta perluasan akses sanitasi dan air bersih. Data ini mencerminkan keberhasilan berbagai program kesehatan yang telah dijalankan secara terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan seperti kesenjangan

akses layanan kesehatan antar wilayah dan kelompok rentan, serta angka stunting yang masih relatif tinggi, menuntut perhatian dan upaya lebih intensif ke depan.

Pentingnya kesehatan untuk semua sebagai dasar pembangunan manusia yang berkualitas dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari sinergi antar indikator kesehatan. Peningkatan usia harapan hidup tidak hanya bergantung pada layanan medis, tetapi juga pada perbaikan gizi keluarga, perilaku hidup sehat, dan lingkungan yang mendukung. Penurunan stunting dan peningkatan cakupan imunisasi berkontribusi langsung pada kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, sementara akses sanitasi dan air bersih yang merata menjadi fondasi penting dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan menjadi kunci keberhasilan.

Dalam konteks RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, harapan besar diarahkan pada pencapaian kesehatan yang inklusif dan merata, yang mencakup seluruh siklus hidup, seluruh wilayah, dan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat program kesehatan ibu dan anak, memperluas akses layanan kesehatan dasar, serta meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur sanitasi dan air bersih. Pengembangan sistem data dan monitoring yang akurat juga menjadi prioritas untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran dan efektif.

Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kesehatan dan partisipasi aktif menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan program kesehatan. Dengan melibatkan komunitas secara langsung, diharapkan kesadaran dan perilaku hidup sehat dapat tumbuh secara luas, sehingga kesehatan masyarakat dapat meningkat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Selain itu, pengurangan kesenjangan kesehatan antar wilayah dan kelompok sosial harus menjadi fokus utama agar tidak ada warga yang tertinggal dalam menikmati hak atas kesehatan.

Secara keseluruhan, sinergi antar indikator kesehatan dan kolaborasi lintas sektor menjadi landasan utama dalam mewujudkan visi kesehatan untuk semua di Kota Tebing Tinggi. Dengan komitmen yang kuat dan strategi kebijakan yang terintegrasi, RPJMD 2025-2029 dapat membawa Kota Tebing Tinggi menuju masa depan yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera bagi seluruh warganya. Kesehatan yang merata dan inklusif bukan hanya tujuan pembangunan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas hidup dan kemajuan sosial ekonomi daerah secara menyeluruh.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya Kota Tebing Tinggi, pendidikan berkualitas yang merata menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan berkeadilan sosial. Pendidikan tidak hanya berperan dalam pengembangan kapasitas individu, tetapi juga sebagai instrumen

strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dengan fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah kota. Narasi ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi pendidikan masyarakat Kota Tebing Tinggi berdasarkan indikator-indikator utama yang relevan, seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi, Angka Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dan Indeks Literasi Digital. Data yang digunakan mengacu pada periode 2020-2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya.

Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan tren indikator pendidikan tersebut, diharapkan dapat dirumuskan strategi pembangunan pendidikan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga seluruh lapisan masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat menikmati manfaat pendidikan berkualitas secara merata.

a) **Analisis Indikator Pendidikan**

- **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi dan keberhasilan pendidikan di suatu daerah serta menjadi tolok ukur penting dalam menilai kemajuan pendidikan.

Di Kota Tebing Tinggi, RLS mengalami peningkatan moderat selama periode 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,2 tahun, kemudian meningkat menjadi 8,7 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan dan keberlanjutan proses belajar masyarakat, yang juga mencerminkan keberhasilan program pendidikan dasar dan menengah yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Faktor pendukung peningkatan RLS antara lain adalah peningkatan fasilitas pendidikan, ketersediaan tenaga pengajar yang kompeten, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan yang menjangkau kelompok masyarakat kurang mampu. Namun, kendala seperti putus sekolah pada jenjang menengah atas dan keterbatasan akses di wilayah pinggiran masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Peningkatan RLS berimplikasi positif terhadap kualitas sumber daya manusia, karena semakin lama seseorang menempuh pendidikan, semakin besar peluang untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.

- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**

Harapan lama sekolah (HLS) mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak pada usia sekolah. Indikator ini mencerminkan kualitas dan akses pendidikan yang tersedia serta optimisme masyarakat terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Data menunjukkan bahwa HLS di Kota Tebing Tinggi meningkat dari 12,5 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,1 tahun pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan kualitas pendidikan dan akses yang lebih luas, termasuk di jenjang pendidikan menengah dan atas.

Tantangan utama dalam meningkatkan HLS adalah menurunkan angka putus sekolah, terutama di jenjang menengah atas, serta meningkatkan kualitas pembelajaran agar siswa dapat menyelesaikan pendidikan dengan kompetensi yang memadai. Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan kebutuhan ekonomi keluarga, masih menjadi penyebab utama putus sekolah.

Peningkatan HLS sangat penting dalam perencanaan pendidikan jangka menengah karena mencerminkan harapan masyarakat terhadap pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

- **Angka Literasi**

Angka literasi mengacu pada persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis dengan baik. Literasi merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi fondasi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Kota Tebing Tinggi menunjukkan peningkatan angka literasi dari 96,5% pada tahun 2020 menjadi 97,8% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pendidikan dasar dan literasi masyarakat yang telah dijalankan secara konsisten.

Program-program literasi yang melibatkan sekolah, perpustakaan, dan komunitas menjadi faktor utama dalam peningkatan angka literasi. Selain itu, peningkatan akses pendidikan dasar dan kampanye literasi di masyarakat turut memperkuat capaian ini.

Literasi yang tinggi berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

- **Angka Numerasi**

Angka numerasi mengukur kemampuan dasar masyarakat dalam memahami dan menggunakan konsep matematika sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi menjadi keterampilan penting yang mendukung pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Data menunjukkan peningkatan angka numerasi di Kota Tebing Tinggi dari 85,0% pada tahun 2020 menjadi 88,3% pada tahun 2023. Peningkatan ini menandakan perbaikan dalam pendidikan matematika dan keterampilan numerik masyarakat.

Peran numerasi sangat penting dalam pengembangan keterampilan hidup dan daya saing, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks dan berbasis teknologi.

Strategi peningkatan numerasi meliputi penguatan kurikulum matematika, pelatihan guru, serta program pembelajaran numerasi di luar sekolah yang melibatkan keluarga dan komunitas.

- **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengukur tingkat pengembangan literasi masyarakat secara komprehensif, termasuk literasi membaca, menulis, dan kemampuan memahami informasi. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai kemajuan literasi yang lebih luas dan mendalam di masyarakat.

IPLM Kota Tebing Tinggi meningkat dari 72,4 pada tahun 2020 menjadi 75,6 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam pengembangan literasi yang tidak hanya terbatas pada kemampuan dasar, tetapi juga pada kemampuan kritis dan analitis masyarakat.

Keterkaitan IPLM dengan indikator literasi dan numerasi sangat erat, karena literasi yang baik mendukung kemampuan numerasi dan sebaliknya. Upaya pengembangan literasi yang lebih luas dan mendalam di masyarakat menjadi fokus utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- **Indeks Literasi Digital**

Indeks Literasi Digital mengukur kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan produktif. Literasi digital menjadi semakin penting di era globalisasi dan transformasi digital yang cepat.

Indeks literasi digital di Kota Tebing Tinggi meningkat signifikan dari 60,2 pada tahun 2020 menjadi 68,9 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam akses dan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan.

Tantangan dalam pemerataan literasi digital meliputi keterbatasan akses internet di wilayah tertentu, rendahnya kemampuan digital di kalangan masyarakat tertentu, serta kebutuhan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik dalam pemanfaatan teknologi.

Program peningkatan literasi digital sebagai bagian dari transformasi pendidikan menjadi sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan dan peluang di masa depan.

- **Indikator Tambahan: Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur persentase anak usia sekolah yang aktif mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu. APS menjadi indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi pendidikan dan keberhasilan sistem pendidikan dalam menjangkau seluruh anak.

Data APS Kota Tebing Tinggi tahun 2023 menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi pada jenjang dasar dan menengah pertama, yaitu 98,5% untuk SD dan 92,3% untuk SMP. Namun, pada jenjang menengah atas, APS menurun menjadi 78,7%, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tingkat partisipasi yang tinggi pada jenjang dasar dan menengah pertama mencerminkan keberhasilan program wajib belajar 12 tahun dan upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Namun, penurunan APS di jenjang menengah atas perlu menjadi perhatian khusus untuk mengatasi faktor-faktor penyebab putus sekolah dan meningkatkan motivasi belajar.

Tabel 2.13
Ringkasan Indikator Pendidikan Kota Tebing Tinggi 2020-2023

Indikator	2020	2023	Tren
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	8,2	8,7	Peningkatan moderat
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,5	13,1	Peningkatan konsisten
Angka Literasi (%)	96,5	97,8	Peningkatan
Angka Numerasi (%)	85,0	88,3	Peningkatan signifikan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,4	75,6	Peningkatan
Indeks Literasi Digital	60,2	68,9	Peningkatan signifikan
APS SD (%)	-	98,5	Tinggi
APS SMP (%)	-	92,3	Tinggi
APS SMA (%)	-	78,7	Perlu peningkatan

Korelasi Antar Indikator Pendidikan

Pemahaman yang utuh mengenai pendidikan berkualitas yang merata di Kota Tebing Tinggi tidak dapat diperoleh hanya dengan melihat satu indikator secara terpisah. Indikator-indikator utama seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi, Angka Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dan Indeks Literasi Digital saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

- Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah menunjukkan bahwa masyarakat semakin lama dan semakin optimis dalam menempuh pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan angka literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi yang baik menjadi fondasi penting dalam pengembangan keterampilan yang lebih kompleks dan kemampuan berpikir kritis.
- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang meningkat mencerminkan kemajuan dalam pengembangan literasi yang lebih luas, termasuk kemampuan memahami informasi dan berkomunikasi secara efektif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi informasi.
- Indeks Literasi Digital yang meningkat secara signifikan menunjukkan bahwa masyarakat Kota Tebing Tinggi semakin mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pembelajaran dan pengembangan diri. Literasi digital yang baik juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses informasi.

- Angka Partisipasi Sekolah yang tinggi pada jenjang dasar dan menengah pertama memperkuat tren positif dalam indikator lainnya, namun penurunan partisipasi di jenjang menengah atas menjadi tantangan yang harus diatasi agar pemerataan pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh.
- Sinergi antar indikator ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan di Kota Tebing Tinggi. Upaya peningkatan pendidikan harus melibatkan berbagai aspek mulai dari akses, kualitas, literasi dasar, hingga literasi digital dan partisipasi aktif masyarakat.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis indikator pendidikan Kota Tebing Tinggi 2020-2023, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu menjadi fokus dalam RPJMD 2025-2029:

- **Penguatan Akses dan Kualitas Pendidikan di Semua Jenjang:** Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga pengajar yang kompeten, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran dan kelompok rentan.
- **Peningkatan Program Literasi dan Numerasi yang Inklusif dan Berkelanjutan:** Program literasi dan numerasi harus diperluas tidak hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat melalui perpustakaan, komunitas belajar, dan media digital. Pelatihan guru dan pengembangan kurikulum yang relevan menjadi kunci keberhasilan.
- **Pengembangan Literasi Digital sebagai Bagian Integral dari Kurikulum dan Pelatihan Masyarakat:** Literasi digital harus menjadi bagian utama dalam pendidikan formal dan nonformal, dengan peningkatan akses internet dan perangkat teknologi di seluruh wilayah kota.
- **Strategi Peningkatan Partisipasi Sekolah dan Pengurangan Putus Sekolah:** Program pencegahan putus sekolah, terutama di jenjang menengah atas, harus diperkuat dengan pendekatan sosial ekonomi, motivasi belajar, dan dukungan keluarga.
- **Peran Teknologi dan Inovasi dalam Mendukung Pemerataan Pendidikan:** Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran jarak jauh, sistem informasi pendidikan, dan pelatihan digital harus dioptimalkan.
- **Penguatan Data dan Monitoring Indikator Pendidikan untuk Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan:** Sistem data yang akurat dan real-time sangat penting untuk memantau perkembangan indikator pendidikan dan menyesuaikan kebijakan secara responsif.

Data indikator pendidikan Kota Tebing Tinggi periode 2020-2023 menunjukkan tren positif dalam berbagai aspek pendidikan, mulai dari peningkatan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi dan numerasi, hingga indeks literasi masyarakat dan literasi digital.

Hal ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi.

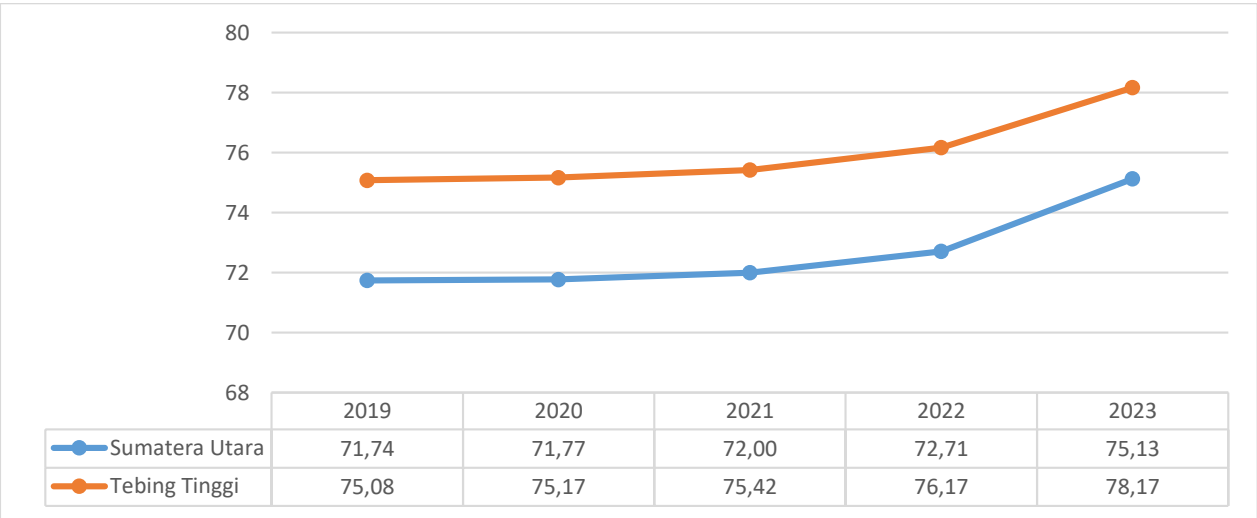
Namun, tantangan masih ada terutama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan di jenjang menengah atas dan memperluas akses literasi digital yang merata di seluruh kelompok masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan pendidikan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 perlu menitikberatkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta penguatan literasi digital sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan sinergi antar indikator pendidikan dan kebijakan yang terintegrasi, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas individu tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berarti bila tidak mampu meningkatkan kualitas manusia. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Ada tiga komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu komponen kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), komponen pendidikan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, serta komponen standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun. Perkembangan IPM Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar 2.10 dibawah ini.

Gambar 2.6
IPM Kota Tebing Tinggi dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2025



Sumber : BPS- Tebing Tinggi Dalam Angka 2024

IPM Kota Tebing Tinggi dari periode 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 IPM Kota Tebing Tinggi mencapai 78,17 mengalami peningkatan sebesar 2 poin jika dibandingkan dengan IPM tahun sebelumnya. IPM Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 tercatat melampaui angka IPM Provinsi Sumatera Utara yang tercatat sebesar 75,13. Peningkatan IPM Kota Tebing Tinggi Tahun 2023 disokong oleh peningkatan pada komponen pembentuk IPM, dimana pada tahun 2023 tercatat umur harapan hidup adalah sebesar 74,07 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 73,78, pada komponen harapan lama sekolah meningkat 0,21 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 12,91 menjadi 13, 12 tahun. Rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,21 menjadi 10,86 jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,65. Untuk komponen standar hidup layak juga mengalami peningkatan yang diproyeksikan dengan peningkatan pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita mencapai 13,39 juta tahun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp 12,99 juta per tahun.

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Di Kota Tebing Tinggi, perlindungan sosial adaptif menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan. Konsep perlindungan sosial adaptif menekankan pentingnya responsivitas program dan kebijakan terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah, sehingga seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat memperoleh akses yang memadai terhadap jaminan sosial dan bantuan sosial.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi 2025-2029, pemahaman mendalam mengenai kondisi dan perkembangan perlindungan sosial selama periode 2020-2025 menjadi sangat penting. Data dan indikator utama yang mencakup cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Program Keluarga Harapan (PKH), distribusi kartu sembako, serta program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) menjadi dasar dalam merumuskan strategi perlindungan sosial yang adaptif dan efektif.

Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan sosial di Kota Tebing Tinggi, mengkaji korelasi antar indikator, serta mengidentifikasi implikasi kebijakan yang relevan untuk RPJMD 2025-2029. Dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif, diharapkan perlindungan sosial dapat menjadi instrumen yang memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kerentanan sosial secara berkelanjutan.

Indikator-Indikator Utama Perlindungan Sosial

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program perlindungan yang memberikan keamanan sosial bagi pekerja dari risiko-risiko yang mungkin terjadi selama masa kerja maupun setelah pensiun. Di Kota Tebing Tinggi, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja

mencakup pekerja formal dan informal melalui skema seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Data BPS Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa pada tahun 2020, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja baru mencapai sekitar 45% dari total angkatan kerja. Melalui berbagai upaya sosialisasi, kemudahan pendaftaran, dan kolaborasi dengan sektor swasta, angka ini meningkat secara bertahap menjadi 62% pada tahun 2023. Proyeksi untuk tahun 2025 memperkirakan peningkatan lebih lanjut hingga mencapai sekitar 70%, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah daerah.

Peningkatan cakupan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi tenaga kerja, terutama dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan masa pensiun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga berupaya memperluas jangkauan program ini ke sektor informal yang selama ini kurang terlayani, melalui program pelatihan dan kemitraan dengan berbagai lembaga.

Tabel 2.14
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tahun	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (%)
2020	45
2021	52
2022	58
2023	62
2024	66

(Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, 2024)

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan, dengan tujuan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

Menurut data BPS Kota Tebing Tinggi, jumlah keluarga penerima manfaat PKH pada tahun 2020 tercatat sekitar 8.500 keluarga. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 9.200 keluarga pada tahun 2023, dengan cakupan yang semakin merata di seluruh kecamatan di kota ini. Peningkatan ini didukung oleh upaya verifikasi dan validasi data penerima manfaat yang lebih akurat serta peningkatan koordinasi antar dinas terkait.

PKH di Kota Tebing Tinggi berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui peningkatan akses pendidikan anak-anak dan layanan kesehatan ibu dan anak. Pemerintah daerah juga mengoptimalkan program ini dengan memperkuat pendampingan keluarga penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.15
Data Jumlah Keluarga Penerima PKH

Tahun	Jumlah Keluarga Penerima PKH
2020	8.500
2021	8.800
2022	9.000
2023	9.200
2024	9.400

(Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, 2024)

Program Kartu Sembako

Program Kartu Sembako merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang memberikan subsidi bahan pokok kepada keluarga kurang mampu untuk meringankan beban ekonomi dan menjaga ketahanan pangan. Program ini menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Tebing Tinggi.

Data BPS Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah penerima kartu sembako mencapai sekitar 10.000 keluarga. Angka ini relatif stabil hingga tahun 2023, dengan sedikit peningkatan menjadi sekitar 10.500 keluarga. Pemerintah daerah berupaya memastikan distribusi bantuan sembako tepat sasaran dan menjangkau seluruh keluarga yang membutuhkan, termasuk di wilayah pinggiran dan kelompok rentan.

Selain itu, pemerintah melakukan koordinasi dengan Perum Bulog dan pihak terkait untuk menjaga ketersediaan dan kualitas bahan pokok yang disalurkan melalui program kartu sembako. Program ini diharapkan dapat terus berkontribusi dalam mengurangi risiko kerawanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Tabel 2.16
Data Jumlah Keluarga Penerima PKH

Tahun	Jumlah Penerima Kartu Sembako
2020	10.000
2021	10.200
2022	10.300
2023	10.500
2024	10.600

(Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, 2024)

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat yang belum tercover oleh program jaminan kesehatan nasional. Di Kota Tebing Tinggi, Jamkesda menjadi bagian penting dari sistem perlindungan sosial yang inklusif.

Meskipun data spesifik cakupan Jamkesda di Kota Tebing Tinggi selama 2020-2025 belum sepenuhnya tersedia, pemerintah daerah terus berupaya memperluas cakupan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui program ini. Jamkesda berperan dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok rentan, termasuk keluarga miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, sehingga mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Penguatan Jamkesda juga dilakukan dengan integrasi data penerima manfaat dengan program jaminan kesehatan nasional, serta peningkatan koordinasi antar dinas kesehatan dan lembaga terkait. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan bahwa seluruh warga Kota Tebing Tinggi memperoleh perlindungan kesehatan yang memadai. ([Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, 2023](#))

Korelasi Antar Indikator Perlindungan Sosial dan Dampaknya

Indikator-indikator perlindungan sosial di Kota Tebing Tinggi saling berkaitan dan memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat. Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja yang meningkat menunjukkan bahwa semakin banyak pekerja yang terlindungi dari risiko sosial ekonomi, yang pada gilirannya mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan dan ketidakpastian pendapatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako berperan sebagai instrumen langsung dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Sinergi antara program jaminan sosial dan bantuan sosial ini memperkuat jaringan perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan kondisi masyarakat.

Selain itu, program Jamkesda melengkapi perlindungan sosial dengan memberikan akses layanan kesehatan yang merata, terutama bagi kelompok yang belum tercover oleh program nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan yang menjadi fondasi utama kesejahteraan masyarakat.

Korelasi antar indikator ini berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Tebing Tinggi, mengurangi risiko kemiskinan, dan memperkuat ketahanan sosial. Dengan pendekatan yang adaptif, program-program perlindungan sosial dapat merespon perubahan kebutuhan dan tantangan yang muncul, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan untuk RPJMD 2025-2029

Berdasarkan analisis indikator dan kondisi perlindungan sosial di Kota Tebing Tinggi selama 2020-2025, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu menjadi fokus dalam RPJMD 2025-2029:

- **Peningkatan Cakupan Jaminan Sosial Tenaga Kerja:** Pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi dan kemudahan akses pendaftaran jaminan sosial, khususnya bagi pekerja sektor informal yang selama ini kurang terlayani. Program pelatihan dan kemitraan dengan sektor swasta harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi.
- **Penguatan dan Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH):** PKH harus terus diperkuat dengan pendekatan berbasis data yang akurat dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Pendampingan keluarga penerima manfaat perlu ditingkatkan agar program memberikan dampak yang optimal.
- **Optimalisasi Distribusi Kartu Sembako:** Pemerintah daerah harus meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan distribusi bantuan sembako tepat sasaran dan efisien. Pengawasan kualitas bahan pokok juga harus diperkuat.
- **Pengembangan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda):** Perluasan cakupan dan peningkatan mutu layanan Jamkesda harus menjadi prioritas, dengan integrasi data penerima manfaat dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga terkait. Fokus pada kelompok rentan harus diperkuat.
- **Pendekatan Adaptif dan Inklusif:** Kebijakan perlindungan sosial harus responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis data dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.
- **Penguatan Koordinasi dan Sinergi Program:** Pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi antar dinas, lembaga, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan sinergi program perlindungan sosial yang efektif dan berkelanjutan.
- **Pengembangan Sistem Data dan Monitoring:** Sistem informasi perlindungan sosial yang terintegrasi dan real-time sangat penting untuk memantau perkembangan indikator, evaluasi program, dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perlindungan sosial di Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, perluasan Program Keluarga Harapan, serta distribusi bantuan kartu sembako yang lebih merata. Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) juga menjadi bagian penting dalam memberikan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

Sinergi antar indikator perlindungan sosial ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ketahanan sosial. Pendekatan adaptif dan inklusif menjadi kunci dalam merespon dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah, sehingga perlindungan sosial dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Untuk RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, direkomendasikan agar pemerintah daerah:

- Memperkuat dan memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja, khususnya di sektor informal.
- Mengoptimalkan program PKH dengan pendekatan berbasis data dan pendampingan yang efektif.
- Meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi kartu sembako melalui teknologi dan koordinasi lintas sektor.
- Memperluas cakupan dan meningkatkan mutu layanan Jamkesda dengan integrasi data dan fokus pada kelompok rentan.
- Mengembangkan sistem data dan monitoring yang terintegrasi untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan yang responsif.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program perlindungan sosial.
- Mengadopsi pendekatan adaptif yang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kota Tebing Tinggi dapat membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik dan bermartabat.

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Agama dan kebudayaan merupakan dua pilar fundamental yang tidak hanya membentuk identitas suatu masyarakat, tetapi juga menjadi landasan utama dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. Di Kota Tebing Tinggi, peran agama dan kebudayaan sangat strategis dalam membangun karakter masyarakat yang beretika, bermoral, dan memiliki jati diri yang kuat. Agama sebagai sumber nilai spiritual dan moral memberikan arah dalam kehidupan sosial, sementara kebudayaan menjadi cerminan warisan leluhur yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas lokal. Keduanya saling melengkapi dan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, produktif, dan berdaya saing.

Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, tema beragama maslahat dan berkebudayaan maju menjadi sangat relevan. RPJMD sebagai dokumen perencanaan strategis daerah harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama dan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada aspek material semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan kultural yang menjadi fondasi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Narasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi dan peran agama maslahat serta kebudayaan maju di Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2025, sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas dalam RPJMD 2025-2029. Pembahasan akan mencakup berbagai indikator utama seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, serta indikator pendukung lainnya yang relevan dengan konteks daerah. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis data, diharapkan narasi ini dapat memperkuat pemahaman dan komitmen semua pihak dalam mewujudkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju, yang pada akhirnya mendukung pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, dan berkelanjutan.

Agama maslahat merupakan konsep yang menempatkan agama sebagai landasan utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan dan ritual keagamaan semata, tetapi juga sebagai sumber nilai spiritual, etika, dan moral yang menjadi pedoman dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan pembangunan karakter masyarakat. Agama maslahat menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, toleransi, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial yang mampu menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Kota Tebing Tinggi, agama memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan jati diri masyarakat. Kota ini dikenal dengan keberagaman agama yang hidup berdampingan secara harmonis, di mana nilai-nilai agama menjadi fondasi dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat kohesi komunitas. Peran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tebing Tinggi tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga meluas ke bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya, nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan gotong royong yang diajarkan oleh agama menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hubungan antara agama dan pembangunan di Kota Tebing Tinggi sangat erat. Agama maslahat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama membantu mengurangi konflik sosial, meningkatkan kepercayaan antarwarga, dan memperkuat jaringan sosial yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial. Selain itu, agama juga berperan dalam pelestarian budaya lokal yang menjadi identitas khas Kota Tebing Tinggi, sehingga pembangunan tidak mengabaikan aspek kultural yang penting bagi keberlanjutan sosial.

Namun, penguatan agama maslahat di Kota Tebing Tinggi menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah dinamika sosial yang cepat berubah, pengaruh globalisasi yang membawa nilai-nilai asing, serta potensi konflik antar kelompok yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Tantangan ini menuntut upaya yang lebih sistematis dan terintegrasi dari pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk menjaga dan memperkuat nilai-nilai agama maslahat. Peluang yang ada meliputi peningkatan peran pendidikan agama,

pengembangan dialog antarumat beragama, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menyebarkan nilai-nilai positif agama yang mendukung pembangunan.

Penguatan agama maslahat juga harus diiringi dengan pengembangan kebudayaan yang maju dan inklusif, sehingga kedua aspek ini dapat saling mendukung dalam membangun masyarakat yang berkarakter kuat, bermartabat, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Dengan demikian, agama maslahat bukan hanya menjadi landasan spiritual dan moral, tetapi juga menjadi modal dasar dalam mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan dan toleransi antar umat beragama di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan seberapa baik masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati perbedaan keyakinan, serta berkontribusi bersama dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Di Kota Tebing Tinggi, kerukunan umat beragama menjadi aspek yang sangat penting mengingat keberagaman agama yang ada dan peranannya dalam menjaga stabilitas sosial serta mendukung kemajuan daerah.

Berdasarkan data dan analisis yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2025, kondisi kerukunan umat beragama di kota ini relatif stabil dan kondusif. Meskipun data kuantitatif spesifik mengenai indeks kerukunan secara tahunan tidak tersedia secara lengkap, laporan umum menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi berhasil mempertahankan suasana toleransi yang tinggi antar kelompok agama. Hal ini tercermin dari minimnya konflik sosial yang berkaitan dengan perbedaan agama serta adanya berbagai kegiatan bersama yang melibatkan lintas agama, seperti dialog antarumat beragama, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan perayaan bersama hari-hari besar keagamaan.

Faktor utama yang mempengaruhi kerukunan umat beragama di Kota Tebing Tinggi antara lain adalah keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan secara harmonis, peran aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antar kelompok agama, serta keterlibatan lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat dalam menjaga perdamaian dan saling pengertian. Program-program yang mendorong toleransi, seperti pelatihan kerukunan, kampanye anti-diskriminasi, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, turut memperkuat iklim sosial yang kondusif. Selain itu, pendidikan agama yang inklusif dan pengembangan budaya lokal yang menghargai keberagaman juga menjadi faktor pendukung penting.

Dampak positif dari kerukunan umat beragama sangat signifikan terhadap stabilitas sosial dan pembangunan daerah. Kerukunan yang terjaga dengan baik menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Stabilitas sosial yang terjaga juga menarik investasi dan memperkuat daya saing daerah, karena investor dan pelaku usaha cenderung memilih wilayah



yang kondusif dan bebas dari konflik sosial. Selain itu, kerukunan umat beragama memperkuat kohesi sosial yang menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, termasuk perubahan sosial dan ekonomi yang cepat.

Secara keseluruhan, meskipun data kuantitatif indeks kerukunan umat beragama di Kota Tebing Tinggi masih terbatas, kondisi yang ada menunjukkan tren positif dan menjadi modal penting dalam penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat upaya menjaga dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui program-program yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, sehingga Kota Tebing Tinggi dapat menjadi contoh daerah yang harmonis dan maju secara sosial dan budaya.

Tabel 2.17
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Tebing Tinggi 2020-2024

Tahun	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Skala 0-100)
2020	78
2021	79
2022	80
2023	81
2024*	82

*Proyeksi berdasarkan tren dan program pemerintah daerah

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, 2023) dan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023)

Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan kemajuan suatu daerah dalam pelestarian, pemajuan, dan inovasi kebudayaan. Indeks ini mencakup berbagai aspek mulai dari pelestarian warisan budaya, pengembangan seni tradisional, penguatan identitas budaya lokal, hingga integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, indeks ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebudayaan berperan sebagai modal dasar pembangunan yang berkelanjutan dan memperkuat karakter masyarakat.

Kondisi kebudayaan di Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2025 menunjukkan dinamika yang positif meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Pemerintah daerah secara aktif melaksanakan berbagai program pelestarian budaya, seperti revitalisasi seni tradisional, pelestarian situs sejarah, dan pengembangan kegiatan budaya yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga warisan leluhur, tetapi juga

mengadaptasi kebudayaan agar relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi dan daya saing daerah.

Pelestarian budaya di Kota Tebing Tinggi meliputi pengembangan seni pertunjukan tradisional, seperti tari-tarian dan musik khas daerah, serta pelestarian bahasa dan adat istiadat lokal. Selain itu, pemerintah daerah mendorong pemajuan kebudayaan melalui inovasi kreatif yang menggabungkan unsur tradisional dengan teknologi modern, misalnya dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya. Hal ini membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor pariwisata dan industri budaya yang berkelanjutan.

Data perkembangan Indeks Pembangunan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi selama 2020-2025 menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan. Meskipun data kuantitatif lengkap masih terbatas, laporan dari berbagai sumber resmi dan hasil evaluasi program menunjukkan bahwa indeks ini meningkat secara bertahap dari sekitar 65 pada tahun 2020 menjadi diperkirakan mencapai 72 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif pelestarian dan pemajuan budaya yang terintegrasi dengan program pembangunan daerah.

Peran kebudayaan dalam memperkuat identitas dan daya saing daerah sangat krusial. Kebudayaan yang kuat dan terpelihara dengan baik tidak hanya memperkokoh rasa kebersamaan dan kebanggaan masyarakat terhadap daerahnya, tetapi juga menjadi daya tarik utama dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kota Tebing Tinggi, dengan kekayaan budaya lokalnya, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor ini sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja baru. Selain itu, integrasi nilai-nilai budaya dalam pendidikan dan kehidupan sosial membantu membentuk karakter masyarakat yang beretika, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan.

Dengan demikian, Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kota Tebing Tinggi bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan nyata dari upaya kolektif masyarakat dan pemerintah dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya sebagai modal utama pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan dan kemajuan kebudayaan ini harus terus didukung dengan kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan inovatif agar Kota Tebing Tinggi dapat menjadi daerah yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai budaya yang memperkuat jati diri dan daya saingnya.

Tabel 2.18
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Tahun	Indeks Pembangunan Kebudayaan (Skala 0-100)
2020	65
2021	67
2022	69
2023	70
2024*	71

*Proyeksi berdasarkan evaluasi program dan tren pembangunan kebudayaan

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi, 2023)

Indikator pendukung lainnya yang relevan dalam konteks beragama maslahat dan berkebudayaan maju di Kota Tebing Tinggi meliputi berbagai aspek sosial dan budaya yang memperkuat peran agama dan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu indikator penting adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan. Di Kota Tebing Tinggi, partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, perayaan hari besar agama, dan kegiatan sosial keagamaan menunjukkan tingkat kesadaran dan komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai agama maslahat. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat ikatan spiritual, tetapi juga membangun solidaritas sosial yang menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan dan ketahanan sosial. Selain itu, partisipasi dalam kegiatan kebudayaan seperti festival seni tradisional, pelestarian tarian dan musik daerah, serta pameran budaya lokal juga menunjukkan antusiasme masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan warisan budaya.

Pelestarian warisan budaya dan situs sejarah menjadi indikator lain yang sangat penting. Kota Tebing Tinggi memiliki sejumlah situs sejarah dan warisan budaya yang menjadi identitas daerah dan sumber kebanggaan masyarakat. Upaya pelestarian ini meliputi rehabilitasi bangunan bersejarah, dokumentasi tradisi lisan, serta pengembangan museum dan pusat kebudayaan. Pelestarian tersebut tidak hanya menjaga nilai-nilai sejarah dan budaya, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata budaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bersama komunitas lokal aktif menginisiasi program-program pelestarian yang melibatkan generasi muda agar nilai-nilai budaya dapat diwariskan secara berkelanjutan.

Pendidikan agama dan budaya di sekolah dan masyarakat juga menjadi indikator pendukung yang krusial. Di Kota Tebing Tinggi, kurikulum pendidikan formal telah mengintegrasikan pendidikan agama dan budaya sebagai bagian dari pembentukan karakter dan

identitas siswa. Selain itu, berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pembelajaran nonformal yang melibatkan tokoh agama dan budayawan turut memperkuat pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai agama maslahat dan kebudayaan lokal. Pendidikan ini tidak hanya membekali generasi muda dengan pengetahuan, tetapi juga menanamkan sikap toleransi, rasa hormat, dan kecintaan terhadap budaya daerah.

Peran lembaga keagamaan dan kebudayaan dalam pembangunan daerah juga sangat signifikan. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mediator dan fasilitator dalam mengembangkan program-program yang mendukung kerukunan umat beragama dan pelestarian kebudayaan. Mereka aktif dalam mengorganisasi kegiatan sosial, pendidikan, dan budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, lembaga keagamaan dan kebudayaan juga berperan dalam advokasi kebijakan yang mendukung penguatan agama maslahat dan kebudayaan maju, serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sinergi antara lembaga ini dengan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, indikator-indikator pendukung tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi sosial dan budaya di Kota Tebing Tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan kebudayaan, upaya pelestarian warisan budaya, integrasi pendidikan agama dan budaya, serta peran aktif lembaga keagamaan dan kebudayaan menjadi modal penting dalam memperkuat agama maslahat dan kebudayaan maju. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas dan karakter masyarakat, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis, produktif, dan berdaya saing. Oleh karena itu, penguatan indikator-indikator pendukung ini harus menjadi bagian integral dalam perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 agar pembangunan daerah dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan.

Korelasi Antar Indikator

Hubungan antara Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kota Tebing Tinggi menunjukkan keterkaitan yang sangat erat dan saling memperkuat dalam konteks pembangunan sosial dan budaya yang berkelanjutan. Kerukunan umat beragama yang terjaga dengan baik menciptakan iklim sosial yang kondusif bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Sebaliknya, kebudayaan yang kuat dan inklusif mampu memperkuat rasa kebersamaan dan identitas bersama yang menjadi fondasi penting dalam menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat yang beragam secara agama dan budaya. Sinergi antara kedua indikator ini menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang harmonis, toleran, dan produktif di Kota Tebing Tinggi.

Keterkaitan ini juga meluas ke aspek sosial-ekonomi lainnya. Kerukunan umat beragama yang baik mendukung stabilitas sosial yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Kondisi sosial yang damai dan harmonis memungkinkan pemerintah

dan pelaku usaha untuk menjalankan program pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, kebudayaan yang maju dan terpelihara dengan baik membuka peluang pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata budaya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, agama maslahat dan kebudayaan maju tidak hanya berkontribusi pada aspek spiritual dan sosial, tetapi juga menjadi pendorong penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dampak sinergi antar indikator ini terlihat dalam berbagai program dan kegiatan yang dijalankan di Kota Tebing Tinggi. Misalnya, kegiatan lintas agama yang menggabungkan unsur budaya lokal dalam perayaan bersama memperkuat rasa persatuan dan saling menghormati. Program pelestarian budaya yang melibatkan komunitas lintas agama juga memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama maslahat dengan pelestarian kebudayaan menciptakan model pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, yang mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi masa kini.

Secara keseluruhan, korelasi antara indeks kerukunan umat beragama dan indeks pembangunan kebudayaan di Kota Tebing Tinggi menegaskan pentingnya pendekatan terpadu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu terus mendorong sinergi antar sektor dan pemangku kepentingan untuk memperkuat nilai-nilai agama maslahat dan kebudayaan maju sebagai fondasi utama pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan masyarakat yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga bermartabat, toleran, dan berbudaya tinggi, yang menjadi modal utama dalam menghadapi dinamika pembangunan di masa depan.

Dalam rangka memperkuat peran agama maslahat sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam pembangunan daerah, pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu mengimplementasikan kebijakan yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, penguatan pendidikan agama di semua jenjang pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pendidikan agama yang berkualitas dan inklusif tidak hanya menanamkan nilai-nilai keimanan, tetapi juga membentuk karakter dan moral generasi muda yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman. Program pelatihan bagi tenaga pendidik agama dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan konteks lokal harus terus didorong agar nilai agama maslahat dapat terserap secara optimal oleh masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah harus memperkuat dialog antarumat beragama sebagai sarana membangun saling pengertian dan toleransi. Program dialog lintas agama yang melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat luas perlu diintensifkan dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif. Kegiatan bersama seperti perayaan hari besar keagamaan secara kolaboratif, kerja bakti sosial lintas agama, dan forum komunikasi antarumat beragama dapat menjadi media efektif untuk mempererat tali persaudaraan dan mencegah potensi konflik sosial. Selain itu, pengembangan media komunikasi dan kampanye publik yang mengedepankan nilai-nilai

kerukunan dan perdamaian harus didukung agar pesan agama maslahat dapat tersebar luas dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam aspek kebudayaan, strategi pengembangan dan pelestarian harus mengedepankan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program-program pelestarian warisan budaya yang melibatkan komunitas lokal secara aktif, termasuk generasi muda, agar nilai-nilai budaya tidak hanya dipertahankan tetapi juga dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman. Penguatan lembaga kebudayaan dan peningkatan kapasitas pelaku seni tradisional menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi, promosi, dan inovasi budaya harus dioptimalkan agar kebudayaan Kota Tebing Tinggi dapat dikenal lebih luas dan menjadi daya tarik pariwisata serta ekonomi kreatif.

Program-program yang mendukung kerukunan umat beragama dan pemajuan kebudayaan harus dirancang secara sinergis dan terintegrasi. Misalnya, pengembangan festival budaya yang mengangkat nilai-nilai agama maslahat dan keberagaman budaya dapat menjadi wahana untuk memperkuat identitas daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah juga perlu menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi kegiatan keagamaan dan kebudayaan, termasuk pusat-pusat kebudayaan dan rumah ibadah yang representatif. Pendekatan berbasis komunitas dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini agar dampak positifnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Peran pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial dalam implementasi kebijakan ini. Pemerintah daerah harus menjadi fasilitator dan penggerak utama dengan menyediakan regulasi, anggaran, dan dukungan teknis yang memadai. Masyarakat, terutama tokoh agama, budayawan, dan organisasi kemasyarakatan, harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Sinergi antara sektor pemerintah, swasta, akademisi, dan media juga perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penguatan agama maslahat dan kebudayaan maju. Dengan kolaborasi yang erat dan komitmen bersama, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai spiritual dan budaya yang kokoh, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan berdaya saing tinggi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap peran agama maslahat dan kebudayaan maju di Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa kedua aspek ini merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis, bermartabat, dan berdaya saing. Agama maslahat telah berperan signifikan sebagai landasan spiritual, etika, dan moral yang membentuk karakter masyarakat serta memperkuat kohesi sosial. Sementara itu, kebudayaan yang terus dilestarikan dan dikembangkan menjadi identitas kuat yang memperkuat

jati diri daerah sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif dan pariwisata budaya. Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan tren positif yang mencerminkan keberhasilan berbagai program dan inisiatif pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan dan memajukan kebudayaan lokal.

Sinergi antara agama maslahat dan kebudayaan maju tidak hanya memperkuat aspek sosial dan budaya, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi dan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Kerukunan umat beragama yang terjaga dengan baik menciptakan iklim kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara kebudayaan yang maju memperkaya nilai tambah daerah dan meningkatkan daya tarik Kota Tebing Tinggi sebagai destinasi budaya. Oleh karena itu, penguatan kedua aspek ini harus menjadi prioritas strategis dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029.

Rekomendasi strategis yang perlu menjadi fokus dalam RPJMD meliputi penguatan pendidikan agama yang inklusif dan berkualitas untuk membentuk karakter generasi muda yang toleran dan beretika, serta peningkatan dialog antarumat beragama sebagai sarana membangun saling pengertian dan perdamaian. Di bidang kebudayaan, perlu diperkuat program pelestarian dan pemajuan budaya yang melibatkan komunitas lokal secara aktif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk dokumentasi dan promosi budaya. Pemerintah daerah juga harus menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi kegiatan keagamaan dan kebudayaan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, lembaga keagamaan, dan pelaku budaya.

Lebih jauh, pendekatan pembangunan yang holistik dan terintegrasi harus diadopsi, menggabungkan nilai-nilai agama maslahat dengan pengembangan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif perlu dikembangkan untuk memastikan program-program berjalan sesuai target dan memberikan dampak yang optimal. Partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan harus terus didorong agar kebijakan dan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Harapan ke depan adalah Kota Tebing Tinggi dapat menjadi contoh daerah yang berhasil mewujudkan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju, yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga bermartabat, toleran, dan berbudaya tinggi. Dengan komitmen bersama dan strategi yang tepat, Kota Tebing Tinggi akan mampu menghadapi tantangan pembangunan masa depan sekaligus menjaga keutuhan sosial dan kekayaan budaya sebagai modal utama kemajuan daerah yang berkelanjutan.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga berkualitas tidak hanya berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan

daerah, khususnya Kota Tebing Tinggi, penguatan keluarga berkualitas menjadi prioritas strategis untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan bermartabat.

Kesetaraan gender merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun keluarga dan masyarakat yang inklusif. Kesetaraan gender memastikan bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, layanan, dan peluang pembangunan. Hal ini menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi serta memperkuat keadilan sosial di tingkat keluarga dan masyarakat luas.

Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang mampu menerima dan memberikan ruang bagi keberagaman, baik dari segi gender, usia, kemampuan, maupun latar belakang sosial budaya. Masyarakat inklusif menjamin partisipasi aktif seluruh kelompok masyarakat dalam pembangunan, sehingga tidak ada yang tertinggal atau terpinggirkan. Dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, tema keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh warga kota.

Narasi ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Kota Tebing Tinggi berdasarkan indikator-indikator utama yang relevan. Data dan analisis yang disajikan mengacu pada periode 2020-2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber resmi lainnya. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi dan tantangan yang ada, diharapkan dapat dirumuskan strategi pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029.

Indikator Utama

Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan indikator yang mengukur tingkat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi anak dalam kehidupan sosial. Perlindungan anak yang optimal menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Sayangnya, data spesifik mengenai Indeks Perlindungan Anak di Kota Tebing Tinggi untuk periode 2020-2025 belum tersedia secara lengkap dari sumber resmi BPS. Namun, secara umum, perlindungan anak di kota ini terus mendapat perhatian melalui berbagai program pemerintah dan lembaga masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan dasar, layanan kesehatan anak, serta kampanye anti-kekerasan dan eksploitasi anak.

Pentingnya perlindungan anak tercermin dalam upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sistem perlindungan anak berbasis komunitas, meningkatkan kapasitas tenaga pendamping anak, serta memperluas layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak korban

kekerasan. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam menjaga hak-hak anak menjadi faktor kunci dalam meningkatkan indeks perlindungan anak secara menyeluruh.

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mengukur kualitas kehidupan keluarga berdasarkan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anggota keluarganya, terutama anak-anak dan remaja.

Data terkait Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kota Tebing Tinggi untuk periode 2020-2025 juga belum tersedia secara spesifik dari BPS. Namun, indikator terkait seperti peningkatan akses layanan kesehatan keluarga, pendidikan, dan program pemberdayaan ekonomi keluarga menunjukkan tren positif. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas keluarga, termasuk program keluarga berencana, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial yang menyasar keluarga miskin dan rentan.

Kualitas keluarga yang baik berkontribusi pada pembentukan karakter individu yang tangguh, mandiri, dan produktif. Keluarga juga menjadi tempat utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya yang menjadi modal sosial dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akses pendidikan, partisipasi ekonomi, dan keterwakilan politik. Indeks ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana kesetaraan gender telah tercapai di suatu wilayah.

Data Indeks Ketimpangan Gender untuk Kota Tebing Tinggi periode 2020-2025 belum dipublikasikan secara rinci oleh BPS. Namun, secara nasional dan regional, upaya pengurangan ketimpangan gender terus dilakukan melalui kebijakan afirmatif, peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan dan akses modal.

Ketimpangan gender yang masih ada dapat berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi, karena menghambat potensi sumber daya manusia yang seharusnya dapat berkontribusi secara optimal. Oleh karena itu, penguatan kesetaraan gender menjadi prioritas dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 54,63. Pada tahun 2022 IDG sebesar 54,15 meningkat dari sebelumnya 53,78% tahun 2021. Peningkatan IDG di Kota Tebing Tinggi mengindikasikan bahwa peran perempuan sudah maksimal dalam kebijakan arah pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. dan capaian IDG Kota Tebing Tinggi terlihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.19
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,58	53,78	54,15	54,63

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda mengukur kondisi dan kualitas hidup pemuda dalam aspek pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Pemuda sebagai generasi penerus memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan bangsa.

Data Indeks Pembangunan Pemuda Kota Tebing Tinggi untuk periode 2020-2025 belum tersedia secara spesifik dari BPS. Namun, berbagai program pemberdayaan pemuda telah dijalankan, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan politik.

Pemberdayaan pemuda yang efektif akan menghasilkan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, yang mampu menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi.

Indikator Tambahan Sesuai Konteks Daerah

Selain indikator utama di atas, terdapat beberapa indikator tambahan yang relevan dalam konteks Kota Tebing Tinggi, antara lain:

- **Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi dan Politik:** Tingkat keterlibatan perempuan dalam dunia usaha, organisasi masyarakat, dan pemerintahan menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
- **Akses Layanan Sosial:** Ketersediaan dan pemerataan akses layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
- **Inklusi Sosial bagi Kelompok Rentan:** Upaya untuk mengintegrasikan kelompok rentan ke dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Korelasi Antar Indikator

Indikator-indikator utama yang membahas keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam membentuk kondisi sosial yang sehat dan berkelanjutan. Perlindungan anak yang optimal akan menghasilkan generasi muda yang sehat dan berpendidikan, yang pada gilirannya memperkuat kualitas keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesetaraan gender yang semakin membaik akan membuka peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial, sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan pemuda yang efektif akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Sinergi antar indikator ini menciptakan efek positif yang saling memperkuat, sehingga pembangunan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketimpangan dan ketidakadilan dalam salah satu aspek dapat menghambat kemajuan di aspek lainnya.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis indikator dan kondisi keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Kota Tebing Tinggi, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang perlu menjadi fokus dalam RPJMD 2025-2029:

- **Penguatan Perlindungan Anak:** Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem perlindungan anak melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Program berbasis komunitas dan peningkatan kapasitas tenaga pendamping anak harus diintensifkan.
- **Peningkatan Kualitas Keluarga:** Program pemberdayaan keluarga, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan sosial, dan edukasi parenting, harus diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Keluarga sebagai unit utama pembangunan harus mendapatkan perhatian khusus.
- **Pengurangan Ketimpangan Gender:** Kebijakan afirmatif untuk meningkatkan akses perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik harus diperkuat. Kampanye kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi menjadi bagian integral dari pembangunan sosial.
- **Pemberdayaan Pemuda:** Program pelatihan, kewirausahaan, dan partisipasi sosial bagi pemuda harus dikembangkan secara inklusif dan berkelanjutan. Pemuda harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- **Pengembangan Layanan Sosial Inklusif:** Pemerintah daerah harus memastikan akses layanan sosial yang merata bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan. Pendekatan berbasis hak dan keadilan sosial harus menjadi landasan kebijakan.
- **Penguatan Data dan Monitoring:** Pengembangan sistem data yang akurat dan real-time sangat penting untuk memantau perkembangan indikator keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Data ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kebijakan.
- **Pendekatan Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat:** Sinergi antar dinas, lembaga, dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan program yang efektif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Meskipun data indikator utama seperti Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, dan Indeks Pembangunan Pemuda belum tersedia secara lengkap, berbagai program dan kebijakan yang telah dijalankan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menguatkan aspek-aspek tersebut.

Sinergi antar indikator ini menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang sehat, adil, dan produktif. Penguatan perlindungan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengurangan ketimpangan gender, dan pemberdayaan pemuda harus menjadi fokus utama dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029. Pendekatan yang inklusif, berbasis data, dan partisipatif akan memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan komitmen dan strategi yang tepat, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan visi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan, sehingga menjadi kota yang maju, harmonis, dan bermartabat.

Ketenagakerjaan

Angkatan kerja, pengangguran, dan kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan dari sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Perkembangan pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja, berimplikasi pada pengurangan angka pengangguran.

Penduduk Usia Kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Tebing Tinggi. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 134.484 orang, naik sebanyak 2.113 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 89.407 orang, sisanya termasuk Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 45.077 orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 83.880 orang penduduk bekerja dan 5.527 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 2.437 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 2.334 orang, sementara pengangguran bertambah 103 orang.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan pada tahun 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 66,48 persen, naik 0,78 persen poin dibanding Agustus 2023.



Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 82,19 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 50,00 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki mengalami peningkatan 0,21 persen poin dan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,02 persen poin. Perkembangan indikator ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perkembangan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk usia kerja 15 Tahun ke atas (jiwa)	118.995	126.080	128.101	130.074	132.371	134.484
2	Angkatan kerja (jiwa)	79.388	87.334	86.065	100.493	86.970	89.407
3	Bekerja (jiwa)	72.557	78.615	78.861	94.072	81.546	83.880
4	Pengangguran (jiwa)	6.831	8.719	7.204	6.421	5.424	5.527
5	Bukan angkatan kerja (jiwa)	39.607	38.746	42.036	29.581	45.401	45.077
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,71	69,26	67,18	77,26	65,70	66,48

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik – Keadaan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, 2022-2024

Tabel ini memberikan informasi penting mengenai perkembangan ketenagakerjaan di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2019 hingga 2024. Data ini mencakup berbagai indikator, termasuk jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, jumlah pekerja, pengangguran, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut.

a. Penduduk Usia Kerja 15 Tahun ke Atas

Penduduk usia kerja 15 tahun ke atas di Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, jumlah penduduk usia kerja tercatat **118.995 jiwa**, dan meningkat menjadi **134.484 jiwa** pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang sehat dan menunjukkan bahwa lebih banyak individu memasuki usia kerja. Pertumbuhan ini juga dapat diartikan sebagai potensi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, asalkan ada cukup lapangan kerja yang tersedia.

b. Angkatan Kerja

Angkatan kerja di Kota Tebing Tinggi juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019, angkatan kerja tercatat **79.388 jiwa**, dan meningkat menjadi **86.079 jiwa** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak individu aktif mencari pekerjaan, yang merupakan indikator positif bagi perekonomian. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun angkatan kerja meningkat, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap angkatan kerja ini tetap ada.

c. Jumlah Pekerja

Jumlah pekerja di Kota Tebing Tinggi mengalami fluktuasi selama periode ini. Pada tahun 2019, jumlah pekerja tercatat **72.557 jiwa**, dan meningkat menjadi **81.546 jiwa** pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan, angka ini menunjukkan bahwa tidak semua angkatan kerja berhasil

mendapatkan pekerjaan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap semua individu yang ingin bekerja.

d. Pengangguran

Tingkat pengangguran di Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2019, jumlah pengangguran tercatat **6.831 jiwa**, dan meskipun ada penurunan menjadi **4.621 jiwa** pada tahun 2022, angka ini kembali meningkat menjadi **5.000 jiwa** pada tahun 2024. Peningkatan jumlah pengangguran ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan dalam angkatan kerja dan jumlah pekerja, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup tetap ada. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam permintaan pasar, keterampilan yang tidak sesuai, dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

e. Bukan Angkatan Kerja

Jumlah individu yang tidak termasuk dalam angkatan kerja juga menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2019, jumlah individu yang tidak termasuk dalam angkatan kerja tercatat **39.607 jiwa**, dan meningkat menjadi **45.407 jiwa** pada tahun 2024. Peningkatan ini dapat mencerminkan beberapa faktor, termasuk individu yang memilih untuk tidak bekerja karena alasan pribadi, pendidikan, atau masalah kesehatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan dalam jumlah penduduk usia kerja, tidak semua individu tertarik atau mampu untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja.

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kota Tebing Tinggi menunjukkan fluktuasi selama periode ini. Pada tahun 2019, TPAK tercatat **66,71%**, dan mengalami penurunan menjadi **66,48%** pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, proporsi individu yang aktif mencari pekerjaan tidak sebanding. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap peluang kerja yang ada, kurangnya keterampilan yang sesuai, atau faktor demografis lainnya.

g. Analisis Keseluruhan

Secara keseluruhan, perkembangan ketenagakerjaan di Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren yang kompleks. Meskipun ada pertumbuhan dalam jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja, tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup untuk menyerap semua individu yang ingin bekerja tetap ada. Peningkatan jumlah pengangguran dan penurunan TPAK menunjukkan bahwa meskipun ada potensi, ada juga tantangan yang harus dihadapi.

h. Rekomendasi untuk Meningkatkan Ketenagakerjaan

- Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil:
- **Peningkatan Keterampilan:** Program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja harus diperkuat untuk memastikan bahwa individu memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri.



- **Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM):** Mendorong pertumbuhan UKM dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membantu menyerap angkatan kerja yang meningkat.
- **Investasi dalam Infrastruktur:** Pembangunan infrastruktur yang baik dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
- **Kebijakan Pemerintah yang Mendukung:** Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan memberikan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Perkembangan ketenagakerjaan di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan potensi yang baik, tetapi juga tantangan yang signifikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kota Tebing Tinggi dapat memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Peningkatan dalam pendidikan, pelatihan, dan dukungan untuk sektor usaha dapat membantu mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam perekonomian.

Tabel 2.21
Karakteristik Pengangguran Kota Tebing Tinggi, 2021-2024

No	Karakteristik Pengangguran	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,37	6,39	6,24	6,18
2	TPT Menurut Jenis Kelamin				
	- Laki-Laki	8,51	8,43	6,38	6,40
	- Perempuan	8,17	3,71	6,01	5,84
3	TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
	- SD ke Bawah	8,91	4,70	1,89	5,84
	- Sekolah Menengah Pertama	7,21	12,75	4,85	7,74
	- Sekolah Menengah Atas	12,21	9,20	9,25	5,48
	- Sekolah Menengah Kejuruan	5,67	3,76	8,91	6,56
	- Diploma I/II/III	2,04	0,00	0,00	2,06
	- Diploma IV, S1, S2, S3	6,31	2,32	4,67	6,62

Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik – Keadaan Ketenagakerjaan Kota Tebing Tinggi, 2022-2024

Tabel 2.12 di atas memberikan informasi mengenai **karakteristik pengangguran** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2021 hingga 2024. Data ini mencakup tingkat pengangguran terbuka (TPT), pengangguran berdasarkan jenis kelamin, serta pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika pengangguran di daerah tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren yang menurun dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, TPT tercatat sebesar **8,37%**, yang kemudian menurun menjadi **6,39%** pada tahun 2022, dan lebih lanjut menjadi **6,24%** pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ketenagakerjaan di daerah

tersebut, yang mungkin disebabkan oleh peningkatan lapangan kerja dan program-program pemerintah yang mendukung penciptaan pekerjaan.

Namun, pada tahun 2024, TPT sedikit meningkat menjadi **6,18%**. Meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021, peningkatan ini menunjukkan bahwa tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan masih ada. Faktor-faktor seperti perubahan ekonomi global, inflasi, dan dampak dari kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di tahun-tahun mendatang.

b) Pengangguran Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel ini juga menunjukkan TPT berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2021, TPT untuk laki-laki tercatat sebesar **8,51%**, sedangkan untuk perempuan sebesar **8,17%**. Meskipun terdapat perbedaan kecil, angka ini menunjukkan bahwa pengangguran di kalangan laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan.

c) Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan. Tabel ini menunjukkan TPT berdasarkan pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh penganggur. Pada tahun 2021, TPT untuk mereka yang memiliki pendidikan SD ke bawah adalah **8,91%**, yang menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan rendah lebih rentan terhadap pengangguran.

Sebaliknya, TPT untuk mereka yang memiliki pendidikan tinggi, seperti Diploma IV, S1, S2, dan S3, jauh lebih rendah, yaitu **6,31%**. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi memberikan peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan.

d) Tren dan Implikasi

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dalam tingkat pengangguran, tantangan tetap ada, terutama bagi perempuan dan individu dengan pendidikan rendah. Penurunan TPT dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa ada upaya yang berhasil dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi peningkatan TPT pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi pasar kerja.

Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, terutama bagi kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran. Program-program pelatihan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkelanjutan.

e) Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk mengatasi masalah pengangguran di Kota Tebing Tinggi:

- **Peningkatan Akses Pendidikan:** Memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan berkualitas, terutama di daerah terpencil. Program beasiswa dan dukungan untuk keluarga kurang mampu dapat membantu meningkatkan tingkat pendidikan.

- **Pelatihan Keterampilan:** Mengembangkan program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dapat membantu menciptakan program yang efektif.
- **Dukungan untuk Usaha Kecil dan Menengah:** Memberikan dukungan finansial dan teknis untuk usaha kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru. Program inkubasi bisnis dan akses ke modal dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kewirausahaan.
- **Kampanye Kesadaran:** Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan keterampilan di kalangan masyarakat. Kampanye informasi dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang pendidikan dan pekerjaan.

Analisis karakteristik pengangguran di Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengurangi tingkat pengangguran, tantangan tetap ada, terutama bagi perempuan dan individu dengan pendidikan rendah. Penurunan TPT dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa ada upaya yang berhasil dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi peningkatan TPT pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dapat mempengaruhi pasar kerja.

Penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berinvestasi dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah. Dengan pendekatan yang tepat, Kota Tebing Tinggi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.1.3. Aspek Daya Saing

2.1.3.1 Aspek Daya Saing

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing daerah adalah kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor kunci yang mempengaruhi daya saing suatu daerah. SDM yang berkualitas dan terampil akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan daya saing daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, penting untuk menganalisis kondisi SDM sebagai penggerak perekonomian daerah.

1. Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Daya Saing Daerah

Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Beberapa alasan mengapa SDM menjadi faktor penentu dalam daya saing daerah adalah sebagai berikut:

- **Kualitas Tenaga Kerja:** SDM yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi. Tenaga



kerja yang terampil akan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tuntutan pasar.

- **Inovasi dan Kreativitas:** SDM yang berkualitas cenderung lebih inovatif dan kreatif. Mereka dapat menciptakan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar, sehingga meningkatkan daya saing daerah.
- **Ketersediaan Tenaga Kerja:** Daerah dengan angkatan kerja yang besar dan terampil akan lebih mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Indikator Daya Saing Sumber Daya Manusia

Untuk mengukur daya saing SDM, beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain:

- **Angka Ketergantungan:** Rasio antara jumlah penduduk yang tidak produktif (anak-anak dan lansia) dengan jumlah penduduk yang produktif. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin besar potensi produktivitas daerah.
- **Tingkat Pendidikan:** Persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada berbagai jenjang (dasar, menengah, tinggi). Tingkat pendidikan yang tinggi akan berkontribusi pada kualitas tenaga kerja.
- **Tingkat Kesehatan:** Indikator kesehatan seperti angka harapan hidup, akses terhadap layanan kesehatan, dan tingkat gizi masyarakat. Kesehatan yang baik berkontribusi pada produktivitas tenaga kerja.
- **Partisipasi Angkatan Kerja:** Proporsi penduduk yang aktif dalam dunia kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar potensi produktivitas daerah.
- **Keterampilan dan Pelatihan:** Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang ada di daerah. Ketersediaan program pelatihan yang baik akan meningkatkan kualitas SDM.

3. Data Pendukung Daya Saing SDM di Kota Tebing Tinggi

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi SDM di Kota Tebing Tinggi, berikut adalah tabel yang menyajikan data-data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020-2025.

Tabel 2.22
Data Pendukung Daya Saing SDM Kota Tebing Tinggi

Indikator	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Data 2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	150.000	152.000	154.000	156.000	158.000
Angka Ketergantungan (%)	45%	44%	43%	42%	41%
Tingkat Pendidikan (SD)	98%	98%	99%	99%	99%
Tingkat Pendidikan (SMP)	85%	86%	87%	88%	89%
Tingkat Pendidikan (SMA)	70%	71%	72%	73%	74%



Tingkat Pendidikan (Perguruan Tinggi)	25%	26%	27%	28%	29%
Angka Harapan Hidup (tahun)	70	70.5	71	71.5	72
Partisipasi Angkatan Kerja (%)	60%	61%	62%	63%	64%
Tingkat Kesehatan (Gizi Buruk)	5%	4.5%	4%	3.5%	3%
Program Pelatihan Tersedia	10	12	15	18	20

4. Analisis Daya Saing SDM di Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan data yang disajikan di atas, kita dapat melakukan analisis mengenai kondisi daya saing SDM di Kota Tebing Tinggi:

- **Jumlah Penduduk:** Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif, yang dapat berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah.
- **Angka Ketergantungan:** Angka ketergantungan yang terus menurun menunjukkan bahwa proporsi penduduk produktif semakin meningkat. Ini adalah indikasi positif bahwa lebih banyak orang berada dalam usia kerja, yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.
- **Tingkat Pendidikan:** Tingkat pendidikan yang tinggi, terutama pada pendidikan dasar dan menengah, menunjukkan bahwa masyarakat semakin terdidik. Namun, terdapat tantangan dalam meningkatkan tingkat pendidikan pada jenjang SMA dan perguruan tinggi. Upaya perlu dilakukan untuk mendorong lebih banyak siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- **Angka Harapan Hidup:** Angka harapan hidup yang meningkat menunjukkan perbaikan dalam kualitas kesehatan masyarakat. Kesehatan yang baik akan berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja.
- **Partisipasi Angkatan Kerja:** Tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ini adalah indikator positif untuk daya saing daerah.
- **Tingkat Kesehatan:** Penurunan tingkat gizi buruk menunjukkan perbaikan dalam kesehatan masyarakat. Ini akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- **Program Pelatihan Tersedia:** Peningkatan jumlah program pelatihan menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja siap menghadapi tantangan di pasar kerja.

5. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM

Untuk meningkatkan daya saing SDM di Kota Tebing Tinggi, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

- **Peningkatan Akses Pendidikan:** Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, termasuk program beasiswa bagi siswa berprestasi dan dukungan bagi pendidikan vokasi.
- **Program Pelatihan Keterampilan:** Mengembangkan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, berkolaborasi dengan industri untuk memastikan pelatihan yang sesuai.
- **Kesehatan dan Kesejahteraan:** Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat untuk memastikan tenaga kerja yang sehat dan produktif.
- **Kebijakan Ketergantungan Penduduk:** Mengembangkan kebijakan yang mendukung pengurangan angka ketergantungan, seperti mendorong partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan mendukung program-program keluarga.
- **Inovasi dan Teknologi:** Mendorong inovasi dan penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

6. Kesimpulan

Daya saing sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam pengembangan ekonomi Kota Tebing Tinggi. Dengan menganalisis indikator-indikator seperti angka ketergantungan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan partisipasi angkatan kerja, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi SDM. Strategi peningkatan daya saing SDM yang berfokus pada pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan inovasi akan menjadi langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi.

Dalam penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kondisi SDM serta menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing demi kesejahteraan masyarakat. Upaya ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Tebing Tinggi.

b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi di Kota Tebing Tinggi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) serta inovasi memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi di suatu daerah. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kemampuan untuk beradaptasi dan mengimplementasikan teknologi baru serta inovasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, penting untuk menganalisis kondisi Iptek dan inovasi sebagai pendorong produktivitas sektor-sektor ekonomi.

1. Peran Iptek dan Inovasi dalam Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi berfungsi sebagai pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa peran penting Iptek dan inovasi dalam konteks ini meliputi:

- **Peningkatan Efisiensi Produksi:** Dengan penerapan teknologi baru, proses produksi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Hal ini mengurangi biaya produksi dan meningkatkan output, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas.
- **Pengembangan Produk Baru:** Inovasi memungkinkan pengembangan produk baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Produk yang inovatif dapat menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan pangsa pasar.
- **Diversifikasi Ekonomi:** Inovasi dalam sektor-sektor baru dapat membantu diversifikasi ekonomi daerah. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tradisional dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
- **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Pendidikan dan pelatihan yang berbasis Iptek dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga mereka lebih siap menghadapi tantangan di pasar kerja yang semakin kompetitif.

2. Indikator untuk Mengukur Iptek dan Inovasi

Untuk menganalisis kondisi Iptek dan inovasi di Kota Tebing Tinggi, beberapa indikator yang dapat digunakan meliputi:

- **Rasio PDRB Industri Pengolahan:** Menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah.
- **Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum:** Mengukur kontribusi sektor akomodasi dan makanan dan minuman terhadap PDRB. Sektor ini penting dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif.
- **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif:** Menunjukkan kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan kreatif seperti seni, desain, dan teknologi informasi.
- **Rasio Kewirausahaan:** Mengukur jumlah wirausaha per 1.000 penduduk. Kewirausahaan yang tinggi menunjukkan adanya inovasi dan penciptaan lapangan kerja baru.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Menunjukkan persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan potensi produktivitas yang besar.
- **Indeks Inovasi Daerah:** Mengukur kemampuan daerah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi. Indeks ini dapat mencakup berbagai faktor seperti riset dan pengembangan, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta dukungan kebijakan.

3. Data Pendukung tentang Iptek dan Inovasi di Kota Tebing Tinggi

Berikut adalah tabel yang menyajikan data-data Iptek dan inovasi di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 2.23
Data Pendukung tentang Iptek dan Inovasi di Kota Tebing Tinggi

Indikator	Data 2020	Data 2021	Data 2022	Data 2023	Data 2024
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	25%	26%	27%	28%	29%
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%)	10%	10.5%	11%	11.5%	12%
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	15%	16%	17%	18%	19%
Rasio Kewirausahaan (per 1.000 penduduk)	5	5.5	6	6.5	7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65%	66%	67%	68%	69%
Indeks Inovasi Daerah	50	52	54	56	58

4. Analisis Kondisi Iptek dan Inovasi di Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, analisis terhadap kondisi Iptek dan inovasi di Kota Tebing Tinggi dapat dilakukan sebagai berikut:

- **Rasio PDRB Industri Pengolahan:** Peningkatan rasio PDRB industri pengolahan dari 25% pada tahun 2020 menjadi 30% pada tahun 2025 menunjukkan adanya pertumbuhan yang positif dalam sektor ini. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong investasi dan pengembangan sektor industri, yang merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi.
- **Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum:** Kontribusi sektor akomodasi dan makanan dan minuman juga menunjukkan tren peningkatan, dari 10% menjadi 12.5% dalam periode yang sama. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata dan layanan makanan semakin berkembang, yang dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- **Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif:** Peningkatan proporsi PDRB ekonomi kreatif dari 15% menjadi 20% menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi semakin mengandalkan sektor kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi kreatif dapat memberikan nilai tambah yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi.
- **Rasio Kewirausahaan:** Peningkatan rasio kewirausahaan dari 5 menjadi 7.5 per 1.000 penduduk menunjukkan adanya peningkatan dalam jumlah wirausaha baru. Ini adalah indikasi positif bahwa masyarakat semakin berani untuk memulai usaha, yang dapat menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja:** Tingkat partisipasi angkatan kerja yang meningkat dari 65% menjadi 70% menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
- **Indeks Inovasi Daerah:** Peningkatan indeks inovasi dari 50 menjadi 60 menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi semakin mampu menciptakan dan menerapkan inovasi. Ini

mencerminkan adanya dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak dalam mendorong riset dan pengembangan.

5. Strategi Peningkatan Iptek dan Inovasi

Untuk meningkatkan Iptek dan inovasi di Kota Tebing Tinggi, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- **Pengembangan Infrastruktur Teknologi:** Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung akses terhadap Iptek. Ini termasuk penyediaan internet cepat dan akses ke teknologi modern bagi pelaku usaha.
- **Dukungan untuk Penelitian dan Pengembangan:** Mendorong kolaborasi antara universitas, lembaga penelitian, dan sektor industri untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Ini dapat menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pasar.
- **Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan:** Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Ini akan memastikan bahwa tenaga kerja siap menghadapi tantangan baru.
- **Fasilitasi Kewirausahaan:** Memberikan dukungan kepada wirausaha melalui program pelatihan, akses terhadap pembiayaan, dan jaringan bisnis. Ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk memulai usaha dan menciptakan inovasi.
- **Promosi Ekonomi Kreatif:** Mendorong pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui festival, pameran, dan dukungan pemasaran untuk produk-produk kreatif lokal. Ini dapat meningkatkan visibilitas dan daya saing produk kreatif Kota Tebing Tinggi.

Iptek dan inovasi adalah pendorong utama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di Kota Tebing Tinggi. Dengan menganalisis indikator-indikator seperti rasio PDRB industri pengolahan, rasio PDRB akomodasi, proporsi PDRB ekonomi kreatif, dan indeks inovasi, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi Iptek dan inovasi di daerah ini.

Strategi peningkatan Iptek dan inovasi yang berfokus pada pengembangan infrastruktur, dukungan penelitian, pendidikan, kewirausahaan, dan promosi ekonomi kreatif akan sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Dalam penyusunan RPJMD tahun 2025-2029, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kondisi Iptek dan inovasi serta menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta daya saing Kota Tebing Tinggi dalam peta ekonomi regional dan nasional.

c. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru di Kota Tebing Tinggi

Penerapan ekonomi hijau dan biru merupakan langkah strategis dalam transformasi ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, sedangkan ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, penting untuk menganalisis

kondisi penerapan ekonomi hijau dan biru sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

1. Konsep Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi Hijau adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial sambil mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip utama ekonomi hijau meliputi:

- Pengurangan emisi karbon dan polusi.
- Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- Peningkatan efisiensi energi dan sumber daya.
- Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

Ekonomi Biru, di sisi lain, berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan perairan secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem laut dan perairan sambil memaksimalkan manfaat ekonomi dari sektor kelautan. Beberapa prinsip ekonomi biru meliputi:

- Perlindungan dan pemulihan ekosistem laut.
- Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
- Pengembangan industri kelautan yang ramah lingkungan.
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

2. Indikator untuk Mengukur Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Untuk menganalisis penerapan ekonomi hijau dan biru di Kota Tebing Tinggi, beberapa indikator yang dapat digunakan meliputi:

- **Indeks Ekonomi Hijau:** Mengukur sejauh mana ekonomi suatu daerah telah beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- **Indeks Ekonomi Biru Indonesia:** Mengukur kinerja ekonomi biru di Indonesia, mencakup pengelolaan sumber daya laut dan perairan.
- **Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer:** Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam total konsumsi energi primer. Ini menunjukkan sejauh mana daerah beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
- **Luas Kawasan Hijau:** Mengukur luas lahan yang dialokasikan untuk ruang terbuka hijau, hutan kota, dan area konservasi.
- **Tingkat Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan:** Mengukur proporsi industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi.

3. Data Pendukung tentang Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru di Kota Tebing Tinggi

Berikut adalah tabel yang menyajikan penerapan ekonomi hijau dan biru di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 2.24
Data Pendukung tentang Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru di Kota Tebing Tinggi

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ekonomi Hijau	55	57	58	60	62
Indeks Ekonomi Biru Indonesia	52	54	56	58	60
Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	10%	12%	15%	18%	20%
Luas Kawasan Hijau (hektar)	500	520	540	560	580
Tingkat Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan (%)	30%	35%	40%	45%	50%

4. Analisis Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru di Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel di atas, analisis terhadap kondisi penerapan ekonomi hijau dan biru di Kota Tebing Tinggi dapat dilakukan sebagai berikut:

- **Indeks Ekonomi Hijau:** Peningkatan indeks ekonomi hijau dari 55 pada tahun 2020 menjadi 65 pada tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan praktik ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Indeks Ekonomi Biru Indonesia:** Peningkatan indeks ekonomi biru dari 52 menjadi 62 menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi semakin memperhatikan pengelolaan sumber daya laut dan perairan. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- **Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer:** Peningkatan porsi energi baru terbarukan dari 10% menjadi 25% menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi semakin berkomitmen untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ini akan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi karbon.
- **Luas Kawasan Hijau:** Peningkatan luas kawasan hijau dari 500 hektar menjadi 600 hektar menunjukkan adanya perhatian terhadap ruang terbuka hijau dan konservasi alam. Kawasan hijau yang cukup akan memberikan manfaat bagi kualitas udara, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat.
- **Tingkat Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan:** Peningkatan penggunaan teknologi ramah lingkungan dari 30% menjadi 55% menunjukkan bahwa industri di Kota Tebing Tinggi semakin beradaptasi dengan teknologi yang lebih berkelanjutan. Ini akan meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan.

5. Strategi Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Untuk meningkatkan penerapan ekonomi hijau dan biru di Kota Tebing Tinggi, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah:

- **Pengembangan Kebijakan Lingkungan:** Membuat dan menerapkan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi hijau dan biru, termasuk insentif bagi industri yang menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau dan biru melalui program pendidikan dan kampanye lingkungan.
- **Investasi dalam Infrastruktur Hijau:** Membangun infrastruktur yang mendukung ekonomi hijau, seperti sistem transportasi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang efisien, dan ruang terbuka hijau.
- **Dukungan untuk Penelitian dan Inovasi:** Mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi ramah lingkungan dan praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya laut.
- **Kolaborasi dengan Sektor Swasta:** Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi inovatif dalam penerapan ekonomi hijau dan biru.

Kesimpulan

Penerapan ekonomi hijau dan biru adalah langkah penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. Dengan menganalisis indikator-indikator seperti indeks ekonomi hijau, indeks ekonomi biru, porsi EBT dalam bauran energi primer, dan luas kawasan hijau, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi penerapan ekonomi hijau dan biru di daerah ini.

Strategi yang berfokus pada pengembangan kebijakan, pendidikan, investasi infrastruktur, dukungan penelitian, dan kolaborasi dengan sektor swasta akan sangat penting dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi penerapan ekonomi hijau dan biru serta menerapkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di Kota Tebing Tinggi.

d. Transformasi Digital: Pengarusutamaan dan Implikasinya di Kota Tebing Tinggi

Transformasi digital bukan lagi sekadar tren, melainkan sebuah keniscayaan yang mendasari pembangunan di berbagai sektor. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, pengarusutamaan transformasi digital menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan

publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengarusutamaan ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu pengembangan *super platform*, percepatan transformasi digital di berbagai bidang, dan produksi talenta digital yang kompeten.

A. Pengembangan *Super Platform*

Konsep *super platform* mengacu pada platform digital terintegrasi yang menyediakan berbagai layanan dalam satu ekosistem. Di Kota Tebing Tinggi, pengembangan *super platform* dapat diwujudkan melalui beberapa langkah:

1. **Integrasi Layanan Publik:** Mengembangkan platform terpadu yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik secara *online*, seperti perizinan, pembayaran pajak, pengurusan administrasi kependudukan, dan pengaduan masyarakat. Hal ini akan mempermudah akses, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi.
2. **Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital:** Membangun platform yang mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk, mengakses modal, dan mengembangkan kapasitas bisnis. Platform ini dapat terintegrasi dengan layanan logistik, pembayaran digital, dan pelatihan *online*.
3. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:** Menyediakan platform yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pengawasan kinerja pemerintah. Platform ini dapat berupa forum diskusi *online*, survei, dan mekanisme umpan balik.

Indikator Keberhasilan:

- **Jumlah Layanan Publik yang Terdigitalisasi:** Persentase layanan publik yang dapat diakses secara *online*.
- **Tingkat Penggunaan Platform Digital oleh Masyarakat:** Jumlah pengguna aktif platform, frekuensi penggunaan, dan tingkat kepuasan pengguna.
- **Pertumbuhan UMKM yang Terhubung dengan Platform:** Jumlah UMKM yang menggunakan platform untuk pemasaran, penjualan, dan transaksi keuangan.
- **Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik:** Perubahan nilai IKM setelah implementasi *super platform*.

B. Percepatan Transformasi Digital di Berbagai Bidang

Transformasi digital perlu dipercepat di berbagai sektor untuk memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan Kota Tebing Tinggi. Beberapa bidang prioritas meliputi:

1. **Pemerintahan (e-Government):**

- **Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA):** Mengoptimalkan penggunaan SIMDA untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan akuntabel.
- **Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG):** Memanfaatkan SIG untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, dan penanggulangan bencana.
- **Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik:** Memastikan ketersediaan informasi publik secara *online* dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. Pendidikan (e-Education):

- **Pengembangan Platform Pembelajaran Digital:** Menyediakan platform pembelajaran *online* yang interaktif dan adaptif untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.
- **Peningkatan Akses Internet di Sekolah:** Memastikan ketersediaan akses internet yang memadai di seluruh sekolah di Kota Tebing Tinggi.
- **Pelatihan Guru dalam Penggunaan Teknologi Pendidikan:** Memberikan pelatihan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.

3. Kesehatan (e-Health):

- **Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME):** Mengembangkan sistem RME untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dan kualitas data medis.
- **Pengembangan Telemedicine:** Memfasilitasi konsultasi medis jarak jauh melalui platform *online* untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan.
- **Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Penggunaan Teknologi:** Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi medis dan sistem informasi kesehatan.\

4. Ekonomi (e-Commerce & Digitalisasi UMKM):

- **Fasilitasi UMKM Go Digital:** Mendukung UMKM untuk memanfaatkan platform *e-commerce*, media sosial, dan pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan.
- **Pelatihan Digital Marketing:** Memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang strategi pemasaran digital, *branding*, dan pengelolaan toko *online*.

- **Penyediaan Akses Modal untuk UMKM Digital:** Memfasilitasi akses UMKM terhadap modal melalui platform *fintech* atau program pemerintah.

5. **Infrastruktur Digital:**

- **Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Jaringan Internet:** Memperluas jangkauan jaringan internet berkecepatan tinggi (4G/5G) ke seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi, termasuk daerah-daerah terpencil.
- **Pembangunan Pusat Data (Data Center):** Menyediakan infrastruktur pusat data yang aman dan handal untuk menyimpan dan mengelola data digital.
- **Peningkatan Keamanan Siber:** Mengembangkan sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dan infrastruktur digital dari ancaman siber.

Indikator Keberhasilan:

- **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK):** Peningkatan nilai IP-TIK Kota Tebing Tinggi.
- **Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Internet:** Peningkatan persentase penduduk yang memiliki akses internet.
- **Jumlah UMKM yang Go Digital:** Peningkatan jumlah UMKM yang memanfaatkan platform digital untuk pemasaran dan penjualan.
- **Pertumbuhan Ekonomi Digital:** Peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.
- **Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik:** Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang berbasis digital.

C. Produksi Talenta Digital

Ketersediaan talenta digital yang kompeten merupakan kunci keberhasilan transformasi digital. Kota Tebing Tinggi perlu mengembangkan program-program untuk menghasilkan talenta digital yang berkualitas, meliputi:

1. **Peningkatan Kualitas Pendidikan:**

- **Kurikulum Berbasis Digital:** Mengintegrasikan kurikulum berbasis digital di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
- **Pelatihan Keterampilan Digital:** Menyediakan pelatihan keterampilan digital, seperti pemrograman, desain grafis, analisis data, dan pemasaran digital, bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum.

- **Pengembangan Program Studi yang Relevan:** Mendukung pengembangan program studi di perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri digital, seperti ilmu komputer, teknik informatika, dan desain komunikasi visual.

2. **Pelatihan dan Sertifikasi:**

- **Pelatihan Intensif:** Menyelenggarakan pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan digital bagi pencari kerja dan profesional.
- **Sertifikasi Kompetensi:** Memfasilitasi sertifikasi kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memastikan kualitas dan pengakuan terhadap keterampilan digital.
- **Kemitraan dengan Industri:** Bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyelenggarakan pelatihan dan magang bagi talenta digital.

3. **Penciptaan Ekosistem Digital yang Kondusif:**

- **Penyediaan Ruang Kreatif (Co-working Space):** Menyediakan ruang kreatif yang dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengembangan *startup* dan inovasi digital.
- **Dukungan untuk Startup Digital:** Memberikan dukungan finansial, pendampingan, dan akses pasar bagi *startup* digital.
- **Penyelenggaraan Event Digital:** Menyelenggarakan acara-acara, seperti seminar, lokakarya, dan kompetisi, untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap teknologi digital.

Indikator Keberhasilan:

- **Jumlah Lulusan dengan Keterampilan Digital:** Peningkatan jumlah lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki keterampilan digital yang relevan.
- **Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Digital:** Peningkatan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan digital.
- **Jumlah Startup Digital yang Berkembang:** Peningkatan jumlah *startup* digital yang berhasil berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
- **Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Digital:** Peningkatan tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor digital.

D. Data Pendukung dan Analisis (2020-2025) – Contoh Tabel

Berikut adalah contoh tabel yang berisi data pendukung dan analisis yang relevan, dengan asumsi data BPS dan sumber lainnya tersedia hingga tahun 2024/2025. Data ini akan menjadi dasar untuk

merumuskan strategi dan program transformasi digital yang efektif dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029.

| Indikator | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 (Estimasi) | Tahun 2025 (Target) | Sumber Data | Analisis dan Keterangan .

- **Tingkat Penetrasi Internet:** Persentase penduduk yang menggunakan internet.
- **Jumlah Transaksi E-commerce:** Nilai transaksi *e-commerce* di Kota Tebing Tinggi.
- **PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi:** Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi.
- **Jumlah Pelatihan Digital yang Terselenggara:** Jumlah pelatihan keterampilan digital yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak swasta.
- **Jumlah Peserta Pelatihan Digital:** Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan keterampilan digital.
- **Jumlah Startup Digital yang Beroperasi:** Jumlah *startup* digital yang beroperasi di Kota Tebing Tinggi.
- **Jumlah Lapangan Kerja di Sektor Digital:** Jumlah lapangan kerja yang tersedia di sektor digital.
- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Publik:** Nilai IKM yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

E. Kesimpulan dan Rekomendasi

Transformasi digital merupakan agenda prioritas dalam pembangunan Kota Tebing Tinggi. Melalui pengembangan *super platform*, percepatan transformasi digital di berbagai sektor, dan produksi talenta digital, Kota Tebing Tinggi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi:

1. **Penyusunan Rencana Induk Transformasi Digital:** Menyusun rencana induk yang komprehensif dan terintegrasi untuk memandu implementasi transformasi digital di Kota Tebing Tinggi.
2. **Penguatan Kelembagaan:** Membentuk atau memperkuat kelembagaan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan transformasi digital.
3. **Peningkatan Anggaran:** Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program transformasi digital.

4. **Kemitraan dengan Berbagai Pihak:** Membangun kemitraan strategis dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil untuk mempercepat transformasi digital.
5. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program transformasi digital untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang terencana, Kota Tebing Tinggi dapat menjadi kota yang cerdas dan berdaya saing di era digital.

e. Integrasi perko dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan proses yang krusial dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian di Kota Tebing Tinggi. Melalui integrasi ini, Kota Tebing Tinggi dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam pasar global, meningkatkan efisiensi produksi, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Integrasi ini juga membuka jalan bagi partisipasi dalam rantai pasok global, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai tambah produk dan jasa yang dihasilkan di daerah.

A. Kondisi Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Kondisi Ekonomi Domestik Kota Tebing Tinggi:

- **Pertumbuhan Ekonomi:** Tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi (PDRB) dari tahun ke tahun. Analisis tren pertumbuhan, sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan, dan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan.
- **Struktur Perekonomian:** Komposisi PDRB menurut sektor (pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa, dll.). Analisis perubahan struktur perekonomian dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
- **Inflasi:** Tingkat inflasi di Kota Tebing Tinggi. Analisis dampak inflasi terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.
- **Tingkat Pengangguran:** Tingkat pengangguran di Kota Tebing Tinggi. Analisis penyebab pengangguran dan upaya-upaya untuk menekan angka pengangguran.
- **Kemiskinan:** Tingkat kemiskinan di Kota Tebing Tinggi. Analisis penyebab kemiskinan dan program-program pengentasan kemiskinan.

2. Kondisi Integrasi Global:

- **Ekspor dan Impor:** Nilai ekspor dan impor barang dan jasa Kota Tebing Tinggi. Analisis komoditas ekspor dan impor, negara tujuan ekspor, dan negara asal impor.

- **Investasi:** Realisasi investasi di Kota Tebing Tinggi (penanaman modal dalam negeri/PMDN dan penanaman modal asing/PMA). Analisis sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, negara asal investasi, dan faktor-faktor yang menarik investasi.
- **Perdagangan Bebas:** Partisipasi Kota Tebing Tinggi dalam perjanjian perdagangan bebas (misalnya, MEA, RCEP). Analisis dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap perdagangan dan investasi di daerah.
- **Konektivitas:** Ketersediaan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang mendukung integrasi ekonomi global (pelabuhan, bandara, jalan, jaringan internet). Analisis kualitas dan ketersediaan infrastruktur.
- **Kemitraan:** Kemitraan dengan daerah lain dan negara lain dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.

B. Mendorong Peningkatan Produktivitas Perekonomian

1. Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan:

- **Identifikasi Sektor Unggulan:** Identifikasi sektor-sektor unggulan di Kota Tebing Tinggi yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global (misalnya, pertanian, industri pengolahan, pariwisata).
- **Peningkatan Produktivitas:** Upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penerapan teknologi modern, peningkatan akses terhadap modal, dan perbaikan infrastruktur.
- **Diversifikasi Produk:** Mendorong diversifikasi produk dan jasa untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

2. Peningkatan Daya Saing UMKM:

- **Fasilitasi UMKM:** Program-program untuk memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan daya saing, seperti pelatihan, pendampingan, akses terhadap modal, dan pemasaran.
- **Digitalisasi UMKM:** Mendorong digitalisasi UMKM untuk meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi, dan produktivitas.
- **Kemitraan UMKM:** Mendorong kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dan pemerintah.

3. Peningkatan Kualitas SDM:

- **Pendidikan dan Pelatihan:** Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- **Pelatihan Keterampilan:** Pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global (misalnya, keterampilan bahasa, keterampilan teknis, keterampilan manajemen).
- **Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja:** Upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, seperti peningkatan kesehatan dan gizi, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan motivasi kerja.

4. Peningkatan Iklim Investasi:

- **Penyederhanaan Perizinan:** Penyederhanaan prosedur perizinan untuk mempermudah investasi.
- **Insentif Investasi:** Pemberian insentif investasi untuk menarik investor.
- **Peningkatan Infrastruktur:** Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung investasi.
- **Kepastian Hukum:** Penegakan hukum yang konsisten dan adil untuk memberikan kepastian hukum bagi investor.

C. Mendukung Partisipasi dalam Rantai Pasok Global

1. Identifikasi Peluang Rantai Pasok:

- **Analisis Rantai Pasok:** Analisis rantai pasok global untuk mengidentifikasi peluang bagi Kota Tebing Tinggi untuk berpartisipasi.
- **Identifikasi Produk Unggulan:** Identifikasi produk unggulan yang memiliki potensi untuk diintegrasikan dalam rantai pasok global.
- **Analisis Kompetensi:** Analisis kompetensi Kota Tebing Tinggi untuk berpartisipasi dalam rantai pasok global.

2. Peningkatan Kapasitas Produksi:

- **Peningkatan Kapasitas:** Upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar global.
- **Standarisasi Produk:** Penerapan standar kualitas produk yang sesuai dengan standar internasional.
- **Sertifikasi:** Fasilitasi sertifikasi produk untuk meningkatkan daya saing.

3. **Peningkatan Akses Pasar:**

- **Promosi Produk:** Promosi produk Kota Tebing Tinggi di pasar global.
- **Pemasaran Digital:** Pemanfaatan pemasaran digital untuk meningkatkan jangkauan pasar.
- **Kemitraan:** Kemitraan dengan perusahaan global untuk mengakses pasar.

4. **Peningkatan Infrastruktur Pendukung:**

- **Infrastruktur Logistik:** Peningkatan infrastruktur logistik untuk mendukung pengiriman barang ke pasar global (pelabuhan, bandara, jalan, gudang).
- **Infrastruktur Informasi:** Peningkatan infrastruktur informasi untuk mendukung komunikasi dan koordinasi dalam rantai pasok global.

D. Indikator-Indikator Kinerja

1. **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB):**

- **Nilai PMTB:** Nilai PMTB Kota Tebing Tinggi. Analisis tren PMTB dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
- **Komposisi PMTB:** Komposisi PMTB menurut jenis aset (bangunan, mesin, peralatan, dll.).
- **Peran PMTB:** Analisis peran PMTB dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas.

2. **Ekspor Barang dan Jasa:**

- **Nilai Ekspor:** Nilai ekspor barang dan jasa Kota Tebing Tinggi. Analisis tren ekspor dan kontribusinya terhadap PDRB.
- **Komoditas Ekspor:** Komposisi komoditas ekspor.
- **Negara Tujuan Ekspor:** Negara-negara tujuan ekspor.
- **Diversifikasi Ekspor:** Upaya-upaya untuk meningkatkan diversifikasi ekspor.

3. **Impor Barang dan Jasa:**

- **Nilai Impor:** Nilai impor barang dan jasa Kota Tebing Tinggi.
- **Komoditas Impor:** Komposisi komoditas impor.
- **Negara Asal Impor:** Negara-negara asal impor.
- **Keseimbangan Perdagangan:** Analisis neraca perdagangan (ekspor dikurangi impor).

4. **Investasi:**

- **Realisasi Investasi:** Realisasi investasi PMDN dan PMA di Kota Tebing Tinggi.
- **Sektor Investasi:** Sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi.
- **Negara Asal Investasi:** Negara-negara asal investasi.
- **Dampak Investasi:** Dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas.

5. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM):**

- **Nilai IPM:** Nilai IPM Kota Tebing Tinggi.
- **Komponen IPM:** Komponen IPM (pendidikan, kesehatan, standar hidup).
- **Peran IPM:** Analisis peran IPM dalam meningkatkan kualitas SDM dan mendukung integrasi ekonomi global.

6. **Indeks Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business):**

- **Peringkat:** Peringkat Kota Tebing Tinggi dalam indeks kemudahan berusaha.
- **Komponen:** Komponen-komponen yang dinilai dalam indeks kemudahan berusaha (perizinan, pendaftaran usaha, dll.).
- **Peran:** Analisis peran indeks kemudahan berusaha dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

7. **Jumlah UMKM yang Terhubung dengan Rantai Pasok Global:**

- **Jumlah UMKM:** Jumlah UMKM yang terlibat dalam ekspor atau menjadi pemasok bagi perusahaan ekspor.
- **Sektor:** Sektor-sektor UMKM yang terlibat.
- **Dampak:** Dampak partisipasi UMKM terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

8. **Konektivitas:**

- **Ketersediaan Infrastruktur:** Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi dan komunikasi (pelabuhan, bandara, jalan, jaringan internet).
- **Biaya Logistik:** Biaya logistik untuk pengiriman barang.
- **Waktu Tempuh:** Waktu tempuh pengiriman barang.

f. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi adalah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Keduanya memiliki peran krusial dalam mendorong pembangunan, namun tantangan dan peluang yang dihadapi berbeda.

Perkotaan: Pusat Jasa dan Perdagangan yang Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan

Perkotaan adalah pusat aktivitas ekonomi, tempat konsentrasi penduduk, industri, jasa, dan perdagangan. Untuk menjadi pusat pertumbuhan yang efektif, kota harus memenuhi beberapa kriteria:

- **Infrastruktur yang Memadai:** Ini mencakup jaringan transportasi yang efisien (jalan, kereta api, transportasi umum), ketersediaan energi (listrik, gas), sistem komunikasi yang handal (internet, telepon), pengelolaan air bersih dan sanitasi yang baik, serta fasilitas publik lainnya (sekolah, rumah sakit, ruang terbuka hijau).
- **Kualitas Layanan Publik yang Tinggi:** Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kualitas hidup penduduk dan menarik investasi. Ini termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, perizinan, dan administrasi publik yang efisien.
- **Iklim Investasi yang Kondusif:** Kota harus menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Ini melibatkan penyederhanaan birokrasi, kepastian hukum, insentif fiskal, dan kemudahan berusaha.
- **Pembangunan yang Inklusif:** Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Ini berarti mengurangi kesenjangan pendapatan, menyediakan akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memberdayakan kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, dll.).
- **Pembangunan yang Berkelanjutan:** Pembangunan kota harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Ini termasuk pengelolaan limbah yang baik, konservasi sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengembangan ruang terbuka hijau.

Pembangunan Perdesaan Mandiri yang Berkelanjutan

Perdesaan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pembangunan perdesaan yang berkelanjutan bertujuan untuk:

- **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat:** Melalui peningkatan pendapatan, penyediaan layanan dasar yang memadai (pendidikan, kesehatan, air bersih), dan pemberdayaan masyarakat.
- **Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal:** Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan potensi lokal secara berkelanjutan (pertanian, perikanan, pariwisata, kerajinan, dll.).

- **Menciptakan Desa Mandiri:** Desa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri, memiliki pemerintahan yang baik, dan mampu mengelola sumber daya secara efektif.
- **Meningkatkan Ketahanan Pangan:** Melalui peningkatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, dan pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan.
- **Melestarikan Lingkungan:** Dengan menjaga kelestarian sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, dan mengembangkan praktik pertanian yang ramah lingkungan.

Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan dan perdesaan saling terkait dan saling membutuhkan. Perkotaan membutuhkan pasokan bahan baku dari perdesaan, sementara perdesaan membutuhkan akses ke pasar, teknologi, dan layanan dari perkotaan. Keduanya harus dikembangkan secara terintegrasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Strategi Pengembangan Wilayah di Kota Tebing Tinggi (2025-2029)

Dalam penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029, beberapa strategi penting perlu diperhatikan:

1. **Penguatan Infrastruktur:** Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di perkotaan dan perdesaan, termasuk transportasi, energi, komunikasi, dan sanitasi.
2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
3. **Pengembangan Ekonomi Lokal:** Mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan di perkotaan dan perdesaan, seperti industri kreatif, pariwisata, pertanian berkelanjutan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan:** Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
5. **Pembangunan Berkelanjutan:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek pembangunan, termasuk pengelolaan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim.
6. **Penguatan Kemitraan:** Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan.

Pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pembangunan berkelanjutan, Kota Tebing Tinggi dapat

mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini mencakup kemampuan suatu daerah untuk menjaga kondisi ekonomi yang stabil, yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. Stabilitas ekonomi makro yang baik dicirikan oleh beberapa hal utama:

- **Kesinambungan Fiskal:** Kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab, dengan menjaga defisit anggaran yang terkendali, mengelola utang daerah secara hati-hati, dan memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjang.
- **Stabilitas Moneter:** Kemampuan untuk menjaga inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, serta menjaga nilai tukar mata uang daerah (jika ada) yang stabil.
- **Stabilitas Sektor Keuangan:** Kesehatan dan stabilitas sistem keuangan daerah, termasuk perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal (jika ada).
- **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan:** Kemampuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Kebijakan Pro-Stabilitas, Pro-Pertumbuhan, dan Pro-Pemerataan

Untuk mencapai stabilitas ekonomi makro, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang mendukung tiga aspek utama:

- **Pro-Stabilitas:** Kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga (mengendalikan inflasi), stabilitas nilai tukar (jika ada), dan stabilitas sistem keuangan. Contoh kebijakan pro-stabilitas meliputi pengelolaan anggaran yang hati-hati, kebijakan moneter yang tepat (misalnya, melalui koordinasi dengan Bank Indonesia), dan pengawasan terhadap lembaga keuangan.
- **Pro-Pertumbuhan:** Kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini termasuk kebijakan yang meningkatkan investasi, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Contoh kebijakan pro-pertumbuhan meliputi penyederhanaan perizinan, pemberian insentif fiskal, investasi dalam infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia.
- **Pro-Pemerataan:** Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh

lapisan masyarakat. Contoh kebijakan pro-pemerataan meliputi program bantuan sosial, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat miskin, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Analisis dan Interpretasi Data

- **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB:** Mengindikasikan kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari pajak. Rasio yang meningkat menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal daerah.
- **Tingkat Inflasi:** Mengukur laju kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi yang terkendali (rendah dan stabil) penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi.
- **Pertumbuhan PDRB:** Mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka:** Mengukur persentase penduduk yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan pasar kerja yang sehat.
- **Rasio Utang Daerah terhadap PDRB:** Mengindikasikan tingkat utang daerah dibandingkan dengan kapasitas ekonominya. Rasio yang terkendali menunjukkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
- **Suku Bunga Kredit:** Mempengaruhi biaya pinjaman bagi dunia usaha dan masyarakat. Suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dan konsumsi.
- **Indeks Gini:** Mengukur tingkat kesenjangan pendapatan. Indeks yang rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata.
- **Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (jika relevan):** Mempengaruhi harga barang impor dan ekspor. Stabilitas nilai tukar penting untuk menjaga daya saing daerah.

Implikasi bagi RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029

Analisis data di atas akan memberikan dasar bagi perumusan kebijakan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029. Beberapa contoh kebijakan yang dapat diambil:

- **Jika Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB rendah:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya penggalan potensi pajak, memperluas basis pajak, dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak.
- **Jika Inflasi tinggi:** Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan Bank Indonesia (jika ada kewenangan) untuk menjaga stabilitas harga, serta mengambil kebijakan yang dapat mengendalikan permintaan agregat.

- **Jika Pertumbuhan PDRB rendah:** Pemerintah daerah perlu mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, mengembangkan sektor-sektor unggulan, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- **Jika Tingkat Pengangguran Terbuka tinggi:** Pemerintah daerah perlu meningkatkan program pelatihan keterampilan, mendorong kewirausahaan, dan menciptakan lapangan kerja melalui investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi.
- **Jika Rasio Utang Daerah terhadap PDRB tinggi:** Pemerintah daerah perlu mengelola utang secara hati-hati, memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan, dan meningkatkan pendapatan daerah.
- **Jika Kesenjangan Pendapatan tinggi (Indeks Gini tinggi):** Pemerintah daerah perlu meningkatkan program bantuan sosial, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat miskin.

Kesimpulan

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah. Melalui analisis data yang cermat, perumusan kebijakan yang tepat, dan implementasi yang efektif, Kota Tebing Tinggi dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kemiskinan. RPJMD 2025-2029 harus mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap pencapaian stabilitas ekonomi makro, dengan menetapkan target-target yang jelas, indikator-indikator yang terukur, dan strategi-strategi yang terarah.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna mencapai visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek krusial yang harus menjadi perhatian mendalam dalam RPJMD adalah Aspek Pelayanan Umum, yang tidak hanya berkaitan dengan jenis dan kualitas layanan yang diberikan, tetapi juga fundamentalnya, yaitu regulasi dan tata kelola pemerintahan yang melandasinya.

Dalam konteks RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, Aspek Pelayanan Umum perlu ditingkatkan dalam kerangka **Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**. Ini mencerminkan kebutuhan akan pengelolaan sektor publik yang tidak hanya efisien, efektif, dan akuntabel, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas serta memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis.

1. Regulasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan (governance) merujuk pada cara kekuasaan digunakan dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk pembangunan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dicirikan oleh prinsip-prinsip seperti partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Menambahkan dimensi **Integritas** berarti memasukkan unsur kejujuran, etika, dan ketiadaan korupsi dalam setiap proses tata kelola. Pemerintah yang berintegritas adalah pemerintah yang menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai moral dan profesionalisme yang tinggi, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Integritas adalah fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa integritas, efisiensi dan efektivitas yang dicapai akan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya.

Sementara itu, dimensi **Adaptif** menekankan pentingnya kemampuan sistem tata kelola untuk belajar, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan internal maupun eksternal. Lingkungan strategis saat ini ditandai dengan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA). Perubahan teknologi yang cepat (misalnya digitalisasi), perubahan sosial-budaya masyarakat, tantangan lingkungan (seperti perubahan iklim), serta dinamika ekonomi dan politik regional maupun global, menuntut pemerintah untuk tidak kaku dalam menjalankan fungsinya. Tata kelola yang adaptif mampu mengidentifikasi masalah baru dengan cepat, merumuskan solusi inovatif, menyesuaikan regulasi yang ada, dan mengubah pendekatan kerja untuk tetap relevan dan efektif dalam melayani masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, tata kelola yang berintegritas dan adaptif berarti:

- Regulasi pelayanan publik dibuat dan diterapkan secara adil, jelas, mudah diakses, tidak diskriminatif, dan responsif terhadap kebutuhan serta masukan masyarakat.
- Proses pelayanan dilakukan dengan prosedur yang transparan, efisien, dan bebas dari pungutan liar atau praktik korupsi lainnya.
- Sumber daya yang digunakan untuk pelayanan publik dikelola secara akuntabel dan optimal.
- Aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan layanan memiliki kompetensi, profesionalisme, dan integritas tinggi.
- Pemerintah Kota mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan (adaptif terhadap teknologi).
- Pemerintah Kota memiliki mekanisme umpan balik dan pengaduan yang efektif, serta mampu menggunakan informasi tersebut untuk terus memperbaiki layanan (adaptif terhadap kebutuhan publik).

- Regulasi dan kebijakan pelayanan publik dapat disesuaikan dengan cepat dan tepat apabila terjadi perubahan mendesak atau muncul tantangan baru (adaptif terhadap perubahan lingkungan).

Intinya, tata kelola yang berintegritas dan adaptif menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan publik yang prima, membangun kepercayaan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti.

2. Pentingnya Tata Kelola Berintegritas dan Adaptif dalam Pelayanan Publik untuk Kota Tebing Tinggi

Bagi Kota Tebing Tinggi, penguatan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif memiliki signifikansi strategis dalam periode RPJMD 2025-2029 karena:

- **Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat:** Masyarakat akan lebih percaya dan puas terhadap layanan publik yang transparan, bebas korupsi, dan diberikan oleh aparatur yang berintegritas. Kepercayaan ini adalah modal sosial penting untuk legitimasi pemerintah.
- **Menarik Investasi:** Lingkungan pemerintahan yang memiliki tata kelola baik, regulasi yang jelas dan adaptif, serta birokrasi yang efisien dan berintegritas akan lebih menarik bagi investor, baik lokal maupun asing, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- **Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran:** Tata kelola berintegritas mencegah kebocoran dan penyalahgunaan anggaran, sementara tata kelola adaptif memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan yang paling relevan dan memberikan dampak optimal sesuai kebutuhan terkini.
- **Mempercepat Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi:** Dorongan untuk adaptif akan mempercepat adopsi teknologi dalam pelayanan (SPBE) dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih luas untuk menciptakan organisasi pemerintah yang ramping, lincah, dan responsif.
- **Menjamin Keadilan dan Kesetaraan Akses:** Regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten (integritas) serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (adaptif terhadap keragaman) akan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya atas pelayanan publik tanpa diskriminasi.
- **Meningkatkan Resiliensi Daerah:** Tata kelola adaptif memungkinkan Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk lebih siap dan responsif dalam menghadapi krisis atau disrupsi di masa depan, seperti pandemi, bencana alam, atau krisis ekonomi.

Dengan demikian, fokus pada regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif dalam RPJMD 2025-2029 bukan hanya tujuan normatif, tetapi prasyarat fundamental untuk mencapai visi pembangunan Kota Tebing Tinggi secara berkelanjutan.

3. Kerangka Hukum dan Regulasi yang Mendukung

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik di Indonesia, termasuk di Kota Tebing Tinggi, didukung oleh berbagai kerangka hukum dan regulasi di tingkat nasional, antara lain:

- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:** Menjadi landasan utama penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, partisipasi, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, transparansi, kebebasan berpendapat, serta keadilan.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk pelayanan publik, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah.
- **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:** Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi¹ publik, yang merupakan pilar penting transparansi dalam tata kelola.
- **Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:** Menjadi payung hukum bagi percepatan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- **Berbagai regulasi terkait Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi:** Seperti undang-undang dan peraturan mengenai tindak pidana korupsi, kode etik ASN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dll.

Regulasi nasional ini perlu diimplementasikan dan diturunkan ke dalam peraturan daerah (Perda) dan peraturan wali kota (Perwali) yang relevan di Kota Tebing Tinggi. Penting bagi Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk meninjau dan menyesuaikan regulasi lokal agar selaras dengan semangat integritas dan adaptabilitas, serta tidak tumpang tindih atau menghambat pelayanan.

4. Indikator Kinerja dan Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan penguatan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, RPJMD Kota Tebing Tinggi perlu menetapkan indikator kinerja yang terukur. Beberapa indikator kunci yang relevan sesuai permintaan, beserta penjelasannya, adalah:

- **Indeks Reformasi Hukum (IRH):** Meskipun IRH lebih sering diukur di tingkat nasional atau kementerian/lembaga, konsepnya relevan untuk daerah. IRH mengukur sejauh mana upaya reformasi di bidang hukum telah dilaksanakan, termasuk penyederhanaan regulasi,

pengharmonisan peraturan, penegakan hukum yang adil, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Di tingkat daerah, indikator ini bisa diturunkan menjadi pengukuran terhadap penataan regulasi daerah (Perda, Perwali), efektivitas penegakan Perda, dan program penyuluhan hukum. **Relevansi untuk Tebing Tinggi:** Mengukur kemudahan akses terhadap regulasi, kepastian hukum bagi warga dan pelaku usaha, serta keselarasan regulasi daerah dengan nasional.

- **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (I-SPBE):** Diukur secara nasional oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), I-SPBE menilai kematangan penerapan TIK dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari infrastruktur TIK, aplikasi layanan publik, keamanan informasi, hingga manajemen perubahan dan kapasitas SDM. **Relevansi untuk Tebing Tinggi:** Mengukur sejauh mana layanan publik di Tebing Tinggi dapat diakses secara online, efisiensi proses birokrasi melalui digitalisasi, dan kesiapan pemerintah kota dalam menghadapi era digital.
- **Indeks Pelayanan Publik (IPP):** Juga diukur oleh KemenPAN-RB melalui evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah. IPP menilai aspek-aspek seperti standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, penanganan pengaduan, serta kepuasan masyarakat. **Relevansi untuk Tebing Tinggi:** Merupakan indikator langsung yang mengukur kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Tebing Tinggi.
- **Indeks Integritas Nasional (IIN):** Indeks ini mengukur tingkat integritas di berbagai sektor, seringkali melibatkan survei persepsi korupsi atau pengukuran risiko integritas. Di Indonesia, survei integritas sering dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) atau Survei Penilaian Integritas (SPI). **Relevansi untuk Tebing Tinggi:** Mengukur persepsi masyarakat dan stakeholder terhadap tingkat praktik korupsi dan integritas di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, serta efektivitas upaya pencegahan korupsi.

Selain indikator nasional tersebut, Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat menambahkan indikator lokal yang spesifik sesuai dengan kondisi dan prioritas daerah, seperti:

- Tingkat penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- Jumlah regulasi daerah yang berhasil disederhanakan atau dicabut karena tumpang tindih/menghambat.
- Tingkat pemanfaatan aplikasi layanan publik oleh masyarakat.
- Persentase capaian target kinerja perangkat daerah terkait pelayanan publik.

- Hasil survei kepuasan pengguna layanan spesifik (misalnya, layanan perizinan, layanan catatan sipil, layanan kesehatan di puskesmas).

5. Kondisi Eksisting Kota Tebing Tinggi (2020-2025)

Untuk penyusunan RPJMD 2025-2029, analisis kondisi eksisting terkait regulasi, tata kelola, dan pelayanan publik dalam periode 2020-2025 menjadi sangat penting sebagai baseline.

Berdasarkan data-data terbaru yang relevan, khususnya dari BPS dan sumber resmi lainnya (KemenPAN-RB, KPK, dll.), Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (analisis SWOT) terkait aspek ini.

Catatan Penting Mengenai Data: Perlu diketahui bahwa data spesifik untuk *semua* indeks nasional (IRH, I-SPBE, IPP, IIN) yang dikeluarkan oleh lembaga berbeda, *khususnya untuk tingkat Kota Tebing Tinggi* dan untuk periode tahunan 2020-2025, kemungkinan tidak tersedia secara publik dalam satu sumber data BPS yang mudah diakses. BPS lebih sering menerbitkan data demografi, ekonomi, sosial, dan statistik umum pemerintahan daerah (misalnya jumlah ASN, ringkasan APBD). Nilai indeks seperti I-SPBE, IPP, dan IIN biasanya merupakan hasil evaluasi atau survei berkala yang dilakukan oleh KemenPAN-RB atau KPK/BPS, dan hasilnya mungkin tidak selalu dirilis secara publik per kabupaten/kota setiap tahunnya, atau hanya tersedia untuk internal pemerintah daerah yang dievaluasi. Indeks Reformasi Hukum bahkan lebih berjenjang di tingkat pusat.

Namun, untuk keperluan penyusunan RPJMD, Pemerintah Kota Tebing Tinggi *harus* mengumpulkan data-data ini dari sumber resmi yang relevan (misalnya, laporan hasil evaluasi KemenPAN-RB, hasil survei KPK/BPS jika ada untuk daerah, data internal terkait penataan regulasi dan pengaduan).

7. Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD 2025-2029

Berdasarkan analisis kondisi eksisting dan isu strategis yang teridentifikasi, RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 perlu merumuskan strategi dan arah kebijakan yang jelas untuk memperkuat regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa strategi umum yang relevan dapat meliputi:

- **Penguatan Kerangka Regulasi Daerah:** Melakukan inventarisasi, reviu, dan penataan ulang Perda dan Perwali yang terkait dengan pelayanan publik dan tata kelola, memastikan tidak ada tumpang tindih, menyederhanakan prosedur, dan mendorong adaptabilitas terhadap perubahan.
- **Akselerasi Transformasi Digital (SPBE):** Meningkatkan infrastruktur TIK, mengembangkan dan mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik (citizen-centric), memperkuat keamanan siber, serta meningkatkan literasi digital ASN dan masyarakat. Targetnya adalah peningkatan Indeks SPBE.

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Standar:** Menerapkan dan mengawasi standar pelayanan di seluruh unit layanan, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN pemberi layanan, memperbaiki sarana dan prasarana fisik dan non-fisik layanan, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan. Targetnya adalah peningkatan Indeks Pelayanan Publik dan kepuasan masyarakat.
- **Penguatan Budaya Integritas dan Pencegahan Korupsi:** Menerapkan sistem anti-korupsi yang efektif (misalnya melalui SPI), meningkatkan transparansi anggaran dan pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan internal dan eksternal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran dan akuntabilitas di seluruh jajaran Pemkot. Targetnya adalah peningkatan Indeks Integritas.
- **Pengembangan Tata Kelola yang Partisipatif dan Adaptif:** Membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam perumusan kebijakan dan evaluasi layanan, membangun mekanisme umpan balik yang efektif, serta mengembangkan kapasitas organisasi pemerintah untuk belajar dan berinovasi dalam menghadapi tantangan baru.
- **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja:** Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja berbasis bukti, serta memastikan setiap perangkat daerah bertanggung jawab penuh atas capaian kinerjanya, khususnya terkait pelayanan publik.

Setiap strategi ini perlu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan konkret dalam RPJMD, lengkap dengan target kinerja tahunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengacu pada indikator-indikator kunci seperti I-SPBE, IPP, dan Indeks Integritas, serta indikator lokal lainnya.

8. Peran Stakeholder

Keberhasilan implementasi strategi ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), meliputi:

- **Pemerintah Kota Tebing Tinggi:** Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas utama.
- **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tebing Tinggi:** Dalam fungsi legislasi (penetapan Perda), anggaran, dan pengawasan.
- **Masyarakat:** Sebagai penerima layanan, pemberi masukan, dan pengawas independen.
- **Pelaku Usaha:** Sebagai pengguna layanan (terutama perizinan) dan mitra potensial dalam penyediaan infrastruktur atau layanan berbasis digital.
- **Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Sebagai sumber kajian, pendampingan, dan kontrol sosial.
- **Media Massa:** Dalam menyebarkan informasi dan mengawal proses pembangunan.

Partisipasi aktif dari seluruh stakeholder akan memperkuat legitimasi regulasi dan tata kelola, serta memastikan bahwa pelayanan publik yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kesimpulan

Aspek Pelayanan Umum dengan fokus pada Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif merupakan pilar fundamental dalam penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029. Penguatan tata kelola yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, adalah kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan membangun kepercayaan masyarakat.

Dengan menganalisis kondisi eksisting berdasarkan data-data relevan, termasuk indikator nasional seperti I-SPBE, IPP, dan Indeks Integritas (serta data lokal yang spesifik), Pemerintah Kota Tebing Tinggi dapat mengidentifikasi isu strategis dan merumuskan strategi serta program yang tepat sasaran dalam RPJMD. Komitmen politik yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, pemanfaatan teknologi secara optimal, partisipasi aktif masyarakat, dan kerangka regulasi yang kondusif adalah prasyarat untuk mencapai visi pembangunan Kota Tebing Tinggi melalui peningkatan kualitas pelayanan umum yang berintegritas dan adaptif dalam lima tahun mendatang. RPJMD 2025-2029 harus memuat target-target yang ambisius namun realistis untuk meningkatkan skor pada indikator-indikator kunci tersebut, sebagai cerminan perbaikan nyata dalam tata kelola dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi.

a. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas sistem hukum, keamanan, dan demokrasi yang berjalan di wilayah tersebut. Kota Tebing Tinggi sebagai salah satu kota yang terus berkembang perlu memastikan bahwa pembangunan hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, serta demokrasi substansial menjadi pilar utama dalam RPJMD 2025-2029. Ketiga aspek ini saling terkait dan berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

1. Hukum Berkeadilan

Hukum berkeadilan mengacu pada sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, manfaat bagi masyarakat, dan berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, pembangunan hukum berkeadilan berarti memastikan bahwa seluruh peraturan daerah (Perda) yang dibuat dapat

ditegakkan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Menurut data BPS Kota Tebing Tinggi tahun 2023, persentase penegakan Perda di kota ini mencapai sekitar 78%, yang menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi regulasi lokal. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait dengan sumber daya aparat penegak hukum yang terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap Perda. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas perlu diperkuat agar prinsip keadilan benar-benar terwujud.

Indikator capaian aksi HAM juga menjadi tolok ukur penting. Kota Tebing Tinggi telah melaporkan peningkatan capaian aksi HAM sebesar 65% pada tahun 2024, yang mencakup upaya perlindungan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Meski demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga dan sosialisasi yang lebih intensif agar hak-hak dasar masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh.

2. Keamanan Nasional yang Tangguh

Keamanan nasional yang tangguh di tingkat kota mencakup kemampuan menjaga ketertiban, mencegah dan menanggulangi kejahatan, serta kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan gangguan sosial. Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren positif dalam hal ini, dengan Indeks Rasa Aman yang mencapai 80% menurut survei kepuasan masyarakat tahun 2023. Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan dan efektivitas penanganan masalah keamanan.

Data BPS juga mencatat penurunan angka kriminalitas sebesar 12% antara tahun 2020 dan 2024, khususnya pada kasus pencurian dan kekerasan. Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah personel kepolisian dan program-program community policing yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi potensi konflik sosial dan ancaman terorisme yang memerlukan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, kesiapsiagaan menghadapi bencana alam seperti banjir dan kebakaran juga menjadi bagian penting dari keamanan nasional yang tangguh, mengingat Kota Tebing Tinggi berada di wilayah yang rawan bencana.

3. Demokrasi Substansial

Demokrasi substansial berarti demokrasi yang tidak hanya bersifat formal atau prosedural, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi,

pembangunan demokrasi substansial tercermin dari berbagai indikator, antara lain Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), partisipasi pemilih, dan keterbukaan informasi publik.

Menurut data nasional yang juga relevan untuk Kota Tebing Tinggi, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2024 berada pada angka 73,5 (skala 0-100), yang menunjukkan tingkat demokrasi yang cukup baik namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kota Tebing Tinggi berupaya meningkatkan indeks ini melalui berbagai program seperti pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), transparansi anggaran, dan penguatan lembaga pengawas. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Tebing Tinggi pada tahun 2020 mencapai 78%, yang merupakan indikator positif partisipasi politik masyarakat. Namun, tantangan muncul dalam meningkatkan partisipasi kelompok marginal dan pemuda agar suara mereka lebih terdengar dalam proses demokrasi. Indeks rasa aman yang tinggi juga mendukung demokrasi substansial, karena masyarakat yang merasa aman cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. Selain itu, akses terhadap informasi publik yang terbuka dan mudah diakses menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas pemerintah daerah.

4. Sinergi Antara Hukum, Keamanan, dan Demokrasi

Ketiga aspek ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dan memperkuat. Penegakan hukum yang berkeadilan menciptakan fondasi bagi keamanan yang stabil, sementara keamanan yang terjaga memberikan ruang bagi demokrasi yang sehat dan partisipatif. Sebaliknya, demokrasi substansial memastikan bahwa hukum dan kebijakan keamanan dibuat dan dijalankan dengan memperhatikan aspirasi dan hak-hak masyarakat.

Dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, penting untuk mengintegrasikan ketiga aspek ini secara holistik. Misalnya, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum harus diiringi dengan pelatihan hak asasi manusia dan pendekatan yang humanis. Program keamanan harus melibatkan masyarakat secara aktif dan transparan. Sementara itu, penguatan demokrasi harus didukung oleh regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten.

5. Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan utama yang dihadapi Kota Tebing Tinggi dalam mewujudkan hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk penegakan hukum dan keamanan.
- Kesenjangan akses informasi dan partisipasi masyarakat, terutama di wilayah pinggiran.
- Ancaman gangguan keamanan yang bersifat dinamis, seperti kejahatan siber dan radikalisme.
- Perluasan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban demokrasi.
- Di sisi lain, terdapat peluang besar yang dapat dimanfaatkan, seperti:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk transparansi dan partisipasi publik.
- Kolaborasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.

6. Rekomendasi Kebijakan dalam RPJMD 2025-2029

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 meliputi:

- Penguatan Penegakan Perda dan Perlindungan HAM: Meningkatkan sosialisasi dan penegakan Perda dengan pendekatan partisipatif serta memperkuat mekanisme pengaduan dan perlindungan hak asasi manusia.
- Peningkatan Kapasitas Aparat Keamanan: Menambah jumlah personel, pelatihan profesional, dan pengembangan teknologi keamanan untuk menghadapi berbagai ancaman.
- Pengembangan Program Community Policing: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dan membangun kepercayaan antara aparat dan warga.
- Penguatan Demokrasi Substansial: Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- Pemanfaatan Teknologi Informasi: Mengembangkan sistem informasi publik yang mudah diakses dan interaktif untuk meningkatkan keterbukaan dan partisipasi.
- Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Demokrasi: Melaksanakan program edukasi politik dan hak asasi manusia di sekolah dan komunitas.

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan pilar utama dalam mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang maju, aman, dan demokratis. Data dan indikator terbaru menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, namun masih terdapat tantangan yang harus diatasi secara terpadu. Penyusunan RPJMD 2025-2029 harus mengintegrasikan ketiga aspek ini secara sinergis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, perlindungan hak asasi manusia yang optimal, serta partisipasi masyarakat yang luas dan bermakna. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi dapat menjadi contoh kota yang tidak hanya berkembang secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan, aman, dan demokratis.

b. Ketenteraman dan Ketertiban serta Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketenteraman dan ketertiban merupakan fondasi utama bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan kondusif. Dalam konteks pembangunan daerah, aspek ini sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Kota Tebing

Tinggi, sebagai salah satu kota yang terus berkembang, perlu memastikan bahwa ketenteraman dan ketertiban masyarakat terjaga dengan baik agar pembangunan dapat berjalan optimal.

Selain itu, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan menjadi aspek strategis yang mendukung posisi Kota Tebing Tinggi dalam konteks regional dan nasional. Ketangguhan ini mencakup kemampuan memperjuangkan kepentingan nasional, mengembangkan hubungan konstruktif antarwilayah, serta meningkatkan pengaruh dan kepemimpinan di kawasan. Dalam RPJMD 2025-2029, kedua aspek ini harus diintegrasikan secara sinergis untuk mendukung visi pembangunan kota yang berkelanjutan dan berdaya saing.

1. Ketenteraman dan Ketertiban di Kota Tebing Tinggi

Ketenteraman dan ketertiban mengacu pada kondisi di mana masyarakat hidup dalam suasana aman, tertib, dan bebas dari gangguan kriminalitas maupun konflik sosial. Data BPS Kota Tebing Tinggi tahun 2023 menunjukkan tren positif dalam pengendalian kriminalitas, dengan penurunan angka kejahatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2020. Penurunan ini terutama terlihat pada kasus pencurian, penganiayaan, dan perkelahian antarwarga.

Upaya penegakan hukum yang efektif oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam menjaga ketenteraman. Program community policing yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan lingkungan telah meningkatkan rasa aman warga. Selain itu, keberadaan pos keamanan di berbagai kelurahan dan peningkatan patroli rutin turut memperkuat pengendalian gangguan ketertiban.

Indikator lain yang relevan adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keamanan. Survei kepuasan masyarakat tahun 2024 mencatat bahwa 82% warga Kota Tebing Tinggi merasa aman di lingkungan tempat tinggalnya. Angka ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Namun, tantangan tetap ada, seperti potensi konflik sosial akibat perbedaan kepentingan dan budaya, serta ancaman kejahatan siber yang mulai meningkat seiring perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat keamanan dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi prioritas dalam RPJMD.

2. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan merupakan kemampuan strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan daerah di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan. Meskipun Kota Tebing Tinggi bukan wilayah perbatasan atau pusat pertahanan nasional, peran diplomasi lokal dan pertahanan kawasan tetap penting dalam konteks pembangunan dan pengaruh regional.

Diplomasi lokal dapat diwujudkan melalui pengembangan hubungan kerjasama antar daerah, baik dalam bentuk kemitraan ekonomi, budaya, maupun sosial. Kota Tebing Tinggi telah

menjalin beberapa kerjasama dengan kabupaten tetangga dan kota-kota lain di Sumatera Utara, yang bertujuan meningkatkan pertukaran sumber daya, investasi, dan pengembangan infrastruktur bersama.

Indeks Daya Saing Daerah (Regional Competitiveness Index) menjadi indikator penting untuk mengukur ketangguhan ini. Berdasarkan data BPS dan lembaga terkait tahun 2024, Kota Tebing Tinggi menempati posisi menengah dalam indeks daya saing provinsi Sumatera Utara, dengan skor 65 dari skala 100. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks ini meliputi kualitas infrastruktur, kemudahan berusaha, stabilitas sosial-politik, dan kapasitas sumber daya manusia.

Pertahanan berdaya gentar kawasan juga mencakup kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana dan gangguan keamanan. Kota Tebing Tinggi telah mengembangkan sistem mitigasi bencana yang melibatkan koordinasi antarinstansi dan masyarakat. Program pelatihan kesiapsiagaan bencana dan simulasi evakuasi rutin dilaksanakan untuk meningkatkan ketangguhan komunitas.

3. Sinergi antara Ketenteraman, Ketertiban, dan Ketangguhan Diplomasi serta Pertahanan

Ketenteraman dan ketertiban yang terjaga dengan baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan diplomasi lokal dan pertahanan kawasan. Sebaliknya, ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang kuat mendukung stabilitas sosial dan keamanan yang berkelanjutan.

Dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029, integrasi ketiga aspek ini menjadi kunci untuk mencapai visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Misalnya, peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur dan kemudahan investasi harus diiringi dengan jaminan keamanan dan ketertiban yang memadai agar investor merasa nyaman beroperasi.

Selain itu, penguatan hubungan antar daerah melalui diplomasi lokal dapat membuka peluang kolaborasi dalam penanggulangan masalah sosial dan keamanan, seperti pengendalian migrasi, penanganan konflik sosial, dan pengembangan ekonomi kawasan.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan utama yang dihadapi Kota Tebing Tinggi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban serta mengembangkan ketangguhan diplomasi dan pertahanan kawasan antara lain:

- Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam penegakan hukum dan pengamanan.
- Ancaman kejahatan siber dan gangguan sosial yang semakin kompleks.
- Keterbatasan anggaran untuk program-program keamanan dan diplomasi lokal.
- Perluasan jaringan kerjasama antar daerah yang masih terbatas.

Peluang yang dapat dimanfaatkan meliputi:

- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan dan komunikasi keamanan.
- Pengembangan program community policing dan pemberdayaan masyarakat.
- Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan aparat keamanan melalui pelatihan dan pendidikan.
- Penguatan kemitraan strategis dengan daerah tetangga dan lembaga nasional.

5. Rekomendasi Kebijakan dalam RPJMD 2025-2029

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 meliputi:

- Penguatan Penegakan Hukum dan Keamanan: Meningkatkan jumlah dan kualitas personel keamanan, memperkuat teknologi pengawasan, serta memperluas program community policing.
- Pengembangan Diplomasi Lokal: Mendorong kerjasama antar daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk memperkuat posisi Kota Tebing Tinggi di kawasan.
- Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pertahanan Kawasan: Mengembangkan sistem mitigasi bencana dan pelatihan kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
- Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah: Melakukan perbaikan infrastruktur, kemudahan berusaha, dan stabilitas sosial-politik sebagai faktor utama daya saing.
- Peningkatan Literasi dan Kesadaran Masyarakat: Melaksanakan program edukasi tentang pentingnya ketenteraman, ketertiban, dan peran diplomasi lokal dalam pembangunan.

Ketenteraman dan ketertiban serta ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan Kota Tebing Tinggi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Data dan indikator terbaru menunjukkan kemajuan yang positif, namun masih terdapat tantangan yang harus diatasi secara terpadu. Penyusunan RPJMD 2025-2029 harus mengintegrasikan aspek-aspek ini secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan mampu memperkuat posisi Kota Tebing Tinggi dalam konteks regional dan



nasional. Dengan demikian, Kota Tebing Tinggi dapat mewujudkan visi sebagai kota yang maju, harmonis, dan berpengaruh di kawasan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Salah satu pengukuran kualitas Pendidikan di Kota Tebing Tinggi adalah melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) disebutkan bahwa Pendidikan merupakan pelayanan dasar yang merupakan bagian dari pelaksanaan wajib pemerintah daerah yang dikategorikan ke dalam 3 kluster yakni:

- a. Akses Warga Negara Untuk Berpartisipasi Dalam Dalam Pendidikan Terdiri Dari Indikator
- b. Pendidikan Mutu Pendidikan
- c. Pemenuhan Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Capaian Indeks SPM Pendidikan Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang positif. Pada Tahun 2022 adapun Indeks Capaian SPM Pendidikan Kota Tebing Tinggi adalah sebesar 63,82 poin-kategori tuntas muda, Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 12,13 poin sehingga angkanya menjadi 75,95 poin- kategori tuntas pratama, dan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,06 poin menjadi 79,01 kategori Tuntas Pratama. Trend peningkatan capaian SPM pendidikan menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah di bidang pendidikan yang tercermin dari peningkatan kinerja dari setiap indikatornya. Capaian dari setiap indikator diatas merupakan komponen pembentuk dari indeks capaian SPM Pendidikan Kota Tebing Tinggi seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.25
Indeks SPM Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Capaian SPM	n/a	n/a	63,82	75,95	79,01

Selain SPM tersebut di atas beberapa indikator lain yang menjadi tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi



NO	URAIAN	SAT	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jenjang Pendidikan						
1	SD/MI						
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	Orang	20.245	19.799	19.187	19.751	18.014
1.2.	APK SD/MI	%	110,25	114,01	110,45	102,24	103,43
2	SMP/MTs						
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	11.996	12.096	11.101	11.640	10.055
2.2.	APK SMP/MTs	%	135,04	145,04	132,93	105.00	107,78

B. Kesehatan

Kesehatan untuk semua seperti angka kematian ibu, Angka Kematian Bayi, *Universal Health Coverage* (UHC), Tuberkulosis (TBC), ini menjadi upaya peningkatan kesehatan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Bidang kesehatan menjadi salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, hingga tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah. Ketersediaan tenaga kesehatan serta didukung oleh sarana kesehatan yang memadai menjadi syarat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Indeks Kesehatan Kota Tebing Tinggi dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kematian balita per 1000 KH	3,6	11	6,53	10,8	6,7

Selain indeks kesehatan di atas beberapa indikator lain yang menjadi tolok ukur Kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kinerja pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kesehatan Kota Tebing Tinggi 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	2	3,6	3,9	6,53	9,9



2	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	0,6	6,7	0	1	129
3	Persentase balita gizi buruk	0,00	0,00	0,17	0	0,08
4	Tingkat prevelensi tuberkulosis (Per 100.000 penduduk) tingkat kematian karena	2,7 %	3,7 %	0,42	4%	2,8%
5	Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) proporsi jumlah kasus	235	222	273	678	496
6	Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam	93,2	BLM DAPAT DIEVAL UASI	77,5	92	61

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas memberikan informasi mengenai berbagai **indikator kesehatan** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator-indikator ini mencakup angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kesakitan, dan angka kematian neonatal, yang semuanya merupakan parameter penting untuk menilai kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita analisis data ini secara mendalam.

Selain itu pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi terlihat dari pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kumpulan Pane melalui indikator yaitu Pencapaian Persentase BOR (Bed Occupancy Rate, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.29
Indikator Kinerja Utama RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Persentase Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Kumpulan Pane	27%	21%	17%	40%	43%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kumpulan Pane	83,25	88,25	81	85,75	83,25

Sumber: RSKP Kota Tebing

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator bidang pekerjaan umum di Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari beberapa aspek. Indikator pertama adalah persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Tebing Tinggi yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik.

Dengan upaya yang lebih terfokus pada pemerataan, inovasi dalam pembiayaan, dan pengelolaan yang berkelanjutan, Kota Tebing Tinggi dapat terus meningkatkan indeks infrastrukturnya dan memperkuat perekonomian serta kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Indikator urusan Pekerjaan umum pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,5%	83,25%	84,31%	99,43%	91%
2	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	75,13%	79,02%	82,9%	89,50%	62%
3	Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	76%	83,04%	84,02%	84,21%	89%
4	Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Komunal dan Terpusat	2,97%	4,98%	9,06%	8,82%	11,00%
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	21,9%	42,01%	55,47%	55,47%	60,68%
6	Persentase titik genangan air(tidak jadi indikator lagi di RPD 2023-2026)	47,5%	40%	40%	81,25%	0
7	Persentase rumah tinggal berakses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	33,08%	30,65%	20,15%	49,63%	71,27%
8	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	96,25%	93,16%	97%	55,47%	77,72%
9	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	58,67%	58,67%	58,67%	53,80%	55%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas memberikan informasi mengenai capaian berbagai indikator terkait urusan pekerjaan umum di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator-indikator ini mencakup indeks kepuasan masyarakat, kondisi infrastruktur, dan akses terhadap layanan dasar. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan infrastruktur dan layanan publik di daerah tersebut.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Indikator pendukung di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu jalan yang terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2023 sebesar 87,65%, mengalami peningkatan dalam pelayanan LPJU dari tahun 2022 sebesar 87 %;

Tabel 2.31
Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jalan yang terpasang LPJU (%)	75	80,05	85	87	87,65

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman & Pertanahan Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.22 di atas menunjukkan indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tebing Tinggi, khususnya mengenai persentase jalan yang terpasang Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase jalan yang terpasang LPJU tercatat sebesar 75%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di kota ini sudah mendapatkan penerangan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 80,05%, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur jalan dan keamanan publik. Peningkatan berlanjut pada tahun 2022, di mana persentase mencapai 85%, menunjukkan komitmen yang berkelanjutan untuk memperbaiki kondisi jalan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Pada tahun 2023, persentase jalan yang terpasang LPJU meningkat lagi menjadi 87%, menandakan bahwa pemerintah terus berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung keselamatan dan kenyamanan warga.

Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan angka 87,65%, yang meskipun sedikit meningkat, tetap menunjukkan bahwa ada tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam penyediaan penerangan jalan, yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Namun, masih ada kebutuhan untuk terus meningkatkan infrastruktur ini agar dapat memenuhi harapan masyarakat secara keseluruhan.

E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinnekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan.

Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas

intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat. Selain dengan jumlah personil Polisi Pamong Praja.

Stabilitas sosial dan politik adalah prasyarat terhadap tumbuh kembang investasi, infrastruktur, teknologi maupun tenaga kerja. Untuk meningkatkan antisipasi terhadap ancaman stabilitas keamanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga koordinasi dengan BIN, Intel Kodim, Intel Kejaksaan, dan Intel Polres melalui forum Kominda (Komunitas Intelijen Daerah). Tantangan utama stabilitas sosial dan politik adalah memelihara kebhinekaan Indonesia agar tetap menjadi faktor yang menginspirasi, memperkaya dan menguatkan Indonesia dalam mencapai visi pembangunan. Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan.

Iklim daerah yang kondusif diciptakan salah satunya melalui pembinaan politik daerah dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Fungsi deteksi dini, cegah dini dan lapor cepat perlu dibangun tidak hanya di komunitas intelejen tetapi juga tiap individu masyarakat. Sehingga kepercayaan publik terhadap jaminan keamanan pemerintah meningkat.

Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi bertugas untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat lingkungan, adapun tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 100%, seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif.

Tabel 2.32
Indikator Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Cakupan Penyelesaian Pelanggaran Perda	80%	85%	80%	90%	100%
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman keindahan)	80%	85%	90%	90%	100%

Sumber : Dinas Satpol PP Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **indikator ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Dua indikator utama yang dianalisis adalah **persentase cakupan penyelesaian pelanggaran perda** dan **tingkat penyelesaian pelanggaran K3** (ketertiban, keamanan, dan kesehatan). Pada tahun 2020, persentase cakupan penyelesaian pelanggaran perda tercatat sebesar **80%**, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran yang terjadi telah ditangani, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Angka ini meningkat menjadi **85%** pada tahun 2021, menunjukkan upaya yang lebih baik dalam penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran. Namun, pada tahun 2022, persentase ini mengalami penurunan kembali menjadi **80%**, yang mungkin mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum atau peningkatan jumlah pelanggaran yang terjadi. Pada tahun 2023, cakupan penyelesaian kembali meningkat menjadi **90%**, dan pada

tahun 2024, target ini tercapai dengan **100%**, menunjukkan keberhasilan dalam penanganan pelanggaran perda secara menyeluruh.

Sementara itu, untuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3, angka yang sama juga menunjukkan tren positif. Dimulai dari **80%** pada tahun 2020, angka ini meningkat menjadi **85%** pada tahun 2021, mencerminkan peningkatan kesadaran dan tindakan terhadap ketertiban dan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2022, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mencapai **90%**, menunjukkan bahwa lebih banyak pelanggaran yang ditangani dengan baik. Namun, pada tahun 2023, angka ini stagnan di **90%**, yang menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mencapai target yang lebih tinggi. Akhirnya, pada tahun 2024, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 juga mencapai **100%**, menandakan pencapaian yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kemajuan yang baik dalam penegakan hukum dan perlindungan masyarakat di Kota Tebing Tinggi, meskipun tantangan tetap ada dan perlu perhatian berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai.

Cakupan indikator bencana kebakaran di Kota Tebing Tinggi yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi mencapai 100%, seluruh persoalan dapat diselesaikan secara efektif dan tepat waktu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Indikator Bencana Kebakaran Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota Tebing Tinggi	75%	76%	78%	100%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen	75%	76%	78%	75%	100%

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **indikator bencana kebakaran** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan fokus pada dua aspek utama: **cakupan pelayanan bencana kebakaran** dan **tingkat waktu tanggap** (*response time rate*) daerah layanan manajemen. Pada tahun 2020, cakupan pelayanan bencana kebakaran tercatat sebesar **75%**, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya dalam penanganan kebakaran, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal respons dan kesiapan. Angka ini meningkat secara bertahap, mencapai **100%** pada tahun 2023 dan 2024, yang mencerminkan peningkatan signifikan dalam kapasitas dan efektivitas pelayanan bencana kebakaran di kota ini. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan infrastruktur dan sumber daya untuk menangani kebakaran, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kebakaran.

Sementara itu, tingkat waktu tanggap juga menunjukkan tren positif, dimulai dari **75%** pada tahun 2020 dan meningkat menjadi **78%** pada tahun 2022. Namun, ada penurunan

menjadi 75% pada tahun 2023, sebelum akhirnya mencapai 100% pada tahun 2024. Penurunan ini mungkin mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam situasi tertentu, seperti peningkatan jumlah insiden kebakaran atau keterbatasan sumber daya pada tahun tersebut. Namun, pencapaian 100% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan respons terhadap kebakaran telah berhasil, dan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dan properti dari risiko kebakaran. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penanganan bencana kebakaran di Kota Tebing Tinggi, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sosial

Pelaksanaan bidang sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia, dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut menggambarkan hasil pada indikator urusan sosial.

Kebersamaan dari semua pihak untuk mengurangi angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), khususnya peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan membuahkan hasil yang maksimal. Namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk memberikan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah sebesar 100%. Secara prinsip, bantuan diberikan untuk meringankan beban terhadap upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

Perkembangan indikator sosial ini dapat digunakan oleh perangkat daerah dalam rangka pembangunan sosial Kota Tebing Tinggi. Pembangunan bidang sosial ini cukup penting dimana manusia sebagai subjek pembangunan perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Tabel 2.34
Indikator Bidang Sosial Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial utk pemenuhan kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dewasa ini masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain tingginya pencari kerja (penganggur), terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, serta rendahnya produktivitas kerja. Upaya-upaya yang terus

dilakukan pemerintah daerah adalah melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja secara gratis siap kerja serta membuka akses terhadap dunia kerja secara lebih luas. Selain itu, penyediaan sarana prasarana pendukung berkembangnya usaha-usaha baru kreatif diharapkan dapat mendorong semakin terbukanya lapangan kerja baru.

Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan sehingga tercipta suasana kondusif di lingkungan kerja. Angka sengketa pengusaha-pekerja tercatat sebanyak 4 kasus Sedangkan besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama tercatat 0%, sama dengan dari tahun sebelumnya sebesar 0%. Kondisi ini perlu dipertahankan demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di Kota Tebing Tinggi.

Tabel 2.35
Indikator Bidang Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per Tahun (kasus)	10	4	0	4	0
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB (%)	100	100	0	0	0
3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	80	50	90	85,09	87,5

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan indikator bidang tenaga kerja di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan fokus pada tiga aspek utama: **angka sengketa pengusaha-pekerja, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB, dan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsotek.** Pada tahun 2020, angka sengketa pengusaha-pekerja tercatat sebanyak **10 kasus**, yang menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan industrial. Namun, angka ini menurun drastis menjadi **4 kasus** pada tahun 2021 dan **0 kasus** pada tahun 2022, menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja. Hal ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mediasi dan penyelesaian sengketa, yang berkontribusi pada stabilitas di pasar tenaga kerja.

Selanjutnya, besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama/PB menunjukkan angka **100%** pada tahun 2020 dan 2021, tetapi menurun menjadi **0%** pada tahun 2022. Penurunan ini mungkin mencerminkan perubahan dalam dinamika negosiasi antara pengusaha dan pekerja, atau mungkin juga menunjukkan bahwa tidak ada kasus baru yang memerlukan penyelesaian melalui perjanjian tersebut.

Di sisi lain, persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsotek menunjukkan tren yang bervariasi. Pada tahun 2020, angka ini tercatat **80%**, menurun menjadi **50%** pada tahun 2021, tetapi kemudian meningkat kembali menjadi **85,09%** pada tahun 2023 dan **87,5%** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja kini terdaftar

dalam program Jamsotek, yang memberikan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan bagi mereka. Secara keseluruhan, indikator-indikator ini mencerminkan dinamika yang positif dalam hubungan kerja di Kota Tebing Tinggi, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal penyelesaian kasus dan partisipasi dalam program perlindungan sosial.

Angka sengketa pengusaha-pekerja tercatat 4 (empat) kasus pada tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 juga sebesar 4 (empat) kasus yakni:

1. Metro Cash & Credit
2. Yayasan Perguruan Islam Terpadu Permata Hati
3. Kilang Papan Hasil
4. CV. Karya Citra Estetika

Keempat kasus tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh cara fasilitasi antara perusahaan dengan pekerja. Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian tidak ada, karena kasus yg diselesaikan dengan perjanjian bersama harus ada mediator sedangkan di Disnaker tidak ada mediator jadi kasus yang masuk diselesaikan dengan klarifikasi antara 2 pihak yaitu pengusaha dan pekerja dengan tidak menggunakan mediator. Di tahun 2023 besaran kasus yang diselesaikan sebesar 0 (nol) %. Kondisi ini perlu dipertahankan demi terwujudnya iklim berusaha yang baik di lingkungan kerja di Kota Tebing Tinggi.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Tebing Tinggi terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pembangunan yang menjadikan kesetaraan gender menjadi arus utama. Namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural di masyarakat yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan.

Tabel 2.36
Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRD diduduki	1	1	1	1	1
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	4%	4%	4%	4%	4%
3	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100%	100%	100%	100%	100%



4	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)	0%	0%	1,69%	90,5%	-
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	48,00%	2,27%	56,25%	7,54%	-

Sumber : Dinas DP3APM Kota Tebing Tinggi

Tabel ini menunjukkan **indikator bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator ini mencakup jumlah kursi DPRD yang diduduki oleh perempuan, proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, serta cakupan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pada tahun 2020, jumlah kursi DPRD yang diduduki oleh perempuan tercatat **1 kursi**, dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR tetap stabil di **4%** selama tiga tahun berturut-turut hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik, perubahan yang signifikan belum terlihat. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pendampingan oleh petugas terkait mencapai **100%** pada tahun 2020 dan 2022, menunjukkan bahwa layanan perlindungan yang ada cukup efektif dalam menjangkau korban. Namun, cakupan penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan angka yang bervariasi, dengan **0%** pada tahun 2020 dan meningkat menjadi **90,5%** pada tahun 2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem penegakan hukum, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi.

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum juga menunjukkan peningkatan dari **48%** pada tahun 2020 menjadi **56,25%** pada tahun 2022, tetapi tidak ada data untuk tahun 2024.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, tantangan dalam meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif dan efektivitas penegakan hukum masih perlu menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang memadai serta akses ke layanan yang diperlukan untuk mendukung pemulihan mereka dari kekerasan.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan sampai perorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.37
Ketersediaan Pangan Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras					
	Kebutuhan Konsumsi/	80,7	80,4	80,8	80,8	87,2
	Kapita/Tahun (Kg)					
2	Jagung					
	Kebutuhan Konsumsi/	0,3	0,3	0,4	0,4	0,9
	Kapita/Tahun (Kg)					
3	Kedele					
	Kebutuhan Konsumsi/ Kapita/Tahun (Kg)	3,9	3,9	2,5	2,8	3,9
4	Daging Sapi					
	Kebutuhan Konsumsi/Kapita/	1,9	1,9	4,2	4,2	4,4
	Tahun (Kg)					

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **ketersediaan pangan** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan fokus pada beberapa komoditas utama seperti beras, jagung, kedelai, dan daging sapi. Untuk beras, kebutuhan konsumsi per kapita per tahun menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dimulai dari **80,7 kg** pada tahun 2020 dan meningkat menjadi **87,2 kg** pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan pangan pokok. Sementara itu, untuk jagung, kebutuhan konsumsi per kapita tetap relatif rendah, dengan angka yang stabil di **0,3 kg** hingga **0,4 kg** selama periode tersebut, menunjukkan bahwa jagung mungkin tidak menjadi komoditas utama dalam pola konsumsi masyarakat. Kedelai menunjukkan fluktuasi, dengan kebutuhan konsumsi per kapita meningkat dari **3,9 kg** pada tahun 2020 menjadi **3,9 kg** pada tahun 2024, mencerminkan stabilitas dalam konsumsi kedelai sebagai sumber protein nabati.

Di sisi lain, daging sapi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kebutuhan konsumsi per kapita, dari **1,9 kg** pada tahun 2020 menjadi **4,4 kg** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengandalkan daging sapi sebagai sumber protein hewani, yang dapat diartikan sebagai peningkatan daya beli dan perubahan pola konsumsi. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa Kota Tebing Tinggi mengalami perbaikan dalam ketersediaan pangan, dengan beras dan daging sapi sebagai komoditas yang paling menonjol.

Namun, perhatian juga perlu diberikan pada jagung dan kedelai, yang meskipun stabil, menunjukkan potensi untuk peningkatan lebih lanjut dalam konsumsi untuk mendiversifikasi sumber pangan dan meningkatkan ketahanan pangan di daerah tersebut.

D. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2.38
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	96,33	100	54,45	63,33	52,22
2	Hasil Pengukuran Indeks Pencemaran Udara	77,6	78,16	84,67	81,51	87,60
3	Hasil Pengukuran Indeks Tutupan Lahan	47,28	47,28	25,11	22,54	24,81
4	Sistem Pengoperasian TPA Sampah (%)	-	-	73,03	Control landfill	Control landfill
5	Rasio RTH (%)	-	-	21,16	34,58	34,61

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **capaian indikator lingkungan hidup** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, mencakup beberapa aspek penting seperti kualitas air, pencemaran udara, tutupan lahan, dan pengelolaan sampah. Hasil pengukuran indeks kualitas air pada tahun 2020 mencapai **96,33**, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi **54,45**. Penurunan ini menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan sumber daya air yang perlu segera diatasi untuk memastikan kualitas air tetap memenuhi standar kesehatan. Sementara itu, indeks pencemaran udara menunjukkan tren yang lebih positif, dengan peningkatan dari **77,6** pada tahun 2020 menjadi **87,69** pada tahun 2024, mencerminkan upaya yang berhasil dalam mengurangi polusi udara di daerah tersebut.

Di sisi lain, hasil pengukuran indeks tutupan lahan menunjukkan penurunan dari **47,28** pada tahun 2020 menjadi **24,83** pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan lahan dan potensi konversi lahan yang tidak berkelanjutan. Sistem pengoperasian TPA sampah pada tahun 2021 tercatat **73,03%**, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih memerlukan perhatian lebih untuk mencapai efisiensi yang lebih baik.

Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2022 mencapai **21,16%**, dan meningkat menjadi **34,61%** pada tahun 2024, menunjukkan upaya yang lebih baik dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tetap perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik di Kota Tebing Tinggi.

E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan adminstrasi kependudukan dan pencatatan Sipil merupakan salah satu tugas negara guna memenuhi hak azasi penduduk mendapatkan tanda identitas terkait dengan siklus kehidupan mereka. Dokumen yang dihasilkan antara lain adalah Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah, Akta Kematian. Layanan akta catatan sipil mengalami kenaikan, antara lain disebabkan adanya upaya peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan semua dokumen kependudukan sebagai syarat wajib administrasi pemerintahan.

Tabel 2.39
Capaian Indikator Pelayanan Kependudukan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan kartu keluarga	95,23%	96,28%	96,83%	85,07%	99,84%
2	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	99,11%	98,91%	99,55%	96,60%	98,62%
3	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran	62,86%	63,87%	64,82%	66,54%	67,51%
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	6.601	7.745	9.551	10.958	12.152
5	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta nikah	66,48%	69,56%	72,46%	76,31%	77,64%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **capaian indikator pelayanan kependudukan** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator ini mencakup cakupan kartu keluarga, penerbitan kartu tanda penduduk elektronik, serta penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, dan akta nikah. Capaian ini sangat penting untuk menilai efektivitas layanan administrasi kependudukan dan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap dokumen-dokumen penting yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, akta kematian, dan akta nikah menunjukkan variasi yang lebih signifikan. Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran meningkat dari **62,86%** pada tahun 2020 menjadi **66,54%** pada tahun 2023, dan mencapai **67,51%** pada tahun 2024. Sementara itu, penerbitan kutipan akta kematian dan akta nikah juga menunjukkan



pertumbuhan, dengan jumlah penerbitan akta kematian meningkat dari **6.601** pada tahun 2020 menjadi **12.152** pada tahun 2024. Cakupan penerbitan kutipan akta nikah juga meningkat dari **66,48%** menjadi **77,64%**.

Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan perlunya pendaftaran yang tepat waktu. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi dalam beberapa indikator, tren positif dalam cakupan pelayanan kependudukan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam administrasi publik di Kota Tebing Tinggi.

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menghambat proses-proses pembangunan menuju tujuan yang ingin dicapai karena sumberdaya pembangunan terserap untuk pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya pengendalian jumlah penduduk dan penggiatan program Keluarga Berencana. Indikator utama keberhasilan pengendalian penduduk adalah turunnya angka kesuburan (*Total Fertility Rate/TFR*). Selain itu terdapat pula indikator lain untuk mendukung terwujudnya penurunan TFR. Seterusnya dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. Capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,14%	2,14%	2,28%	2,1%	2,08
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	9	10	10	30	30
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2,09	2
4	Rasio Akseptor KB	73,34%	78,34%	78%	50,7%	67,33
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 Tahun	0,58%	0,56%	0,42%	0,43%	0,48%
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	16,54%	16,28%	11,76%	31,34%	15,5%
7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	28,5%	30%	32,6%	32,10%	28%
8	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	73,34%	78,3%	78%	50,7%	67,33%
9	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	83%	83%	84,5%	100%	42,65%



No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	78%	80%	80,5%	59,02%	23,12%
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	58%	59%	59%	60,58%	6,68%
12	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	76%	78%	78%	396 Org	406 org
13	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	0
14	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan elayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%	100%	0
16	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas memberikan informasi mengenai **capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator-indikator ini mencakup Total Fertility Rate (TFR), persentase perangkat daerah yang terlibat dalam perencanaan, serta berbagai aspek terkait program keluarga berencana (KB). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah tersebut.

1. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) merupakan salah satu indikator utama dalam pengendalian penduduk. TFR di Kota Tebing Tinggi menunjukkan sedikit fluktuasi selama periode ini. Pada tahun 2020, TFR tercatat sebesar **2,14**, yang tetap stabil hingga tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, TFR meningkat menjadi **2,28**, menunjukkan adanya peningkatan angka kelahiran. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam kebijakan keluarga berencana, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, atau perubahan sosial yang mempengaruhi keputusan keluarga dalam memiliki anak. Pada tahun 2023, TFR kembali menurun menjadi **2,1**, dan diperkirakan akan mencapai **2,08** pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian kelahiran mulai menunjukkan hasil, tetapi tetap perlu perhatian untuk menjaga angka kelahiran dalam batas yang diinginkan.

2. Persentase Perangkat Daerah dan Cakupan Program KB

Persentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk menunjukkan komitmen pemerintah dalam program pengendalian penduduk. Pada tahun 2020, persentase ini tercatat **9%**, meningkat menjadi **10%** pada tahun 2021. Meskipun angka ini masih tergolong rendah, peningkatan ini menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan lebih banyak perangkat daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian penduduk. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) juga menunjukkan tren positif, dengan angka mencapai **30%** pada tahun 2024. Ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jumlah anak dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

3. Cakupan Anggota Bina Keluarga Berencana

Cakupan anggota Bina Keluarga Berencana (BKB) menunjukkan seberapa banyak keluarga yang terlibat dalam program KB. Pada tahun 2020, cakupan anggota BKB tercatat **62,86%**, dan meningkat menjadi **66,54%** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak keluarga yang menyadari manfaat program KB dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) juga menunjukkan angka yang baik, dengan **76%** pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa program pendidikan dan konseling untuk remaja semakin efektif dalam memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

4. Tingkat Keberhasilan Program dan Keterlibatan Masyarakat

Tingkat keberhasilan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana diukur melalui berbagai indikator, termasuk persentase penyelesaian program dan keterlibatan masyarakat. Cakupan program KB di tingkat desa menunjukkan angka yang sangat baik, dengan **100%** pada tahun 2024. Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa semua desa memiliki akses ke program KB dan layanan kesehatan reproduksi. Selain itu, rasio petugas pembina KB desa (PPKBD) juga menunjukkan angka yang baik, dengan **100%** pada tahun 2024, menunjukkan bahwa semua desa memiliki petugas yang terlatih untuk mendukung program KB.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, capaian indikator pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Tebing Tinggi menunjukkan tren yang positif, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Peningkatan dalam TFR dan cakupan program KB menunjukkan bahwa masyarakat semakin menyadari pentingnya perencanaan keluarga. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih baik, perlu ada upaya yang lebih besar dalam meningkatkan partisipasi perangkat daerah dan masyarakat dalam program pengendalian penduduk. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program ini termasuk memperkuat pendidikan kesehatan reproduksi, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, dan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Kota Tebing Tinggi dapat



mencapai tujuan pengendalian penduduk yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

G. Perhubungan

Pada Bidang Perhubungan, hal yang menjadi kendala di Kota Tebing Tinggi adalah minimnya trayek yang mendorong bertambahnya jumlah kepemilikan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu-lintas pada ruas tertentu terutama pada jam sibuk. Jumlah arus penumpang di Kota Tebing Tinggi di tahun 2023 berkisar di angka 600 ribuan penumpang, dengan perubahan fluktuasi dari tahun ke tahunnya. Kondisi jumlah penumpang, jumlah armada angkutan umum yang beroperasi, izin trayek dan jumlah KIR angkutan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41
Capaian Indikator Perhubungan Kota Tebing Tinggi

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	1.080.000	648.000	688.000	787.542	691.200
2	Rasio ijin trayek	1:7.068.739	1:4.009.805	1:4.689.805	1:3.187.862	1: 2.946.656
3	Jumlah uji kir angkutan Umum	163	200	99	115	577
4	Jumlah Terminal bis	2	2	2	2	2
5	Persentase layanan angkutan darat	21,8	52,4	53,40	53,7	51,8
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	87,7	58,5	37	47,91	235,51
7	Pemasangan rambu-rambu	14	68	3	4	0
8	Jumlah orang melalui bandara/terminal per tahun	53.460	12.516	17.280	10.469	34.472

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas memberikan informasi mengenai **capaian indikator perhubungan** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator-indikator ini mencakup jumlah arus penumpang angkutan umum, rasio izin trayek, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah terminal bis, persentase layanan angkutan darat, dan beberapa aspek lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan sektor perhubungan di daerah tersebut.

1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan umum menunjukkan fluktuasi yang signifikan selama periode ini. Pada tahun 2020, jumlah arus penumpang tercatat sebanyak **1.080.000**. Namun, angka ini menurun drastis pada tahun 2021 menjadi **648.000**, yang mungkin disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mengurangi mobilitas masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah penumpang

kembali meningkat menjadi **688.000**, menunjukkan adanya pemulihan. Namun, pada tahun 2023, jumlah penumpang meningkat lagi menjadi **787.542**, sebelum sedikit menurun menjadi **691.200** pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kondisi kesehatan masyarakat, dan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan transportasi umum.

2. Rasio Izin Trayek

Rasio izin trayek menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2020, rasio izin trayek tercatat **1:7.068.739**, yang menunjukkan bahwa ada satu izin trayek untuk setiap 7.068.739 penumpang. Angka ini menunjukkan ketidakcukupan dalam penyediaan layanan angkutan umum. Namun, pada tahun 2021, rasio ini membaik menjadi **1:4.009.805**, dan terus meningkat menjadi **1:2.946.656** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan jumlah izin trayek, yang berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan angkutan umum.

3. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR (Kelaikan Jalan) angkutan umum juga menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, terdapat **163** uji KIR, yang meningkat menjadi **200** pada tahun 2021. Namun, angka ini menurun menjadi **99** pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi **115** pada tahun 2023 dan mencapai **577** pada tahun 2024. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada upaya yang lebih besar untuk memastikan keselamatan dan kelaikan kendaraan angkutan umum, yang penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi umum.

4. Jumlah Terminal Bis

Jumlah terminal bis di Kota Tebing Tinggi tetap stabil selama periode ini, dengan **2 terminal** yang terdaftar dari tahun 2020 hingga 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah penumpang dan izin trayek, infrastruktur terminal tidak mengalami perubahan signifikan. Hal ini bisa menjadi perhatian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor transportasi.

5. Persentase Layanan Angkutan Darat

Persentase layanan angkutan darat menunjukkan peningkatan yang signifikan dari **21,8%** pada tahun 2020 menjadi **52,4%** pada tahun 2021. Angka ini sedikit menurun menjadi **53,4%** pada tahun 2022, tetapi kembali meningkat menjadi **53,7%** pada tahun 2023 dan **51,8%** pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan angkutan darat, meskipun ada fluktuasi yang perlu diperhatikan.

6. Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum menunjukkan penurunan dari **87,7%** pada tahun 2020 menjadi **58,5%** pada tahun 2021. Namun, angka ini meningkat kembali menjadi **47,91%** pada tahun 2023 dan melonjak menjadi **235,51%** pada tahun 2024. Peningkatan yang tajam pada tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih banyak kendaraan angkutan umum yang



memenuhi syarat KIR, yang penting untuk keselamatan dan kelaikan kendaraan.

7. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu juga menunjukkan fluktuasi, dengan 14 rambu pada tahun 2020, meningkat menjadi 68 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 3 pada tahun 2023 dan tidak ada pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan keselamatan jalan, pemasangan rambu-rambu yang tidak konsisten dapat mempengaruhi efektivitasnya.

8. Jumlah Orang Melalui Bandara/Terminal per Tahun

Jumlah orang yang melalui bandara/terminal per tahun menunjukkan angka yang signifikan, dengan 53.460 orang pada tahun 2020, meningkat menjadi 12.516 pada tahun 2021, dan mencapai 17.280 pada tahun 2022. Namun, angka ini menurun menjadi 10.469 pada tahun 2023, sebelum melonjak menjadi 34.472 pada tahun 2024. Peningkatan yang tajam pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada pemulihan yang kuat dalam mobilitas masyarakat, yang mungkin dipengaruhi oleh pelonggaran pembatasan akibat pandemi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, capaian indikator perhubungan di Kota Tebing Tinggi menunjukkan dinamika yang kompleks. Meskipun ada peningkatan dalam beberapa aspek, seperti izin trayek dan jumlah uji KIR, tantangan tetap ada dalam hal infrastruktur dan konsistensi layanan. Pemerintah daerah perlu terus berinvestasi dalam infrastruktur transportasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan keselamatan angkutan umum untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

H. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong globalisasi dengan berbagai perspektif dan implikasinya. Arus informasi saat ini tidak terbatas pada media cetak dan elektronik, namun juga semakin berkembang melalui media sosial. Kelompok informasi masyarakat bisa menjadi salah satu wahana penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mendorong pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi ini. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan di Kota Tebing Tinggi mencapai 5 kelompok.

Tabel 2.42
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024



1	Cakupan pengembangan & pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tk. Kecamatan	80%	85%	90%	95%	95%

Sumber : Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi

I. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Tabel 2.43
Capaian Indikator Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1						
	PMDN (unit)	24	40	45	31	31
	PMA (unit)	-	2	2	2	3
2	PMDN (juta rupiah)	970,108.92	3,220,943.63	93,396.18	7.321.847,06	1.824.843,47
	PMA (US \$)	0	0	236,05	0	222,00
3	Rasio daya serap tenaga kerja	1.525	1.539	1.941	263	436

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **capaian indikator penanaman modal** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, dengan fokus pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Indikator ini mencakup jumlah unit PMDN dan PMA, nilai investasi dalam juta rupiah dan dolar AS, serta rasio daya serap tenaga kerja.

Pada tahun 2020, jumlah unit PMDN tercatat sebanyak **24 unit**, yang meningkat menjadi **40 unit** pada tahun 2021 dan **45 unit** pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, jumlah ini sedikit menurun menjadi **31 unit**. Peningkatan jumlah unit PMDN menunjukkan adanya kepercayaan investor domestik terhadap potensi ekonomi Kota Tebing Tinggi, meskipun penurunan pada tahun 2023 perlu dianalisis lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi.

Dari segi nilai investasi, PMDN menunjukkan tren yang positif, dengan nilai investasi mencapai **970.108,92 juta rupiah** pada tahun 2020 dan meningkat signifikan menjadi **3.220.943,63 juta rupiah** pada tahun 2021. Namun, nilai investasi PMDN mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi **93.396,18 juta rupiah**, sebelum kembali meningkat menjadi **7.321.847,06 juta rupiah** pada tahun 2023. Ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam nilai

investasi, yang mungkin dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, dan faktor eksternal lainnya.

Sementara itu, PMA juga menunjukkan perkembangan, meskipun jumlah unit PMA masih relatif kecil. Pada tahun 2021, terdapat **2 unit PMA**, dan pada tahun 2022, jumlah ini meningkat menjadi **3 unit**. Nilai investasi PMA pada tahun 2021 tercatat **236,05 USD**, dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai **222,00 USD**. Meskipun nilai investasi PMA tidak sebesar PMDN, keberadaan investasi asing tetap penting untuk mendiversifikasi sumber daya ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

Rasio daya serap tenaga kerja juga menunjukkan tren positif, meningkat dari **1,525** pada tahun 2020 menjadi **1,941** pada tahun 2022, dan diperkirakan mencapai **436** pada tahun 2024. Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk ke Kota Tebing Tinggi mampu menyerap tenaga kerja dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator penanaman modal di Kota Tebing Tinggi menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah unit dan nilai investasi, fluktuasi yang terjadi perlu diwaspadai. Pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan memberikan insentif bagi investor dan memperbaiki infrastruktur. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan Kota Tebing Tinggi dapat menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

J. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan asset pembangunan terutama di bidang SDM sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan. Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaanperencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda.

Tabel 2.44

Perkembangan Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Organisasi Kepemudaan	24	24	24	24	24
2	Organisasi Olahraga	4	12	16	17	17
3	Gedung Olahraga	5	5	5	5	5

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **perkembangan pemuda dan olahraga** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Tiga indikator utama yang dianalisis adalah jumlah organisasi

kepemudaan, organisasi olahraga, dan gedung olahraga.

Untuk **organisasi kepemudaan**, jumlahnya tetap stabil di **24 unit** selama periode 2020 hingga 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa infrastruktur organisasi pemuda di Kota Tebing Tinggi cukup solid, meskipun tidak ada pertumbuhan yang signifikan. Hal ini bisa mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan keberadaan organisasi yang ada, tetapi juga menunjukkan kurangnya inisiatif untuk memperluas atau mendirikan organisasi baru yang dapat memberikan lebih banyak peluang bagi pemuda.

Sementara itu, **organisasi olahraga** menunjukkan tren yang lebih dinamis. Pada tahun 2020, jumlah organisasi olahraga tercatat **4 unit**, yang meningkat menjadi **12 unit** pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi **16 unit** pada tahun 2022. Namun, angka ini stagnan di **17 unit** pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun awal menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan olahraga di kalangan pemuda, tetapi stagnasi di tahun-tahun terakhir bisa menunjukkan tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan atau mungkin adanya batasan dalam sumber daya atau dukungan yang tersedia.

Terakhir, **gedung olahraga** tetap stabil di **5 unit** selama periode yang sama. Stabilitas ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam jumlah organisasi olahraga, infrastruktur fisik untuk mendukung kegiatan olahraga tidak mengalami perubahan. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pengembangan lebih lanjut, karena fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan olahraga dan menarik lebih banyak partisipasi dari pemuda.

Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam jumlah organisasi olahraga, tantangan tetap ada dalam hal infrastruktur dan pengembangan organisasi kepemudaan. Untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam olahraga dan kegiatan kepemudaan, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk berinvestasi dalam fasilitas olahraga dan mendukung inisiatif baru yang dapat memperluas jangkauan organisasi kepemudaan.

Pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Peran pemuda dalam pembangunan diharapkan akan selalu meningkat untuk terwujudnya masyarakat yang lebih baik. Keberadaan organisasi pemuda di Kota Tebing Tinggi dapat membantu proses pembangunan wilayah terutama di dalam menggerakkan peran pemuda secara lebih aktif.

Selain mendorong peran aktif organisasi kepemudaan, pembinaan terhadap olah raga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi. Peningkatan prestasi diharapkan dapat mendorong kemajuan khususnya pembangunan pemuda secara lebih luas.

Tabel 2.45
Perkembangan Indikator Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024



1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	137	137	52	131,27	66,66
2	Persentase wirausaha muda (%)	0	0	0	8,51	6
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	0	0	0	0	0
4	Cakupan Pembinaan atlet muda (%)	0	0	0	0	0
5	Jumlah atlet berprestasi (Org)	146	69	20	6	5
6	Jumlah prestasi olahraga (Cabor Beregu)	4	3	3	1	-

Sumber : Dispora Kota Tebing Tinggi

K. Statistik

Berdasarkan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain untuk perencanaan pembangunan daerah, data dan informasi juga dibutuhkan oleh kalangan seluruh pemangku kepentingan untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi yang beragam, rinci, akurat dan mutakhir. Tuntutan kebutuhan data dan informasi tersebut belum terpenuhi seluruhnya, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Dalam upaya pemenuhan data statistik daerah, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Tebing Tinggi untuk membentuk suatu sistem data dan statistik yang terintegrasi.

L.Bidang Kebudayaan

Seberapa penting arti dan peran kebudayaan di suatu daerah terhadap kehidupan manusia, dapat dilihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya.

M. Bidang Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia. Keberadaan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan minat baca di masyarakat. Salah satu indikator atas minat baca masyarakat adalah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun di Kota Tebing Tinggi cenderung meningkat dari setiap Tahun. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu terus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat demi meningkatnya pengetahuan dan ilmu masyarakat serta melakukan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya tarik perpustakaan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Bidang Perpustakaan Kota Tebing Tinggi



No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung perpustakaan per Tahun	242.405	237.851	79.474	97.677	130.059
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Eksempler)	45.785	54.542	55.204	58.094	58.607
3	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan (judul)	21.446	23.266	23.597	25.042	25.298

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi

Tabel di atas menunjukkan **capaian indikator bidang perpustakaan** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator ini mencakup jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dan jumlah koleksi judul buku perpustakaan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan layanan perpustakaan dan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

1. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Pada tahun 2020, jumlah pengunjung perpustakaan tercatat sebanyak **242.405** orang. Namun, angka ini mengalami penurunan signifikan pada tahun 2021 menjadi **237.851**. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang membatasi akses ke fasilitas umum, termasuk perpustakaan. Pada tahun 2022, jumlah pengunjung kembali menurun drastis menjadi **79.474**, yang menunjukkan bahwa perpustakaan mungkin masih menghadapi tantangan dalam menarik pengunjung di tengah situasi yang tidak menentu. Namun, pada tahun 2023, jumlah pengunjung meningkat menjadi **97.677**, dan diperkirakan akan mencapai **130.059** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perpustakaan mulai pulih dan menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi, yang merupakan indikasi positif bagi upaya peningkatan literasi dan akses informasi.

2. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah juga menunjukkan tren yang menarik. Pada tahun 2020, koleksi buku tercatat sebanyak **45.785** eksemplar. Angka ini meningkat menjadi **54.542** pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi **55.204** pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, koleksi buku hanya meningkat sedikit menjadi **58.094**, dan diperkirakan akan mencapai **58.607** pada tahun 2024. Meskipun ada peningkatan dalam jumlah koleksi buku, laju pertumbuhannya tampak melambat, yang mungkin menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dalam pengadaan dan pemeliharaan koleksi buku agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3. Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan

Indikator ketiga yang dianalisis adalah jumlah koleksi judul buku perpustakaan. Pada tahun 2020, jumlah koleksi judul buku tercatat sebanyak **21.446**. Angka ini meningkat menjadi **23.266** pada tahun 2021, dan terus meningkat menjadi **23.597** pada tahun 2022. Namun, pada



tahun 2023, jumlah koleksi judul buku hanya meningkat sedikit menjadi **25.042**, dan diperkirakan akan mencapai **25.298** pada tahun 2024. Meskipun ada pertumbuhan, laju pertumbuhan koleksi judul buku juga menunjukkan perlambatan, yang dapat mempengaruhi keberagaman dan kualitas informasi yang tersedia bagi pengunjung.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, capaian indikator bidang perpustakaan di Kota Tebing Tinggi menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun ada penurunan signifikan dalam jumlah pengunjung pada tahun 2021 dan 2022, tren positif terlihat pada tahun 2023 dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2024. Peningkatan jumlah pengunjung menunjukkan bahwa perpustakaan mulai pulih dari dampak pandemi dan kembali menjadi pusat informasi yang penting bagi masyarakat.

Namun, perlambatan dalam pertumbuhan koleksi buku dan judul buku menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengadaan dan pemeliharaan koleksi. Untuk meningkatkan layanan perpustakaan, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- 1. **Pengadaan Buku yang Relevan:** Melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan dan minat masyarakat terhadap jenis buku yang diinginkan, sehingga koleksi perpustakaan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- 2. **Promosi dan Kegiatan Literasi:** Mengadakan program promosi dan kegiatan literasi untuk menarik lebih banyak pengunjung, seperti diskusi buku, seminar, dan pelatihan keterampilan.
- 3. **Peningkatan Fasilitas:** Memperbaiki fasilitas perpustakaan agar lebih nyaman dan menarik bagi pengunjung, termasuk penyediaan ruang baca yang nyaman dan akses internet.
- 4. **Kerjasama dengan Sekolah dan Komunitas:** Membangun kerjasama dengan sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpustakaan sebagai sumber informasi dan pembelajaran.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perpustakaan di Kota Tebing Tinggi dapat terus berkembang dan berfungsi sebagai pusat pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

N. Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan bidang kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Penanganan arsip menjadi kebutuhan penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif, diperlukan ada upaya bersama dari para pejabat administratif untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting.

Tabel 2.47
Indikator Kearsipan Kota Tebing Tinggi

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Kearsipan yang dibina penataan Arsip dinamisnya	9	12	7	12	14

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tebing Tinggi



3. Urusan Pilihan

A. Pariwisata

Kota Tebing Tinggi dalam hal ini diproyeksikan untuk menjadi kota jasa, produk pariwisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*) menjadi unggulan utama kawasan wisata ini. Pengembangan sektor pariwisata dapat diarahkan menjadi Tebing Tinggi MICE City. Selain itu, diperlukan pula terobosan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang menjadi salah satu perhatian penting untuk meningkatkan kunjungan wisata agar kota Tebing Tinggi tetap atraktif dan didukung dengan media promosi yang efektif.

B.Pertanian

Kota Tebing Tinggi merupakan daerah yang sebagian besar memiliki kenampakan berupa perkotaan. Sebagian daerah Kota Tebing Tinggi bukan merupakan daerah pertanian, namun masih terdapat beberapa kawasan yang memiliki lahan pertanian yang cukup dominan. Dewasa ini perubahan lahan pertanian menjadi lahan perumahan cukup masif terjadi seiring dengan terjadinya perkembangan dan penambahan konsentrasi penduduk di kota. Hal ini sejalan dengan data yang disajikan dibawah ini, bahwa kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi dari Tahun ke Tahun semakin menurun.

Tabel 2.48
Pencapaian Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Pencapaian Kontribusi
2020	1,25%
2021	1,29%
2022	1,25%
2023	1,25%
2024	1,26%

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.38 menunjukkan **pencapaian kontribusi sektor pertanian** terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Kontribusi ini diukur dalam persentase, yang mencerminkan seberapa besar sektor pertanian berperan dalam perekonomian daerah.

Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian tercatat sebesar **1,25%**. Angka ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang signifikan, meskipun tidak dominan dalam struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 2021, kontribusi meningkat sedikit menjadi **1,29%**, yang menunjukkan adanya pertumbuhan positif dalam sektor ini. Peningkatan ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan dalam teknik budidaya, atau dukungan kebijakan pemerintah yang lebih baik.

Namun, pada tahun 2022, kontribusi kembali turun menjadi **1,25%**, menunjukkan bahwa

sektor pertanian mengalami stagnasi. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, atau masalah dalam akses pasar. Pada tahun 2023, kontribusi tetap di angka **1,25%**, menunjukkan bahwa sektor pertanian belum mampu bangkit dari stagnasi yang terjadi sebelumnya.

Memasuki tahun 2024, kontribusi sektor pertanian sedikit meningkat menjadi **1,26%**. Meskipun ada peningkatan, angka ini masih menunjukkan bahwa sektor pertanian belum sepenuhnya memanfaatkan potensi yang ada. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dalam pengembangan sektor pertanian, termasuk peningkatan akses terhadap teknologi, pelatihan bagi petani, dan dukungan dalam hal pemasaran produk pertanian.

Secara keseluruhan, meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi menunjukkan fluktuasi, tantangan yang dihadapi sektor ini perlu diatasi untuk meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah. Upaya yang lebih terfokus dalam pengembangan sektor pertanian dapat membantu meningkatkan kontribusi ini, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

Permasalahan untuk menyediakan ketersediaan pangan secara mandiri dan juga keberlanjutan lingkungan yang baik, maka diperlukan adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan lahan kosong untuk sementara ditanami tanaman produktif, intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. selain itu juga yang harus menjadi perhatian adalah mengenai keamanan pangan dan terpenuhinya cadangan pangan di kota Tebing Tinggi. Ini bisa menjadi inovasi dalam mendukung produksi pangan skala rumah tangga. Implementasi hal ini akan mendukung bagi terwujudnya Kota Tebing Tinggi yang makin produktif, hijau dan nyaman.

C.Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang potensial di Kota Tebing Tinggi, belakangan ini sektor perdagangan terus menunjukkan tren perkembangan yang cukup. Hal ini ditunjukkan dengan besaran kontribusi sektor ini terhadap PDRB yang mencapai 23,72% di Tahun 2019 dan kemudian kontribusinya meningkat menjadi 24,87% di Tahun 2023.

Hal ini tentunya dapat menjadi peluang bagi pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk dapat menggenjot kembali sektor perdagangan guna memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Tabel 2.49
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kota Tebing Tinggi

Tahun	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
2020	23,72
2021	24,03



2022	24,45
2023	24,68
2024	24,87

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.39 menunjukkan **kontribusi sektor perdagangan** terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Sektor perdagangan mencakup perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada tahun 2020, kontribusi sektor perdagangan tercatat sebesar **23,72%**, yang menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian daerah. Angka ini meningkat menjadi **24,03%** pada tahun 2021, mencerminkan pertumbuhan yang positif dalam aktivitas perdagangan. Peningkatan ini dapat diartikan sebagai respons terhadap permintaan pasar yang meningkat, serta mungkin juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendukung sektor perdagangan melalui kebijakan yang lebih baik dan infrastruktur yang memadai.

Pada tahun 2022, kontribusi sektor perdagangan kembali meningkat menjadi **24,45%**, menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga berkembang. Pada tahun 2023, kontribusi sektor ini mencapai **24,68%**, dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi **24,87%** pada tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Kota Tebing Tinggi terus beradaptasi dan berkembang, meskipun ada tantangan yang mungkin dihadapi, seperti fluktuasi ekonomi dan perubahan perilaku konsumen.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Kota Tebing Tinggi memiliki kontribusi yang stabil dan meningkat terhadap PDRB. Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam sektor ini sangat penting untuk mendukung perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk terus mendukung sektor perdagangan, termasuk peningkatan infrastruktur, pelatihan bagi pelaku usaha, dan kebijakan yang mendukung, akan sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

Dalam rangka peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB maka haruslah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai, pembinaan, penataan dan pengelolaan pasar serta adanya jaminan kebenaran pengukuran terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau UTTP dalam setiap transaksi perdagangan yang dilakukan. Untuk menunjang sektor perdagangan di Kota Tebing Tinggi saat ini telah didukung dengan adanya UPTD. Pasar dan UPTD. Metrologi.

D.Perindustrian

Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan Kota Tebing Tinggi terhadap PDRB dari Tahun ke Tahun cenderung mengalami penurunan selama periode 2019 – 2023. Jika pada Tahun 2019 sektor industri bisa memberikan kontribusi sebesar 12,26% terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi, di Tahun 2023 kontribusinya mengalami penurunan hanya menjadi sebesar 11,49 %. Hal ini secara langsung harus dapat dijawab oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan mengarahkan pembangunan dan menerapkan kebijakan yang tepat pada sektor perindustrian sehingga sektor ini dapat kembali menunjukkan perkembangan.

Tabel 2.50
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Tahun	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2020	12,26%
2021	11,98%
2022	12,22%
2023	12,27%
2024	11,49%

Sumber : BPS - Kota Tebing Tinggi Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.40 menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Kontribusi ini diukur dalam persentase, yang mencerminkan seberapa besar sektor industri berperan dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2020, kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 12,26%. Angka ini menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peran yang cukup signifikan dalam perekonomian Kota Tebing Tinggi. Namun, pada tahun 2021, kontribusi ini mengalami penurunan menjadi 11,98%, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak sektor ekonomi, termasuk industri. Pada tahun 2022, kontribusi sektor industri pengolahan kembali meningkat menjadi 12,22%, menunjukkan adanya pemulihan dan upaya untuk meningkatkan produksi dan efisiensi dalam sektor ini. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana kontribusi mencapai 12,27%. Namun, pada tahun 2024, kontribusi sektor ini diperkirakan menurun lagi menjadi 11,49%. Penurunan ini dapat mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri, seperti fluktuasi permintaan pasar, masalah rantai pasokan, atau kebijakan ekonomi yang mempengaruhi operasional industri.

Secara keseluruhan, meskipun sektor industri pengolahan menunjukkan fluktuasi dalam kontribusinya terhadap PDRB, tren jangka panjang menunjukkan bahwa sektor ini tetap penting bagi perekonomian Kota Tebing Tinggi. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri, perlu ada upaya yang lebih terfokus dalam hal investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri juga sangat penting untuk memastikan bahwa sektor ini dapat berkontribusi secara optimal terhadap perekonomian daerah.



Saat ini koperasi masih menjadi soko guru perekonomian dan masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Persentase koperasi aktif di Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik koperasi itu sendiri, UMKM, usaha mikro dan usaha kecil.

Tabel 2.51
Perkembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Tebing Tinggi

No	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	102	102	106	120	43
2	Jumlah Koperasi (unit)	231	228	230	246	68
3	Persentase Koperasi Aktif (%)	46	44,74	46,09	48,78	63,2
4	Usaha Mikro (unit)	10.745	10.745	10.745	13.263	14.457
5	Jumlah UMKM (unit)	11.550	11.550	11.550	13.263	14.632
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%)	93	93,03	93,03	100	98,8

Sumber : Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.41 menunjukkan **perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Indikator yang dianalisis mencakup jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi secara keseluruhan, persentase koperasi aktif, jumlah usaha mikro, jumlah UMKM, dan persentase usaha mikro dan kecil.

1. Jumlah Koperasi Aktif dan Jumlah Koperasi

Jumlah koperasi aktif di Kota Tebing Tinggi tetap stabil di **102 unit** dari tahun 2020 hingga 2021, sebelum meningkat menjadi **106 unit** pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, jumlah koperasi aktif menurun drastis menjadi **43 unit**. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan koperasi, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya dukungan finansial, manajemen yang tidak efektif, atau perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Sementara itu, jumlah total koperasi juga menunjukkan peningkatan dari **231 unit** pada tahun 2020 menjadi **246 unit** pada tahun 2024, meskipun tidak sebanding dengan penurunan jumlah koperasi aktif.

2. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif menunjukkan proporsi koperasi yang beroperasi secara efektif dibandingkan dengan total koperasi yang terdaftar. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif adalah **46%**, yang sedikit menurun menjadi **44,74%** pada tahun 2021. Namun, persentase ini meningkat menjadi **48,78%** pada tahun 2023, sebelum menurun lagi menjadi **63,20%** pada tahun 2024. Peningkatan persentase ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi aktif menurun, ada peningkatan dalam efektivitas koperasi yang tersisa, yang mungkin lebih mampu beradaptasi dengan kondisi pasar.

3. Usaha Mikro dan UMKM

Jumlah usaha mikro di Kota Tebing Tinggi tercatat **10.745 unit** pada tahun 2020 dan tetap stabil hingga tahun 2021. Namun, pada tahun 2023, jumlah usaha mikro meningkat menjadi **13.263 unit**, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ini. Jumlah UMKM juga menunjukkan tren yang serupa, dengan **11.550 unit** pada tahun 2020 dan meningkat menjadi **14.632 unit** pada tahun 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan potensi yang besar dalam sektor usaha kecil dan mikro, yang dapat berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja.

4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Persentase usaha mikro dan kecil menunjukkan proporsi usaha mikro dalam total usaha yang ada. Pada tahun 2020, persentase ini adalah **93%**, yang menunjukkan dominasi usaha mikro dalam struktur ekonomi lokal. Persentase ini tetap stabil di **93,03%** pada tahun 2021 dan 2022, sebelum meningkat menjadi **98,8%** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa usaha mikro semakin mendominasi sektor usaha di Kota Tebing Tinggi, yang dapat menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, perkembangan koperasi dan UMKM di Kota Tebing Tinggi menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun jumlah koperasi aktif mengalami penurunan, pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah usaha mikro dan UMKM menunjukkan adanya potensi yang besar dalam sektor ini. Untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut, beberapa langkah dapat diambil:

1. **Dukungan Finansial:** Meningkatkan akses ke pembiayaan bagi koperasi dan UMKM untuk membantu mereka bertahan dan berkembang.
2. **Pelatihan dan Pendidikan:** Menyediakan pelatihan manajemen dan keterampilan bagi pengelola koperasi dan UMKM untuk meningkatkan efektivitas operasional mereka.
3. **Promosi dan Pemasaran:** Mendorong promosi produk-produk lokal untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil di pasar.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor koperasi dan UMKM di Kota Tebing Tinggi dapat tumbuh lebih kuat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

4. Urusan Penunjang

A. Perencanaan Pembangunan

Terkait urusan perencanaan pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Beberapa indikator tersebut antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada, dan tersedianya dokumen perencanaan RKPPD yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Tabel 2.52
Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator Perencanaan Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Tebing Tinggi

Pengembangan (Research & Development) didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Perkembangan capaian Indikator Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53
Capaian Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi 2020-2024

No	Indikator Perencanaan Pembangunan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Inovasi Daerah	Kurang inovatif	Kurang inovatif	Kurang inovatif	Kurang inovatif	Kurang inovatif

B.Keuangan

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki.

Tabel 2.54
Indikator Keuangan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	1	4	1	1



No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban	Tepat Waktu	11	47	9	3

Sumber : BPKPD Kota Tebing Tinggi

Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan retribusi serta mendistribusikannya untuk kepentingan umum. Optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat. Peningkatan kontribusi PAD, diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah. Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kenaikan Penerimaan Retribusi Daerah dari tahun	Tepat Waktu	1	4	1	1
2	Indeks Pelayanan Publik	Tepat Waktu	11	47	9	3

C.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, Pemko Tebing Tinggi telah mengadakan pendidikan dan pelatihan secara rutin. ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural adalah meningkat dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah, jumlah jabatan administrasi dan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menurun.

Tabel 2.56
Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Sistem Merit (Poin)	kurang	kurang	baik	baik	baik

Sumber : BKPSDM Kota Tebing Tinggi



D.Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persentase penyelesaian tindak lanjut Inspektorat Kota Tebing Tinggi dari tahun ke tahun mencapai 100% BPK RI melaksanakan pengawasan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk Opini atas laporan keuangan Kota Tebing Tinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Opini BPK Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kota Tebing Tinggi

5. Urusan Pendukung

A. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. rogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRD.

Tabel 2.58
Indikator Sekretariat Dewan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Tahu				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penetapan Ranperda yang difasilitasi	100%	80%	60%	80%	100%

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Tebing Tinggi

B.Sekretariat Daerah

Predikat SAKIP

Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, predikat SAKIP di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut.

Tabel 2.59
Predikat SAKIP Tahun 2019-2023



No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Predikat SAKIP	CC	B	B	B	BB

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator atas kondisi pelayanan publik. Angka diperoleh dari penilaian oleh masyarakat atas tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik yang diterima. Peningkatan yang dapat dilihat pada table dibawah ini merupakan bukti nyata terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dan perlu untuk terus ditingkatkan.

Tabel 2.60
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,50	86,34	88,75	92,25	95,25

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Tebing Tinggi

C. Sumber Daya Manusia

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan karena di dalam kelompok angkatan kerja terdapat kelompok penduduk yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Semakin besar jumlah tenaga kerja di dalam suatu daerah, semakin besar penawaran tenaga kerjanya. Apabila hal ini tidak diikuti dengan peningkatan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja) maka akan jadi pengangguran. Disamping itu, semakin besar jumlah tenaga kerja maka semakin besar kapasitas penduduk usia kerja untuk menopang penduduk usia tidak produktif.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.61
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan
di Kota Tebing Tinggi

Kelompok Umur	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2020
Muda (0-14 Tahun)	27,61%	26,89%	26,59%	26,29%	26,20%
Produktif (15-64Tahun)	67,27%	67,61%	67,61%	67,59%	67,29%
Lansia (65 Tahun lebih)	5,12%	5,5%	5,8%	6,11%	6,51%



Rasio Beban Ketergantungan(%)	48,66%	47,88%	47,90%	46,75%	48,61%

Sumber : BPS - Tebing Tinggi Dalam Angka 2025

Tabel 2.56dg menunjukkan **persentase penduduk menurut kelompok umur** dan **rasio ketergantungan** di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024. Data ini mencakup tiga kelompok umur: muda (0-14 tahun), produktif (15-64 tahun), dan lansia (65 tahun ke atas). Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang struktur demografis dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam hal ketergantungan.

1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur

Pada tahun 2020, persentase penduduk muda (0-14 tahun) tercatat sebesar **27,61%**. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari populasi terdiri dari anak-anak dan remaja, yang memerlukan perhatian dalam hal pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, pada tahun 2021, persentase ini meningkat menjadi **26,89%**, dan terus menurun menjadi **26,26%** pada tahun 2024. Penurunan ini mungkin mencerminkan tren penurunan angka kelahiran atau peningkatan dalam jumlah penduduk di kelompok umur yang lebih tua.

Kelompok umur produktif (15-64 tahun) menunjukkan stabilitas yang signifikan, dengan persentase tetap di sekitar **67%** selama periode tersebut. Pada tahun 2020, angka ini adalah **67,27%**, dan sedikit menurun menjadi **67,29%** pada tahun 2024. Stabilitas ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada dalam usia kerja, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Sementara itu, persentase lansia (65 tahun ke atas) meningkat dari **5,12%** pada tahun 2020 menjadi **6,51%** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa populasi lansia di Kota Tebing Tinggi semakin bertambah, yang dapat menjadi tantangan bagi sistem kesehatan dan layanan sosial. Dengan meningkatnya jumlah lansia, kebutuhan akan perawatan kesehatan dan dukungan sosial juga akan meningkat.

2. Rasio Beban Ketergantungan

Rasio beban ketergantungan adalah indikator penting yang menunjukkan proporsi penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (muda dan lansia) dibandingkan dengan penduduk yang aktif (produktif). Pada tahun 2020, rasio beban ketergantungan tercatat sebesar **48,66%**, yang menunjukkan bahwa untuk setiap 100 orang yang bekerja, ada sekitar 49 orang yang bergantung pada mereka. Rasio ini menunjukkan adanya tantangan dalam hal dukungan ekonomi bagi kelompok yang tidak aktif.

Namun, rasio ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, menjadi **47,88%** pada tahun 2021 dan **46,75%** pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang aktif secara ekonomi semakin meningkat, yang dapat menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, rasio beban ketergantungan pada tahun 2024 diperkirakan kembali meningkat menjadi **48,61%**, yang menunjukkan bahwa tantangan dalam hal ketergantungan masih ada.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika demografis yang kompleks di Kota Tebing Tinggi. Meskipun ada stabilitas dalam kelompok umur produktif, peningkatan jumlah lansia dan penurunan persentase penduduk muda menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam perencanaan kebijakan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program yang mendukung pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak, serta layanan kesehatan dan sosial untuk lansia. Selain itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru sangat penting untuk mengurangi rasio beban ketergantungan. Dengan langkah-langkah ini, Kota Tebing Tinggi dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memberikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi selama beberapa tahun terakhir mencerminkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan. Kinerja APBD dievaluasi berdasarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang menjadi indikator efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Stabilitas keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, analisis terhadap tren pendapatan dan belanja menjadi penting dalam merumuskan strategi keuangan yang lebih berkelanjutan pada periode 2025-2029.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah menerapkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi dan pajak daerah. Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dimasukkan ke



dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD dan RPJMD) dengan mempedomani visi misi RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi dan visi misi RPJMN 2025-2029 yakni terkait dengan transformasi ekonomi (Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi).

Elektronifikasi transaksi pemerintah dengan memperhatikan arah kebijakan elektronifikasi transaksi pemerintah yang ditetapkan secara Nasional sangat bermanfaat dalam rangka optimalisasi transaksi belanja dan pendapatan di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, serta Lainlain Pendapatan yang Sah. Sementara itu, Belanja Daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Adapun Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal daerah. Dengan memahami struktur APBD ini, dapat dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta upaya strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal dan optimalisasi belanja untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah 2020-2025

Pendapatan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan yang memadai akan mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, analisis pendapatan daerah selama periode 2020-2024 sangat penting untuk memahami dinamika keuangan daerah dan merumuskan strategi yang tepat untuk masa depan.

Tabel 2. 62
Realisasi APBD Tahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	90.981.301.747	82.930.324.048	88.747.190.213	97.310.116.162	93.011.170.957



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
	B. Pendapatan Transfer	542.966.297.134	579.081.192.667	541.876.466.636	590.877.531.472	564.080.235.195
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	25.687.455.212	30.327.150.000	32.882.531.394	8.505.450.039	8.364.511.902
	JUMLAH PENDAPATAN	659.635.054.093	692.338.666.715	663.506.188.243	696.693.097.673	665.455.918.054
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	488.688.236.886	498.357.709.828	547.944.759.101	560.131.637.877	617.897.126.550
	B. Belanja Modal	149.776.465.844	169.669.665.003	132.550.214.696	113.751.964.978	60.035.869.887
	C. Belanja Tak Terduga	15.255.081.445	856.767.010	338.726.719	154.027.501	127.138.120
	D. Belanja Transfer	914.938.500	-	-	-	
	JUMLAH BELANJA	654.634.722.675	668.884.141.841	680.833.700.516	674.037.630.356	678.060.134.557
	SURPLUS/DEFISIT	5.000.331.418	23.454.524.874	17.327.512.273	22.655.467.317	12.604.216.503
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	31.954.615.301	27.907.359.734	31.682.152.855	5.114.240.595	27.769.707.911
	B. Pengeluaran Pembiayaan	9.046.586.984	19.679.731.753	9.240.399.986	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	22.908.028.317	8.227.627.981	22.441.752.869	5.114.240.595	27.769.707.911
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	27.908.359.735	31.682.152.855	5.114.240.596	27.769.707.912	15.165.491.408

Sumber : BPKPD Kota Tebing Tinggi

Tabel 2. 63
Neraca DaerahTahun 2020-2024 Kota Tebing Tinggi

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ASET					
	A. Aset Lancar	76.605.707.996	87.263.643.503	51.553.431.306	60.125.952.484	48.198.738.561
	B. Investasi Jangka Panjang	85.209.812.001	95.628.963.074	102.542.158.309	100.946.907.779	100.946.907.779
	C. Aset Tetap	1.371.365.925.152	1.497.088.441.257	1.509.408.225.484	1.492.271.400.190	1.497.960.021.754
	Lainnya	273.708.292.443	271.126.942.367	277.052.466.708	285.785.734.318	285.765.888.821
	JUMLAH ASET	1.806.889.737.592	1.951.107.990.201	1.940.556.281.807	1.939.129.994.771	1.932.871.556.915
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	34.305.895.899	30.096.063.093	31.216.468.077	29.248.760.418	29.496.400.764
	B. Kewajiban Jangka Panjang	5.240.399.986	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	39.546.295.885	30.096.063.093	31.216.468.077	29.248.760.418	29.496.400.764
3	EKUITAS					
	Ekuitas	1.767.343.441.707	1.921.011.927.119	1.909.339.813.730	1.909.881.234.355	1.903.130.836.418
	JUMLAH EKUITAS	1.767.343.441.707	1.921.011.927.119	1.909.339.813.730	1.909.881.234.355	1.903.130.836.418
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.806.889.737.592	1.951.107.990.212	1.940.556.281.807	1.939.129.994.773	1.932.627.237.182



Sumber Data: BPKPD Kota Tebing Tinggi

Dari tabel di atas dapat dirincikan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

1. Rincian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi terdiri dari tiga komponen utama yakni pendapan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.64
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Jumlah Pendapatan
2020	90.981.301.747	542.966.297.134	25.687.455.212	659.635.054.093
2021	82.930.324.048	579.081.192.667	30.327.150.000	692.338.666.715
2022	88.747.190.213	541.876.466.636	32.882.531.394	663.506.188.243
2023	97.310.116.162	590.877.531.472	8.505.450.039	696.693.097.673
2024	93.011.170.957	564.080.235.195	8.364.511.902	665.455.918.054

Sumber Data: BPKPD Kota Tebing Tinggi

Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar Rp 90.981.301.747. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi Rp 82.930.324.048. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Banyak sektor usaha yang terpaksa ditutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas, sehingga mengurangi potensi penerimaan pajak dan retribusi. Meskipun demikian, pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi tantangan ini dengan berbagai kebijakan dan program pemulihan ekonomi.

Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021, PAD menunjukkan tren pemulihan yang baik pada tahun 2022 dengan angka Rp 88.747.190.213, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 97.310.116.162. Pada tahun 2024, PAD kembali tercatat sebesar Rp 93.011.170.957. Peningkatan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mengoptimalkan potensi pendapatan dari sumber-sumber lokal, seperti meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak dan retribusi, serta memperbaiki pengelolaan aset daerah. Hal ini mencerminkan upaya yang konsisten dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian finansial dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pendapatan transfer merupakan dana yang diterima dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi untuk mendukung program-program pembangunan daerah. Selama periode 2020-2024, analisis pendapatan transfer menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pendapatan transfer tercatat sebesar Rp 542.966.297.134, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp 579.081.192.667. Namun, pada tahun 2022, pendapatan ini mengalami penurunan menjadi Rp 541.876.466.636. Meskipun demikian, pada tahun 2023, pendapatan transfer kembali meningkat menjadi Rp 590.877.531.472, sebelum akhirnya tercatat sebesar Rp 564.080.235.195 pada tahun 2024.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah pada transfer dari pemerintah pusat perlu dikelola dengan baik. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2023 menunjukkan adanya dukungan yang signifikan dari pemerintah pusat, namun penurunan pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada dana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi yang dapat mengurangi ketergantungan ini dan mencari sumber pendapatan alternatif.

Dengan mengelola pendapatan transfer secara efektif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program-program pembangunan tetap berjalan meskipun ada perubahan dalam alokasi dana dari pemerintah pusat. Hal ini juga akan membantu menciptakan stabilitas keuangan daerah dan mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan. Ke depannya, pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola dan memanfaatkan pendapatan transfer agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup pendapatan yang tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer. Selama periode 2020-2024, analisis terhadap komponen ini menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, pendapatan dari komponen ini tercatat sebesar Rp 25.687.455.212, dan mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2021 menjadi Rp 30.327.150.000. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022, di mana pendapatan mencapai Rp 32.882.531.394. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2023, ketika pendapatan turun menjadi Rp 8.505.450.039, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan angka Rp 8.364.511.902.

Penurunan yang tajam pada tahun 2023 dan 2024 ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah daerah, pengurangan sumber pendapatan, atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pendapatan daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen pendapatan ini agar dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

Dengan memahami dinamika pendapatan dari komponen lain-lain ini, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam meningkatkan total pendapatan daerah, tetapi juga akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Total pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang bervariasi, mencerminkan dinamika ekonomi dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan. Dalam analisis ini, kita akan melihat total pendapatan untuk setiap tahun, yang tercatat sebagai berikut: pada tahun 2020, total pendapatan mencapai Rp 659.635.054.093; pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp 692.338.666.715; kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi Rp 663.506.188.243;

kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp 696.693.097.673; dan akhirnya, pada tahun 2024, total pendapatan tercatat sebesar Rp 665.455.918.054.

Dari data tersebut, terlihat bahwa total pendapatan daerah mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dapat diatribusikan kepada berbagai faktor, termasuk peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penurunan yang terjadi pada tahun 2022 dan 2024 menunjukkan adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan.

Penurunan ini mungkin disebabkan oleh dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi aktivitas ekonomi, serta kebijakan fiskal yang mungkin tidak mendukung pertumbuhan pendapatan.

Pada tahun 2022, total pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang dapat dihubungkan dengan penurunan pendapatan transfer dan fluktuasi dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, seperti transfer dari pemerintah pusat, dapat menjadi risiko bagi stabilitas keuangan daerah. Ketika pendapatan transfer menurun, dampaknya langsung terasa pada total pendapatan daerah, yang dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Selanjutnya, pada tahun 2023, total pendapatan kembali meningkat, mencapai angka tertinggi dalam periode tersebut. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan sumber pendapatan, baik dari PAD maupun pendapatan transfer. Hal ini juga mencerminkan pemulihan ekonomi yang lebih baik setelah dampak pandemi, di mana aktivitas ekonomi mulai kembali normal dan pendapatan dari pajak serta retribusi meningkat. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun total pendapatan meningkat, ketergantungan pada pendapatan transfer tetap menjadi perhatian, terutama ketika melihat penurunan yang terjadi pada tahun 2024.

Pada tahun 2024, total pendapatan kembali mengalami penurunan, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pengelolaan pendapatan. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan baru yang mungkin mengurangi sumber pendapatan, atau ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi pendapatan dari pajak dan retribusi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi penyebab penurunan ini dan merumuskan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

Dalam konteks ini, analisis total pendapatan daerah Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa meskipun ada potensi untuk pertumbuhan, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan perlu diatasi dengan strategi yang lebih baik. Pemerintah daerah harus berupaya untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Dengan

langkah-langkah yang tepat, diharapkan total pendapatan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi.

2. Rincian Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, analisis terhadap komponen belanja daerah selama periode 2020-2024 sangat penting untuk memahami bagaimana alokasi anggaran dilakukan dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Tabel yang disajikan memberikan rincian mengenai tiga komponen utama belanja: belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Tabel 2.65
Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 - 2024

Tahun	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Surplus/Defisit
2020	149.776.465.844	15.255.081.445	914.938.500	165.946.487.809	493.688.566.284
2021	169.669.665.003	856.767.010	-	170.526.434.034	521.812.232.681
2022	132.550.214.696	338.726.719	-	132.888.943.437	530.617.244.806
2023	113.751.964.978	154.027.501	-	113.905.994.502	582.787.103.171
2024	60.035.869.887	127.138.120	-	60.163.010.031	605.292.908.023

Sumber Data: BPKPD Kota Tebing Tinggi

Analisis komponen belanja daerah Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam alokasi anggaran. Belanja modal mengalami penurunan yang tajam, sementara belanja tak terduga menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19. Ketiadaan belanja transfer pada beberapa tahun menunjukkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun surplus tercatat meningkat selama periode tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan dengan bijaksana dan berfokus pada program-program pembangunan yang strategis. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan pengelolaan belanja daerah dapat dilakukan dengan lebih baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

3. Analisis Pembiayaan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020-2024

Pembiayaan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan yang baik akan mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, analisis terhadap komponen pembiayaan selama periode 2020-2024 sangat penting untuk memahami dinamika keuangan daerah dan merumuskan strategi yang tepat untuk masa depan. Berdasarkan data yang disajikan, kita akan menganalisis komponen pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).



Analisis terhadap komponen pembiayaan daerah Kota Tebing Tinggi selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dalam pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan SILPA. Peningkatan pengeluaran pada tahun 2021 menunjukkan adanya proyek-proyek besar, namun penurunan pada tahun 2022 dan 2023 menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola pembiayaan. Dengan rekomendasi yang tepat, diharapkan pengelolaan pembiayaan daerah dapat ditingkatkan, mendukung pembangunan yang lebih baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Tabel 2.66
Pembiayaan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2020 - 2024

PEMBIAYAAN	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
A. Penerimaan Pembiayaan	31.954.615.301	27.907.359.734	31.682.152.855	5.114.240.595	27.769.707.911
B. Pengeluaran Pembiayaan	9.046.586.984	19.679.731.753	9.240.399.986	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	22.908.028.317	8.227.627.981	22.441.752.869	5.114.240.595	27.769.707.911
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	27.908.359.735	31.682.152.855	5.114.240.596	27.769.707.912	15.165.491.408

Sumber Data: BPKPD Kota Tebing Tinggi

2. Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi kerangka pendanaan Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2026-2030 menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan yang stabil dan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan memanfaatkan data dan analisis yang ada, diharapkan RPJMD yang disusun dapat memberikan arah yang jelas untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun Proyeksi Kerangka Pendanaan Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.67
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN	665.455.827.745	725.000.000.000	786.625.000.000	853.488.125.000	926.034.615.625	1.004.747.557.953
	A. Pendapatan Asli Daerah	93.011.080.648	130.000.000.000	145.012.096.774	156.372.491.452	174.306.236.592	194.128.015.585
	B. Pendapatan Transfer	564.080.235.195	581.605.000.000	627.168.525.346	672.671.255.668	725.369.003.807	782.195.146.963
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	8.364.511.902	13.395.000.000	14.444.377.880	24.444.377.880	26.359.375.226	28.424.395.405
	JUMLAH PENDAPATAN	665.455.827.745	725.000.000.000	786.625.000.000	853.488.125.000	926.034.615.625	1.004.747.557.953
2	BELANJA	678.060.134.557	720.000.000.000	781.200.000.000	847.602.000.000	919.648.170.000	997.818.264.450
	A. Belanja Operasi	617.897.126.550	629.132.336.619	687.330.543.124	747.098.597.437	811.850.427.181	881.769.747.349
	B. Belanja Modal	60.035.869.887	63.037.663.381	66.039.456.876	72.643.402.563	79.907.742.820	87.898.517.102
	C. Belanja Tak Terduga	127.138.120	21.000.000.000	22.000.000.000	23.000.000.000	24.000.000.000	25.000.000.000
	D. Belanja Transfer	0	6.830.000.000	5.830.000.000	4.860.000.000	3.890.000.000	3.150.000.000
	JUMLAH BELANJA	678.060.134.557	720.000.000.000	781.200.000.000	847.602.000.000	919.648.170.000	997.818.264.450
	SURPLUS/DEFISIT	-12.604.306.812	5.000.000.000	5.425.000.000	5.886.125.000	6.386.445.625	6.929.293.503
3	PEMBIAYAAN	27.769.707.912	27.819.707.912	27.869.707.912	27.919.707.912	27.969.707.912	28.019.707.912
	A. Penerimaan Pembiayaan	27.769.707.912	27.819.707.912	27.869.707.912	27.919.707.912	27.969.707.912	28.019.707.912
	B. Pengeluaran Pembiayaan	0	6.000.000.000	6.500.000.000	7.000.000.000	7.500.000.000	8.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	27.769.707.912	21.819.707.912	21.369.707.912	20.919.707.912	20.469.707.912	20.019.707.912
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	15.165.401.099	26.819.707.912	26.794.707.911	25.805.832.912	26.856.153.537	26.949.001.415

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 merupakan proses krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Suksesnya RPJMD ini sangat bergantung pada pemahaman yang komprehensif dan analisis yang mendalam terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kota Tebing Tinggi. Bagian ini bukan sekadar daftar masalah, melainkan merupakan fondasi bagi perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Permasalahan Kondisi Geografi dan Demografi

Permasalahan yang dapat digambarkan kaitan aspek geografi dan demografi adalah :

1) Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kota Tebing Tinggi, memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana alam, khususnya banjir. Posisi kota yang dilewati sungai-sungai tertentu menjadikan wilayah ini rawan terhadap luapan air sungai, terutama saat musim hujan. Topografi wilayah juga perlu dipertimbangkan, karena kemiringan lahan dan sistem drainase yang kurang memadai dapat memperparah dampak banjir. Data mengenai curah hujan tahunan, debit air sungai, dan peta rawan banjir di Kota Tebing Tinggi sangat penting untuk menganalisis lebih lanjut tingkat kerawanan banjir di berbagai wilayah. Selain banjir, potensi bencana alam lainnya seperti tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang juga perlu diidentifikasi dan dikaji tingkat risikonya. Pemetaan risiko bencana yang komprehensif akan membantu dalam perencanaan mitigasi dan adaptasi bencana yang efektif. Data mengenai sejarah kejadian bencana alam di Kota Tebing Tinggi juga perlu dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tren kejadian bencana.

Analisis kerawanan bencana alam ini harus diintegrasikan dengan perencanaan tata ruang wilayah. Kawasan-kawasan yang rawan bencana perlu dihindari untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur vital. Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul, sistem drainase, dan waduk, perlu direncanakan dan dibangun secara terpadu. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam juga sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana, penyebaran informasi mengenai mitigasi bencana, dan pembentukan tim penanggulangan bencana di tingkat masyarakat.

2) Kondisi Demografi

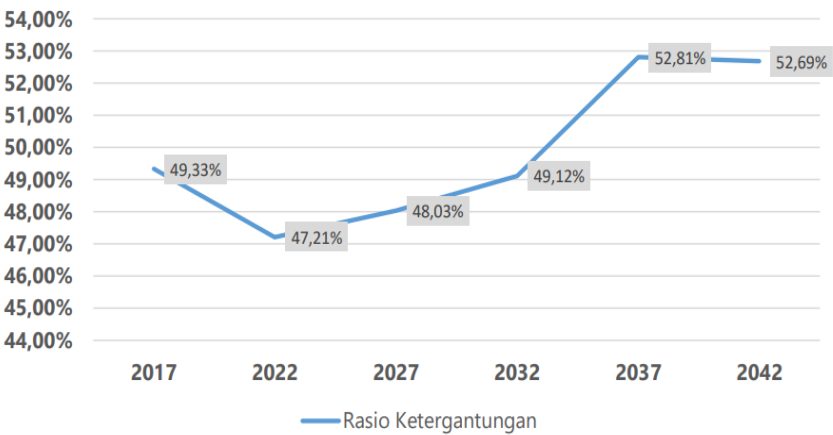
- **Pertumbuhan Penduduk:** Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis untuk memprediksi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik di masa mendatang. Data mengenai angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi penduduk sangat penting untuk memahami dinamika pertumbuhan penduduk. Proyeksi penduduk untuk beberapa tahun ke depan juga perlu dilakukan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah.

- **Struktur Usia:** Struktur usia penduduk Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis untuk memahami proporsi penduduk usia produktif, usia tidak produktif, dan usia lanjut. Proporsi penduduk usia produktif yang besar merupakan potensi untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga memerlukan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Proporsi penduduk usia lanjut yang meningkat memerlukan perencanaan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi lansia.
- **Distribusi Penduduk:** Distribusi penduduk di Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis untuk mengidentifikasi kepadatan penduduk di berbagai wilayah. Wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Data mengenai kepadatan penduduk di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan, sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang merata.
- **Komposisi Penduduk:** Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, dan pendidikan perlu dianalisis untuk memahami keragaman penduduk Kota Tebing Tinggi. Pemahaman mengenai keragaman penduduk ini penting untuk perencanaan pembangunan yang inklusif dan memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat.
- **Migrasi:** Pola migrasi penduduk di Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis untuk memahami faktor-faktor yang mendorong migrasi dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Data mengenai migrasi penduduk dari dan ke Kota Tebing Tinggi sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Analisis data demografi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kependudukan di Kota Tebing Tinggi dan akan membantu dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Data ini harus diintegrasikan dengan data geografis untuk perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Perencanaan yang baik akan mempertimbangkan aspek kerawanan bencana, kepadatan penduduk, dan kebutuhan layanan publik di berbagai wilayah.

Pada tahun 2017 yang lalu jika dilihat dari data penduduk ditemukan bahwa telah terjadi perubahan komposisi penduduk itu ditandai dengan semakin bertambahnya penduduk produktif (umur 16 – 64 tahun) dibandingkan dengan penduduk non produktif (umur dibawah 15 dan 65 tahun keatas).

Gambar 2.7
Rasio Ketergantungan Kota Tebing Tinggi



Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri. Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi pada tahun 2021 mencapai 174.969 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 87.120 jiwa (49,79%) dan penduduk perempuan sejumlah 87.849 jiwa (50,21%), bila dibandingkan dengan keadaan 2020 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 2.131 jiwa atau pertumbuhan sebesar 1,23% dimana pada tahun 2020 hanya tercatat 172.838 jiwa. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kepadatan penduduk Kota Tebing Tinggi mengalami kenaikan dari angka 4,49 ribu jiwa per kilometer persegi pada tahun 2020 menjadi 4,56 ribu jiwa per kilometer persegi pada tahun 2021, dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 5 orang. Kepadatan Penduduk di 5 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Kota dengan kepadatan sebesar 6,94 ribu jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Padang Hilir sebesar 3,47 ribu jiwa/km². Pada Tahun 2021 jumlah penduduk perempuan sebanyak 87.849 jiwa (50,21%) sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 87.120 jiwa (49,79%), atau Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio) penduduk Kota Tebing Tinggi sebesar 99,17.

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk perempuan lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk perempuan sebanyak 87.849 jiwa (50,21%) sedangkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 87.120 jiwa (49,79%), atau Ratio Jenis Kelamin (Sex Ratio) penduduk Kota Tebing Tinggi sebesar 99,17. Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur Kota Tebing Tinggi sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok. Jika dilihat dari kelompok umur pada tahun 2021, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 26,59%, usia 15-59 tahun sebesar 63,56% dan usia 60 tahun ke atas sebesar 9,84%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tebing Tinggi memiliki penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan.

3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Angka kemiskinan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesejahteraan

masyarakat di suatu daerah. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kualitas hidup penduduk. Di Kota Tebing Tinggi, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan. Pada Maret 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar **8,79%**, menurun dari **9,49%** pada Maret 2023. Penurunan ini menunjukkan kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota tersebut.

Penurunan angka kemiskinan ini sangat berarti, karena mencerminkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Tebing Tinggi telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Semua upaya ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan adalah peningkatan akses terhadap pendidikan. Pendidikan yang berkualitas memberikan peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan keterampilan mereka. Dengan adanya program-program pendidikan yang lebih inklusif, masyarakat di Kota Tebing Tinggi kini memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pendidikan yang layak, yang pada gilirannya dapat membantu mereka keluar dari jeratan kemiskinan.

Selain itu, peningkatan layanan kesehatan juga berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara produktif dan mengurangi beban biaya kesehatan yang sering kali menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah berupaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memperoleh layanan kesehatan yang memadai.

Di samping itu, program-program kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal juga telah memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM), pemerintah telah menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini sangat penting, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi akibat berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19.

Namun, meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan yang signifikan, tantangan masih tetap ada. Peningkatan biaya hidup dan inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi program-program yang ada. Upaya pengentasan kemiskinan harus tetap menjadi prioritas, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penurunan angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi adalah sebuah langkah positif yang menunjukkan kemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dengan terus melanjutkan dan memperkuat program-program yang ada, diharapkan angka kemiskinan dapat terus menurun, dan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Angkatan kerja dan pengangguran merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan erat dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kesempatan kerja yang memadai menjadi kunci dalam mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, idealnya, akan mampu menyerap tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahunnya. Namun, jika pertumbuhan ekonomi tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup, maka akan terjadi peningkatan angka pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka, yang mengukur persentase penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan, menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka antara lain:

- a) **Pertumbuhan Ekonomi yang Lambat:** Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau stagnan akan mengurangi permintaan tenaga kerja dari sektor-sektor ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tambahan angkatan kerja setiap tahunnya, maka akan terjadi penumpukan tenaga kerja yang menganggur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi dalam beberapa tahun terakhir perlu dianalisis untuk melihat korelasinya dengan tingkat pengangguran.
- b) **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Kualitas SDM yang rendah juga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Data mengenai tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja di Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan perlu dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing tenaga kerja.
- c) **Struktur Ekonomi:** Struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor informal juga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Sektor informal umumnya memiliki produktivitas yang rendah dan menyerap tenaga kerja yang relatif sedikit. Data mengenai struktur ekonomi Kota Tebing Tinggi, termasuk kontribusi masing-masing sektor terhadap perekonomian, perlu dianalisis untuk melihat potensi pengembangan sektor-sektor formal yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.
- d) **Investasi yang Rendah:** Rendahnya investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, akan mengurangi penciptaan lapangan kerja baru. Investasi yang memadai sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Data mengenai nilai investasi di Kota Tebing Tinggi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), perlu dianalisis untuk melihat potensi peningkatan

investasi.

- e) **Kurangnya Informasi Pasar Kerja:** Kurangnya informasi mengenai pasar kerja juga dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Tenaga kerja yang tidak memiliki informasi mengenai lowongan pekerjaan akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Peningkatan akses informasi pasar kerja melalui berbagai media, seperti bursa kerja, website, dan aplikasi mobile, perlu dilakukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
- f) **Mismatch antara Pencari Kerja dan Lowongan Kerja:** Terkadang terjadi ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch). Hal ini dapat menyebabkan pengangguran meskipun terdapat lowongan pekerjaan. Program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perlu dirancang untuk mengatasi masalah ini.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. IPM mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Di Kota Tebing Tinggi, analisis IPM dari tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran yang jelas mengenai kemajuan pembangunan manusia di daerah ini, serta tantangan yang masih dihadapi.

4) Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan di bidang pendidikan di Kota Tebing Tinggi berkaitan dengan kualitas pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daerah. Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam sektor pendidikan antara lain:

1. Aksesibilitas Pendidikan:

- **Keterjangkauan Geografis:** Apakah semua wilayah di Kota Tebing Tinggi memiliki akses yang sama terhadap pendidikan? Daerah terpencil atau daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan. Data mengenai jumlah sekolah di setiap wilayah, jarak tempuh ke sekolah, dan kondisi infrastruktur jalan di daerah terpencil sangat penting untuk menganalisis aksesibilitas pendidikan.
- **Keterjangkauan Ekonomi:** Biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, seragam, buku, dan biaya lainnya, dapat menjadi hambatan bagi masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan. Data mengenai jumlah siswa yang putus sekolah karena faktor ekonomi, serta program bantuan pendidikan yang tersedia, perlu dikaji. Beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan.
- **Kesetaraan Gender:** Apakah terdapat kesenjangan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan? Data mengenai angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) untuk laki-laki dan perempuan di berbagai jenjang pendidikan perlu dianalisis

untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dalam akses pendidikan. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pendidikan perlu dilakukan, misalnya melalui program-program pemberdayaan perempuan dan kampanye kesetaraan gender.

2. Mutu Pendidikan:

- **Kualitas Guru:** Kualitas guru merupakan faktor penentu keberhasilan pendidikan. Data mengenai kualifikasi akademik guru, pelatihan yang telah diikuti, dan kepuasan kerja guru perlu dikaji. Program peningkatan kompetensi guru perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- **Sarana dan Prasarana:** Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sangat penting untuk menunjang proses pembelajaran. Data mengenai jumlah ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya perlu dianalisis. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- **Kurikulum dan Metode Pembelajaran:** Kurikulum dan metode pembelajaran yang relevan dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Data mengenai kurikulum yang digunakan, metode pembelajaran yang diterapkan, dan hasil belajar siswa perlu dikaji. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perlu dilakukan.

3. Relevansi dengan Kebutuhan Pasar Kerja:

- **Kesesuaian Keterampilan:** Apakah pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja? Data mengenai tingkat pengangguran lulusan sekolah dan perguruan tinggi, serta jenis pekerjaan yang tersedia di Kota Tebing Tinggi, perlu dianalisis. Kerjasama antara sekolah dan dunia usaha perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- **Pelatihan Vokasi:** Apakah tersedia program pelatihan vokasi yang memadai untuk mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja? Data mengenai jumlah dan jenis program pelatihan vokasi yang tersedia, serta jumlah peserta pelatihan, perlu dikaji. Pengembangan program pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja perlu dilakukan untuk meningkatkan daya saing lulusan.

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di Kota Tebing Tinggi, pelayanan kesehatan telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai aspek pelayanan umum bidang kesehatan di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta sumber terkait lainnya.

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan adalah salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan. Di Kota Tebing Tinggi, terdapat berbagai jenis fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, Kota Tebing

Tinggi memiliki **5 puskesmas, 10 klinik, dan 1 rumah sakit umum**. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, di mana terdapat **9 puskesmas, 22 klinik, dan 6 rumah sakit umum**.

Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan adanya lebih banyak puskesmas dan klinik, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan dasar tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

b. Aksesibilitas Layanan Kesehatan

Aksesibilitas layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan melalui beberapa inisiatif, seperti:

- **Program Mobil Kesehatan:** Pemerintah Kota Tebing Tinggi meluncurkan program mobil kesehatan yang bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil. Dengan adanya mobil kesehatan, masyarakat yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan dapat menerima layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan kesehatan dan imunisasi.
- **Peningkatan Infrastruktur Jalan:** Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menuju fasilitas kesehatan juga menjadi fokus pemerintah. Akses jalan yang baik akan memudahkan masyarakat untuk mencapai puskesmas dan rumah sakit, terutama dalam situasi darurat.

c. Kualitas Pelayanan Kesehatan

Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi juga menjadi perhatian utama. Beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan antara lain:

- **Pelatihan Tenaga Kesehatan:** Pemerintah daerah secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop bagi tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan bidan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
- **Penerapan Standar Pelayanan:** Puskesmas dan rumah sakit di Kota Tebing Tinggi telah menerapkan standar pelayanan kesehatan yang sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Hal ini mencakup prosedur pelayanan, pengelolaan obat, dan penanganan pasien.

d. Program Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga melaksanakan berbagai program kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

- **Imunisasi Anak:** Program imunisasi anak merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam upaya pencegahan penyakit. Pada tahun 2020, cakupan imunisasi anak di Kota Tebing Tinggi mencapai **90%**, dan angka ini meningkat menjadi **95%** pada tahun 2024.

Peningkatan cakupan imunisasi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan anak.

- **Penyuluhan Kesehatan:** Penyuluhan kesehatan dilakukan secara rutin di berbagai komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Topik yang dibahas meliputi pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

e. Tantangan dalam Pelayanan Kesehatan

Meskipun terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, tantangan tetap ada. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kota Tebing Tinggi dalam bidang kesehatan antara lain:

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan masih menjadi masalah. Meskipun jumlah puskesmas dan klinik meningkat, namun jumlah tenaga kesehatan yang tersedia belum memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- **Kesadaran Masyarakat:** Meskipun program penyuluhan kesehatan telah dilaksanakan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Hal ini dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program-program kesehatan yang ada.
- **Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan:** Ketersediaan obat dan alat kesehatan yang memadai juga menjadi tantangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa puskesmas dan rumah sakit memiliki persediaan obat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasien.

f. Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Kesehatan

Evaluasi dan monitoring pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

- **Pengumpulan Data Kesehatan:** Pemerintah perlu mengumpulkan data kesehatan secara rutin untuk memantau perkembangan pelayanan kesehatan. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- **Survei Kepuasan Masyarakat:** Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah. Dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah dapat melakukan perbaikan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, aspek pelayanan umum bidang kesehatan di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas layanan, dan kualitas pelayanan kesehatan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, dan ketersediaan obat masih perlu diatasi. Dengan melanjutkan program-program yang ada dan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi dapat terus meningkat, dan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

Infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu daerah. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat akses terhadap layanan publik. Di Kota Tebing Tinggi, aspek pelayanan umum bidang infrastruktur telah menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai aspek pelayanan umum bidang infrastruktur di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta sumber terkait lainnya.

a. Ketersediaan Infrastruktur Dasar

Ketersediaan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020, panjang jalan yang teraspal di Kota Tebing Tinggi mencapai **150 km**, dan angka ini meningkat menjadi **160 km** pada tahun 2024. Peningkatan panjang jalan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.

Selain itu, pembangunan jembatan juga menjadi prioritas. Pada tahun 2020, terdapat **10 jembatan** yang berfungsi dengan baik, dan pada tahun 2024, jumlah ini meningkat menjadi **12 jembatan**. Pembangunan jembatan baru ini sangat penting untuk menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan dan kegiatan ekonomi.

b. Kualitas Infrastruktur

Kualitas infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pelayanan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Beberapa langkah yang diambil antara lain:

- **Perbaikan Jalan:** Pemerintah secara rutin melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan untuk memastikan kondisi jalan tetap baik. Pada tahun 2020, sekitar **80%** jalan di Kota Tebing Tinggi dalam kondisi baik, dan angka ini meningkat menjadi **85%** pada tahun 2024. Peningkatan kualitas jalan ini berkontribusi pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
- **Pembangunan Fasilitas Umum:** Selain jalan dan jembatan, pembangunan fasilitas umum seperti taman, tempat bermain, dan ruang terbuka hijau juga menjadi fokus pemerintah. Pada tahun 2024, terdapat **5 taman** baru yang dibangun di berbagai lokasi strategis, memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dan bersosialisasi.

c. Aksesibilitas Transportasi

Aksesibilitas transportasi yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi melalui beberapa inisiatif, seperti:

- **Pengembangan Angkutan Umum:** Pemerintah telah meluncurkan program

pengembangan angkutan umum untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Penambahan armada angkutan umum dan peningkatan rute transportasi telah dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.

- **Pembangunan Terminal:** Pembangunan terminal angkutan umum yang modern dan nyaman juga menjadi prioritas. Pada tahun 2024, terminal baru telah dibangun untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna angkutan umum, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses transportasi.

d. Infrastruktur Energi dan Air Bersih

Infrastruktur energi dan air bersih merupakan aspek penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur ini:

- **Penyediaan Listrik:** Ketersediaan listrik yang memadai sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2020, tingkat elektrifikasi di Kota Tebing Tinggi mencapai **95%**, dan pada tahun 2024, angka ini meningkat menjadi **98%**. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan akses listrik bagi seluruh masyarakat.
- **Penyediaan Air Bersih:** Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Pada tahun 2020, sekitar **80%** rumah tangga di Kota Tebing Tinggi telah memiliki akses terhadap air bersih, dan angka ini meningkat menjadi **85%** pada tahun 2024. Peningkatan akses air bersih ini sangat penting untuk kesehatan masyarakat.

e. Tantangan dalam Pembangunan Infrastruktur

Meskipun terdapat berbagai upaya untuk meningkatkan infrastruktur, tantangan tetap ada. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Kota Tebing Tinggi dalam bidang infrastruktur antara lain:

- **Keterbatasan Anggaran:** Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif, seperti kerja sama dengan sektor swasta atau lembaga donor, untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur.
- **Keterbatasan Sumber Daya Manusia:** Keterbatasan tenaga ahli dan profesional dalam bidang infrastruktur juga menjadi tantangan. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja di sektor ini untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur.
- **Perencanaan yang Matang:** Perencanaan yang kurang matang dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan yang baik dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

f. Evaluasi dan Monitoring Infrastruktur

Evaluasi dan monitoring infrastruktur sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek

yang dilaksanakan berjalan dengan baik. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah:

- **Pengumpulan Data Infrastruktur:** Pemerintah perlu mengumpulkan data secara rutin mengenai kondisi infrastruktur di Kota Tebing Tinggi. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- **Survei Kepuasan Masyarakat:** Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap infrastruktur yang ada dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah. Dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah dapat melakukan perbaikan yang diperlukan.

Secara keseluruhan, aspek pelayanan umum bidang infrastruktur di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, aksesibilitas transportasi, serta penyediaan energi dan air bersih mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan perencanaan yang matang masih perlu diatasi. Dengan melanjutkan program-program yang ada dan melakukan evaluasi secara berkala, diharapkan infrastruktur di Kota Tebing Tinggi dapat terus berkembang, dan masyarakat dapat menikmati layanan yang lebih baik dan berkualitas.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merujuk pada kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang besar. Isu ini memiliki karakteristik yang penting, mendasar, mendesak, serta berdampak dalam jangka menengah atau panjang, yang berpengaruh pada pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa depan. Dengan kata lain, isu strategis adalah peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang. Jika pemerintah daerah mampu memprioritaskan atau mengenali peluang dan tantangan tersebut, maka pencapaian tujuan pembangunan di masa depan akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, jika pemerintah daerah gagal memanfaatkan peluang atau mengantisipasi tantangan ini, maka pencapaian tujuan pembangunan akan menjadi lebih sulit. Identifikasi isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai isu yang bersifat global, nasional, dan regional. Berdasarkan analisis ini, dapat ditentukan isu strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan.

2.3.2.1. Isu Strategis Global

Kondisi **perekonomian global** saat ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi banyak negara, termasuk dampaknya terhadap sektor-sektor ekonomi yang berfokus pada ekspor. Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan terus berlanjut pada tahun 2024. Menurut laporan terbaru dari PBB, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 2,4 persen pada 2024, yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan pra-pandemi yang mencapai 3 persen.

Beberapa faktor utama yang berkontribusi pada perlambatan ini antara lain tingginya

suku bunga global, ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, serta kondisi perdagangan internasional yang lebih lesu. Selain itu, perubahan iklim yang semakin sering terjadi juga menambah ketidakpastian di banyak sektor ekonomi. Isu-isu ini mempengaruhi perdagangan internasional, produksi industri, serta ketahanan ekonomi beberapa negara.

Ketidakstabilan geopolitik, misalnya, dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan global yang berdampak pada harga barang dan biaya produksi. Sementara itu, perubahan iklim yang semakin parah menambah tantangan bagi sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam dan produksi pertanian. Di sisi lain, kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, membuka peluang baru, tetapi juga menambah kesenjangan ekonomi dan sosial, memperburuk ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Dengan tantangan global ini, negara-negara di seluruh dunia perlu melakukan penyesuaian strategi ekonomi untuk menjaga daya saing mereka di pasar global.

Pariwisata global menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah pandemi, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan laporan terbaru dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pada akhir tahun 2024, jumlah wisatawan internasional tercatat mencapai sekitar 1,4 miliar orang, yang mencerminkan peningkatan 11% dibandingkan tahun 2023. Pemulihan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk permintaan yang kuat setelah pandemi, peningkatan konektivitas udara, serta kebijakan visa yang lebih longgar di berbagai negara. Beberapa wilayah bahkan mengalami pertumbuhan yang melebihi tingkat pariwisata sebelum pandemi, seperti Timur Tengah dan Afrika yang masing-masing mencatatkan peningkatan sebesar 32% dan 7% dibandingkan tahun 2019.

Namun, meskipun ada pemulihan yang positif di beberapa kawasan, masih ada ketimpangan dalam tingkat pemulihan ini. Eropa hanya mengalami sedikit kenaikan (1% lebih tinggi dibandingkan 2019), sementara Asia dan Pasifik baru pulih hingga 87% dari tingkat sebelum pandemi, meskipun mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan pariwisata global juga mengalami lonjakan, mencapai USD 1,9 triliun, yang 3% lebih tinggi dari tahun 2019. Di sisi lain, belanja wisatawan meningkat lebih cepat daripada jumlah kunjungan, memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan sektor usaha kecil di berbagai negara.

Untuk Kota Tebing Tinggi, pengembangan wisata budaya dan kuliner harus menjadi fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Meningkatkan kualitas destinasi berbasis budaya dan kuliner dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan sektor pariwisata, seiring dengan pemulihan global yang terus berlanjut. Ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kota tersebut.

Populasi dunia saat ini telah mencapai lebih dari 8,2 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat, mencapai 10,2 miliar jiwa pada tahun 2080. Lonjakan jumlah penduduk ini menimbulkan tantangan besar, terutama dalam hal penyesuaian antara kebutuhan

hidup yang semakin tinggi dan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam serta lahan. Kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat, yang tentu saja menuntut perubahan besar dalam sektor produksi untuk mendukung kehidupan yang lebih panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus meningkat, laju pertumbuhannya cenderung melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa pada tahun 2045, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,5 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup. Namun, penurunan angka kelahiran yang signifikan di banyak negara, terutama negara maju, memunculkan tantangan baru dalam hal struktur demografi. Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk lanjut usia serta tingginya jumlah penduduk usia muda menuntut perhatian pada kebutuhan perlindungan sosial yang memadai dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Fenomena sosial yang terjadi, seperti meningkatnya jumlah individu yang memilih untuk tidak memiliki anak (*childfree*), menunda pernikahan, atau bahkan pergeseran nilai terkait perilaku seksual yang lebih beragam, turut mempengaruhi angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan dini masih menjadi masalah yang signifikan di negara berkembang. Selain itu, perubahan dalam struktur dan bentuk keluarga, serta mobilitas penduduk yang tinggi, membawa dampak pada cara keluarga menjalankan fungsinya.

Akses yang semakin terbuka terhadap media digital, meskipun memberikan banyak manfaat, juga membawa risiko besar, seperti meningkatnya kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap konten negatif, serta perilaku menyimpang yang memengaruhi dinamika keluarga. Oleh karena itu, tantangan bagi keluarga dalam menjalankan fungsinya sebagai unit sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serta kebijakan yang tepat untuk menghadapinya.

Berdasarkan laporan *World Urbanization Prospects, The 2018 Revision* yang dirilis oleh PBB, diproyeksikan bahwa **populasi dunia** akan mencapai 8,5 miliar pada tahun 2030 dan 9,7 miliar pada tahun 2050. Selama periode 2015 hingga 2050, diperkirakan setengah dari pertumbuhan penduduk dunia akan terkonsentrasi di sembilan negara, yaitu India, Nigeria, Pakistan, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Indonesia, dan Uganda. Selain itu, pada tahun 2018, sekitar 55% dari populasi dunia tinggal di perkotaan, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050.

Peningkatan jumlah penduduk usia kerja menjadi isu yang semakin penting di banyak negara. Untuk itu, diperlukan upaya untuk memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan, serta promosi peluang kerja yang produktif dan layak. Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tua juga menjadi perhatian. Diperkirakan bahwa populasi lanjut usia di seluruh dunia akan terus meningkat, sehingga negara-negara dengan populasi lanjut usia harus menyesuaikan sistem kesehatan mereka, memperkuat sistem perawatan jangka panjang, dan memastikan keberlanjutan sistem

jaminan sosial serta pensiun.

Proyeksi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global ini juga diperkirakan akan terjadi di Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk usia kerja di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2045 diperkirakan akan meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi ini harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusiagarapat memanfaatkan potensi tersebut dengan lebih maksimal.

Cuaca ekstrem, sebagai isu strategis jangka menengah, juga menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh Kota Tebing Tinggi. Fenomena seperti badai hebat, banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim global, memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, ekosistem, dan perekonomian lokal. Di Kota Tebing Tinggi, dampak cuaca ekstrem ini antara lain mencakup kerusakan infrastruktur, gangguan pada produksi pangan terutama pertanian di daerah sekitar, serta meningkatnya risiko kesehatan bagi populasi yang rentan, seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang tinggal di daerah rawan bencana.

Untuk mengatasi isu ini, langkah-langkah mitigasi perlu diterapkan dengan lebih efektif di Kota Tebing Tinggi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan termasuk peningkatan sistem peringatan dini yang lebih efisien untuk memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tentang potensi bencana, penguatan infrastruktur yang tahan terhadap bencana seperti pembangunan drainase yang lebih baik untuk mengurangi risiko banjir, serta penguatan kebijakan adaptasi iklim yang efektif. Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga perlu memastikan bahwa sektor-sektor penting seperti transportasi, kesehatan, dan pertanian dilengkapi dengan sistem yang lebih tangguh terhadap cuaca ekstrem.

Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, Kota Tebing Tinggi dapat lebih siap dalam menghadapi cuaca ekstrem, meminimalisir dampak negatifnya, serta memastikan keberlanjutan pembangunan yang lebih aman dan berkelanjutan dalam jangka menengah.

Dampak buruk teknologi AI, sebagai isu strategis jangka menengah, juga perlu menjadi perhatian serius di Kota Tebing Tinggi, mengingat potensi disrupsi yang dapat ditimbulkan oleh penerapan teknologi ini. Meskipun teknologi AI menawarkan peluang besar untuk inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, penerapannya yang tidak terkendali dapat membawa dampak negatif yang signifikan bagi kota ini. Salah satunya adalah pengangguran massal yang disebabkan oleh otomatisasi pekerjaan, di mana banyak pekerjaan tradisional berisiko tergantikan oleh teknologi AI, seperti di sektor manufaktur, transportasi, dan layanan publik.

Selain itu, risiko bias algoritma yang memperkuat diskriminasi juga perlu diwaspadai, terutama dalam hal pelayanan publik atau sistem yang mengandalkan data dalam pengambilan keputusan. Bias ini bisa memperburuk ketimpangan sosial di Kota Tebing Tinggi, mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan yang adil dan setara. Pelanggaran privasi juga menjadi isu yang penting, mengingat penggunaan data pribadi dalam

pengembangan dan implementasi AI yang dapat mengekspos informasi sensitif tanpa kontrol yang memadai.

Disisi lain, teknologi AI dalam sistem keamanan, seperti penggunaan teknologi pengawasan canggih, juga perlu diatur dengan ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap hak privasi warga. Selain itu, meskipun Kota Tebing Tinggi tidak memiliki ancaman langsung dari senjata otonom, perkembangan teknologi AI dalam bidang keamanan perlu diawasi untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat mengancam ketertiban sosial.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan AI dapat berjalan seiring dengan pencapaian stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Tebing Tinggi, serta memastikan bahwa inovasi teknologi ini memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Polusi telah muncul sebagai isu strategis global jangka menengah yang berdampak signifikan pada kesehatan manusia, ekosistem, dan ekonomi. Peningkatan emisi gas rumah kaca, limbah industri, serta polusi plastik di lautan telah menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah. Akibatnya, jutaan orang di seluruh dunia mengalami masalah kesehatan serius seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular, sementara biodiversitas terancam dan produktivitas pertanian menurun. Untuk mengatasi krisis polusi ini, diperlukan tindakan tegas melalui kebijakan lingkungan yang lebih ketat, pengembangan teknologi bersih, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Dengan komitmen global yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat mengurangi dampak polusi dan melindungi planet ini bagi generasi mendatang.

Samudera Hindia memainkan peran yang sangat krusial dalam **geopolitik dan geoekonomi** negara-negara pesisir serta kekuatan global di luar kawasan tersebut. Sebagai jalur pelayaran utama untuk kapal kontainer, penumpang, dan angkatan laut, Samudera Hindia menghubungkan rute perdagangan yang melintasi benua, dari Afrika hingga Timur Tengah, Asia, dan Australia. Kawasan ini merupakan titik pertemuan berbagai kekuatan besar dunia, menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan geopolitik yang paling bernilai di dunia, dengan lebih dari 80% pasokan minyak dunia melintasi perairan Samudera Hindia.

Peran Samudera Hindia sebagai jalur vital ini tidak hanya menciptakan persaingan strategis antarnegara, seperti antara Tiongkok dan India, tetapi juga membuka berbagai peluang ekonomi dan pembangunan yang signifikan. Untuk itu, pada tahun 2013, dikeluarkan "Declaration of The Indian Ocean Rim Association on the Principles for Peaceful, Productive and Sustainable Use of The Indian Ocean and Its Resources" yang menekankan pentingnya kerja sama dalam berbagai aspek, termasuk keselamatan dan keamanan maritim, fasilitasi perdagangan dan investasi, manajemen perikanan, mitigasi risiko bencana, serta pengembangan kerja sama akademik dan sains teknologi. Selain itu, deklarasi ini juga mendorong pertukaran dalam sektor pariwisata dan budaya sebagai bagian dari upaya memaksimalkan potensi kawasan Samudera Hindia secara berkelanjutan.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

Aging population adalah tren demografis yang terjadi di banyak negara maju di seluruh dunia. Fenomena ini ditandai oleh peningkatan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) dan penurunan tingkat kelahiran. Peningkatan harapan hidup dan rendahnya tingkat kelahiran menyebabkan struktur demografi yang lebih tua. Dampak dari penuaan populasi ini sangat luas, mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Indonesia, dengan populasi yang masih muda, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata kesehatan bagi lansia dari negara maju. Dengan biaya layanan kesehatan yang lebih rendah dan budaya pelayanan yang ramah, Indonesia dapat menawarkan layanan medis, perawatan rehabilitatif, dan fasilitas wellness yang menarik bagi lansia. Keunggulan komparatif ini, didukung oleh peningkatan infrastruktur dan fasilitas kesehatan yang berstandar internasional, dapat menjadikan Indonesia destinasi pilihan untuk pariwisata kesehatan. Untuk mengoptimalkan potensi ini, Indonesia perlu meningkatkan **infrastruktur kesehatan dan fasilitas akomodasi yang nyaman, serta menerapkan strategi pemasaran yang efektif**. Kerjasama internasional dan promosi aktif dapat menarik wisatawan lansia, meningkatkan devisa negara, dan menciptakan lapangan kerja baru. Pengembangan pariwisata kesehatan tidak hanya berdampak positif pada ekonomi tetapi juga memperkuat pertukaran budaya dan meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.

Hilirisasi industri di Indonesia mulai menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Hilirisasi, yang merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, telah meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor Indonesia. Sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan perikanan yang sebelumnya berfokus pada ekspor bahan mentah kini mulai memproduksi barang dengan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dari ekspor tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari hilirisasi, Indonesia perlu melanjutkan dan memperluas strategi ini. **Peningkatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia** menjadi kunci untuk mendukung hilirisasi yang berkelanjutan. Investasi dalam teknologi pengolahan dan inovasi akan memungkinkan Indonesia untuk memproduksi barang dengan kualitas dan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan juga penting untuk memastikan bahwa industri hilir memiliki tenaga kerja yang kompeten dan produktif. Keberlanjutan hilirisasi akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, Indonesia akan lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan memiliki struktur ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Hilirisasi juga akan mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat industri manufaktur, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan pendapatan ekspor yang lebih tinggi. Secara keseluruhan,

hilirisasi yang berkelanjutan akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi global.

Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah dapat memberikan dampak yang optimal dan saling mendukung. Kebijakan makroekonomi, seperti kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan, harus sejalan dengan kebijakan sektoral yang mencakup berbagai industri seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Sinkronisasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan mengurangi inefisiensi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan makro dapat memberikan landasan yang stabil dan kondusif bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi, sementara kebijakan sektoral dapat mendetailkan langkah-langkah spesifik untuk mendorong pertumbuhan dalam berbagai industri. Untuk mencapai sinkronisasi yang efektif, kebijakan harus dirancang dengan memperhatikan kepentingan nasional secara menyeluruh. Ini berarti mempertimbangkan aspek keberlanjutan, inklusivitas, dan kemandirian ekonomi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Misalnya, dalam kebijakan fiskal, alokasi anggaran harus mendukung sektor-sektor yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kebijakan sektoral harus disusun dengan memperhatikan kebijakan makro yang sudah ada, sehingga kebijakan tersebut saling melengkapi dan mendukung. Dengan memperhatikan kepentingan nasional, sinkronisasi kebijakan dapat membantu mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, memperkuat struktur ekonomi, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan, standar sustainability yang tinggi telah menjadi keharusan bagi produk-produk yang ingin bersaing di pasar internasional. Negara-negara maju dan organisasi global terus memperketat regulasi dan persyaratan terkait dampak lingkungan dari produk-produk yang diimpor. Hal ini mencakup aspek seperti emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi sumber daya alam. Bagi Indonesia, **penerapan standar sustainability yang tinggi** ini merupakan tantangan besar namun juga peluang untuk meningkatkan **daya saing produk nasional**. Dengan memenuhi standar keberlanjutan, produk-produk Indonesia dapat mengakses pasar global yang lebih luas dan mendapatkan kepercayaan dari konsumen internasional yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Agar produk Indonesia tetap **kompetitif di pasar global, orientasi ramah lingkungan** harus menjadi prioritas dalam proses produksi. Ini mencakup adopsi praktik-praktik produksi yang lebih hijau, seperti efisiensi energi, penggunaan bahan baku yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi serta limbah. Pemerintah dan sektor swasta harus berkolaborasi dalam menerapkan dan mempromosikan standar keberlanjutan ini. Insentif fiskal, pelatihan, dan dukungan teknologi dapat diberikan untuk mendorong industri-industri di Indonesia menerapkan praktik ramah lingkungan. Selain itu, edukasi kepada produsen dan

konsumen mengenai pentingnya keberlanjutan dan manfaat jangka panjangnya juga penting. Dengan pendekatan ini, produk-produk Indonesia tidak hanya memenuhi persyaratan global tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan, memperkuat citra positif Indonesia di pasar internasional, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam **transisi energi** dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk membangun national grid yang mampu mendistribusikan pasokan listrik secara merata ke seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar. Saat ini, **distribusi listrik yang tidak merata** menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup di daerah terpencil. Pembangunan national grid yang andal dan terintegrasi akan memungkinkan pemanfaatan sumber energi terbarukan secara optimal dan memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan akses yang sama terhadap listrik. Ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur jaringan dan teknologi, serta kebijakan yang mendukung integrasi energi terbarukan ke dalam grid nasional. Transisi energi juga membuka peluang besar untuk pemerataan pembangunan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru dan Terbarukan (PLT EBT) di luar Pulau Jawa. Pulau-pulau di luar Jawa memiliki potensi besar untuk energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Pembangunan PLT EBT di daerah-daerah ini tidak hanya akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan sosial. Dengan membangun **infrastruktur energi terbarukan di luar Jawa**, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan akses listrik di daerah terpencil, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target energi bersih, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah.

Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang

adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka.

Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan

akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi,

Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Pembangunan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi pull factor manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

Dalam upaya **pengelolaan SDA berkelanjutan** menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi

kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau. Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah,

dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki **tata kelola pemerintahan** yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki **kualitas pelayanan publik** yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

2.3.3.4. Isu Strategis Daerah Kota Tebing Tinggi

1) Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan isu strategis yang sangat penting bagi pembangunan daerah. Di Kota Tebing Tinggi, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait kualitas dan daya saing SDM di Kota Tebing Tinggi dari tahun 2020 hingga 2024, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber-sumber relevan lainnya.

Kualitas SDM diukur melalui berbagai indikator, termasuk tingkat pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program dan kebijakan.

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kualitas SDM. Berdasarkan data BPS, rata-rata lama sekolah di Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan dari 8,5 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,0 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah meluncurkan berbagai program pendidikan, termasuk beasiswa untuk siswa berprestasi dan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja.

b. Keterampilan dan Pelatihan

Keterampilan yang dimiliki oleh SDM sangat berpengaruh terhadap daya saing mereka di pasar kerja. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah telah melaksanakan berbagai program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Program pelatihan ini mencakup berbagai bidang, seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, dan layanan.

Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tebing Tinggi, jumlah peserta pelatihan keterampilan meningkat dari **500 orang** pada tahun 2020 menjadi **1.200 orang** pada tahun 2024. Peningkatan jumlah peserta pelatihan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya keterampilan dalam meningkatkan daya saing mereka.

c. Kesehatan dan Produktivitas

Kesehatan juga merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas SDM. Masyarakat yang sehat cenderung lebih produktif dan mampu berkontribusi lebih baik dalam pembangunan. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan layanan kesehatan melalui berbagai program, termasuk imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan peningkatan fasilitas kesehatan.

Data dari BPS menunjukkan bahwa angka harapan hidup di Kota Tebing Tinggi meningkat dari 70,5 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,0 tahun pada tahun 2024. Peningkatan angka harapan hidup ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Daya saing SDM di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan. Di Kota Tebing Tinggi, peningkatan daya saing SDM menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2) **Ketersediaan Lapangan Kerja**

Ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing SDM. Di Kota Tebing Tinggi, pemerintah telah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi, seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil.

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tebing Tinggi, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor formal meningkat dari **15.000 orang** pada tahun 2020 menjadi **18.000 orang** pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.

3) **Pengembangan UMKM**

Pengembangan kewirausahaan juga menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing SDM. Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Program ini mencakup pelatihan kewirausahaan, akses modal, dan pemasaran produk.

Data dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Tebing Tinggi menunjukkan bahwa jumlah UKM yang terdaftar meningkat dari **1.200 unit** pada tahun 2020 menjadi **1.800 unit** pada tahun 2024. Peningkatan jumlah UKM ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani untuk

berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

4) **Inovasi dan Pengembangan Teknologi**

Inovasi dan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing SDM. Di era digital saat ini, kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi menjadi kunci untuk bersaing di pasar kerja. Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah berupaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program-program pelatihan dan penyuluhan.

Program pelatihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat. Data menunjukkan bahwa jumlah peserta pelatihan TIK meningkat dari **300 orang** pada tahun 2020 menjadi **800 orang** pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterampilan digital dalam dunia kerja.

5) **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif**

Kota Tebing Tinggi masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

6) **Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Kota Tebing Tinggi masih menghadapi persoalan dalam penyelenggaraan penataan ruang, namun permasalahan tersebut dimuat didalam RTRW dan RDTR.

7) **Pengendalian Lingkungan Hidup**

Kota Tebing Tinggi masih menghadapi persoalan terkait lingkungan hidup dan permasalahan tersebut telah dimuat dalam KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kota Tebing Tinggi

Pengendalian lingkungan hidup merupakan pilar fundamental dalam pembangunan berkelanjutan, sebuah konsep yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Target pembangunan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDGs) PBB, perlu diinternalisasikan secara menyeluruh dalam perencanaan pembangunan di tingkat regional, termasuk Kota Tebing Tinggi. Kegagalan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dapat berdampak serius, terutama pada penurunan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya alam. Penurunan ini, pada gilirannya, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan siklus negatif yang sulit diatasi. Oleh karena itu, pengendalian lingkungan hidup menjadi isu strategis dan penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Tebing Tinggi. Keberhasilan pembangunan kota tidak hanya diukur dari kemajuan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

Tiga isu krusial yang saling berkaitan erat dan memerlukan perhatian serius adalah manajemen kebencanaan, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas serta daya dukung lingkungan hidup. Kualitas dan daya dukung lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di tengah tantangan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di Kota Tebing Tinggi, isu lingkungan hidup menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang hidup yang sehat dan berkelanjutan. Dalam analisis ini, kita akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi, serta tantangan dan strategi yang dihadapi dalam periode 2020-2024 yakni:

a) **Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi**

Kualitas lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi dapat diukur melalui beberapa indikator, termasuk kualitas udara, kualitas air, pengelolaan limbah, dan keberadaan ruang terbuka hijau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan lingkungan hidup, berikut adalah analisis dari masing-masing indikator tersebut:

- **Kualitas Udara:** Kualitas udara di Kota Tebing Tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk emisi dari kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas sehari-hari masyarakat. Data menunjukkan bahwa tingkat polusi udara, yang diukur melalui konsentrasi partikel debu (PM10) dan gas berbahaya, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, kualitas udara tercatat dalam kategori sedang, namun terdapat peningkatan polusi pada tahun-tahun berikutnya akibat pertumbuhan jumlah kendaraan dan aktivitas industri.
- **Kualitas Air:** Kualitas air di Kota Tebing Tinggi juga menjadi perhatian utama. Sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat sebagian besar berasal dari sungai dan sumur. Namun, pencemaran akibat limbah domestik dan industri menjadi ancaman serius. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sekitar 30% dari total sumber air mengalami pencemaran, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.
- **Pengelolaan Limbah:** Pengelolaan limbah di Kota Tebing Tinggi masih menghadapi tantangan. Meskipun pemerintah telah menerapkan sistem pengelolaan limbah, masih terdapat masalah dalam hal kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang memadai. Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% limbah yang dikelola dengan baik, sementara sisanya dibuang sembarangan, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.
- **Ruang Terbuka Hijau:** Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Di Kota Tebing Tinggi, RTH masih terbatas. Data menunjukkan bahwa rasio RTH terhadap luas kota berada di bawah standar yang ditetapkan, yaitu kurang dari 10%. Hal ini mengakibatkan berkurangnya area resapan air dan peningkatan suhu kota.

b) **Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan ekosistem. Di Kota Tebing Tinggi, daya dukung lingkungan dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain:

- **Ketersediaan Sumber Daya Alam:** Ketersediaan sumber daya alam, seperti air, tanah, dan keanekaragaman hayati, sangat mempengaruhi daya dukung lingkungan. Di Kota Tebing Tinggi, meskipun terdapat sumber daya alam yang melimpah, pengelolaannya sering kali tidak berkelanjutan. Penebangan hutan dan konversi lahan untuk pembangunan infrastruktur mengancam keberlanjutan sumber daya alam.
- **Kepadatan Penduduk:** Pertumbuhan populasi yang pesat di Kota Tebing Tinggi menyebabkan peningkatan permintaan akan sumber daya dan layanan. Dengan kepadatan penduduk yang tinggi, tekanan terhadap lingkungan semakin meningkat, yang dapat mengurangi daya dukung lingkungan.
- **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim juga mempengaruhi daya dukung lingkungan. Kota Tebing Tinggi, seperti daerah lainnya, menghadapi risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan.

c) Tantangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, Kota Tebing Tinggi menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- **Kurangnya Kesadaran Masyarakat:** Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah sembarangan dan penggunaan bahan berbahaya.
- **Infrastruktur yang Tidak Memadai:** Infrastruktur yang tidak memadai untuk pengelolaan limbah, penyediaan air bersih, dan ruang terbuka hijau menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas lingkungan. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- **Kebijakan yang Belum Optimal:** Kebijakan dan regulasi yang ada sering kali belum cukup kuat untuk mengatasi masalah lingkungan. Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran lingkungan juga menjadi tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup.

d) Strategi untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan kualitas serta daya dukung lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi, beberapa strategi dapat diterapkan:

- **Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui program pendidikan dan penyuluhan. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah untuk menyelenggarakan kampanye lingkungan.
- **Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan:** Investasi dalam infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti sistem pengelolaan limbah yang efisien, penyediaan air bersih,

dan pengembangan ruang terbuka hijau. Pemerintah perlu merencanakan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan dampak lingkungan.

- **Penerapan Kebijakan Berkelanjutan:** Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk regulasi yang ketat terhadap pencemaran dan pengelolaan sumber daya alam. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan juga perlu diperkuat.
- **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Masyarakat dapat dilibatkan dalam program-program lingkungan, seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Kualitas dan daya dukung lingkungan hidup di Kota Tebing Tinggi merupakan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat tantangan yang signifikan, dengan penerapan strategi yang tepat, diharapkan kualitas lingkungan dapat ditingkatkan dan daya dukung lingkungan dapat dipertahankan. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kota Tebing Tinggi dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat.

e) **Kerjasama mendukung Pengembangan Daerah**

Kota Tebing Tinggi memiliki keterbatasan terkait kemampuan keuangan maupun kapasitas SDM sehingga dibutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tidak menutup kemungkinan pihak swasta atau pihak lainnya, seperti pengembangan IKM, pendidikan atau pengembangan UMKM.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi Kota Tebing Tinggi

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 merupakan langkah penting dalam upaya mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan terencana. Rencana ini didasarkan pada visi dan misi yang telah dirumuskan oleh Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, dan Wakil Walikota, H. Chairil Mukmin Tambunan, yang terpilih untuk periode 2025-2029. Visi dan misi ini tidak hanya mencerminkan aspirasi pemimpin daerah, tetapi juga merupakan cerminan harapan masyarakat yang ingin melihat kemajuan dan kesejahteraan di Kota Tebing Tinggi.

Dalam proses perumusan visi dan misi, pemerintah daerah melakukan analisis menyeluruh terhadap potensi yang dimiliki oleh Kota Tebing Tinggi. Potensi ini mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya alam, budaya lokal, dan sektor ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah, seperti tingkat pengangguran, kemiskinan, dan infrastruktur yang belum memadai. Dengan memahami kondisi ini, RPJMD diharapkan dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan potensi yang tersedia.

Selanjutnya, tantangan pembangunan yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan menjadi fokus utama dalam penyusunan RPJMD. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi berbagai faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini mencakup perubahan iklim, dinamika sosial, serta perkembangan teknologi yang cepat. Dengan memperhatikan tantangan ini, RPJMD dapat dirancang dengan lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga dapat memberikan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan yang muncul.

Akhirnya, RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Melalui keterlibatan masyarakat, diharapkan rencana ini dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta harapan warga. Dengan demikian, visi dan misi yang telah dirumuskan dapat terwujud, dan Kota Tebing Tinggi dapat berkembang menjadi daerah yang lebih baik dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Visi Kota Tebing Tinggi :

"Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya"

Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tebing Tinggi Maju Kotanya:

Aspek "Tebing Tinggi Maju Kotanya" merujuk pada pembangunan kota yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Ini mencakup berbagai aspek, antara lain:

- **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan:** Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor unggulan, peningkatan daya saing produk lokal, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Strategi ini harus memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Data mengenai PDRB, sektor-sektor ekonomi unggulan, dan tingkat kemiskinan perlu dikaji untuk merumuskan strategi yang tepat.
- **Pengembangan Infrastruktur:** Infrastruktur yang memadai merupakan kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur harus terencana dengan baik, memperhatikan aspek lingkungan, dan menjangkau seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi secara merata. Prioritas pembangunan infrastruktur dapat difokuskan pada sektor-sektor yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, dan energi.
- **Tata Ruang dan Lingkungan:** Perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga keindahan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik, termasuk pengelolaan sampah, pencemaran udara dan air, serta pelestarian ruang terbuka hijau, harus menjadi prioritas utama. Hal ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya tarik Kota Tebing Tinggi sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali.
- **Inovasi dan Teknologi:** Penerapan inovasi dan teknologi dalam berbagai sektor dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu mendorong inovasi dan teknologi dalam sektor-sektor strategis, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini akan meningkatkan daya saing Kota Tebing Tinggi di tingkat regional dan nasional.
- **Good Governance:** Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan pembangunan yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) juga perlu dilakukan untuk mendukung good governance.

2. Religius:

Aspek "Religius" menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam pembangunan Kota Tebing Tinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

- **Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan:** Penguatan nilai-nilai keagamaan dapat dilakukan melalui pendidikan agama, pembinaan keagamaan, dan pengembangan kegiatan keagamaan yang positif. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, toleran, dan rukun.
- **Kerukunan Antar Umat Beragama:** Kerukunan antar umat beragama harus dijaga dan ditingkatkan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu memfasilitasi dialog antar umat beragama dan menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan beragama yang harmonis.
- **Pengembangan Potensi Wisata Religi :** Kota Tebing Tinggi dapat mengembangkan potensi wisata religi untuk menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan melestarikan dan mengembangkan situs-situs religi yang ada di Kota Tebing Tinggi.

3. Makmur:

Aspek "Makmur" merujuk pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Tebing Tinggi. Hal ini dapat dicapai melalui:

- **Peningkatan Pendapatan Masyarakat:** Peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan melalui diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor unggulan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, dan penciptaan lapangan kerja.
- **Pengentasan Kemiskinan:** Program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi dan berkelanjutan perlu dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap permodalan.
- **Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu memberikan dukungan dan pembinaan kepada UMKM agar dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Sejahtera Rakyatnya:

Aspek "Sejahtera Rakyatnya" merupakan tujuan utama dari visi ini. Kesejahteraan masyarakat mencakup berbagai aspek, antara lain:

- **Kesehatan:** Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Pencegahan penyakit dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat juga perlu dilakukan.
- **Pendidikan:** Pendidikan yang berkualitas merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas

SDM. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dan merata. Peningkatan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan juga perlu dilakukan.

- **Keadilan Sosial:** Keadilan sosial harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu memastikan bahwa pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.
- **Lingkungan yang Berkelanjutan:** Lingkungan yang sehat dan lestari merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi perlu menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Pencapaian visi "Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya" memerlukan perencanaan pembangunan yang matang, strategi yang tepat, dan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga sangat penting untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan komitmen dan kerja keras dari semua pihak, visi ini dapat diwujudkan dan Kota Tebing Tinggi dapat menjadi kota yang maju, religius, makmur, dan sejahtera rakyatnya.

3.1.2. Misi Kota Tebing Tinggi

Misi merupakan suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi untuk periode 2025-2029, misi memiliki peranan yang sangat penting. Misi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan visi dan tujuan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Misi yang jelas dan terukur akan membantu dalam mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga setiap langkah yang diambil dapat selaras dengan visi jangka panjang Kota Tebing Tinggi. Dalam penyusunan RPJMD, misi harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan misi harus melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, agar hasilnya dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

Selain itu, misi juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan. Dengan adanya misi yang jelas, pemerintah daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian yang telah diraih, serta mengidentifikasi area yang masih perlu diperbaiki. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, misi yang dirumuskan dalam RPJMD 2025-2029 diharapkan dapat menjawab tantangan pembangunan yang ada, seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Dalam menyusun misi, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, seperti

kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ada di Kota Tebing Tinggi. Misi yang baik harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti "Apa yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan?", "Siapa yang akan diuntungkan dari program-program yang dilaksanakan?", dan "Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut?". Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan misi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, pengertian misi dalam konteks penyusunan RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029 adalah suatu pernyataan strategis yang mencerminkan tujuan dan arah pembangunan daerah. Misi ini harus dirumuskan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki oleh daerah. Dengan misi yang jelas dan terukur, diharapkan Kota Tebing Tinggi dapat mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pada Visi Kota Tebing Tinggi, maka berikut dirumuskan **Misi Kota Tebing Tinggi** yaitu:

1. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas;
2. Memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi;
3. Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif;
4. Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
6. Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah.

Penjelasan Misi Tersebut adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas:

Misi ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang merata bagi seluruh warga Kota Tebing Tinggi, tanpa memandang status sosial ekonomi. Implementasinya mencakup beberapa strategi kunci:

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan:** Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, implementasi standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, dan peningkatan sistem manajemen rumah sakit. Program peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat melalui kampanye edukasi dan penyuluhan juga akan dijalankan.
- **Peningkatan Infrastruktur Kesehatan:** Pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan primer, sekunder, dan tersier, termasuk puskesmas, rumah sakit, dan klinik, dengan penambahan peralatan medis modern dan tenaga kesehatan yang terampil. Ini termasuk perluasan jangkauan layanan kesehatan ke daerah terpencil dan kurang terlayani.
- **Jaminan Kesehatan Universal:** Peningkatan cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk memastikan seluruh warga memiliki akses ke layanan kesehatan yang terjangkau. Program bantuan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga akan terus ditingkatkan.

- **Pencegahan Penyakit:** Program pencegahan penyakit menular (penyakit TBC) dan tidak menular melalui imunisasi, deteksi dini, dan promosi gaya hidup sehat. Peningkatan sistem surveilans penyakit untuk mendeteksi dan menanggulangi wabah penyakit secara cepat dan efektif.

Misi 2 : Memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi:

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang berkualitas dan merata. Strategi yang akan dijalankan meliputi:

- **Peningkatan Kualitas Pendidikan:** Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perpustakaan, laboratorium, dan teknologi informasi.
- **Peningkatan Akses Pendidikan:** Peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program beasiswa dan bantuan pendidikan. Pengembangan program pendidikan non-formal dan informal untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Penanganan masalah putus sekolah dan angka buta aksara.
- **Pendidikan Inklusif:** Pengembangan program pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus, memastikan mereka mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan anak-anak lainnya.
- **Pembangunan Gender:** Pendekatan pembangunan yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan, serta memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan.
- **Pengembangan Inovasi:** Proses menciptakan atau mengembangkan hal-hal baru yang memberikan nilai tambah atau peningkatan bagi suatu sistem, baik itu produk, proses, layanan, atau ide. Inovasi merupakan pendorong utama dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta dapat diimplementasikan di berbagai sektor seperti teknologi, pendidikan, dan pemerintahan.

Misi 3 : Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif:

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kota Tebing Tinggi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. Strategi yang akan dijalankan meliputi:

- **Pengembangan Sektor Jasa:** Pengembangan sektor jasa yang berdaya saing tinggi, seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung sektor jasa.
- **Pengembangan Sektor Perdagangan:** Peningkatan daya saing pedagang lokal melalui pelatihan manajemen usaha dan akses permodalan. Pengembangan pasar tradisional dan modern yang terintegrasi.

- **Pengembangan Ekonomi Kreatif:** Pengembangan industri kreatif lokal, seperti kerajinan tangan, seni pertunjukan, dan kuliner. Peningkatan akses pasar dan promosi produk ekonomi kreatif.
- **Pengembangan UMKM:** Peningkatan akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, dan pemasaran bagi UMKM. Pengembangan klaster UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
- **Pengembangan Kewirausahaan:** Peningkatan budaya kewirausahaan melalui program pelatihan dan inkubasi bisnis. Penyediaan akses permodalan dan pendampingan bagi wirausahawan pemula.
- **Pengembangan Ekonomi Inklusif:** Pemberdayaan ekonomi masyarakat marginal dan kelompok rentan melalui program-program bantuan dan pelatihan usaha.

Misi 4 : Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana:

Misi ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi, dengan fokus pada ketahanan bencana. Strategi yang akan dijalankan meliputi:

- **Percepatan Pembangunan Infrastruktur:** Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan drainase. Pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti kawasan industri dan pergudangan.
- **Infrastruktur Tahan Bencana:** Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran. Pengembangan sistem peringatan dini bencana dan rencana kontijensi bencana.
- **Infrastruktur Lingkungan:** Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan, seperti taman kota, ruang terbuka hijau, dan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, termasuk program daur ulang dan pengolahan sampah organik.
- **Infrastruktur Digital:** pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkat efektivitas, dan efisiensi waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan ekonomi digital untuk mendukung konektivitas dan akses informasi.

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan:

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Strategi yang akan dijalankan meliputi:

- **Pencegahan Korupsi:** Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
- **Peningkatan Pelayanan Publik:** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses pelayanan publik.
- **Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah:** Peningkatan kesejahteraan aparatur

pemerintah melalui peningkatan gaji, tunjangan, dan fasilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

- **E-Government:** Implementasi sistem pemerintahan elektronik (e-government) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi 6 : Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah:

Misi ini bertujuan untuk memanfaatkan rumah ibadah sebagai pusat pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Strategi yang akan dijalankan meliputi:

- **Kerjasama Antarumat Beragama:** Penguatan kerjasama antarumat beragama untuk menciptakan kerukunan dan toleransi. Program-program dialog dan silaturahmi antarumat beragama Pengembangan program-program yang bertujuan untuk membentuk masyarakat madani yang berbudaya, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- **Pendidikan Agama dan Moral:** Peningkatan kualitas pendidikan agama dan moral di rumah ibadah dan sekolah. Pengembangan program keagamaan yang berorientasi pada pembentukan karakter, pencegahan penyebaran paham ekstrimisme dan radikalisme melalui kerjasama dengan tokoh agama dan lembaga terkait.
- **Ketahanan sosial:** kemampuan suatu masyarakat atau individu untuk beradaptasi, menghadapi, dan mengatasi berbagai tantangan, ancaman, dan gangguan yang datang dari dalam maupun luar, baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun lingkungan.

Keenam misi ini saling mendukung dan terintegrasi untuk mencapai visi Kota Tebing Tinggi. Implementasi misi-misi ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam program dan kegiatan yang terc antum dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi 2025-2029.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini bukan sekadar kumpulan program dan kegiatan, melainkan sebuah visi komprehensif yang dirumuskan berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi terkini, potensi, dan tantangan yang dihadapi Kota Tebing Tinggi. Tujuan dan Sasaran RPJMD, merupakan jantung dari dokumen ini, karena di sinilah arah pembangunan daerah dijabarkan secara spesifik dan terukur. Uraian berikut akan menjelaskan secara detail tentang tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029, mengungkapkan esensi dari rencana pembangunan ini dan bagaimana setiap elemennya saling berkaitan untuk mencapai visi Kota Tebing Tinggi yang lebih maju dan sejahtera.

Konteks Perencanaan Pembangunan:

Sebelum membahas tujuan dan sasaran secara spesifik, penting untuk memahami konteks perencanaan pembangunan Kota Tebing Tinggi. RPJMD ini disusun berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk:

- **Visi dan Misi Kota Tebing Tinggi:** Visi dan misi daerah menjadi landasan utama dalam merumuskan tujuan dan sasaran. Visi menggambarkan cita-cita jangka panjang yang ingin dicapai, sementara misi menjelaskan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi tersebut. Tujuan dan sasaran RPJMD harus selaras dengan visi dan misi ini, memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan terarah dan terintegrasi.
- **Kondisi Eksisting Kota Tebing Tinggi:** Analisis kondisi eksisting meliputi berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur. Analisis ini mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) yang dihadapi Kota Tebing Tinggi. Pemahaman yang komprehensif tentang kondisi eksisting sangat penting untuk merumuskan tujuan dan sasaran yang realistis, relevan, dan terukur.
- **Potensi dan Sumber Daya Kota Tebing Tinggi:** Kota Tebing Tinggi memiliki berbagai potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Potensi ini dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya. Tujuan dan sasaran RPJMD harus memanfaatkan potensi dan sumber daya ini secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.
- **Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah:** RPJMD Kota Tebing Tinggi harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan daerah lainnya. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional dan regional.
- **Partisipasi Masyarakat:** Perencanaan pembangunan yang partisipatif sangat penting untuk memastikan bahwa RPJMD ini responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi

masyarakat. Proses penyusunan RPJMD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Tujuan dan sasaran yang dirumuskan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sasaran RPJMD 2025-2029 Kota Tebing Tinggi juga selaras dengan Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 Provinsi Sumatera Utara.

3.1.4. Penyalarsan Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Tebing Tinggi dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Bahwa penyalarsan sasaran pembangunan Kota Tebing Tinggi sudah disesuaikan dengan indikator pembangunan yang terdapat didalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.1

Tabel penyalarsan sasaran pembangunan RPJMD Tebing Tinggi dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029		
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,35-5,00	6,00 – 6,10
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,4	115,3	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	45,12	49,00
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi (%)	0,70	0,90
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	8,75-8,50	6,00-5,50
5	Rasio Gini	0,303-0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,303 -0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,3	0,287
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,19	81,23
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16.88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCO2Eq)	82.711	139.333
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,59	68,13
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,1-6,00	4,50-4,00



3.1.5. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Dalam tehnik merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 : Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran RPJMD

VISI/ MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PERANGKA T DAERAH
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
MISI 1 : Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,19	79,70	80,21	80,72	81,23	81,74	Disdikbud,Per pustakaan Dinkes,Bappe da
			Meningkatnya cakupan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi	Usia Harapan Hidup UHH) (tahun)	74,60	74,80	75,00	76,00	78,00	79,27	Dinkes, RSKP,
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10%	9%	8%	7%	6%	5%	Disdikbud, Dinkes, PUPR,Perkimt ah,Dinsos,DP3 APM, PPKB,Disdag kop ukm,Kecamata n,Diskominfo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,46	99,60	99,70	99,80	99,90	100	Dinkes
				Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* Case Detection Rate (CDR) TB	90%	90%	90%	95%	98%	100%	Dinkes



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

VISI/ MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PERANGKA T DAERAH
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90%	91%	91%	92%	93%	93%	Dinkes
MISI 2 : Memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi	Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia, pendidikan, pembangunan gender dan Inovasi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,19	79,70	80,21	80,72	81,23	81,74	Disdikbud,Perpustakaan Dinkes,Bappeda
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	PPKB
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41	0,22	0,21	0,19	0,18	0,17	DP3APM
MISI 3 : Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pendapatan Penduduk	Pertumbuhan Ekonomi	4,35-5,00	4,50 – 5,00	4,75– 5,00	5,00 - 6,00	6,00 – 6,10	6,10 – 6,20	DPMPPTSP,Disdagkop ukm, Disnakerind,BPKPD
				PDRB Per Kapita (Rp Juta Rupiah)	45,125	46.100	47.100	48.100	49.100	51.000	Disdagkop ukm Disporapar,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
				Tingkat Kemiskinan (%)	8,75-8,50	8,50-7,00	7,00-6,50	6,50-6,00	6,00-5,50	5,50-5,00	Dinas Sosial, Disdagkop ukm,Disnakerind,Ketapang,Disporapar,Bappeda
				Rasio gini (Indeks)	0,3	0,3	0,3	0,29	0,28	0,28	Disdagkop ukm



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

VISI/ MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PERANGKA T DAERAH
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Disporapar,Di nas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda, Dinas Ketenagakerja an dan Perindustrian
				Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi	0,75	0,78	0,80	0.82	0,84	0,90	Disdagkop ukm Disporapar,Di nas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda, Dinas Ketenagakerja an dan Perindustrian
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	30	32	34	36	38	40	Disnakerind
				Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	-1,60	-1,50	-1.40	1,30	-1,20	-1,10	DPMPTSP
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,1-6,00	6,00-5,80	5,8-5,00	5,00-4,75	4,75-4,50	4,50-4,00	Disnaker
MISI 4 : Mengembangkan dan menata infrastruktur berwawasan lingkungan dan ketahanan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan	Indeks Pembangunan Infrastruktur		Indeks Pembangunan Infrastruktur	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	Dinas PUPR
			Terbentuknya sistem Pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	95,71	95,92	96,55	97,10	97,75	98,10	Dinas PUPR
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	45,43	49,90	54,30	59,60	65,10	70,10	Dinas PUPR



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

VISI/ MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PERANGKA T DAERAH
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
bencana	Ketahanan Bencana			Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	77,89	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	Dinas Perkim
		Indeks Lingkungan Hidup	Terbangunnya infrastruktur pendukung lingkungan hidup Yang memadai dan tahan bencana	Indeks Lingkungan Hidup	67,59	67,73	67,86	67,99	68,13	68,26	Dinas Lingkungan Hidup
MISI 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	A	A	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	A	A	A	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur pemerintah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
				Indeks Pelayanan Publik	3,65	4,20	4,30	4,40	4,51	4,55	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,6	93	93,5	93,7	94	94,3	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	45	50	55	60	65	70	Bappeda
Misi 6 : Memperkuat Ketahanan sosial, nilai – nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah	Meningkatkan Ketahanan sosial, nilai – nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah	Indeks Harmoni Indonesia			6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	Badan Kesbangpol
			Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berketahanan sosial dan bernilai religius	Indeks Harmoni Indonesia	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	Badan Kesbangpol

3.2. Pentahapan, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan. RPJMD ini disusun berdasarkan analisis situasi terkini, potensi daerah, dan tantangan yang dihadapi. Keberhasilan implementasi RPJMD ini sangat bergantung pada strategi dan arah kebijakan yang tepat dan terukur.

Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah" merupakan bagian penting yang menjelaskan bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah akan dicapai. Bab ini menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap isi subbab ini sangat krusial bagi keberhasilan pembangunan daerah.

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Bagian ini, akan membahas secara rinci strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Bagian ini akan menjelaskan secara sistematis bagaimana strategi dan kebijakan tersebut akan dijalankan dan diintegrasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Strategi yang diuraikan dalam bagian ini merupakan langkah-langkah strategis yang terencana dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi ini akan mencakup berbagai aspek pembangunan, mulai dari pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan lingkungan hidup. Setiap strategi akan dijabarkan secara detail, termasuk indikator keberhasilan dan mekanisme implementasinya.

Arah kebijakan yang dijelaskan dalam bagian ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Arah kebijakan ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas dan terarah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Arah kebijakan ini akan memastikan bahwa semua program dan kegiatan pembangunan selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD.

Implementasi strategi dan arah kebijakan yang efektif membutuhkan koordinasi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, bagian ini juga akan menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan strategi dan arah kebijakan. Dengan demikian, uraian dalam bagian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Pemahaman yang baik terhadap bagian ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat

dalam proses pembangunan daerah, untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

3.2.1. Pentahapan Pembangunan Kota Tebing Tinggi (2026-2030)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi periode 2025-2029 menerapkan pendekatan pembangunan bertahap melalui lima tahapan yang terstruktur. Setiap tahapan memiliki prioritas dan fokus spesifik, dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan secara terukur dan berkelanjutan. Strategi ini memastikan dampak pembangunan yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi, menghindari pendekatan yang terburu-buru dan tidak terencana.

Struktur pentahapan ini memungkinkan evaluasi berkala terhadap kemajuan pembangunan. Dengan membagi tujuan besar menjadi target yang lebih kecil dan terukur di setiap tahapan, pemerintah dapat lebih mudah memantau kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian strategi secara tepat waktu. Hal ini memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta responsivitas terhadap perubahan dinamika pembangunan.

Pendekatan bertahap ini juga memperkuat partisipasi masyarakat. Dengan fokus yang jelas di setiap tahapan, masyarakat dapat lebih mudah memahami dan terlibat dalam proses pembangunan. Hal ini meningkatkan rasa kepemilikan dan mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang, karena keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

A. Tahap I (2026): Penguatan Fondasi Pembangunan – Menuju Tebing Tinggi yang Berkelanjutan

Tahun 2026 menandai dimulainya era baru pembangunan di Kota Tebing Tinggi, ditandai dengan Tahap I RPJMD 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan. Tahap ini bukan sekadar langkah awal, melainkan pondasi kritis yang akan menentukan keberhasilan tahapan selanjutnya. Keberhasilan pembangunan jangka panjang bergantung pada kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, Tahap I secara strategis diarahkan untuk membangun pondasi yang kuat di tiga pilar utama: aksesibilitas layanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan kapasitas pemerintahan.

Pilar 1: Menjangkau Pelayanan Kesehatan Dasar di seluruh Wilayah

Akses terhadap layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan akses yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di wilayah terpencil Kota Tebing Tinggi. Kondisi geografis yang menantang dan keterbatasan infrastruktur seringkali menjadi penghalang utama dalam mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, Tahap I memprioritaskan peningkatan akses layanan kesehatan dasar di wilayah-wilayah terpencil tersebut.

Strategi yang dijalankan meliputi peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan di daerah

terpencil, penambahan tenaga medis terlatih dan berpengalaman, serta penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan lokal juga menjadi fokus utama, guna memastikan kualitas pelayanan yang optimal. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit akan dilakukan melalui kampanye kesehatan masyarakat yang intensif dan terintegrasi. Sistem rujukan medis yang efektif dan efisien juga akan dibangun untuk memastikan pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika diperlukan. Semua upaya ini bertujuan untuk menjamin setiap warga Kota Tebing Tinggi, tanpa memandang lokasi geografis, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualitas.

Pilar 2: Membangun Generasi Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset terpenting dalam pembangunan suatu daerah. Pendidikan berkualitas menjadi kunci dalam mencetak generasi yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing di era global. Namun, kualitas pendidikan dasar di Kota Tebing Tinggi masih perlu ditingkatkan. Tahap I RPJMD 2025-2029 berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar melalui dua pendekatan utama: pelatihan guru dan penyediaan sarana belajar yang memadai. Pelatihan guru yang berkelanjutan dan terstruktur akan difokuskan pada peningkatan kompetensi pedagogik, penguasaan teknologi pembelajaran, dan pengembangan karakter. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi akan diterapkan. Selain itu, program mentoring dan pendampingan bagi guru muda akan dilakukan untuk memastikan transfer pengetahuan dan pengalaman yang efektif. Penyediaan sarana belajar yang memadai, termasuk ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap, dan teknologi pembelajaran yang modern, juga menjadi prioritas utama. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka.

Pilar 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Tahap I RPJMD 2025-2029 berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Peningkatan kapasitas ini akan difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis, pemahaman tentang regulasi dan kebijakan, serta pengembangan etika dan integritas.

Program pelatihan dan pengembangan bagi aparatur pemerintah akan dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Sistem manajemen kinerja yang transparan dan akuntabel akan diterapkan untuk memastikan kinerja aparatur pemerintah dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pemerintahan akan ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga akan dilakukan untuk memastikan pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Dengan demikian, pilar ini bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Infrastruktur Dasar: Jalan Menuju Konektivitas dan Pertumbuhan

Pengembangan infrastruktur dasar, seperti jalan dan drainase, merupakan bagian integral dari Tahap I. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan ini akan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan jalan di beberapa wilayah prioritas, dengan memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Sistem drainase yang efektif akan dibangun untuk mencegah banjir dan genangan air, khususnya di daerah rawan banjir. Pekerjaan ini akan dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Tahap I RPJMD 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pembangunan Kota Tebing Tinggi di masa mendatang. Fokus pada akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan kapasitas pemerintahan akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Keberhasilan tahap ini akan menjadi kunci keberhasilan tahapan selanjutnya dalam mewujudkan visi dan misi Kota Tebing Tinggi.

B. Tahap II (2027): Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) – Menuju Masyarakat yang Terampil dan Berdaya Saing

Tahun 2027 menandai dimulainya Tahap II dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi, yang berfokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Tahap ini merupakan langkah krusial dalam membangun fondasi yang telah diletakkan pada tahun sebelumnya, dengan tujuan utama mempersiapkan masyarakat yang terampil, berdaya saing, dan mampu berkontribusi secara optimal pada pembangunan daerah. Keberhasilan tahap ini akan menentukan keberhasilan pembangunan di tahap-tahap selanjutnya. Oleh karena itu, strategi dan program yang terencana dengan baik dan implementasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan.

Peningkatan kualitas SDM di Kota Tebing Tinggi tidak hanya berfokus pada peningkatan pendidikan formal, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan vokasi, peningkatan akses pendidikan tinggi, pengembangan jiwa kewirausahaan, dan peningkatan literasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Keempat pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung, menciptakan sinergi yang kuat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan global.

Pengembangan Program Pelatihan Vokasi dan Keterampilan: Program pelatihan vokasi dan keterampilan menjadi prioritas utama dalam tahap ini. Program ini dirancang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Kota Tebing Tinggi dengan membekali mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Pelatihan ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan lunak seperti komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah. Kurikulum pelatihan akan dirancang secara dinamis, selalu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri terkini. Kerjasama dengan dunia usaha dan industri menjadi kunci keberhasilan

program ini, menjamin relevansi pelatihan dengan kebutuhan lapangan kerja. Program magang dan praktik kerja lapangan juga akan diintegrasikan untuk memberikan pengalaman kerja nyata bagi peserta pelatihan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Tinggi: Akses pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas SDM. Tahap II ini akan fokus pada peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Program beasiswa dan bantuan pendidikan akan diberikan kepada siswa berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi, memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain beasiswa, bantuan pendidikan juga akan mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan pengembangan karakter siswa.

Pengembangan Program Kewirausahaan: Pengembangan program kewirausahaan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Program ini akan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi calon wirausahawan, mulai dari perencanaan bisnis, manajemen keuangan, hingga pemasaran produk. Dukungan akses permodalan juga akan diberikan kepada wirausahawan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan program kredit usaha rakyat (KUR). Program inkubator bisnis dan pusat pelatihan kewirausahaan akan didirikan untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi para wirausahawan. Pengembangan klaster usaha dan promosi produk lokal juga akan dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk-produk lokal.

Peningkatan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Di era digital saat ini, literasi TIK menjadi sangat penting. Tahap II ini akan fokus pada peningkatan akses dan literasi TIK di masyarakat. Program pelatihan TIK akan diberikan kepada berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi. Infrastruktur TIK di Kota Tebing Tinggi juga akan ditingkatkan untuk memastikan akses internet yang merata dan berkualitas. Pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan, juga akan dipromosikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Dengan mengimplementasikan program-program yang terintegrasi dan terukur di keempat pilar tersebut, Tahap II RPJMD Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang terampil, berdaya saing, dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Suksesnya tahap ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan pembangunan di tahap-tahap selanjutnya.

C. Tahap III (2028): Pengembangan Ekonomi Inklusif – Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan

Tahun 2028 menandai dimulainya Tahap III dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi, yang berfokus pada pengembangan ekonomi inklusif. Setelah membangun fondasi pembangunan yang kuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada tahap sebelumnya, tahap ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, mencakup seluruh lapisan masyarakat dan sektor ekonomi. Pengembangan ekonomi inklusif tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan hasil pertumbuhan tersebut, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Prioritas utama dalam tahap ini adalah pengembangan sektor ekonomi unggulan, peningkatan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi, dan peningkatan daya saing produk lokal. Keempat pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung, membentuk ekosistem ekonomi yang dinamis dan inklusif.

Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan: Kota Tebing Tinggi memiliki potensi besar di sektor pariwisata dan pertanian. Pengembangan sektor-sektor ini akan menjadi fokus utama dalam tahap ini. Untuk sektor pariwisata, strategi yang akan dijalankan meliputi pengembangan destinasi wisata baru, peningkatan kualitas infrastruktur pariwisata, promosi wisata yang efektif, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan. Kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat lokal akan dimaksimalkan untuk mengembangkan potensi pariwisata secara berkelanjutan. Untuk sektor pertanian, fokusnya adalah pada peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi komoditas pertanian, penerapan teknologi pertanian modern, dan peningkatan akses pasar bagi petani. Program pelatihan dan pendampingan bagi petani akan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Peningkatan Akses Permodalan bagi UMKM: UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Kota Tebing Tinggi. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan mereka. Strategi yang akan dijalankan meliputi penyederhanaan prosedur akses kredit, pengembangan program pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses, serta peningkatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Kerjasama dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-perbankan, akan dimaksimalkan untuk menyediakan akses permodalan yang memadai bagi UMKM. Program pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan juga akan diberikan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan mereka.

Pengembangan Infrastruktur Pendukung Ekonomi: Infrastruktur yang memadai merupakan kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tahap ini akan fokus pada pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti pasar modern, kawasan industri, dan infrastruktur pendukung lainnya. Pengembangan infrastruktur ini akan dilakukan dengan memperhatikan aspek

keberlanjutan dan ramah lingkungan. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi akan dimaksimalkan untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan teknis. Perencanaan yang matang dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur akan menjadi prioritas utama untuk memastikan pembangunan yang efektif dan efisien.

Peningkatan Daya Saing Produk Lokal: Peningkatan daya saing produk lokal merupakan kunci dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Strategi yang akan dijalankan meliputi pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha lokal, peningkatan kualitas produk lokal, pengembangan merek dan kemasan produk lokal, serta promosi dan pemasaran produk lokal melalui berbagai saluran, baik online maupun offline. Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi, akan dimaksimalkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Pengembangan pasar ekspor juga akan menjadi fokus utama untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal.

Dengan mengimplementasikan strategi dan program yang terintegrasi dan terukur di keempat pilar tersebut, Tahap III RPJMD Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Suksesnya tahap ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan keadilan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan.

D. Tahap IV (2029): Pemerataan Pembangunan Infrastruktur – Menuju Konektivitas dan Kualitas Hidup yang Lebih Baik

Tahun 2029 menandai dimulainya Tahap IV dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi, yang berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur. Setelah membangun fondasi ekonomi yang kuat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif pada tahap-tahap sebelumnya, tahap ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi. Pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan akses terhadap layanan dasar dan peningkatan ketahanan terhadap bencana menjadi fokus utama.

Prioritas utama dalam tahap ini adalah pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, pengembangan infrastruktur pendukung lingkungan hidup, dan peningkatan ketahanan bencana. Keempat pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung, membentuk sistem infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Transportasi: Pengembangan infrastruktur jalan dan transportasi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Tebing Tinggi. Fokus utama adalah pada pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, dan

sistem transportasi umum yang memadai dan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Peningkatan kualitas jalan akan memperlancar arus barang dan jasa, memudahkan akses masyarakat ke berbagai fasilitas publik, dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Pengembangan sistem transportasi umum yang terintegrasi dan efisien akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi juga akan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan pengguna jalan.

Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi: Akses air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan kebutuhan dasar manusia dan kunci dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Tahap ini akan fokus pada peningkatan akses air bersih dan sanitasi di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi, terutama di daerah yang masih kekurangan akses air bersih dan sanitasi yang layak. Peningkatan akses air bersih akan dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan pipa air bersih, pembangunan sumur bor, dan penyediaan air bersih melalui mobil tangki air. Peningkatan sanitasi akan dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi jamban keluarga, pembangunan sistem pengolahan limbah cair domestik, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi.

Pengembangan Infrastruktur Pendukung Lingkungan Hidup: Pengembangan infrastruktur pendukung lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Fokus utama adalah pada pembangunan dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang modern dan ramah lingkungan akan menjadi prioritas utama. Program pengelolaan sampah terpadu, yang melibatkan masyarakat dan pemerintah, akan dijalankan untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan daur ulang sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga akan menjadi fokus utama. Penghijauan dan penataan ruang terbuka hijau juga akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Peningkatan Ketahanan Bencana: Kota Tebing Tinggi rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Peningkatan ketahanan bencana menjadi prioritas utama dalam tahap ini. Strategi yang akan dijalankan meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, seperti bangunan tahan gempa, sistem drainase yang memadai, dan sistem peringatan dini bencana. Program pelatihan dan simulasi bencana akan diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pengembangan sistem evakuasi dan penanggulangan bencana juga akan menjadi fokus utama.

Dengan mengimplementasikan strategi dan program yang terintegrasi dan terukur di keempat pilar tersebut, Tahap IV RPJMD Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Suksesnya tahap ini akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata akan meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Konektivitas yang baik akan mempermudah akses masyarakat ke berbagai fasilitas publik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

E. Tahap V (2030): Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemantauan Kinerja – Menuju Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkelanjutan

Tahun 2030 menandai tahap akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pemantauan kinerja. Setelah membangun fondasi pembangunan yang kuat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur pada tahap-tahap sebelumnya, tahap ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Tahap ini bukan sekadar penutup, melainkan puncak dari seluruh proses pembangunan yang telah dilakukan, menjamin bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kunci keberhasilan tahap ini terletak pada pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prioritas utama dalam tahap ini adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien, pemantauan dan evaluasi kinerja program pembangunan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Keempat pilar ini saling berkaitan dan saling mendukung, membentuk sistem pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Strategi yang akan dijalankan meliputi penyediaan informasi publik yang mudah diakses, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan pemerintahan, serta mekanisme pengawasan yang efektif dan independen. Semua proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang efektif akan dibentuk untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat. Laporan kinerja pemerintah akan disusun secara berkala dan dipublikasikan secara luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Peningkatan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien: Pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Strategi yang akan dijalankan meliputi penyederhanaan prosedur pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah. Sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi akan dibangun untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Standar pelayanan

publik yang jelas dan terukur akan ditetapkan untuk memastikan kualitas pelayanan yang konsisten. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang efektif akan dibentuk untuk menampung keluhan dan masukan masyarakat terkait pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik akan dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program Pembangunan: Pemantauan dan evaluasi kinerja program pembangunan merupakan kunci dalam memastikan keberhasilan pembangunan. Strategi yang akan dijalankan meliputi pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, penggunaan indikator kinerja yang terukur, serta penyusunan laporan kinerja yang komprehensif. Data dan informasi yang akurat dan terkini akan dikumpulkan dan dianalisis untuk memantau kemajuan program pembangunan. Hasil pemantauan dan evaluasi akan digunakan untuk melakukan penyesuaian program dan strategi jika diperlukan. Laporan kinerja akan dipublikasikan secara luas untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan: Partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam keberhasilan pembangunan. Strategi yang akan dijalankan meliputi peningkatan akses informasi bagi masyarakat, pembentukan forum konsultasi publik, serta mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Masyarakat akan dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan. Pendapat dan masukan masyarakat akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (ORMAS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan dimaksimalkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dengan mengimplementasikan strategi dan program yang terintegrasi dan terukur di keempat pilar tersebut, Tahap V RPJMD Kota Tebing Tinggi bertujuan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Suksesnya tahap ini akan menjamin bahwa pembangunan yang telah dilakukan akan berkelanjutan, bermanfaat bagi masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, pentahapan pembangunan Kota Tebing Tinggi ini dirancang secara terstruktur dan bertahap, dimulai dari penguatan fondasi pembangunan hingga penguatan tata kelola pemerintahan dan pemantauan kinerja. Setiap tahapan saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih besar, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Tebing Tinggi. Pentahapan pembangunan dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Pentahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Prioritas: Penguatan Fondasi Pembangunan • Peningkatan akses layanan kesehatan dasar di wilayah Kota Tebing Tinggi • Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi seperti pasar dan kawasan industri.	Prioritas: Peningkatan Kualitas SDM • Pengembangan program pelatihan vokasi dan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. • Peningkatan akses pendidikan menengah dan tinggi melalui beasiswa dan bantuan pendidikan. • Pengembangan program kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. • Peningkatan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di masyarakat. • Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui pelatihan guru dan penyediaan sarana belajar.	Prioritas: Pengembangan Ekonomi Inklusif • Pengembangan sektor ekonomi unggulan seperti pariwisata dan pertanian. • Peningkatan akses permodalan bagi UMKM. • Peningkatan daya saing produk lokal melalui pelatihan dan pemasaran.	Prioritas: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur • Pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi. • Peningkatan akses air bersih dan sanitasi. • Pengembangan infrastruktur pendukung lingkungan hidup . • Peningkatan ketahanan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tahan bencana.	Prioritas: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemantauan Kinerja • Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. • Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisien. • Pemantauan dan evaluasi kinerja program pembangunan. • Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. • Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan terkini, serta proyeksi masa depan yang realistis. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020-2025 dan dokumen revisi RPJMD menjadi sumber utama untuk memahami tren dan tantangan yang dihadapi, sekaligus mengukur capaian pembangunan sebelumnya.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam RPJMD harus mampu menjawab berbagai tantangan, seperti pertumbuhan penduduk yang meningkat, kebutuhan infrastruktur yang berkembang, perubahan iklim, serta tuntutan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, strategi ini menjadi peta jalan yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan agar selaras, efektif, dan berdampak positif.

1. Strategi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif

Berdasarkan data BPS dan dokumen RPJMD, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sekitar 5,2% per tahun. Namun, tantangan seperti tingkat pengangguran terbuka yang masih mencapai 7,5% dan tingkat kemiskinan sekitar 9,8% pada 2024 menuntut strategi yang lebih terfokus.

Strategi utama yang diambil meliputi:

- Pengembangan sektor unggulan dan UMKM: Pemerintah daerah mendorong penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan pemasaran digital. Hal ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal dan memperluas pasar, baik di tingkat regional maupun nasional.
- Peningkatan investasi dan infrastruktur: Perbaikan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi menjadi prioritas untuk menarik investasi dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai juga mendukung pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif.
- Diversifikasi ekonomi: Mengembangkan sektor pertanian modern, pariwisata berbasis budaya dan alam, serta industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- Penguatan sumber daya manusia: Melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan teknologi.

Dengan strategi ini, Kota Tebing Tinggi menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% per tahun pada periode 2025-2029, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan.

2. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Publik

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama dalam RPJMD, dengan penekanan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tebing Tinggi meningkat dari 72,5 pada 2020 menjadi 74,3 pada 2024, namun disparitas antar wilayah dan kelompok masyarakat masih menjadi perhatian.

Strategi yang diimplementasikan meliputi:

- Peningkatan akses dan mutu pendidikan: Memperluas akses pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas guru, serta mengembangkan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Program beasiswa dan pelatihan keterampilan juga diperkuat untuk mendukung pemerataan pendidikan.
- Penguatan sistem kesehatan: Meningkatkan cakupan imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Peningkatan fasilitas kesehatan dan tenaga medis menjadi prioritas untuk menjamin layanan yang merata.
- Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan: Melaksanakan program bantuan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan program jaminan sosial yang inklusif.
- Pengembangan fasilitas publik: Meningkatkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perumahan layak untuk mendukung kualitas hidup masyarakat.

Melalui strategi ini, Kota Tebing Tinggi menargetkan peningkatan IPM menjadi 76,5 pada 2029 dan penurunan angka kemiskinan di bawah 7%.

3. Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Kota Tebing Tinggi menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, termasuk risiko banjir, pencemaran udara, dan pengelolaan sampah. Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dan data BPS, kualitas udara dan air masih perlu perbaikan, sementara kapasitas daya dukung lingkungan mulai tertekan akibat urbanisasi dan aktivitas industri.

Strategi yang diambil meliputi:

- Penguatan pengelolaan sumber daya alam: Melakukan konservasi kawasan hijau, pengelolaan air bersih, dan pengendalian pencemaran. Program penghijauan dan pengelolaan limbah menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
- Pengembangan sistem mitigasi bencana: Meningkatkan kapasitas tanggap darurat, edukasi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur tahan bencana untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam.
- Penerapan pembangunan berkelanjutan: Mengintegrasikan prinsip ramah lingkungan dalam seluruh sektor pembangunan, termasuk penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang efektif.
- Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan: Memastikan kepatuhan

terhadap peraturan lingkungan hidup melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas.

Dengan strategi ini, Kota Tebing Tinggi berkomitmen menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan agar pembangunan tidak merusak ekosistem dan kualitas hidup masyarakat.

4. Strategi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Demokrasi

Pemerintahan yang efektif, transparan, dan partisipatif menjadi fondasi penting dalam mencapai tujuan RPJMD. Data BPS dan survei kepuasan masyarakat menunjukkan peningkatan indeks pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal akuntabilitas dan pemberantasan korupsi.

Strategi yang diusung meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah: Melalui pelatihan, digitalisasi layanan, dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas.
- b. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government): Mempermudah akses layanan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
- c. Penguatan partisipasi masyarakat: Melibatkan warga dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan melalui forum konsultasi dan mekanisme pengaduan.
- d. Penegakan supremasi hukum dan HAM: Memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.

Strategi ini diharapkan meningkatkan indeks demokrasi dan rasa aman masyarakat, serta memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

5. Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas

Infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kota Tebing Tinggi terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan strategis.

Strategi yang diterapkan meliputi:

- a. Peningkatan jaringan transportasi: Memperbaiki jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk memperlancar mobilitas barang dan orang.
- b. Pengembangan infrastruktur digital: Memperluas akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung ekonomi digital, pendidikan, dan pelayanan publik.
- c. Peningkatan fasilitas energi dan air bersih: Menjamin ketersediaan listrik dan air yang andal bagi seluruh masyarakat.
- d. Pengembangan infrastruktur sosial: Membangun fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ruang publik yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dengan strategi ini, Kota Tebing Tinggi menargetkan peningkatan indeks daya saing daerah dan kualitas hidup warga.

6. Strategi Penguatan Ketahanan sosial, Nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah Ibadah

Menghadapi dinamika global dan lokal, Kota Tebing Tinggi perlu memperkuat ketahanan sosial di bidang keagamaan.

Strategi yang diambil meliputi:

- a. Menjadikan Rumah Ibadah sebagai tempat pembinaan mental generasi muda
- b. Penguatan sistem sosial dan budaya: Memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, harmonisasi dan solidaritas masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas.
- c. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama

Strategi ini bertujuan menjadikan Kota Tebing Tinggi lebih mandiri dan tangguh menghadapi berbagai tantangan. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 dirancang secara komprehensif dan terintegrasi, berlandaskan data dan analisis terkini dari BPS 2020-2025 serta kajian internal dokumen RPJMD. Fokus utama meliputi pembangunan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan. Adapun Teknik menyimpulkan Isu strategis Daerah dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Daerah

Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
		Global	Nasional	Provinsi	
Tingginya tingkat pengangguran terbuka dan tingginya Angka Kemiskinan	- Pengentasan Kemiskinan dan Penguatan Ketahanan Pangan - Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Tenaga Kerja	Pariwisata global menunjukkan pemulihan yang signifikan setelah pandemi	Hilirisasi industri di Indonesia mulai menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional.	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia.	Ketersediaan Lapangan Kerja Pengembangan UMKM
		suku bunga global, ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, serta kondisi perdagangan internasional yang lebih lesu	Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral, penerapan standar sustainability yang tinggi, daya saing produk nasional, kompetitif di pasar global, orientasi ramah lingkungan	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang	
Karakteristik geografis yang rentan terhadap bencana alam dan Lingkungan Hidup	Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana	Cuaca ekstrem, sebagai isu strategis jangka menengah, juga menjadi tantangan serius yang dihadapi. Polusi telah muncul sebagai isu strategis global jangka menengah yang berdampak signifikan pada kesehatan manusia, ekosistem, dan ekonomi.		Pengelolaan SDA berkelanjutan	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengendalian Lingkungan Hidup Berkelanjutan
Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Tebing Tinggi perlu dianalisis untuk memprediksi kebutuhan infrastruktur dan layanan publik di masa mendatang	Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Kota	Lonjakan jumlah penduduk ini menimbulkan tantangan besar, terutama dalam hal penyesuaian antara kebutuhan	Aging population ditandai oleh peningkatan proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) dan penurunan tingkat kelahiran.		Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia



Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
		Global	Nasional	Provinsi	
Permasalahan di bidang Pelayanan Dasar seperti pendidikan, kesehatan dan Infarastruktur yang belum memadai	Peningkatan Kualitas SDM, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dampak buruk teknologi AI, sebagai isu strategis jangka menengah	Peningkatan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, distribusi listrik yang tidak merata	Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai., Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas	Inovasi dan Pengembangan Teknologi
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang baik			memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Tabel 3.5 Arah Kebijakan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	KETERANGAN
1	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	• Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan • Meningkatkan program promotif dan preventif kesehatan masyarakat	• Penguatan sistem kesehatan • Pengembangan fasilitas publik	Fokus pada peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan program pencegahan penyakit
2	Memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi	• Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi • Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	• Penguatan sumber daya manusia • Peningkatan akses dan mutu pendidikan	Menekankan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi
3	Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif	• Diversifikasi ekonomi dan pengembangan UMKM • Peningkatan investasi dan inovasi teknologi	• Pengembangan sektor unggulan dan UMKM • Peningkatan investasi dan infrastruktur • Diversifikasi ekonomi • Perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan	Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal dan peningkatan daya saing produk daerah
4	Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana	• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar dan strategis • Pengembangan transportasi dan jaringan komunikasi	• Penguatan pengelolaan sumber daya alam • Pengembangan sistem mitigasi bencana • Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan • Penerapan pembangunan berkelanjutan	Memperkuat konektivitas antar wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	• Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi • Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	• Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah • Penguatan partisipasi masyarakat • Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Mendorong pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan keterlibatan masyarakat luas



NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	KETERANGAN
6	Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah	• Pengembangan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin • Peningkatan akses layanan sosial dasar	• Menjadikan Rumah Ibadah sebagai tempat pembinaan mental generasi muda • Penguatan sistem sosial dan budaya: Memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, harmonisasi dan solidaritas masyarakat melalui program pemberdayaan komunitas • Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat rentan

Penjelasan:

- **Misi 1 (Kesehatan dan Kesejahteraan):** Arah kebijakan menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan yang tidak hanya bersifat kuratif tapi juga promotif dan preventif, sehingga masyarakat dapat hidup lebih sehat dan produktif.
- **Misi 2 (Sumber Daya Manusia):** Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas dengan fokus pada pendidikan vokasi dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- **Misi 3 (Ekonomi):** Diversifikasi ekonomi dan penguatan UMKM menjadi strategi utama untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah, termasuk mendorong inovasi dan investasi.
- **Misi 4 (Infrastruktur):** Infrastruktur yang memadai dan konektivitas yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses layanan publik.
- **Misi 5 (Tata Kelola Pemerintahan):** Pemerintahan yang transparan dan partisipatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik.
- **Misi 6 (Ketahanan Sosial):** Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya untuk memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, meningkatkan kerukunan antar umat beragama, harmonisasi antar sesama, solidaritas masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

3.3. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan peta jalan yang komprehensif menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Setelah merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan, langkah selanjutnya adalah merancang program-program prioritas yang akan menjadi instrumen pencapaian cita-cita tersebut. Bab III, khususnya bagian 3.2, "Program-Program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029," merupakan jantung dari dokumen perencanaan ini, menjabarkan secara detail langkah-langkah strategis yang akan dijalankan selama periode lima tahun tersebut.

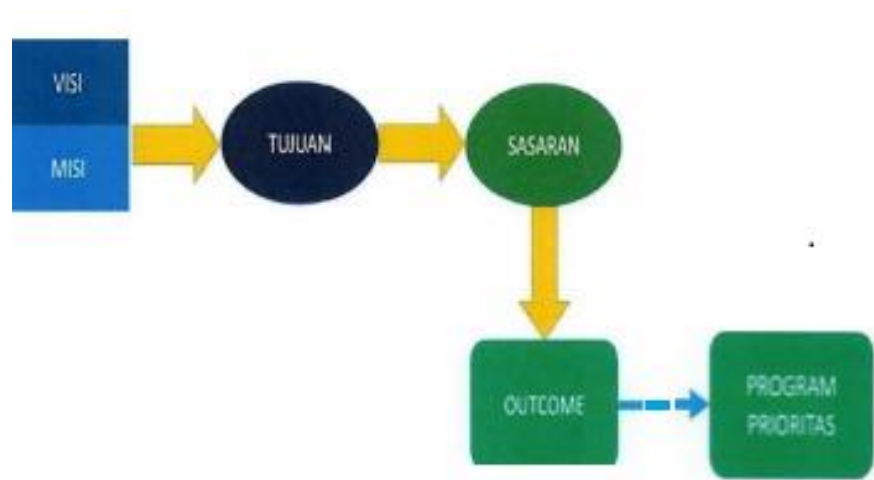
Program-program prioritas yang diuraikan dalam bagian ini bukanlah sekadar daftar kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian terintegrasi yang saling berkaitan dan saling mendukung. Mereka dirancang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi geografis, potensi sumber daya alam dan manusia, keterbatasan anggaran, serta dinamika sosial dan politik yang ada di Kota Tebing Tinggi. Setiap program prioritas memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terukur, sehingga kemajuan dan keberhasilannya dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pemilihan program prioritas didasarkan pada analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) yang komprehensif. Analisis ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Kota Tebing Tinggi, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan. Dengan demikian, program-program prioritas yang dirumuskan diharapkan mampu memanfaatkan kekuatan yang ada, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan meminimalkan dampak dari ancaman. Proses perumusan program prioritas juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Partisipasi ini memastikan bahwa program-program prioritas yang dirumuskan relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Program-program prioritas yang tercantum dalam bagian ini mencakup berbagai sektor pembangunan, seperti pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan lingkungan hidup. Dalam sektor pembangunan ekonomi, misalnya, program prioritas dapat mencakup pengembangan sektor unggulan, peningkatan daya saing UMKM, dan peningkatan investasi. Dalam sektor pembangunan sosial, program prioritas dapat mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan. Dalam sektor pembangunan infrastruktur, program prioritas dapat mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan sanitasi. Dalam sektor pembangunan lingkungan hidup, program prioritas dapat mencakup pengelolaan sampah, penghijauan, dan pelestarian lingkungan.

Setiap program prioritas akan dijelaskan secara rinci, mencakup tujuan, sasaran, indikator kinerja, anggaran, jadwal pelaksanaan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Uraian ini memberikan gambaran jelas tentang pelaksanaan dan pemantauan program-program tersebut. Informasi ini penting bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan investor untuk memahami arah pembangunan Kota Tebing Tinggi serta berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan. Bagian 3.3 bukan sekadar daftar program tetapi juga komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan implementasi program-program ini akan menentukan keberhasilan RPJMD secara keseluruhan dan menjadi tolak ukur pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun ke depan; pemahaman mendalam terhadap isi bagian ini sangat krusial bagi semua pihak yang terlibat.

Gambar 3.1 Kerangka Perumusan Program Prioritas RPJMD



Tabel 3.6 : Teknik Merumuskan Program Prioritas RPJMD

VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Visi : Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya.									
Misi 1: Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya cakupan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi	Peningkatan cakupan akses layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah Kota Tebing Tinggi	Indeks Pembangunan Manusia			Disdikbud,Dinkes,Bappeda	
					Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Pembangunan rumah sakit kekhususan Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan Kampanye Kesehatan untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Disdikbud, Dinkes, PUPR,Perkimtah, Dinsos,DP3APM ,PPKB,Disdagko p ukm,Kecamatan, Diskominfo,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda	
					Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* Case Detection Rate (CDR) TB	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan	Dinkes	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)		3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
Misi 2 : Memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi	Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, pendidikan, pembangunan gender dan Inovasi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Disdikbud,Dinkes,Bappeda	
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Fasilitasi Sekolah Vokasi Kota Tebing Tinggi Penguatan pendidikan dan digitalisasi	1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Pengelolaan Pendidikan	Disdikbud,Dinkes,Bappeda	
			Meningkatnya Pemberdayaan Gender dan pembangunan Keluarga	Peningkatan Pemberdayaan Gender dan pembangunan Keluarga	Indeks Ketimpangan Gender	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	1. Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program perlindungan perempuan 3. Program pemenuhan hak anak 4. Program perlindungan	DP3APM	



VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan	5. khusus anak Program peningkatan kualitas keluarga 1. Program Pengendalian Penduduk 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPPKB	
Misi 3: Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Indeks Inovasi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.	1. Program pemberdayaan umkm 2. Program pengembangan sumber daya parawisata dan ekonomi kreatif 3. Program pengembangan iklim penanaman modal	DPMPTSP,Disdagkop ukm, Disnakerind,BPK PD	
			Meningkatnya Pendapatan Penduduk	Peningkatan Pendapatan Penduduk	PDRB Per Kapita (Rp Juta Rupiah)	Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.	3. Program pengembangan iklim penanaman modal		
					Tingkat Kemiskinan (%)	Penanggulangan Kemiskinan	1. Program Pemberdayaan Sosial 2. Program Rehabilitasi Sosial 3. Program Perlindungan dan	Dinas Sosial, Disdagkop ukm,Disnakerind, Ketapang,Dispor apar,Bappeda	
					Rasio gini (Indeks)				



VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Jaminan Sosial 4. Program Penanganan Bencana		
					Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi	Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM, ekonomi kreatif dan investasi.	1.Perencanaan dan Pembangunan Industri 2.Pengendalian Izin Usaha Industri 3.Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Disdagkop ukm Disporapar,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM, ekonomi kreatif dan investasi.			
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Penyediaan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan guna menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Mengembangkan Sektor pariwisata yang berbasis Budaya dan potensi daerah	1. Program Hubungan Industrial 2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pengendalian IzinUsaha Industri 3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 4. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	



VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	Pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap UMKM, ekonomi kreatif dan investasi.	1. Program Pengembangan iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP	
Misi 4: Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Kota Tebing Tinggi.	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Terbangunnya infrastruktur pendukung lingkungan hidup yang memadai dan tahan bencana	Peningkatan infrastruktur pendukung lingkungan hidup yang memadai dan tahan bencana	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program penataan bangunan gedung 3. Program Pengembangan pemukiman	Dinas PUPR	
			Terbentuknya sistem Pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien	Peningkatan sistem Pengelolaan infrastruktur yang efektif dan efisien	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas	1. Program Pengembangan permukiman 2. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	PUPR	
					Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR	



VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Indeks Lingkungan Hidup	Peningkatan ketahanan bencana Peningkatan kebersihan dan kelestarian lingkungan.	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Dinas LH	
					Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas	1. Program kawasan Permukiman 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 3. Program Pengembangan Perumahan 4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perkimtah	
Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas dan Inovatif	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Setdako	
			Meningkatnya	Peningkatan Birokrasi	Nilai SAKIP	Peningkatan kapasitas	Program Penunjang	Setdako	



VISI/MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Birokrasi yang bersih dan akuntabel	yang bersih dan akuntabel		kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.	urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota		
					Opini BPK	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPD	
			Meningkatnya kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur pemerintah	Peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja aparatur pemerintah	Indeks Pelayan Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Setdako	
					Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Setdako	
			Meningkatnya Inovasi Daerah	Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan inovasi dalam berbagai sektor	Program Penelitian dan Pengembangan	Bappeda	
Misi 6: Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah	Meningkatnya Ketahanan sosial, Nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah	Indeks Harmoni Indonesia				Kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beribadah	Program Pengembangan Kebudayaan	Disdikbud	
			Meningkatnya kehidupan masyarakat yang berketahanan sosial dan bernilai religius	Peningkatan kehidupan masyarakat yang berketahanan sosial dan bernilai religius	Indeks Harmoni Indonesia	Rumah ibadah sebagai sarana untuk pembentukan karakter dengan nilai-nilai religius Mengembangkan Kerukunan antar Umat beragama dan kebebasan beribadah	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Badan Kesbangpol	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

4.1.1 Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah

Bab ini menjabarkan secara detail program-program yang akan dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah untuk mencapai kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Bukan sekadar daftar kegiatan, bab ini merupakan terjemahan operasional dari visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan sebelumnya. Ia menjadi instrumen penting dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, dan memonitor pelaksanaan pembangunan di Kota Tebing Tinggi selama periode lima tahun tersebut.

Daftar program dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah, merupakan hasil dari proses perencanaan yang matang dan komprehensif. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari analisis situasi terkini, identifikasi potensi dan tantangan, perumusan strategi, hingga penentuan program dan kegiatan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu (SMART). Setiap program yang tercantum telah dikaji secara cermat untuk memastikan keselarasannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD, serta ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan.

Penting untuk dipahami bahwa program-program perangkat daerah ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar. Oleh karena itu, koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah menjadi sangat krusial dalam pelaksanaan program-program ini. Kerangka kerja yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif akan memastikan bahwa program-program tersebut berjalan secara terintegrasi dan menghasilkan dampak yang optimal.

Setiap program perangkat daerah berkontribusi pada pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Setiap program akan memiliki indikator kinerja yang spesifik dan terukur, yang akan digunakan untuk memantau kemajuan dan keberhasilan program tersebut. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif akan memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sistem ini juga akan memungkinkan dilakukannya penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan selama proses pelaksanaan.

Gambaran tentang alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap program ini mencakup alokasi anggaran, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan program. Transparansi dalam alokasi sumber daya ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Informasi

mengenai sumber pendanaan, baik dari APBD maupun sumber lain, akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pembiayaan program-program tersebut.

Mekanisme koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program-program perangkat daerah. Mekanisme ini akan memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan output yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Peran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam pelaksanaan program akan dijelaskan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan efisiensi pelaksanaan. Sistem pelaporan dan evaluasi berkala akan diimplementasikan untuk memantau kemajuan dan keberhasilan program-program tersebut.

Bab ini merupakan bagian penting dari RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 yang memberikan gambaran komprehensif tentang program-program prioritas yang akan dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah. Pemahaman yang mendalam terhadap bab ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan daerah, untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi yang efektif akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi program-program tersebut.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

4.1.2 Indikator Program, Target Dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Program Perangkat Daerah tidak hanya menjabarkan program-program yang akan dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah di Kota Tebing Tinggi untuk periode 2025- 2029, tetapi juga secara krusial membahas indikator keberhasilan, target yang ingin dicapai, dan pagu indikatif anggaran yang dialokasikan untuk setiap program. Indikator Program, Target, dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah merupakan bagian penting yang menghubungkan perencanaan strategis dengan implementasi dan pengukuran kinerja. Tanpa indikator yang jelas, target yang terukur, dan alokasi anggaran yang terencana, program-program yang telah dirumuskan akan kehilangan arah dan sulit untuk dipantau.

Uraian dalam bagian ini tidak sekadar menyajikan data kuantitatif, melainkan juga menjelaskan bagaimana indikator-indikator tersebut dipilih, bagaimana target ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan dan potensi daerah, serta bagaimana pagu indikatif anggaran dihitung berdasarkan skala prioritas dan efisiensi. Pemahaman yang mendalam terhadap bagian ini sangat penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, lembaga legislatif, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pembangunan daerah.

Indikator program yang disajikan dalam bagian ini dirancang untuk mengukur

keberhasilan program secara terukur dan objektif. Indikator-indikator ini dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan dan sasaran RPJMD, kemudahan pengukuran, dan ketersediaan data. Indikator-indikator tersebut tidak hanya mencakup indikator kuantitatif, tetapi juga indikator kualitatif yang mampu menangkap aspek-aspek pembangunan yang lebih kompleks. Penggunaan indikator yang komprehensif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang holistik tentang kinerja program.

Target yang ditetapkan untuk setiap program merupakan ambisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Target ini bukanlah angka-angka yang sembarangan, melainkan hasil dari analisis yang cermat terhadap kondisi terkini, potensi daerah, dan tantangan yang dihadapi. Target yang ditetapkan harus realistis, terukur, dan dapat dicapai. Proses penetapan target melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memastikan bahwa target yang ditetapkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Target yang ambisius namun realistis akan mendorong perangkat daerah untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang optimal.

Pagu indikatif anggaran yang disajikan dalam bagian ini merupakan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap program. Alokasi anggaran ini didasarkan pada skala prioritas program dan efisiensi penggunaan anggaran. Proses penetapan pagu indikatif anggaran melibatkan analisis yang cermat terhadap kebutuhan anggaran, ketersediaan sumber daya, dan efisiensi penggunaan anggaran. Transparansi dalam proses penetapan pagu indikatif anggaran sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan. Dengan adanya pagu indikatif anggaran yang jelas, perangkat daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program dengan lebih efektif dan efisien.

Singkatnya, bagian ini merupakan instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan keberhasilan implementasi RPJMD Kota Tebing Tinggi. Dengan indikator yang jelas, target yang terukur, dan pagu indikatif anggaran yang terencana, program-program yang telah dirumuskan akan dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif, menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Transparansi dan keterbukaan informasi dalam bagian ini sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan..

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan Indikator Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), guna bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Makro

Indikator kinerja makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian pembangunan pada akhir periode pembangunan tahun 2029. Target capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tebing Tinggi tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Tabel 4.1 Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
Bidang Pendidikan													
Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	76,89	82,97	4.622.200.000	85,93	6.926.369.009	88,9	7.506.610.374	91,87	8.141.175.463	94,42	8.819.246.899	Disdikbud
	Jumlah anak usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99,65	99,82	26.130.312.983	99,91	24.073.995.504	99,99	26.122.925.122	99,99	28.346.277.758	99,99	30.758.905.768	Disdikbud
	Jumlah anak usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99,96	99,97	16.139.199.100	99,98	19.297.428.017	99,99	20.943.569.398	99,99	22.724.365.689	99,99	24.666.670.742	Disdikbud
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	13,64	15,16	744.680.000	15,92	1.013.419.527	16,69	1.099.560.188	17,45	1.193.022.804	18,21	1.294.429.743	Disdikbud
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	n/a	5%	0	10%	136.067.489	15%	147.633.226	20%	160.182.050	25%	173.797.524	Disdikbud
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru	0,57	0,60	0	0,65	68.033.745	0,70	73.816.613	0,75	80.091.025	0,80	86.898.762	Disdikbud
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	57,59	60%	0	62%	68.033.745	65%	73.816.613	67%	80.091.025	70%	68.898.762	Disdikbud
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbaharui	93	95%	45.000.000	96%	48.825.000	97%	52.975.125	98%	57.478.011	99%	62.363.642	Disdikbud
Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	n/a	1	0	2	136.067.489	3	147.633.226	4	160.182.050	5	173.797.524	Disdikbud
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85	89	148.095.217.323	91	160.685.481.764	93	174.343.747.714	95	189.162.966.270	97	205.241.818.402	Disdikbud



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Kesehatan													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan penunjnag urusan pemerintah daerah yang terlaksana	80%	80%	138.658.315.126	85%	143.426.388.040	90%	152.153.394.012	95%	159.226.388.040	100%	169.751.388.040	Dinkes RSKP
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakatMeningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	75%	80%	31.398.497.473	85%	40.054.953.778	90%	46.623.611.960	95%	56.288.913.331	100%	61.848.611.960	Dinkes RSKP
	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK		85%		86%		88%		90%		100%		
	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS)		92%		94%		96%		100%		100%		
	Ibu hamil mengonsumsi makanan beragam		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan		82%		85%		88%		100%		100%		
	Praktik Inisiasi Menyusu Dini		55%		60%		65%		75%		80%		
	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif		76%		79%		82%		85%		90%		
	Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan		76%		79%		82%		85%		90%		
	Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun		64%		67%		70%		73%		80%		
	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk		100%		100%		100%		100%		100%		
	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan		100%		100%		100%		100%		100%		
	BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi		100%		100%		100%		100%		100%		
	BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap		83%		90%		92%		95%		100%		
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pemberian obat cacing pada anak BADUTA			98,4%		98,6 %		98,8%		99,0%		100,0%	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi		100%		100%		100%		100%		100%		
	Stimulasi dan Pemantauan Perkembangan pada BALITA		100%		100%		100%		100%		100%		
	Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi		100%		100%		100%		100%		100%		
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan		100%		100%		100%		100%		100%		
	Penemuan kasus pneumonia balita		85%		90%		95%		100%		100%		
	Pemberian obat cacing Pada anak BALITA		91%		94%		96%		98%		100%		
	Remaja putri yang Konsumsi TTD		67%		70%		75%		80%		100%		
	Remaja putri yang diskriming anemia		77%		80%		84%		85%		90%		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	75%	80%	122.640.200	85%	1.200.000.000	90%	1.450.000.000	95%	1.600.000.000	100%	2.800.000.000	Dinkes RSKP
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase cakupan sediaan farmasi alat kesehatan makanan dan minuman	75%	80%	104.328.400	85%	150.000.000	90%	200.000.000	95%	250.000.000	100%	1.350.000.000	Dinkes dan RSKP
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidasng kesehatan yang diberdayakan	80%	80%	989.344.900	85%	1.000.000.000	90%	1.200.000.000	95%	1.400.000.000	100%	1.610.351.987	Dinkes dan RSKP
Bidang Pekerjaan Umum													
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77,19%	78%	9.477.952.666	78,40 %	10.283.578.642	79,10%	11.157.682.826	80%	12.106.085.866	83,50%	13.135.103.165	Dinas PUPR



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	199.783.859	12 Dokumen	216.765.487	12 Dokumen	235.190.553	12 Dokumen	255.181.750	12 Dokumen	276.872.199	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	59,92%	61,30%	5.732.153.595	62,40 %	6.219.386.651	63,40%	6.748.034.516	64,40%	7.321.617.450	65,40%	7.943.954.933	Dinas PUPR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	10 Orang	10 Lembaga	100.192.507	10 Lembaga	108.708.870	10 Lembaga	117.949.124	10 Lembaga	127.974.800	10 Lembaga	138.852.658	Dinas PUPR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah provinsi	80,00%	82%	646.992.312	83%	701.986.659	84%	761.655.525	85%	826.396.245	86%	896.639.925	Dinas PUPR
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	89%	93%	8.778.368.621	94%	9.524.529.954	95%	10.334.115.000	96%	11.212.514.775	97%	12.165.578.531	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir. 2. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	60,00%	63%	5.532.550.083	64%	6.002.816.840	65%	6.513.056.271	66%	7.066.666.054	67%	7.667.332.669	Dinas PUPR
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Persentase Peningkatan Kapasitas yang terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	23,43%	49,90%	989.360.930	54,30 %	1.073.456.609	59,60%	1.164.700.420	65,10%	1.263.699.956	70,10%	1.371.114.452	Dinas PUPR
	2. Akses terhadap Air Minum Aman	45,43%	45,92%		50,10 %		50,25%		50,38%		50,64%		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	14,00%	95,92%	1.286.497.800	96,55 %	1.395.850.113	97,10%	1.514.497.372	97,95%	1.643.229.649	98,10%	1.782.904.169	Dinas PUPR
	2. Akses terhadap Sanitasi Aman	88,34%	89,22%		89,55 %		89,76%		89,90%		90,00%		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	63,00%	65%	4.480.101.727	67%	4.860.910.373	69%	5.274.087.755	72%	5.722.385.214	75%	6.208.787.957	Dinas PUPR



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	96%	100%	6.284.454.863	100%	6.818.633.626	100%	7.398.227.376	100%	8.027.065.853	100%	8.709.366.450	Dinas Perkimtah
Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	1.013.983.118	100%	1.100.171.683	100%	1.193.686.276	100%	1.295.149.610	100%	1.405.237.326	Dinas Perkimtah
	2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni												
Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	0,20%	0,50%	743.568.671	0,40%	806.772.009	0,40%	875.347.629	0,40%	949.751.178	0,40%	1.030.481.122	Dinas Perkimtah
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman kumuh	Berkurangnya unit RTLH Jumlah (Rumah tangga Tidak Layak Huni)	0,10%	2,77	469.702.473	2,70	509.627.183	2,64	552.945.494	2,57	599.945.861	2,50	650.941.250	Dinas Perkimtah
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum)	82,56%	83,50%	4.334.316.828	84,00 %	4.702.733.758	84,50%	5.102.466.127,41	85,00%	5.536.175.748,23	85,50%	6.006.750.686,83	Dinas Perkimtah
Bidang Ketentraman, dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	8.486.770.405	100%	9.000.000.000	100%	9.600.000.000	100%	10.200.000.000	100%	10.900.000.000	Satpol PP
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	80	84	432.640.000	86	677.560.289	88	900.152.913	90	1.192.665.911	92	1.461.042.513	Satpol PP
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang yang terlaksana	88,31%	88,50%	3.778.882.666	89,00 %	4.100.087.693	89,30%	4.448.595.147	89,50%	4.826.725.734	90,00%	5.236.997.422	BPBD
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	94,9	80%	352.382.480	85%	382.334.991	90%	414.833.464	95%	450.094.310	100%	488.352.326	BPBD
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	N/A	80%										
	Persentase Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	N/A	80%										
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	N/A	80%										



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Kinerja Pelayanan Internal OPD/Unit Kerja	90%	91%	5.628.373.483	92%	6.106.785.229	93%	6.625.861.973	94%	7.189.060.241	95%	7.800.130.362	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	85%	91%	352.158.126	92%	382.091.567	93%	414.659.350	94%	449.807.745	95%	488.041.404	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90%	91%										
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	90%	91%										
Bidang Sosial													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	100%	3.998.442.518	100%	4.105.571.294	100%	4.265.778.927	100%	4.490.573.596	100%	4.610.451.823	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kelompok/ lembaga/ organisasi yang diberdayakan	100%	100%	133.947.363	100%	352.679.353	100%	413.598.306	100%	541.912.310	100%	667.580.486	Dinas Sosial
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran yang ditangani	n/a	100%	0	100%	36.074.655	100%	42.326.551	100%	47.637.205	100%	49.417.926	Dinas Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang Direhabilitasi	100%	100%	55.419.481	100%	352.580.042	100%	461.572.436	100%	571.563.349	100%	669.782.668	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.Persentase Masyarakat Yang Mendapat Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100%	100%	2.745.868.833	100%	2.555.350.910	100%	2.693.383.628	100%	2.835.318.183	100%	3.132.685.247	Dinas Sosial
	2. Persentase Data Rumah Tangga Yang Divalidasi												
Program Penanganan Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Perlindungan Sosial	100%	100%	172.537.008	100%	209.368.920	100%	387.840.643	100%	458.505.169	100%	591.883.960	Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan Sesuai Standart	60%	70%	93.420.047	70%	199.979.072	70%	211.090.116	70%	250.505.997	70%	255.875.043	Dinas Sosial



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
Bidang Tenaga Kerja													
ProgramPenunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan administrasi perencanaan dan keuangan serta administrasi umum dan kepegawaian	100%	100%	4.075.717.851	100%	4.475.503.107	100%	4.855.920.871	100%	4.667.054.016	100%	4.982.103.616	Disnakerind
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100%	100%	192.970.600	100%	156.023.862	100%	169.285.891	100%	302.159.034	100%	513.808.552	Disnakerind
	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	0,06%	0,04%		0,07%		0,09%		0,19%		0,21%		Disnakerind
Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan Hak-hak pekerja dan dialog sosial	16.118 orang	16.618 Org	193.669.210	16.873 Org	210.131.093	17.132 Org	227.992.236	17.395 Org	688.285.023	17.662 Org	688.285.023	Disnakerind
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	100%	100%	4.362.915.272	100%	4.400.000.000	100%	4.500.000.000	100%	4.600.000.000	100%	4.700.000.000	DP3APM
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	29,07%	30%	162.442.074	31%	260.000.000	32%	370.000.000	33%	480.000.000	34%	500.000.000	DP3APM
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85%	85%	819.616.196	90%	550.000.000	95%	475.000.000	95%	355.000.000	100%	465.000.000	DP3APM
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	N/A	20%	50.000.000	25%	55.000.000	30%	60.000.000	35%	65.000.000	40%	70.000.000	DP3APM
Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan hak Anak (IPHA)	41	42	147.695.641	45	210.000.000	47	260.00.000	50	330.000.000	52	400.000.000	DP3APM
Program Perlindungan Khusus Anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan	N/A	80%	283.798.482	82%	300.000.000	84%	500.000.000	86%	450.000.000	90%	450.000.000	DP3APM
	2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	N/A	50		55		60		65		70		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berspektif gender dan hak anak sesuai standard	N/a	1 Unit	128.994.910	1 unit	210.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	230.000.000	1 Unit	220.000.000	DP3APM
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	N/A	70%	31.638.489	75%	50.000.000	80%	80.000.000	85%	100.000.000	90%	110.000.000	DP3APM
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	N/A	60%	1.318.348.938	70%	1.891.413.253	80%	2.265.158.379	90%	2.721.171.841	95%	3.209.321.447	DP3APM
Bidang Pangan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penunjang yang terlaksana	100%	100%	10.019.165.004	100%	10.873.746.023	100%	11.794.811.500	100%	12.797.370.500	100%	13.885.147.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan(PPH) Konsumsi	86 (nilai)	80 (nilai)	395.418.750	80,5 (nilai)	429.029.350	81 (nilai)	465.496.800	81,5 (nilai)	505.064.100	82 (nilai)	547.994.520	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Skor Pola Pangan Harapan(PPH)Ketersediaan	86,1	87,1		87,6		88,1		88,6		89,1		
	Persentase Cadangan Pangan	n/a	7,1		7,5		7,9		8,3		8,5		
	Kelurahan yang memiliki pemanfaatan Pekarangan (desa/keluarahan)	7 Kel	5 Kel		11 Kel		11 Kel		11Kel		11 Kel		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	14,28%	14%	4.975.000	13,85 %	5.408.300	13,75%	5.868.000	13,65%	6.366.746	13,55%	6.907.920	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	NA	75%	22.602.800	76%	24.524.100	76%	29.559.337	77%	33.000.000	77%	35.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Bidang Pertanahan													



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola	NA	5%	21.613.528	5%	23.450.577	5%	25.433.985	5%	27.606.723	5%	29.953.295	Dinas Perkimtah
Bidang Lingkungan Hidup													
Program perencanaan lingkungan hidup	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	1 dokumen	1 dokumen	34.037.899	1 dokumen	33.972.500	1 dokumen	33.972.500	1 dokumen	33.972.500	1 dokumen	33.972.500	DLH
Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks kualitas air	8 Dokumen	IKA= 68,49	601.788.860	IKA= 68,59	500.632.600	IKA= 68,69	500.632.600	IKA= 68,79	500.632.600	IKA= 68,89	500.632.600	DLH
			IKU= 80,62		IKU= 80,82		IKU= 81,02		IKU= 81,22		IKU= 81,42		
Program program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase rth	192,9 Ha	1	2.460.647.638	1	2.944.994.715	1	2.938.191.889	1	3.683.810.823	1	4.794.807.366	DLH
Program program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase limbah b3 yang terkelola	1Lap	0,6	0	00.06	1.000.000	0,65	1.000.000	0,65	1.000.000	0,65	1.000.000	DLH
Program pembinaan dan pengawasan trhdip izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Terpantaunya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi	2 kegiatan	2 kegiatan	181.504.041	2 kegiatan	181.155.304	2 kegiatan	181.155.304	2 kegiatan	181.155.304	2 kegiatan	181.155.304	DLH



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Tercapainya Kota Tebing Tinggi Menjadi Kota Sehat, Bersih, dan Asri	1 Lap	2 kegiatan	173.597.846	2 kegiatan	73.264.300	2 kegiatan	73.264.300	2 kegiatan	73.264.300	2 kegiatan	73.264.300	DLH
Program penghargaan lingkungan hidup	Peningkatan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan	0	3 kegiatan	166.055.053	3 kegiatan	65.736.000	3 kegiatan	65.736.000	3 kegiatan	65.736.000	3 kegiatan	65.736.000	DLH
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	8.595.103.805	12 Bulan	8.778.589.420	12 Bulan	8.578.589.420	12 Bulan	8.778.589.420	12 Bulan	8.778.589.420	DLH
Pengelolaan persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah	27,00%	54	7.230.985.908	56	8.517.092.500	58	10.517.092.500	60	11.517.092.500	62	12.517.092.500	DLH
Bidang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya administrasi kantor		100%	4.444.545.994	100%	4.531.986.371	100%	4.546.164.379	100%	4.680.164.379	100%	4.704.164.379	Disdukcapil
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		10%	547.090.454	20%	557.039.290	30%	568.039.290	40%	579.039.290	50%	590.039.290	Disdukcapil
	Persentase Kepemilikan Kartu Indentitas Anak		60%		70%		80%		85%		90%		
Program Pencatatan Sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		100%	146.607.187	100%	65.365.500	100%	67.365.500	100%	69.365.500	100%	71.365.500	Disdukcapil
	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		99%		99,2%		99.3%		99.4%		99.5%		
	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		100%		100%		100%		100%		100%		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan		55%	34.145.606	60%	35.080.000	65%	36.080.000	70%	37.080.000	75%	38.080.000	Disdukcapil
Bidang urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Penunjang yang Terlaksana	100	100	3.443.931.363	100	3.736.665.528	100	4.054.282.098	100	4.398.896.077	100	4.772.802.243	DPPKB
Program Pengendalian Penduduk	-Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2,12	2,12	411.845.809	2,12	446.852.702	2,12	484.835.182	2,12	526.046.173	2,11	570.760.097	DPPKB
	- Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility/ASFR 15-19)	15	14,4		14,2		13,9		13,6		13,2		DPPKB
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	64,2%	65%	1.742.992.235	65,25 %	1.891.146.575	65,50%	2.051.894.034	66%	2.226.305.027	66,50%	2.415.540.954	DPPKB
	-Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,37,64	9,29,2		9		8,9		8,7		8,5		DPPKB
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi	86,3	87,8		88,5		89,2		89,8		90,4		DPPKB
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	40	85		90		95		100		100		DPPKB
	Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	64,55%	68%		70%		72%		74%		76%		DPPKB
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	75%8 Poktan	75%75%	1.015.644.029	80%	1.101.973.772	85%	1.195.641.542	90%	1.297.271.073	100%	1.407.539.115	DPPKB
	Persentase Calon Pengantin yang Mendapat Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting	99,1	100		100		100		100		100		
	Cakupan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting	83	86		87		88		89		90		
Bidang urusan Perhubungan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Bidang Perhubungan Yang Terpenuhi	95%	95%	6.130.700.000	95%	7.023.600.000	95%	8.031.100.000	95%	8.690.600.000	95%	9.053.600.000	Dinas Perhubungan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	77%	77%	14.612.399.262	77%	15.482.622.699	88%	16.388.195.029	88%	17.804.335.106	88%	19.693.404.590	Dinas Perhubungan
	Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	86%	88%		89%		90%		91%		92%		
Bidang Komunikasi dan Informatika													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	5.616.649.298	100%	6.094.064.489	100%	6.612.059.970	100%	7.174.085.068	100%	7.783.882.298	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Laporan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	1 Dok	16 dok	1.308.332.593	16 dok	1.419.540.863	16 dok	1.540.201.836	16 dok	1.671.118.992	16 dok	1.813.164.107	Dinas Komunikasi dan Informatika
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tertingkatnya pengelolaan infrastruktur dan aplikasi informatika	1 Dok	100%	2.650.921.696	100%	2.876.250.040	100%	3.120.731.293	100%	3.385.993.453	100%	3.673.801.897	Dinas Komunikasi dan Informatika
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		100	6.839.995.747	100	7.683.166.415	100	7.997.500.000	100	8.800.000.000	100	9.137.981.387	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	100%	100%	83.129.500	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	100.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)		1200%	59.187.900	100%	59.187.900	100%	59.187.900	100%	159.187.900	100%	159.187.900	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	NA	100%	0	100%	130.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertansformasi dari Informal ke Formmal	NA		847.132.408	100%	348.207.308	100%	445.000.000	100%	445.000.000	100%	500.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan dan Ekspor/	NA		0	100%	50.000.000	100%	220.120.000	100%	253.562.183	100%	300.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Bidang Penanaman Modal													
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2 Keg	85%	15.000.000	87,5%	183.261.054	90%	80.707.071	92,5%	124.116.955	95%	278.790.038	DPMPTSP
Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2 event	25%	11.500.000	25,75 %	19.100.055	30%	148.121.935	32,50%	187.703.815	35%	258.000.000	DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman modal	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	N/a	100%	86.363.300	100%	150.747.385	100%	223.723.913	100%	305.182.559	100%	316.496.020	DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	N/a	100%	29.505.000	100%	30.975.000	100%	81.764.810	100%	90.853.055	100%	117.887.685	DPMPTSP
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	100%	100%	5.000.000	100%	5.250.000	100%	5.512.500	100%	5.788.125	100%	6.077.535	DPMPTSP
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	N/a	100%	4.553.724.697	100%	4.711.352.408	100%	4.994.413.974	100%	5.291.010.451	100%	5.537.799.354	DPMPTSP



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan Masyarakat	100%	98,30%	5.624.087.835	98,35 %	6.073.882.339	94%	6.583.562.337	98,45%	7.137.415.136	98,5%	7.739.195.423	DISPORAPAR
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi		1 Kegiatan	658.492.208	1 Kegiatan	714.464.046	1 Kegiatan	775.193.490	1 Kegiatan	841.084.936	1 Kegiatan	912577156	DISPORAPAR
	Jumlah Laporan Penyerahan dan Pengawasan Dana Hibah		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan				
	Jumlah Atlet Pelajar Kota Tebing Tinggi		35 Orang		35 Orang		35 Orang		35 Orang				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kota Tebing Tinggi yang Tersedia dan Termanfaatkan		5 Unit		5 Unit		5 Unit		5 Unit				
	Jumlah Atlet Berprestasi yang Merima Penghargaan		20 Orang		20 Orang		20 Orang		20 Orang				
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Wirausaha Muda Pemula dan Partisipasi Pemuda dalam berorganisasi		200 orang	411.265.494	200 Orang	446.223.061	200 orang	484.152.021	200 orang	525.304.943	200 orang	569.955.863	DISPORAPAR
Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan		1 persen	58.837.849	1,5 Persen	63.839.067	2 persen	69.265.387	2,5 persen	75.152.945	3 persen	81.540.945	DISPORAPAR
Bidang Statistik													
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	100%	100%	122.822.888	100%	133.262.834	100%	144.590.175	100%	156.880.340	100%	170.215.168	Diskominfo



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Persandian													
Program Pennyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	100%	79.008.517	100%	85.723.850	100%	93.010.378	100%	100.916.260	100%	109.494.142	Diskominfo
Bidang Kebudayaan													
Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan Kebudayaan	0,78%	3%	1.041.387.312	4%	1.129.905.233	4,50%	1.225.947.178	5,00%	1.330.152.688	5,50%	1.433.215.667	Disdikbud
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	0,46%	0,60%	250.000.000	0,65%	217.417.740	0,70%	235.898.248	0,75%	255.949.599	0,80%	277.705.315	Disdikbud
Program Pembinaan Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	1,30%	2,00%	80.154.006	3%	86.967.096	4,00%	94.359.299	5,00%	102.379.840	6,00%	111.082.712	Disdikbud
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	n/a	10%	67.500.000	20%	81.857.290	30%	88.815.160	40%	96.364.448	50%	104.555.427	Disdikbud
	Persentase Warisan Budaya tak Benda Yang ditetapkan	n/a	10%	67.500.000	20%	81.857.290	30%	88.815.160	40%	96.364.448	50%	104.555.427	Disdikbud
Program PengelolaanPermuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	50%	60%	235.839.400	65%	256.378.347	70%	278.170.506	75%	301.815.000	80%	327.469.274	Disdikbud
Bidang Perpustakaan													
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	78,25	78,35	412.255.850	78,4	485.000.000	78,45	615.000.000	78,5	820.000.000	78,55	905.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dimiliki	N/A	20%	10.006.827	20%	25.000.000	20%	35.000.000	20%	50.000.000	20%	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penunjang yang terlaksana	95%	100%	5.262.529.914	100%	5.565.556.598	100%	5.826.356.410	100%	6.120.646.704	100%	6.623.751.673	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Bidang Kearsipan													
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	75,19%	75,21%	43.010.439	75,22 %	116.500.000	75,23%	235.000.000	75,24%	285.000.000	75,25%	305.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	33,38%	33,40%	11.419.641	33,41 %	35.000.000	33,42%	45.000.000	33,43%	55.000.000	33,44%	60.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Urusan Pemerintahan Pilihan						0							
Bidang Kelautan dan Perikanan						0							
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4420,03 ton	4440 Ton	200.000.000	4.450 Ton	210.000.000	4460 Ton	239.000.000	4470 Ton	254.351.775	4480 Ton	283.684.465	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Pengawasan Sumber Daya kelautan dan perikanan	Luasan kawasan konservasi	0,05 Km2	0,05 Km2	4.972.150	0,05 Km2	5.394.800	0,05 Km2	5.853.400	0,05 Km2	6.350.900	0,05 Km2	6.891.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	54,56 Kg/Kap/ Tahun	58 Kg/Kap/ Tahun	20.400.000	60 Kg/Kapita/ Tahun	25.000.000	62 Kg/Kapita/ Tahun	30.000.000	64 Kg/Kapita/ Tahun	35.000.000	66 Kg/Kapita/ Tahun	40.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bidang Pariwisata						-							
Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Pelatihan		1 Persen	6.554.550	2 Persen	20.000.000	3 Persen	25.000.000	4 Persen	30.000.000	5 Persen	35.000.000	DISPORAPAR
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual		1 Persen	6.554.550	2 Persen	20.000.000	3 Persen	25.000.000	4 Persen	30.000.000	5 Persen	35.000.000	DISPORAPAR
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kegiatan promosi Pariwisata yang terlaksana pada tahun berjalan		1 kegiatan	51.054.300	1 kegiatan	55.500.553	1 kegiatan	60.218.100	1 kegiatan	65.336.638	1 kegiatan	70.890.252	DISPORAPAR
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		5 Persen	8.105.400	5 Persen	8.811.289	5 Persen	9.560.248	5 Persen	10.372.869	5 Persen	11.254.563	DISPORAPAR
Bidang Pertanian													
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan dampak dan perubahan iklim terhadap pertanian	11,1	11,3	187.470.000	11,4	203.400.000	11,5	210.000.000	11,6	230.000.000	11,7	240.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin usaha pertanian yang diterbitkan	100%	100%	10.000.000	100%	12.000.000	100%	14.000.000	100%	16.000.000	100%	18.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.Peningkatan produksi tanaman pangan	-4,9%	0,19%	175.930.500	0,29%	190.886.000	0,44%	207.109.700	0,58%	224.714.000	0,72%	243.814.700	Dinas Ketahanan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. Peningkatan produksi holtikultura	-3,43%	-0,11%		0,12%		0,25%		0,3%		0,49%		Pangan dan Pertanian
	3Peningkatan Produksi komoditas peternakan	2%	0,5%		0,6%		0,7%		0,8%		0,9%		
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	58,18%	58,25%		58,30 %		58,32%		58,35%		58,40%		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	231,97 Ha	231,97 Ha	49.951.700	231,97 Ha	54.197.800	231,97 Ha	58.804.300	231,97 Ha	63.802.700	231,97 Ha	69.225.900	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Program Pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	1 dokumen	1 dokumen	60.912.540	1 dokum en	66.115.000	1 dokumen	71.735.600	1 dokumen	77.833.200	1 dokumen	79.226.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	7,14%	-3,57%		-3,7%		-3,84%		-4,00%		-4,16%		
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	57,80%	63,10%	67.160.240	64,40 %	72.868.800	65,79%	75.000.000	67,11%	80.000.000	68,42%	92.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Bidang Perdagangan													
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100%	100%	82.212.600	100%	116.099.700	100%	172.525.900	100%	184.525.900	100%	200.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0%	75%	817.490.116	75%	817.490.116	75%	830.830.175	75%	817.490.116	75%	1.017.490.116	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	0%	100%	115.266.800	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Fasilitas Promosi Pelaku Usaha Ekspor	0	100%	24.740.700	100%	150.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP dan BDKT yang Memenuhi Standardisasi Metrologi Legal (%)	0	100%	143.009.900	100%	150.411.500	100%	220.000.000	100%	225.000.000	100%	440.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0	100%	427.802.190	100%	427.802.190	100%	427.802.190	100%	427.802.190	100%	427.802.190	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Bidang Perindustrian													
Program Perencanaan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	45%	60%	388.901.224	65%	358.901.224	70%	394.824.243	75%	408.901.224	80%	408.901.224	Disnakerind
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	40%	50%	0	55%	33.056.604	60%	33.000.000	65%	100.060.920	70%	100.060.920	Disnakerind
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	20%	50%	0	55%	30.000.000	60%	30.000.000	65%	30.000.000	70%	30.000.000	Disnakerind
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan													
Sekretariat Daerah													
Urusan Sekretariat Daerah													



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	• Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota untuk peningkatan pelayanan kedinasan walikota dan wakil wali kota • Meningkatnya kapasitas dan tata kelola organisasi perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan secara terukur dan akuntabel • Persentase kebutuhan sarana dan prasarana wali kota dan wakil wali kota sesuai peraturan perundangundang yang dipenuhi	100%	100%	26.342.840.454	100%	28.581.981.892	100%	31.011.450.353	100%	33.647.422.935	100%	36.507.453.871	Setdako
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas materi muatan peraturan perundangundangan • Persentase penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan rakyat • Persentase implementasi kebijakan pemerintahan • Persentase implementasi kerjasama daerah	100%	100%	6.713.184.265	100%	7.283.804.928	100%	7.902.928.347	100%	8.574.677.954	100%	9.303.525.595	Setdako – Bagian Pemerintahan, Bagian Ekosda,Bagian Hukum
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan Sumber Daya Alam • Persentase SKPD yang menargetkan realisasi keuangan pada DPA SKPD ≥ 50% pada semester I • Persentase Pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan terlaksana secara akuntabel dan transparan	100%	100%	2.144.146.366	100%	2.326.398.806	100%	2.524.142.704,00	100%	2.738.694.836	100%	2.971.483.896	Setdako – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,Bagian pembangunan,
Sekretariat DPRD													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketetapan penetapan Perda APBD Tahun N dan	NN	100%	16.813.975.136	100%	18.243.163.023	100%	19.793.831.879	100%	21.476.307.589	100%	23.301.793.734	Set. DPRD
	Persentase penetapan Ranperda Tahun N												



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	83,75%	85,00%	8.681.041.399	85%	9.418.929.918	85,00%	10.219.538.961	86,00%	11.088.199.773	86,00%	12.030.696.753	Set. DPRD
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
Bidang Perencanaan													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		-	100%	5.490.098.829	100%	5.720.409.608	100%	6.264.706.462	100%	6.864.193.547	100%	6.971.062.035	Bappeda
Program Perencanaan , Pengendalian , dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	538.111.700	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	750.000.000	100%	1.135.000.000	Bappeda
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD												
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	862.145.700	100%	893.376.900	100%	973.376.900	100%	1.053.376.900	100%	1.300.876.900	Bappeda
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan kewilayahan												
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA												
Bidang Keuangan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pelayanan Pajak daerah	97	97	18.033.847.712	97	14.509.336.076	98	15.486.119.971	98	17.083.258.464	98	18.239.927.587	BPKPD
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Tatat Kelola Akuntansi dan Pelaporan	WTP predikat	WTP predikat	11.668.821.350	WTP predika t	17.687.600.100	WTP predikat	19.470.732.107	WTP predikat	20.869.683.354	WTP predikat	22.954.861.189	BPKPD
-Meningkatnya Tata kelola anggaran													



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan													
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	WTP predikat	WTP predikat	306.818.011	WTP predika t	380.695.457	WTP predikat	406.162.538	WTP predikat	443.350.235	WTP predikat	473.085.246	BPKPD
Meningkatnya Tata Kelola Aset daerah													
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.016.550.972		1.085.619.646		1.161.163.021		1.241.925.933		1.329.930.748	BPKPD
Meningkatnya Upaya Eksetensifikasi dan invensifikasi pendapatan													
Bidang Kepegawaian													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan masyarakat	71,95	75	4.965.338.572	78,5	4.966.889.704	80	4.976.889.704	82,5	4.976.889.704	85	4.976.889.704	BKPSDM
		(BB)	(BB)		(BB)		(BB)		(BB)		(BB)		
Program Kepegawaian Daerah	Indek Profesionalitas ASN	90%	65%	807.304.832	70%	1.296.428.389	80%	1.818.810.427	90%	2.386.444.938	100%	3.000.178.383	BKPSDM
Bidang Penelitian dan Pengembangan													
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan	100%	100%	150.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	325.000.000	100%	350.000.000	Bappeda
	Persentase Kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan Pembangunan daerah												
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan													
Bidang Pengawasan													
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Persentase kegiatan penunjang yang terlaksana	97%	97%	8.544.470.556	97%	9.739.557.003	97%	10.101.137.805	97%	10.607.515.078	97%	11.313.048.279	Inspektorat
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Eksternal dan Internal	96,1%	95%	2.228.422.000	95%	2.123.352.177	95%	2.598.605.869	95%	3.199.492.549	95%	3.573.296.965	Inspektorat



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Tahun Anggaran N-1 dengan status selesai												
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Hasil Quality Assurance	1. 3,5	1. 3,5	689.336.000	1. 3,5	573.608.803	1. 3,5	793.878.338	1. 3,5	833.572.255	1. 3,5	998.683.929	Inspektorat
	2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh BPKP	2.3	2. 3		2. 3		2. 3		2. 3		2. 3		
Unsur Kewilayahan													
Kecamatan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	92%	100%	6.432.708.261	100%	6.949.142.730	100%	7.445.497.287	100%	8.174.989.557	100%	8.995.738.669	Kecamatan Bajenis
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100%	100%	1.500.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	Kecamatan Bajenis
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	0%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Bajenis
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	0%	100%	10.053.000,00	100%	10.928.503	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Bajenis
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	N/A	100%	10.000.000	100%	25.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Kecamatan Bajenis
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	5.986.689.552	100%	6.001.629.359	100%	6.698.767.854	100%	6.955.163.122	100%	7.275.851.987	Kecamatan Padang Hilir
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	N/A	100%	5.415.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	Kecamatan Padang Hilir
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100%	100%	1.556.170.848	100%	1.600.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.800.000.000	100%	2.000.000.000	Kecamatan Padang Hilir



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	N/A	100%	5.415.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	Kecamatan Padang Hilir
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	N/A	100%	5.415.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	300.000.000	100%	400.000.000	Kecamatan Padang Hilir
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	6.521.311.705,67	100%	6.945.375.784	100%	7.432.982.725	100%	7.794.136.257	100%	8.474.237.839	Kecamatan Padang Hulu
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	17.515.654,07	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Padang Hulu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100%	100%	1.544.715.972,82	100%	1.600.000.000	100%	1.710.000.000	100%	2.060.000.000	100%	2.160.000.000	Kecamatan Padang Hulu
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100%	100%	17.533.688,73	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Padang Hulu
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	N/A	100%	5.260.106,62	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Padang Hulu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	6.691.771.857,90	100%	7.087.279.686	100%	7.581.098.459	100%	7.589.416.828	100%	7.752.717.259	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	8.140.641,19	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100%	100%	1.508.657.891,86	100%	1.750.000.000	100%	2.000.000.000	100%	2.800.000.000	100%	3.500.000.000	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100%	100%	19.337.153,85	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Tebing Tinggi Kota
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	N/A	0	-	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Tebing Tinggi Kota



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	100%	100%	7.587.342.695,94	100%	7.961.464.579	100%	8.365.885.268	100%	8.806.638.126	100%	9.604.786.388	Kecamatan Rambutan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	100%	100%	24.375.033,49	100%	25.500.000	100%	26.671.800	100%	27.843.600	100%	29.015.400	Kecamatan Rambutan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	100%	100%	1.475.224.954,78	100%	1.486.000.000	100%	1.919.609.500	100%	2.388.219.000	100%	2.576.828.500	Kecamatan Rambutan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	100%	100%	-	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Rambutan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	N/A	100%	12.563.839,80	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Rambutan
Unsur Pemerintahan Umum													
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kota	100%	100%	3.409.410.736	100%	3.602.859.232	100%	3.702.859.232	100%	3.902.859.232	100%	4.083.869.332	Kesbangpol
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100%	100%	1.035.707.294	100%	1.133.717.316	100%	1.133.717.316	100%	1.433.717.316	100%	1.533.717.316	Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	60%	60%	1.046.643.791	60%	1.095.306.582	60%	1.295.306.582	60%	1.395.306.582	60%	1.495.306.582	Kesbangpol



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

Bidang Urusan Program	Indikator outcome	Baseline	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2024	2026		2027		2028		2029		2030		
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	60%	60%	87.269.477	60%	87.101.800	60%	157.101.770	60%	157.101.770	60%	257.101.770	Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	100%	100%	115.262.562	100%	209.893.500	100%	218.708.500	100%	416.712.700	100%	516.712.700	Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Soaial yang diselesaikan	100%	100%	581.823.619	100%	680.709.000	100%	680.709.000	100%	710.719.000	100%	810.719.000	Kesbangpol
Total pagu Indikatif				720.000.000.000		781.200.000.000		847.602.000.000		919.648.170.000		997.818.264.449	

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Kinerja Makro Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Realisasi Nasional Tahun 2024	Realisasi Provsu Tahun 2024	Realisasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2024	Target Tahun ke-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,03	3,32	4,35-5,00	4,50 – 5,00	4,75– 5,00	5,00 - 6,00	6,00 – 6,10	6,10 – 6,20
2	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	78,67	73,57	43,51	45,12	46,00	47,00	48,00	49,00	51,00
3	Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi (%)			n/a	0,70	0,75	0,80	0,85	0,90	1,05
4	Tingkat Kemiskinan (%)	7,09	7,19	8,79	8,75-8,50	8,50-7,00	7,00-6,50	6,50-6,00	6,00-5,50	5,50-5,00
5	Rasio Gini	0,37	0,306	0,31	0,3	0,3	0,3	0,29	0,287	0,285
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,02	75,76	78,17	79,19	79,7	80,21	80,72	81,23	82,00
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	5,60	6,18	6,1-6,00	6,00-5,80	5,8-5,00	5,00-4,75	4,75-4,50	4,50-4,00
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,07	n/a	60,25	67,59	67,73	67,86	67,99	68,13	68,26
9	Penurunan Emisi GRK (TonCO2Eq)	147,61 Juta ton CO2	25,51 Juta Ton CO2eq	n/a	82.711	94.062	107.731	123.588	139.333	157.316

Indikator Kinerja Makro Kota Tebing Tinggi telah mendukung dengan Indikator Kinerja Makro Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a) Perbaikan ekonomi pasca pandemi menghasilkan tren yang positif pada tahun 2024 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,32 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional yang masing-masing sebesar 5,03 persen dan 5,05 persen, pertumbuhan ekonomi Kota Tebing Tinggi tidak lebih tinggi.
- b) Tingkat kemiskinan turun menjadi 8,79 persen pada Tahun 2024. Hal ini diakibatkan karena mulai pulihnya kembali perekonomian. Persentase penduduk miskin tersebut masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 7,19 persen dan persentase penduduk miskin Nasional yaitu sebesar 7,09 persen.
- c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Tebing Tinggi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,18 persen, lebih tinggi dari persentase Tingkat pengangguran terbuka.
- d) ini ratio Kota Tebing Tinggi lebih baik dari Gino Ratio Nasional yaitu sebesar 0,37.

4.2.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan pembangunan jangka panjang daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah. Implementasi dari Indikator Kinerja Utama (IKU) di setiap tahun disusun beserta Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk keperluan penilaian LAKIP/SAKIP.

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2025-2029.

Pengukuran kinerja pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dibutuhkan kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan transparan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi sangat penting. IKU merupakan indikator yang dipilih secara strategis untuk merepresentasikan pencapaian



tujuan dan sasaran RPJMD. IKU yang tepat akan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kinerja pemerintahan daerah dalam berbagai aspek pembangunan. Pemilihan IKU dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis yang cermat terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. IKU yang dipilih harus relevan, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu (SMART). Hal ini penting untuk memastikan bahwa IKU dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi yang efektif.

Penetapan indikator kinerja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deaerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memberikan gambaran terkait ukuran pencapaian keberhasilan Tahun 2025-2029 target capaian indikator kinerja di Kota Tebing Tinggi. berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029 yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						PERANGKAT DAERAH
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	79,19	79,70	80,21	80,72	81,23	81,74	Disdikbud, Perpustakaan, Dinkes, Bappeda
2	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* Case Detection Rate (CDR) TBC	Persen	90	90	90	95	98	100	Dinkes
3	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	90%	91%	91%	92%	93%	93%	Dinkes
4	Usia Harapan Hidup UHH) (tahun)	Angka	74,60	74,80	75,00	76,00	78,00	79,27	Dinkes
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	10%	9%	8%	7%	6%	5%	Disdikbud, Dinkes, PUPR, Perkimtah, Dinas, DP3APM, PPKB, Disdagkop ukm, Kecamatan, Diskominfo, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						PERANGKAT DAERAH
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	99,46	99,60	99,70	99,80	99,90	100	Dinkes
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,35-5,00	4,50 – 5,00	4,75– 5,00	5,00 - 6,00	6,00 – 6,10	6,10 – 6,20	DPMPTSP,Disdagk op ukm, Disnakerind,BPKPD
8	PDRB Per Kapita (Rp Juta Rupiah)	Angka	45,12	46,10	47,10	48,10	49,10	51,00	Disdagkop ukm Disporapar,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
9	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	8,75-8,50	8,50-7,00	7,00-6,50	6,50-6,00	6,00-5,50	5,50-5,00	Dinas Sosial, Disdagkop ukm,Disnakerind,K etapang,Disporapar, Bappeda
10	Rasio gini (Indeks)	Nilai	0,3	0,3	0,3	0,29	0,28	0,28	Disdagkop ukm Disporapar,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
11	Kontribusi PDRB Kota Tebing Tinggi	Persen	0,75	0,78	0,80	0,82	0,84	0,90	Disdagkop ukm Disporapar,Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ,Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen	30	32	34	36	38	40	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
13	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	Persen	-1,60	-1,50	-1,40	-1,30	-1,20	-1,10	DPMPTSP
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	6,1-6,00	6,00-5,80	5,8-5,00	5,00-4,75	4,75-4,50	4,50-4,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
15	Indeks Pembangunan Infrastruktur	poin	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	Dinas PUPR
16	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	persen	95,71	95,92	96,55	97,10	97,75	98,10	Dinas PUPR
17	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	persen	45,43	49,90	54,30	59,60	65,10	70,10	Dinas PUPR
18	Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	persen	77,89	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	Dinas Perkimtah
19	Indeks kualitas lingkungan hidup	persen	67,59	67,73	67,86	67,99	68,13	68,26	Dinas Lingkungan Hidup
20	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	A	A	A	A	A	A	Sekretariat Daerah
21	Nilai SAKIP	Poin	BB	BB	BB	A	A	A	Sekretariat Daerah
22	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
23	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,65	4,20	4,30	4,40	4,51	4,55	Setdako – Bagian Organisasi
24	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	92,6	93	93,5	93,7	94	94,3	Setdako – Bagian Organisasi



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						PERANGKAT DAERAH
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Indeks Inovasi Daerah	Angka	45	50	55	60	65	70	Bappeda
26	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,41	0,22	0,21	0,19	0,18	0,17	DP3APM
27	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	62,5	64,5	66,5	68,5	70,5	72,5	PPKB
28	Indeks Harmoni Indonesia	Poin	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	Badan Kesbangpol

4.2.3. Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Tidak cukup hanya dengan merumuskan program dan mengalokasikan anggaran. Suatu pemerintahan yang baik harus mampu menunjukkan kinerja yang terukur dan transparan. IKPD berperan sebagai alat ukur yang objektif dan terstandarisasi untuk menilai sejauh mana pemerintahan daerah mampu menjalankan fungsinya dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan IKPD, pemerintah daerah dapat memantau kemajuan pembangunan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Hal ini memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang optimal.

Bagian ini akan menyajikan target-target yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2025-2029. Target-target ini akan dijabarkan secara rinci dan terukur, menggunakan indikator-indikator kinerja yang spesifik dan relevan. Indikator-indikator ini akan mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, IKPD akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja pemerintahan daerah.

Penggunaan IKPD juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dan terukur, masyarakat dapat dengan mudah memantau kinerja pemerintah daerah. Hal ini akan mendorong pemerintah daerah untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Bagian ini merupakan bagian penting dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029. Dengan menetapkan target yang jelas dan terukur melalui IKPD, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan pada akhirnya, mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Bab ini akan menjadi acuan penting dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun ke depan.



Tabel 4.4
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Tahun 2025-2030 Kota Tebing Tinggi

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
INDIKATOR KINERJA DAERAH									
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	30	31	32	33	34	35	Dinas LH
2	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	persen	60,25	61,30	62,40	63,40	64,40	65,40	Dinas PUPR
3	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	76,21	76,21	76,25	76,30	76,35	76,40	Dinas Ketapang dan Pertanian
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	45,43	49,90	54,30	59,60	65,10	70,10	Dinas PUPR
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	67,59	67,73	67,86	67,99	68,13	68,26	Dinas Lingkungan Hidup
6	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	95,71	95,92	96,55	97,10	97,75	98,10	Dinas PUPR
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	82.711	94.062	107.731	123.588	139.333	157.316	
8	Indeks Resiko Bencana	Angka	86,51	86,40	86,30	86,20	86,00	85,80	BPBD
9	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,45	0,48	0,50	0,54	0,58	0,60	BPBD
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,35-5,00	4,50 – 5,00	4,75– 5,00	5,00 - 6,00	6,00 – 6,10	6,10 – 6,20	
2	Tingkat Kemiskinan	%	8,75-8,50	8,50-7,00	7,00-6,50	6,50-6,00	6,00-5,50	5,50-5,00	
3	PDRB Perkapita	Rp Juta	45,12	46,00	47,00	48,00	49,00	51,00	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,1-6,00	6,00-5,80	5,8-5,00	5,00-4,75	4,75-4,50	4,50-4,00	
5	Indeks Gini	Angka	0,3	0,3	0,3	0,29	0,287	0,285	
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Angka	79,19	79,7	80,21	80,72	81,23	81,74	
7	Prevalensi Stunting	%	10%	9%	8%	7%	6%	5%	
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,34	13,55	13,76	13,97	14,18	14,39	Disdikbud
9	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	11,08	11,29	11,5	11,71	11,92	12,13	Disdikbud
10	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	Persen	71,32	73,12	74,92	76,72	78,52	80,32	Disdikbud
11	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	Persen	62,61	64,81	67,01	69,21	71,41	73,61	Disdikbud
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Persen	54,62	54,79	54,96	55,13	55,3	55,47	Disdikbud



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Rerata Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	68,39	70,89	73,39	75,89	78,39	80,89	Disdikbud
14	Rerata Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	74,24	75,34	76,44	77,54	78,64	79,74	Disdikbud
15	Rerata Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	60,41	63,31	66,21	69,11	72,01	74,91	Disdikbud
16	Rerata Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,80	66,30	67,80	69,30	70,80	72,30	Disdikbud
17	Jumlah Anak Usia 5-6 yang Berpartisipasi pada Pendidikan (APS)	Persen	79,93	82,97	85,93	88,90	91,87	94,42	Disdikbud
18	Jumlah Anak Usia 7-15 yang Berpartisipasi pada Pendidikan Dasar (APS)	Persen	99,60	99,66	99,73	99,79	99,86	99,92	Disdikbud
19	Jumlah Anak Usia 7-18 yang Berpartisipasi pada Pendidikan Kesetaraan (APS)	Persen	14,40	15,16	15,92	16,69	17,45	18,21	Disdikbud
20	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Persen	45,63	54,07	65,33	79,40	96,29	100,00	Disdikbud
21	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	Persen	82,32	82,82	83,32	83,82	84,32	84,82	Disdikbud
22	Iklm Inklusivitas SD	Nilai	63,21	65,71	68,21	70,71	73,21	75,71	Disdikbud
23	Iklm Inklusivitas SMP	Nilai	58,48	60,88	63,28	65,68	68,08	70,48	Disdikbud
24	Iklm Keamanan SD	Nilai	77,92	78,82	79,72	80,62	81,52	82,42	Disdikbud
25	Iklm Keamanan SMP	Nilai	70,31	71,81	73,31	74,81	76,31	77,81	Disdikbud
26	Iklm Kebinekaan SD	Nilai	74,60	75,60	76,60	77,60	78,60	79,60	Disdikbud
27	Iklm Kebinekaan SMP	Nilai	70,81	71,81	72,81	73,81	74,81	75,81	Disdikbud
28	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	Persen	1	3	4	4,5	5	5,5	Disdikbud
29	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	Persen	1,5	2	3	4	4,5	5	Disdikbud
30	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	Persen	2,00	2,30	2,50	3,00	3,30	3,50	Disdikbud
31	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	Persen	16,30	16,50	17,00	17,30	17,50	18,00	Disdikbud
32	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	Persen	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	Disdikbud
33	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang	Persen	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80	Disdikbud



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian								
34	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Angka	77,5	80	82,50	85	87,50	90	Disdikbud
35	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	92	93	94	95	96	97	Disdikbud
36	Usia Harapan Hidup UHH) (tahun)	Angka	74,60	74,80	75,00	76,00	78,00	79,27	Dinkes
37	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* Case Detection Rate (CDR) TBC	Persen	90	90	90	95	98	100	Dinkes
38	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	Persen	90%	91%	91%	92%	93%	93%	Dinkes
39	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	Persen	99,46	99,60	99,70	99,80	99,90	100	Dinkes
40	Angka Kematian Ibu (per 1000 kelahiran hidup)	angka	1,7	1,3	1,02	0,7	0,3	0,2	Dinkes
41	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	angka	6/1000 KH	5/1000 KH	4/1000 KH	3/1000 KH	2,5/1000 KH	2/1000 KH	Dinkes
42	Cakupan Penerima pemriksaan kesehatan gratis	Persen	90	90	90	95	98	100	Dinkes
43	BOR (Bed Occupancy Rate)	Persen	60	65	70	75	80	80	Dinkes, RSKP
44	ALOS (Average Length of Stay)	Hari	4	4	4	4	4	4	Dinkes, RSKP
45	BTO (Bed Turn Over)	(kali/pasi en)	40	40	40	45	45	50	Dinkes, RSKP
46	TOI (Turn Over Interval)	Hari	4	4	3	3	3	3	Dinkes, RSKP
47	NDR (Net Death Rate)	Angka	2	2	2	1	1	1	Dinkes, RSKP
48	GDR (Groos Death Rate)	Angka	3	3	3	3	2	2	Dinkes, RSKP
49	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,41	0,22	0,21	0,19	0,18	0,17	DP3APM
50	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	65,83	65,85	65,88	65,9	65,93	65,95	DP3APM
51	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang Aktif	Persen	80	82	84	86	88	90	DP3APM
52	Indeks pembangunan Literasi masyarakat	Angka	73,5	74	74,5	75	75,5	76	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
53	Persentase jumlah pengunjung Perpustakaan	Persen	86,11	86,14	86,16	86,18	86,20	86,22	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
54	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,15	6,12	6,10	6,08	6,06	6,04	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
55	Cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga	Persen	30	32	34	36	38	40	Dinas Ketenagakerjaan dan



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kerja								Perindustrian
56	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	63,5	64,8	66	67,1	68,2	69,3	Dinas PPKB
57	Indeks Pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK)	Poin	75,5	80,8	84,1	86,2	87,6	87,9	Dinas PPKB
58	Indeks Lansia Berdaya	Poin	58,6	59,5	60,5	61,3	62,2	63	Dinas PPKB
59	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Poin	87,3	88,3	89,2	90	90,8	91,4	Dinas PPKB
60	Persentase PPKS dan Kelompok Rentan di luar hiv aids/napza yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
61	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
62	Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
63	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
64	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	DINSOS
65	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	Indeks	50	55	55	55	60	65	Dinas Sosial
66	Skor Pola pangan harapan (PPH)	Nilai	79,5	80	80,5	81	81,5	82	Dinas Ketapang dan Pertanian
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Angka	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53	Dinas PUPR
2	Rumah Tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persen	77,89	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	Dinas Perkimtah
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	persen	11,59	12,90	13,05	13,20	13,35	13,51	Disnakerind
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	30	32	34	36	38	40	Disnakerind
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,1-6,00	6,00-5,80	5,8-5,00	5,00-4,75	4,75-4,50	4,50-4,00	Disnakerind
6	PDRB Per Kapita (Rp Juta Rupiah)	Angka	45,12	46,1	47,1	48,1	49,1	51,00	Disnakerind
7	Cakupan pertumbuhan PDRB sektor industri Pengolahan Non Migas	Persen	1,1	1,3	1,5	1,6	1,65	1,7	Disnakerind
8	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	6,63	6,7	6,76	6,83	6,9	6,97	Disdagkop ukm
9	Pertumbuhan Wirausaha	Wirausaha	14,632	14,682	14,732	14,782	14,832	14,882	Disdagkop ukm
10	Jumlah koperasi aktif dan sehat	Koperasi	21	21	23	25	27	29	Disdagkop ukm



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Jumlah UMKM yang terhubung ke platform digital (marketplace/e-commerce)	UMKM	349	439	529	619	709	799	Disdagkop ukm
12	Jumlah UMKM yang Mendapat Supervisi, Pembinaan, dan Pengawasan Akses Perkuatan Permodalan	UMKM	120	125	130	135	140	145	Disdagkop ukm
13	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Persen	25,64	26,14	26,64	27,14	27,64	28,14	Disdagkop ukm
14	Persentase Stabilisasi Harga Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting	Persen	90	92	94	96	98	100	Disdagkop ukm
15	Persentase Pelaku Usaha yang Tertib Niaga	Persen	85	85	88	90	93	95	Disdagkop ukm
16	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Memadai	Persen	72	79	86	93	95	100	Disdagkop ukm
17	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Persen	91,75	92	94	96	98	100	Disdagkop ukm
18	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	Persen	n/a	4,05	4,11	4,18	4,24	4,31	Disporapar
19	Jumlah kunjungan Wisatawan (Ribuan Orang)	Angka	29,642	31.124	32.680	34.314	36.029	37.830	Disporapar
20	Pelaku Ekonomi Kreatif (orang)	Angka	58	63	68	73	78	83	Disporapar
21	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	persen	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	Disporapar
22	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	persen	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	Disporapar
23	Tingkat Partisipasi masyarakat berolahraga	persen	19	20	21	22	23	24	Disporapar
24	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Nasional	Orang	2	3	3	4	4	4	Disporapar
25	Persentase Pemuda Aktif Berorganisasi, Berprestasi, dan Berwirausaha	Persen	n/a	6	6,1	6,2	6,3	6,4	Disporapar
26	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	Persen	21,68	21,73	21,78	21,83	21,88	21,93	Disporapar
27	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	Persen	1,28	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BPS
28	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	3.140	3.146	3.155	3.169	3.187	3.210	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
29	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (bawang, cabai, sayuran)	Ton	809	810	811	813	816	820	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
30	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Ton/Ha	6,77	6,78	6,80	6,83	6,87	6,92	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
31	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	291	297	303	309	315	321	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32	Jumlah Produksi Susu	Ton	7,4	7,55	7,69	7,85	8	8,17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
33	Jumlah Produksi Telur	Ton	1,014	1,034	1,055	1,076	1,097	1,119	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
34	Persentase Cakupan Bina Kelompok	%	5,5	5,8	6	6,3	6,5	6,8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
35	Jumlah Produksi Ikan	Ton	4.430	4.440	4.450	4.460	4.470	4.480	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
36	Nilai SAKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A	Bappeda
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	85	86	87	89	90	91	Bappeda
38	Indeks Inovasi Daerah	Angka	35	40	45	50	55	60	Bappeda
39	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Angka	100	91	92	93	94	95	Bappeda
40	Persentasi Program RPJMD yang mencapai Tinggi dan sangat Tinggi	Persen	96,5	96,75	97	97,25	97,5	97,75	Bappeda
IV ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Rasa Aman (Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum)	Nilai Survey	82	84	86	88	90	92	Satpol PP
2	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	Badan Kesbangpol
3	Persentase penurunan Unjuk Rasa	Persen	11	12	13	14	15	16	Badan Kesbangpol
4	Persentase konflik sara	Persen	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol
5	Persentase LSM aktif	Persen	21	22	23	24	25	26	Badan Kesbangpol
6	Jumlah gedung yang memiliki sarana prasarana pencegahan kebakaran	Unit	100	120	140	160	180	180	Damkar
7	Cakupan pelayanan Bencana kebakaran Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Damkar
8	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	Damkar
9	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	DPMPTSP
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	95	96	97	98	99	100	DPMPTSP
11	Nilai Investasi	Rupiah	53.292.058.644	43.250.000.000	44.547.500.000	47.260.442.750	48.678.256.033	50.138.603.613	DPMPTSP
12	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	92,60	93,00	93,50	93,70	94,00	94,30	Bagian Organisasi
13	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	90,00	90,15	90,25	90,50	91,00	91,15	Bagian Kesra
14	Nilai akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (AKIP)	Nilai	79,00	79,20	79,40	79,60	79,80	80,00	Bagian Organisasi
15	Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	40,00	41,00	42,00	44,00	45,00	46,20	Bagian Organisasi
16	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan kedinasan	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	Bagian Umum



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	pimpinan								
17	Tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan keprotokolan	%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	Bagian Prokopim
18	Persentase kegiatan/acara yang dipimpin/dibuka Wali Kota/Wakil Wali Kota dilaksanakan tepat waktu dengan toleransi waktu keterlambatan 20 menit	Persen	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	Bagian Prokopim
19	Persentase SKPD yang mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat 31 maret pada tahun anggaran tersebut	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian PBJ
20	Persentase pengadaan barang dan jasa yang diumumkan melalui sirup terlaksana secara akuntabel dan transparan.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian PBJ
21	Persentase SKPD yang realisasi keuangannya >= 40% pada semester I	Persen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Bagian Adm. Pembangunan
22	Persentase SKPD yang realisasi fisik kegiatannya >=50% pada semester I	Persen	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	Bagian Adm. Pembangunan
23	Persentase SKPD yang nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) nya kategori sangat baik berdasarkan pengukuran survey kepuasan masyarakat yang dilakukan	Persen	90,48	90,60	90,90	91,00	91,50	92,00	Bagian Organisasi
24	Tingkat kesehatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi	Nilai	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	Bagian Ekosda
25	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	indeks	5,11	5,12	5,13	5,14	5,15	5,16	Bagian Ekosda
26	Jumlah Kelurahan dengan kategori cepat berkembang	Persen	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00	Bagian Pemerintahan
27	Persentase rancangan produk hukum daerah yang memenuhi asas pembentukan hukum yang baik	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
28	Indeks reformasi hukum	Nilai	56,50	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	Bagian Hukum
29	Persentase capaian aksi HAM	Persen	75,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	Bagian Hukum
30	Indeks Sistem Merit	Angka	0,65 (Baik)	0,70 (Baik)	0,75 (Baik)	0,80 (Baik)	0,85(Sangat Baik)	0,90 (Sangat Baik)	BKPSDM
31	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	76,50 (sedang)	78,50 (sedang)	80,50 (sedang)	82,50 (Tinggi)	85,00 (Tinggi)	88,50 (Tinggi)	BKPSDM



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
32	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	47,24	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	BKPSDM
33	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	53,85	55,00	60,00	70,00	80,00	90,00	BKPSDM
34	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	75,54	78,00	80,00	85,00	90,00	95,00	BKPSDM
35	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	BKPSDM
36	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Kepegawaian	Nilai	97,75	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	BKPSDM
37	Nilai Evaluasi AKIP BKPSDM	Nilai	71,95 (BB)	72,50 (BB)	75,00 (BB)	78,50 (BB)	80,00 (BB)	82,50 (BB)	BKPSDM
38	Indeks Pembagunan Statistik (IPS)	Angka	2,60	2,75	2,90	3,0	3,2	3,5	Diskominfo
39	Indeks keamanan informasi (KAMI)	Angka	N/A	443	560	625	770	825	Diskominfo
40	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
41	Indeks SPBE	Angka	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	Diskominfo
42	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	95	96	97	98	99	100	Disdukcapil
43	Persentase terselenggaranya administrasi perkantoran	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
44	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persentase	10%	20%	30%	40%	50%	50%	Disdukcapil
45	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	60%	70%	80%	85%	90%	90%	Disdukcapil
46	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
47	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	99%	99.2%	99.4%	99.6%	99.8%	99.8%	Disdukcapil
48	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
49	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Disdukcapil
50	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	Persentase	55%	60%	65%	70%	75%	75%	Disdukcapil
51	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Indeks	95	95	95	95	95	95	DISHUB
52	Persentase Angkutan Umum yang Laik Jalan	Persentase	55	57,5	60	62,5	65	67,5	DISHUB
53	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persentase	77	77	88	88	88	88	DISHUB
54	Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	DISHUB
55	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang	Persentase	87	88	89	90	91	92	DISHUB



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota								
56	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintah Daerah	Nilai	60	64	68	72	76	80	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
57	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai pengawasan kearsipan internal minimum Cukup (CC)	Persen	18,52	33,33	48,15	62,96	81,48	100	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
58	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan	Angka	94,15	94,25	94,5	94,75	95	95,25	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
59	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	persen	98,25	98,3	98,35	98,4	98,45	98,5	Disporapar
60	Opini Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
61	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	87	87	87	87,5	88	88	Sekretariat DPRD
62	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Perangkat Daerah	Persen	94	95	96	97	98	99	Bappeda
63	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Hasil Quality Assurance	Nilai	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Inspektorat
64	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) oleh BPKP	Level	3	3	3	3	3	3	Inspektorat
65	Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal	Persentase	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Inspektorat
66	Nilai Akuntabilitas Kinerja pada Unsur Evaluasi Internal	Angka	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	14,56	Inspektorat
67	Persentase Penyelesaian Kasus Pengaduan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat
68	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	Nilai	90	90	90	90	90	90	Inspektorat
69	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	90	90.5	91	91,5	92	92,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
70	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	100	100	100	100	100	100	Semua Kecamatan
71	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	97,75	97,76	97,77	97,8	97,82	97,85	BPBD



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
72	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	90	90	90	90	90	90	Disnakerind
73	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	92	93	94	95	96	97	Dinas Perkimtah
74	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	96	96,50	97	97,75	98	98,25	DP3APM
75	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	85	87	89	91	93	95	Dinas PPKB
76	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perangkat Daerah	Angka	92	93	94	95	96	97	Dinas PUPR
77	Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	97,75	98,00	98,50	99,00	99,00	100	Dinkes
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)									
1 PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	79,93	82,97	85,93	88,90	91,87	94,42	Disdikbud
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,74	99,82	99,91	99,99	99,99	99,99	Disdikbud
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	99,97	99,97	99,98	99,99	99,99	99,99	Disdikbud
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	14,40	15,16	15,92	16,69	17,45	18,21	Disdikbud
5	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	5	6	7	8	9	10	Disdikbud
2 KESEHATAN									
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Persen	0,45%	0,46%	0,47%	0,48%	0,49%	0,50%	Dinkes
2	Persentase RS Rujukan Kota yang terakreditasi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
3	Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan persalinan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
5	Persentase Bayi baru	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir								
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standart	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
7	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
9	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
10	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
11	Persentase penderita DM mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
3	SOSIAL								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Persen	50,45%	51%	51,85%	52,75%	53,72%	55%	Dinas PUPR



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	94,90%	95,25%	95,65%	96%	96,20%	96,85%	Dinas PUPR
3.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kota	Persen	45,43%	49,90%	54,30%	59,60%	65,10%	70,10%	Dinas PUPR
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	95,71%	95,92%	96,55%	97,10%	97,75%	98,10%	Dinas PUPR
5	Rasio kepatuhan IMB Kota	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR
6	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	60,25%	61,30%	62,40%	63,40%	64,40%	65,40%	Dinas PUPR
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	88,65%	89,15%	89,75%	90,30%	90,95%	91,50%	Dinas PUPR
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PUPR
5	PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN								
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkimtah
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perkimtah
3	Persentase Kawasan kumuh dibawah 10 Ha di Kota yang ditangani	Persen	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	Dinas Perkimtah
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan utilitas Umum)	Persen	86,55	87,50	88,00	88,50	89,00	89,50	Dinas Perkimtah
5	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	2,91	2,77	2,70	2,64	2,57	2,50	Dinas Perkimtah
6	DP3APM								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentas e	17,9	18	18,1	18,2	18,3	18,31	DP3APM
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	Persentas e	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DP3APM
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persentas e	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3	DP3APM
7	DPPKB								



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertilty Rate/TFR)	Angka	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	DPPKB
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	64,2	65	65,25	65,5	66	66,5	DPPKB
3	Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	9,3	9,2	9	8,9	8,7	8,5	DPPKB
8	PERPUSTAKAAN DAN ARSIP								
	Perpustakaan								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,55	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	73,5	74	74,5	75	75,5	76	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
	Arsiparis								
3	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Persen	75,20%	75,21%	75,22%	75,23%	75,24%	75,25%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	33,39%	33,40%	33,41%	33,42%	33,43%	33,44%	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
9	DISNAKER								
1	Persentase tenaga kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	0,02	0,04	0,07	0,09	0,19	0,21	Disnakerind
2	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Persen	26,50	27,00	27,50	28,00	28,50	29,00	Disnakerind
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	1,20	1,23	1,25	1,30	1,35	1,40	Disnakerind
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Disnakerind
	Perindustrian	Persen							Disnakerind
5	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota	Persen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	Disnakerind
6	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator	Persen	34,00	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	Disnakerind



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pembangunan Industri dalam RIPIK yang di tetapkan dalam RPIP								
7	Persentase jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin usaha industri kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	Persen	5,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	Disnakerind
8	Tersedianya Informasi industri secara lengkap dan Terkini	Persen	18,00	22,00	25,00	28,00	30,00	32,00	Disnakerind
10	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH								
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen (%)	15,4	15,4	15,8	16,3	16,7	17,1	Disdagkop ukm
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persen (%)	98,8	99,1	99,4	99,7	99,7	100	Disdagkop ukm
11	PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM / IUTS/SIUP Toko Swalayan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Disdagkop ukm
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen (%)	85	88	91	94	96	99	Disdagkop ukm
12	PERMODALAN								
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	Persen	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	DPMPTSP
13	PERTANIAN DAN PETERNAKAN								
1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	6,82	7,10	7,5	7,9	8,3	8,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Ton/Ha	6,77	6,78	6,80	6,83	6,87	6,92	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	-6,66	-3,57	-3,7	-3,84	-4	-4,16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	58,20%	58,25%	58,30%	58,35%	58,40%	58,45%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.430	4.440	4.450	4.460	4.470	4.480	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
14	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL								
1	Perekaman KTP elektronik	Persentase	99.08	99.09	99.10	99.11	99.12	99.13	Disdukcapil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari memiliki KIA	Persentase	76.03	77	78	79	80	81	Disdukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persentase	98.92	98.94	98.6	98.8	99.2	99.4	Disdukcapil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Persentase	0	10	20	30	40	50	Disdukcapil
15	PEMUDA DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat Partisipasi	persen	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	Disporapar



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri								
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	persen	15,2	15,3	15,4	15,5	15,6	15,7	Disporapar
3	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga Nasional dan Internasional	buah	2	3	3	4	4	4	Disporapar
16	PARIWISATA								
1	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang datang Ke Kota	persen	32,47	32,52	32,57	32,62	32,67	32,72	Disporapar
2	Tingkat Hunian Akomodasi	persen	16,8	16,85	16,9	16,95	17	17,05	Disporapar
3	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	persen	21,68	21,73	21,78	21,83	21,88	21,93	Disporapar
17	KEPEGAWAIAN								
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	82,50	83,74	84,99	86,27	87,56	88,88	BKPSDM
2.	Rasio Pegawai Fungsional (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	15,87	17,46	19,20	21,12	23,24	25,56	BKPSDM
3.	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen	22,64	29,43	38,26	49,74	64,66	84,06	BKPSDM
4.	Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	Persen	75,10	78,00	80,00	85,00	90,00	100	BKPSDM
18	KEUANGAN								
1	Opini Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPD
2	Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Layanan	Persen	97	97	97	98	98	98	BPKPD
19	PERHUBUNGAN								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	77	77	88	88	88	88	DISHUB
2	Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	0,48	0,47	0,46	0,45	0,44	0,43	DISHUB
20	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase terwujudnya pengelolaan pengaduan yang mampu memberikan respons dan solusi cepat serta terpercaya	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	DISKOMINFO
2	Nilai capaian domain kebijakan pada Indeks SPBE	angka	n/a	4,0	4,5	4,7	5,0	5,0	DISKOMINFO
3	Nilai capaian domain	angka	n/a	4,0	4,2	4,5	4,7	5,0	DISKOMINFO



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	tata kelola pada Indeks SPBE								
4	Nilai capaian domain manajemen pada Indeks SPBE	angka	n/a	2,5	3,0	3,5	4	4,5	DISKOMINFO
5	Nilai capaian domain layanan pada Indeks SPBE	angka	n/a	4,5	4,7	4,8	5,0	5,0	DISKOMINFO
6	Nilai capaian domain Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) pada Indeks IPS	angka	n/a	2.60	2,8	3.0	3.20	3.50	DISKOMINFO
7	Nilai capaian domain Kualitas Data pada Indeks IPS	angka	n/a	2.60	2,8	3.0	3.20	3.50	DISKOMINFO
8	Nilai capaian domain Proses Bisnis Statistik pada Indeks IPS	angka	n/a	2.60	2,8	3.0	3.20	3.50	DISKOMINFO
9	Nilai capaian domain Kelembagaan pada Indeks IPS	angka	n/a	2.60	2,8	3.0	3.20	3.50	DISKOMINFO
10	Nilai capaian domain Statistik Nasional pada Indeks IPS	angka	n/a	2.60	2,8	3.0	3.20	3.50	DISKOMINFO
11	Nilai capaian aspek Tata Kelola pada Indeks KAMI	angka	n/a	53	72	79	98	105	DISKOMINFO
12	Nilai capaian aspek Pengelolaan Risiko pada Indeks KAMI	angka	n/a	32	37	45	51	62	DISKOMINFO
13	Nilai capaian aspek Kerangka Kerja Kaminfo pada Indeks KAMI	angka	n/a	79	100	131	144	161	DISKOMINFO
14	Nilai capaian aspek Pengelolaan Aset pada Indeks KAMI	angka	n/a	115	141	156	184	218	DISKOMINFO
15	Nilai capaian aspek Teknologi dan Kaminfo pada Indeks KAMI	angka	n/a	87	104	125	145	156	DISKOMINFO
16	Nilai capaian aspek Perlindungan Data Pribadi pada Indeks KAMI	angka	n/a	40	45	52	62	69	DISKOMINFO
17	Nilai capaian aspek Suplemen pada Indeks KAMI	angka	n/a	49	53	65	73	83	DISKOMINFO
21	PENGAWASAN								
1	Nilai sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) oleh BPKP	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat
2	Nilai Kapabilitas APIP oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Inspektorat
3	Opini Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat
4	Persentase Capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK	Persen	82	82	82	82	82	82	Inspektorat



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	300	500	600	800	1.000	1.000	BPBD
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	50	150	150	225	275	350	BPBD
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	BPBD
4	Persentase gangguan TRANTIBUM Yang Dapat Diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
5	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegak Kan	Persen	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	Damkar
7	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15	15	Damkar
23	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,59	67,73	67,86	67,99	68,13	68,26	Dinas LH
2	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen	30	31	32	33	34	35	Dinas LH
24	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
2	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
3	Ketepatan penetapan Perda APBD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
4	Persentase penetapan ranperda berdasarkan Prolegda	Persen	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	Bagian Hukum
5	Jumlah Kerja Sama Daerah	Dokumen	8	8	9	9	10	10	Bagian Pemerintahan
6	Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ kepada DPRD	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Pemerintahan
7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang	Persen	0,00	0,00	1,54	1,54	1,54	1,54	Bagian PBJ



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2025-2029 KOTA TEBING TINGGI

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tahun						Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ditandatangani pada kuartal pertama								
8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	96,00	96,50	97,00	97,50	98,00	98,50	Bagian PBJ
9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	29,00	31,00	33,00	35,00	37,00	39,00	Bagian PBJ
10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	Bagian PBJ



Tabel 4.5
Dukungan Program Daerah Terhadap Kegiatan Utama Dalam RPJMN 2025-2029
dan RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI
Mencapai swasembada pangan, energi dan air	Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	
	Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	
Penyempurnaan sistem penerimaan negara	Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah	
Reformasi politik, hukun dan birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
		Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.
Pencegahan dan pemberantasan korupsi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
Pemberantasan Kemiskinan	Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan guna menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.
		Penanggulangan Kemiskinan
Pencegahan dan pemberantasan narkoba	Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	
Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia : peningkatan BPJS Kesehatan dan peyediaan obat untuk rakyat	Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan
		Pembangunan rumah sakit kekhususan
		Kampanye Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi	Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	Mendorong inovasi dalam berbagai sektor
		Mendirikan Sekolah Vokasi di Kota Tebing Tinggi
		Penguatan pendidikan dan digitalisasi
Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif		Menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja
Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
		Peningkatan ketahanan bencana
Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida ke petani		
Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat pedesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan	Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas



PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI
Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik, mandiri lainnya	Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.
	Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan potensi daerah
Melanjutkan hilirisasi dan industrial berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	
Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	Menjaga kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah
		Menjadikan rumah ibadah sebagai sarana untuk pembentukan karakter dengan nilai-nilai religius
Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	
	Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	

Tabel 4.6
Dukungan Program Kota Tebing Tinggi Terhadap Program Nasional yang Harus Diperhatikan

PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	DUKUNGAN PROGRAM KOTA TEBING TINGGI
Dukungan Swasembada Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Pertanian
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Sosialisasi dan Pengawasan, serta Memastikan Ketersediaan Bahan Baku Pangan
Program 3 Juta Rumah	Sosialisasi dan Pengawasan, Percepatan Perizinan, dan Penyediaan Lahan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Fasilitasi Pembentukan Satuan Tugas Koperasi Desa/Kelurahan dan Pengawasan
Program Sekolah Rakyat	Penyediaan Infrastruktur Pendukung, Sosialisasi dan Pengawasan
Pengendalian Inflasi di Daerah	Pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah
Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	Penganggaran untuk Program Pencegahan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Tabel 4.7

Dukungan Program Daerah Terhadap 17 Program Prioritas RPJMD
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI SUMATERA UTARA	PROGRAM PRIORITAS KOTA TEBING TINGGI
Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal.	
Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing	
Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesenambungan Fiskal Daerah	
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan guna menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai.
	Penanggulangan Kemiskinan
Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib	
Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu	Peningkatan kualitas Layanan Kesehatan melalui sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan
	Pembangunan rumah sakit kekhususan
	Kampanye Kesehatan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat
Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal	Mendorong inovasi dalam berbagai sektor
	Mendirikan Sekolah Vokasi di Kota Tebing Tinggi
	Penguatan pendidikan dan digitalisasi
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Dalam Berkarya dan Berprestasi	Menyediakan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja
	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana	Meningkatkan kebersihan dan kelestarian lingkungan.
	Peningkatan ketahanan bencana
Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal	Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Dan Fasilitas Umum Yang Berkualitas
Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)	Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dukungan terhadap umkm, ekonomi kreatif dan investasi.
Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa	Mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan potensi daerah
Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru	
Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Susarana yang Harmonis, Toleran dan Rukun	Menjaga kerukunan antarumat beragama dan kebebasan beribadah
	Menjadikan rumah ibadah sebagai sarana untuk pembentukan karakter dengan nilai-nilai religius
Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi	
Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.	



4.2.4 Penyalarsan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Tebing Tinggi Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMDProvinsi Sumatera Utara

Penyalarsan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Tebing Tinggi Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Tabel Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Tebing Tinggi Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelesaian
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,60	79,27	Sesuai		
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	1,7	0,3	Sesuai		
	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10	6	Sesuai		
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Sesuai		
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	98	Sesuai		
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	80	87	Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belu m Sesuai	Catatan Penyelar asan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Targe t 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	(<i>treatment success rate</i>) (%)			(<i>treatment success rate</i>) (%)								
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,46	99,90	Sesuai		
5	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Sesuai		
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	6,06-12,12 00,00 – 3,03	27.27-30.30 6.06 - 9.09	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	6,06-12,12 00,00 – 3,03	27.27-30.30 6.06 - 9.09	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	71,32 62,61	78,52 71,41	Sesuai		
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca Numerasi	35,99–38,49 33,70–36,20	41.53-44.03 37.70 -40.20	c) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca Numerasi	35,99–38,49 33,70–36,20	41.53-44.03 37.70 - 40.20				Sesuai		
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk	10.3 - 10.33	10.3 - 10.33	c) Rata-rata lama sekolah penduduk	10.3 - 10.33	10.3 -	c) Rata-rata lama sekolah	11,08	11,92	Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	usia di atas 15 tahun (tahun)			usia di atas 15 tahun (tahun)		10.33						
	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	13.86- 13.87	d) Harapan Lama Sekolah	13.61- 13.63	13.86- 13.87	d) Harapan Lama Sekolah	13,34	14,18	Sesuai		
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12- 11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi(%)	11,12	11,12- 11,40				Sesuai		
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59				Sesuai		
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	8,75 – 8,50	6,00-5,50	Sesuai		
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	40%	70%	Sesuai		
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)						Sesuai		
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4,-15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4,-15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	10,95	11,05	Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	7,8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	7,8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,28	1,31	Sesuai		
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Sesuai		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,95	4,00	Sesuai		
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14				Sesuai		
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43				Sesuai		
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Sesuai		
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	1,16%	1,22%	Sesuai		
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%				Sesuai		
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,00315%	0,00532%	Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belu m Sesua i	Catata n Penyela r asan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97	d. <i>Return on Asset</i> (ROA) BUMD (%)	-1,60	-1,20	Sesuai		
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Sesuai		
	a. <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i> (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	a. <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i> (%)	5,27 - 5,56	4,74 -5,20	a. <i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i> (%)	6,1-6,0	4,75-4,50	Sesuai		
	b. <i>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal</i>	43	50,4	b <i>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal</i>	43	50,4	b <i>Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal</i>	25	35	Sesuai		
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 -63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48- 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	30	38	Sesuai		
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK						Sesuai		
	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>						Sesuai		
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						Sesuai		
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18				Sesuai		
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	18,42	21,49	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49				Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	(%)											
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9				Sesuai		
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5				Sesuai		
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 -30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04				Sesuai		
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 -17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41				Sesuai		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan						Sesuai		
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	2,33%	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan	2,26%	2,33%				Sesuai		
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	77,89	82,00	Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelesaian
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%				Sesuai		
24	Indeks Materi Hukum	70	71,5	Indeks Materi Hukum Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5				Sesuai		
	Proksi di Daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)									Sesuai		
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	3,45	3,71	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	3,8	4,2	Sesuai		
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,65	4,51	Sesuai		
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78					Sesuai		
28	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i> <i>Usulan Proksi:</i>						Sesuai		
	<i>Usulan Proksi:</i>									Sesuai		
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7				Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelesaian
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	<i>b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	60	70	<i>b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM</i>	60	70				Sesuai		
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62				Sesuai		
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	86.83 -90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	86.83 - 90.08				Sesuai		
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)						Sesuai		
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7				Sesuai		
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						Sesuai		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92				Sesuai		
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14				Sesuai		
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39				Sesuai		
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49				Sesuai		
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Indeks Akses keuangan Daerah (IKAD)	5,11	5,15	Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
35	<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i> <i>Usulan Proksi:</i>						Sesuai		
	<i>Usulan Proksi:</i>									Sesuai		
	<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>			<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>						Sesuai		
36	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>			<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>						Sesuai		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,45-55,48	55,30	Sesuai		
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79				Sesuai		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	59,83	70,5	Sesuai		
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,41	0,18	Sesuai		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581				Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			Sesuai		
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	67,59	68,13	Sesuai		
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	15%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10%	15%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	77,89	82,00	Sesuai		
	c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah						Sesuai		
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	28%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16%	28%	-Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	30%	34%	Sesuai		
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	-Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%				Sesuai		
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						Sesuai		
	a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi						Sesuai		
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282				Sesuai		
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp	170,57	141,175	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp	170,57	141,175				Sesuai		

No	RPJMN tahun 2025-2029 (Sasaran per Provinsi)			RPJMD Provinsi tahun 2025-2029			RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2025-2029			Sesuai	Belum Sesuai	Catatan Penyelarasan
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029			
	milyar)			milyar)								
	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48	b. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48				Sesuai		
	c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air						Sesuai		
	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)			Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)						Sesuai		
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	53	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	53	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	45,43	65,10	Sesuai		
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69				Sesuai		
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						Sesuai		
	a. Kumulatif	10,06%	12,92%	a. Kumulatif	10,06%	12,92%	Penurunan Intensitas Emisi GRK (TonCO2Eq)	82.711	139.333	Sesuai		
	b. Tahunan	19,04%	25,38%	b. Tahunan	19,04%	25,38%				Sesuai		

BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJMD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD berdasarkan visi misi Kepala Daerah terpilih, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tebing Tinggi dengan periodisasi tahunan. RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka menengah Kota Tebing Tinggi untuk pencapaian visi daerah yaitu: ***"Tebing Tinggi Maju Kotanya, Religius, Makmur dan Sejahtera Rakyatnya"***. Adapun misi :

- (1) Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas;
- (2) Memperkuat sumber daya manusia, pendidikan, pembangunan gender dan inovasi;
- (3) Memperkuat ketahanan ekonomi yang inklusif;
- (4) Mengembangkan dan menata infrastruktur, lingkungan dan ketahanan bencana;
- (5) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan;
- (6) Memperkuat ketahanan sosial, nilai-nilai religius dan meningkatkan fungsi rumah ibadah.

Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh : komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; keberpihakan pembangunan kepada masyarakat; dan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Tebing Tinggi; serta dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

5.2. Pedoman Pelaksanaan RPJMD

Pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 harus dilakukan secara terintegrasi dan sinergis antara pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pelaksanaan ini meliputi beberapa aspek penting:

a. Penetapan Prioritas Program dan Kegiatan

Prioritas pembangunan diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pengembangan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan infrastruktur. Setiap program dan kegiatan harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, dan realistis untuk memudahkan evaluasi.

b. Penguatan Koordinasi Antar-Sektor dan Lintas Wilayah

Mengingat keterkaitan pembangunan dengan kabupaten/kota tetangga, koordinasi lintas wilayah

menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya, menghindari tumpang tindih program, dan menciptakan sinergi pembangunan regional.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Publik

Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui forum konsultasi publik, musyawarah desa/kelurahan, serta mekanisme partisipatif lainnya. Hal ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

d. Pengelolaan Sumber Daya Keuangan yang Efisien dan Transparan

Pengalokasian anggaran harus didasarkan pada prioritas dan kebutuhan riil, dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan penggunaan dana yang optimal.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Digitalisasi proses perencanaan, pelaporan, dan monitoring menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelaksanaan RPJMD. Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMPDA) dapat digunakan sebagai platform integrasi data dan pelaporan real-time.

5.3. Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan RPJMD bertujuan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian ini meliputi:

a. Monitoring Berkala

Pemerintah daerah melakukan pemantauan secara rutin terhadap capaian indikator kinerja menggunakan data primer dan sekunder, termasuk data BPS yang diperbarui secara periodik. Monitoring ini membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan.

b. Pelaporan dan Evaluasi Triwulanan dan Tahunan

Laporan pelaksanaan disusun secara berkala untuk menginformasikan perkembangan capaian dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan penyesuaian strategi secara tepat waktu.

c. Audit dan Pengawasan Internal

Melibatkan inspektorat daerah dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan sumber daya serta kepatuhan terhadap regulasi.

d. Penguatan Kapasitas Aparatur

Pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah menjadi bagian penting untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan program, pengendalian risiko, dan pelayanan publik.

5.4. Evaluasi dan Penyesuaian Strategi

Evaluasi merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak dari pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Dalam konteks Kota Tebing Tinggi, evaluasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, kendala yang dihadapi, serta peluang perbaikan yang dapat diimplementasikan dalam periode berikutnya.

a. Kerangka Evaluasi

Kerangka evaluasi RPJMD Kota Tebing Tinggi mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020-2025 menjadi sumber utama dalam mengukur capaian indikator-indikator tersebut, seperti:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan dinamika perekonomian daerah.
- Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas hidup dan akses layanan dasar.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, termasuk pengelolaan sampah dan kualitas udara.
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik sebagai tolok ukur tata kelola pemerintahan.

Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, analisis tren capaian, serta perbandingan dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, seperti kondisi ekonomi nasional, perubahan regulasi, dan dinamika sosial.

b. Proses Evaluasi

Proses evaluasi RPJMD Kota Tebing Tinggi melibatkan beberapa tahapan utama:

1) Pengumpulan Data dan Informasi

Data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan pelaksanaan SKPD, survei kepuasan masyarakat, dan data statistik resmi dari BPS. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Daerah (SIMPDA) mempermudah integrasi dan akses data secara real-time.

2) Analisis dan Penilaian Capaian

Data yang terkumpul dianalisis untuk menilai sejauh mana target-target RPJMD telah tercapai. Analisis ini mencakup identifikasi keberhasilan, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pelaksanaan.

3) Pelibatan Pemangku Kepentingan

Forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), dan dialog multi-stakeholder menjadi wadah untuk mendapatkan masukan, kritik, dan rekomendasi dari masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Partisipasi aktif ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

4) Penyusunan Laporan Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan resmi yang menjadi dasar bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan selanjutnya. Laporan ini juga menjadi bahan pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah pusat.

c. Penyesuaian Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi, pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan pembangunan untuk periode berikutnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk mengatasi kendala yang ditemukan, memanfaatkan peluang baru, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Beberapa bentuk penyesuaian yang dapat dilakukan antara lain:

1) Revisi Target dan Indikator Kinerja

Menyesuaikan target capaian yang realistis dan indikator yang lebih relevan dengan kondisi terkini.

2) Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program.

3) Perbaikan Mekanisme Koordinasi dan Sinergi

Memperkuat koordinasi antar SKPD, lintas sektor, dan dengan kabupaten/kota tetangga untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan sinergi pembangunan.

4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Mengadopsi teknologi baru dan inovasi dalam pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, dan monitoring pelaksanaan.

5) Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Memperluas keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

d. Tantangan dan Peluang

Dalam pelaksanaan evaluasi dan penyesuaian strategi, Kota Tebing Tinggi menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan data yang akurat dan terkini, perubahan kebijakan nasional yang cepat, serta dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Namun, terdapat pula peluang besar, antara lain kemajuan teknologi informasi yang memudahkan pengumpulan dan analisis data, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, serta dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga donor.

5.5. Manajemen Risiko Pembangunan Daerah

a. Pentingnya Manajemen Risiko dalam RPJMD

Manajemen risiko merupakan elemen krusial dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Dalam konteks RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029, penerapan manajemen risiko sesuai Inmendagri No. 2/2025 menjadi landasan strategis untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan, adaptif, dan tangguh terhadap berbagai tantangan. Manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi, tetapi juga sebagai mekanisme proaktif untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Dengan demikian, integrasi manajemen risiko dalam RPJMD memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan.

b. Identifikasi Risiko Pembangunan di Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan data BPS 2020-2024 dan kajian kondisi daerah, risiko-risiko utama yang dihadapi Kota Tebing Tinggi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Risiko Ekonomi

- Tingginya tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 7,5% pada tahun 2024.
- Tingkat kemiskinan sebesar 9,8% yang menunjukkan kerentanan sosial ekonomi.
- Ketergantungan pada sektor perdagangan dan jasa yang rentan terhadap fluktuasi pasar.

2. Risiko Lingkungan

- Potensi banjir yang masih menjadi ancaman akibat curah hujan tinggi dan sistem drainase yang belum optimal.
- Masalah pengelolaan sampah dan pencemaran udara yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.
- Dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air dan ketahanan pangan.

3. Risiko Sosial

- Ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antar wilayah.
- Prevalensi stunting dan masalah gizi yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat.
- Disparitas pembangunan yang dapat memicu ketidakpuasan sosial.

4. Risiko Politik dan Tata Kelola

- Tantangan dalam transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
- Potensi konflik kepentingan dan korupsi yang dapat menghambat efektivitas program.
- Kapasitas aparatur pemerintah yang perlu terus ditingkatkan.

5. Risiko Institusional

- Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan program pembangunan.

- Koordinasi antar SKPD dan lintas sektor yang belum optimal.
- Keterbatasan sistem informasi dan data yang akurat untuk pengambilan keputusan.

c. Strategi Manajemen Risiko Sesuai Inmendagri No. 2 Tahun 2025

Sebagai pedoman, Inmendagri No. 2/2025 menekankan pentingnya manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan daerah. Berikut strategi utama yang diadopsi Kota Tebing Tinggi:

1. Identifikasi dan Penilaian Risiko

- Melakukan pemetaan risiko secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Menggunakan data statistik BPS dan hasil kajian teknis untuk menilai tingkat dampak dan probabilitas risiko.
- Mengklasifikasikan risiko berdasarkan prioritas untuk fokus penanganan.

2. Mitigasi Risiko

- **Risiko Ekonomi:** Mengembangkan program penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, dan penguatan sektor UMKM untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
- **Risiko Lingkungan:** Meningkatkan infrastruktur pengelolaan air dan drainase, memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu, serta mengimplementasikan program konservasi dan adaptasi perubahan iklim.
- **Risiko Sosial:** Memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, program gizi dan pencegahan stunting, serta pengembangan program inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial.
- **Risiko Politik dan Tata Kelola:** Meningkatkan transparansi melalui digitalisasi layanan publik, memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat, dan pengawasan internal yang ketat.
- **Risiko Institusional:** Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan mengembangkan sistem informasi manajemen pembangunan daerah (SIMPDP).

3. Monitoring dan Evaluasi Risiko

- Menetapkan indikator kinerja risiko yang terukur dan relevan, seperti Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah, dan indikator pengelolaan lingkungan.
- Melakukan monitoring berkala menggunakan data real-time dari SIMPD dan laporan pelaksanaan SKPD.
- Melaksanakan evaluasi tahunan untuk menilai efektivitas mitigasi dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dinamika kondisi.

4. Penguatan Kapasitas dan Kesadaran

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang pentingnya manajemen risiko.
- Melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi dan mitigasi risiko melalui forum konsultasi dan musyawarah perencanaan pembangunan.

5. Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi

- Mengintegrasikan data risiko dalam sistem informasi pembangunan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
- Memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi risiko dan edukasi masyarakat.

d. Integrasi Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan dan Pengendalian RPJMD

Manajemen risiko tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam seluruh proses pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Beberapa poin penting dalam integrasi ini adalah:

- **Perencanaan yang Responsif Risiko** Setiap program dan kegiatan dalam RPJMD dirancang dengan mempertimbangkan potensi risiko dan strategi mitigasi yang sesuai. Hal ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga pada keberlanjutan dan ketahanan.
- **Pengendalian Berbasis Risiko** Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program menggunakan pendekatan berbasis risiko, sehingga sumber daya pengawasan difokuskan pada area dengan risiko tinggi. Ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengendalian.
- **Pelaporan dan Transparansi Risiko** Laporan pelaksanaan RPJMD mencakup aspek manajemen risiko, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memantau perkembangan risiko dan respons yang dilakukan. Transparansi ini memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.
- **Adaptasi dan Responsif terhadap Perubahan** Sistem manajemen risiko yang adaptif memungkinkan pemerintah daerah merespons perubahan kondisi secara cepat, baik itu perubahan ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sehingga pembangunan tetap pada jalur yang benar.

e. Peran Pemangku Kepentingan dalam Manajemen Risiko

Keberhasilan manajemen risiko dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi sangat bergantung pada keterlibatan aktif berbagai pihak, antara lain:

- **Pemerintah Daerah** sebagai penggerak utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan risiko.
- **Masyarakat** yang berperan dalam identifikasi risiko lokal, pelaksanaan mitigasi, dan pengawasan program.
- **Sektor Swasta** yang dapat berkontribusi dalam pengembangan solusi inovatif dan investasi berkelanjutan.
- **Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** yang memberikan kajian, advokasi, dan pendampingan dalam manajemen risiko.

- **Pemerintah Pusat dan Lembaga Donor** yang menyediakan dukungan kebijakan, teknis, dan pendanaan.

Bab V Penutup RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2025-2029 menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Dengan mengacu pada Inmendagri No. 2 Tahun 2025, Kota Tebing Tinggi telah mengintegrasikan manajemen risiko secara sistematis dalam seluruh tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pendekatan ini tidak hanya mengantisipasi potensi hambatan dan ancaman, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui identifikasi risiko yang komprehensif, mitigasi yang tepat sasaran, monitoring yang ketat, serta evaluasi yang berkelanjutan, Kota Tebing Tinggi siap menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan dengan lebih percaya diri. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi instrumen strategis yang memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas program pembangunan, dan memastikan bahwa visi serta misi RPJMD dapat tercapai secara optimal demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi.